



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELU
TAHUN 2025



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 156);

h

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.

1-

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (3) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
- (4) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V	:	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
BAB VI	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB VII	:	Penutup.
- (5) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1-

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belu.
- (2) RKPD mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai Desember 2026.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI BELU,



WILLY BRODUS LAY

Diundangkan di Atambua

pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



JOHANNES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 34

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR GRAFIK iii

DAFTAR TABEL v

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen 4

1.4 Maksud dan Tujuan 5

1.5 Sistematika Dokumen RKPD 6

BAB II 1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu 1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024
dan Evaluasi RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024..... 161

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 170

BAB III..... 1

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 2

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 15

BAB IV..... 1

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1

4.1Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 1

4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026..... 6

BAB V 1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... 1

5.1. Program Prioritas Tahun 2026 2

BAB VI..... 1

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1

6.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKU dan IKK) 1

BAB VII..... 1

P E N U T U P..... 1

LAMPIRAN

i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu 1

Gambar 2.2 Peta Kelerengan di Kabupaten Belu 6

Gambar 2.3 Peta Geologi di Kabupaten Belu 9

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu 13

Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu 28

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu 29

Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu..... 32

Gambar 2.8 Peta Pola Ruang Kabupaten Belu..... 39

Gambar 2.9 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu..... 40

Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu..... 46

Gambar 2.11 Trend Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Belu Tahun
2021-2024..... 83

Gambar 2.12 Trend Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Belu Tahun
2021-2024..... 84



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun	48
Grafik 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024	49
Grafik 2.3 Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2024.....	50
Grafik 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2024	54
Grafik 2.5 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	59
Grafik 2.6 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kab.Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024	60
Grafik 2.7 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Kab.Belu, Kab. Malaka,Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024.....	60
Grafik 2.8 Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	61
Grafik 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	62
Grafik 2.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	63
Grafik 2.11 Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023.....	64
Grafik 2.12 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024	66
Grafik 2.13 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	67
Grafik 2.14 Prevalensi Stunting Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024	72
Grafik 2.15 Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024.....	73
Grafik 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	74
Grafik 2.17 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu Tahun 2023	75
Grafik 2.18 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2020-2024.....	76



Grafik 2.19 Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	77
Grafik 2.20 Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	79
Grafik 2.21 Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	79
Grafik 2.22 APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	80
Grafik 2.23 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	82
Grafik 2.24 Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022	87
Grafik 2.25 Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022	88
Grafik 2.26 Rasio Ketersediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	90
Grafik 2.27 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	92
Grafik 2.28 Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	105
Grafik 2.29 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020-2023	132
Grafik 2.30 Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	143
Grafik 2.31 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	151
Grafik 2.32 Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu	155
Grafik 2.33 Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	155
Grafik 2.34 Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	156
Grafik 3. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Belu 2

Tabel 2.2 18 (Delapan Belas) Desa Persiapan Di Kabupaten Belu 2

Tabel 2.3 Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2024 4

Tabel 2.4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu 4

Tabel 2.5 Jenis Tanah di Kabupaten Belu 11

Tabel 2.6 Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu 15

Tabel 2.7 Alternatif Sumber Air Baku di Kabupaten Belu 16

Tabel 2.8 Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu..... 19

Tabel 2.9 Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu..... 26

Tabel 2.10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu 31

Tabel 2.11 Kawasan Lindung di Kabupaten Belu 32

Tabel 2.12 Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencanadi Kabupaten Belu..... 41

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024..... 47

Tabel 2.14 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024..... 51

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2024 52

Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024..... 55

Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024..... 56

Tabel 2.18 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Belu, Tahun 2024 65

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belu, 2023 dan 2024 68

Tabel 2.20 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024..... 69

Tabel 2.21 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 ... 70



Tabel 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	70
Tabel 2.23 Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian Kabupaten Belu Tahun 2023	76
Tabel 2.24 Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2018-2023	78
Tabel 2.25 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	81
Tabel 2.26 Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2021-2024	85
Tabel 2.27 Angka Penemuan (CNR) Semua Kasus TB di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	86
Tabel 2.28 Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu Tahun 2022	88
Tabel 2.29 Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Belu.....	91
Tabel 2.30 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2022-2024	92
Tabel 2.31 Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	93
Tabel 2.32 Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2023	94
Tabel 2.33 Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Belu Tahun 2022	95
Tabel 2.34 Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu	95
Tabel 2.35 Drainase Terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2023.....	97
Tabel 2.36 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	98
Tabel 2.37 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	100
Tabel 2.38 Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2023	101
Tabel 2.39 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	102
Tabel 2.40 Data Sertifikasi Lahan Pemda Tahun 2022	104
Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	104

Tabel 2.42 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	106
Tabel 2.43 Rincian Kegiatan Pelayanan PMKS Tahun 2020-2021	107
Tabel 2.44 Penerima PKH Kabupaten Belu Tahun 2021-2024	108
Tabel 2.45 Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2018-2023	109
Tabel 2.46 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2023	110
Tabel 2.47 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2017 -2022	111
Tabel 2.48 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	112
Tabel 2.49 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2024	113
Tabel 2.50 Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2019 -2023	114
Tabel 2.51 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	115
Tabel 2.52 Status Desa Tahun 2021-2023	116
Tabel 2.53 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	116
Tabel 2.54 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	117
Tabel 2.55 Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	118
Tabel 2.56 Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	119
Tabel 2.57 Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu Tahun 2019-2024	120
Tabel 2.58 Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.....	120
Tabel 2.59 Realisasi Penerbitan Izin Dan Non Izin Tahun 2020-2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu.....	121
Tabel 2.60 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	122



Tabel 2.61 Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	123
Tabel 2.62 Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	123
Tabel 2.63 Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	124
Tabel 2.64 Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2020–2024 .	124
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2024.....	124
Tabel 2.66 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2024.....	125
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2021-2023	127
Tabel 2.68 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2022	127
Tabel 2.69 Sub Indikator Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022	128
Tabel 2.70 Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2020-2024.....	133
Tabel 2.71 Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu	134
Tabel 2.72 Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020–2024	136
Tabel 2.73 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023-2024	138
Tabel 2.74 Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu.....	139
Tabel 2.75 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Belu Tahun 2020–2024	140
Tabel 2.76 Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2024.....	140
Tabel 2.77 Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2019–2023	141
Tabel 2.78 Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	142
Tabel 2.79 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	142

Tabel 2.80 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	144
Tabel 2.81 Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	145
Tabel 2.82 Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	146
Tabel 2.83 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	147
Tabel 2.84 Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	147
Tabel 2.85 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	148
Tabel 2.86 Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020	149
Tabel 2.87 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2019-2025	152
Tabel 2.88 Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	153
Tabel 2.89 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023	154
Tabel 2.90 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2018–2023	157
Tabel 2.91 Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah	158
Tabel 2.92 Indikator Ketenagaan Kabupaten Belu Tahun 2018– 2022	160
Tabel 2.93 Evaluasi SPM Tahun 2024	161
Tabel 2.94 Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024	165
Tabel 2.95 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023	168
Tabel 3.1 PRDB ADHb Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	7
Tabel 3.2 PRDB ADHk Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	9
Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2024	11
Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2023-2026	20
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2023 – 2026	23

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Belu Tahun 2023 – 2026..... 24

Tabel 3.7 Ringkasan APBD Tahun 2023-2026..... 25

Tabel 4.1 Ringkasan APBD Tahun 2023-2026..... 2

Tabel 4.2 Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan
Kabupaten Belu 7

Tabel 4.3 Sasaran Makro Pembangunan Nasional 9

Tabel 4.4 List Program Strategis Nasional (ProSN) 11

Tabel 4.5 Program Prioritas RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 14

Tabel 5.1 Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026..... 4

Tabel 5.2 Program-Program Integrasi SPM dalam RKPD 2026 18

Tabel 5.3 Program-Program yang merupakan Integrasi POKIR DPRD 20

Tabel 5.4 Program Pendukung Operasional Perangkat Daerah 20

Tabel 5.5 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2026.....21

Tabel 6.1 Capaian IKU Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 dan 2026..... 1

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Kabupaten Belu Capaian 2024 dan Target 2025 dan 2026 2





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mendukung perencanaan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD berfungsi sebagai elaborasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijadwalkan untuk satu tahun ke depan, mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan wilayah, serta rencana kegiatan dan pendanaan untuk periode yang sama. Penyusunan RKPD 2026 dilakukan dengan merujuk pada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi pelayanan dasar, visi dan misi kepala daerah, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karena itu, RKPD memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, karena:

1. Secara substansial, mencakup kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif, berfungsi sebagai acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama oleh DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, menyediakan panduan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam layanan dan pemberdayaan masyarakat, serta tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi ukuran untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.



Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026, diharapkan Pemerintah Daerah provinsi serta kabupaten/kota mengikuti kebijakan nasional dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih dengan merincikan visi pembangunan yang terkandung dalam Asta Cita sebagai dasar strategis untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan serta prosedur penyusunan, mekanisme perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0132);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu



Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 161).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun. Selain itu, RKPD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu 2025-2045, yang menjadi pedoman utama dalam menetapkan visi dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

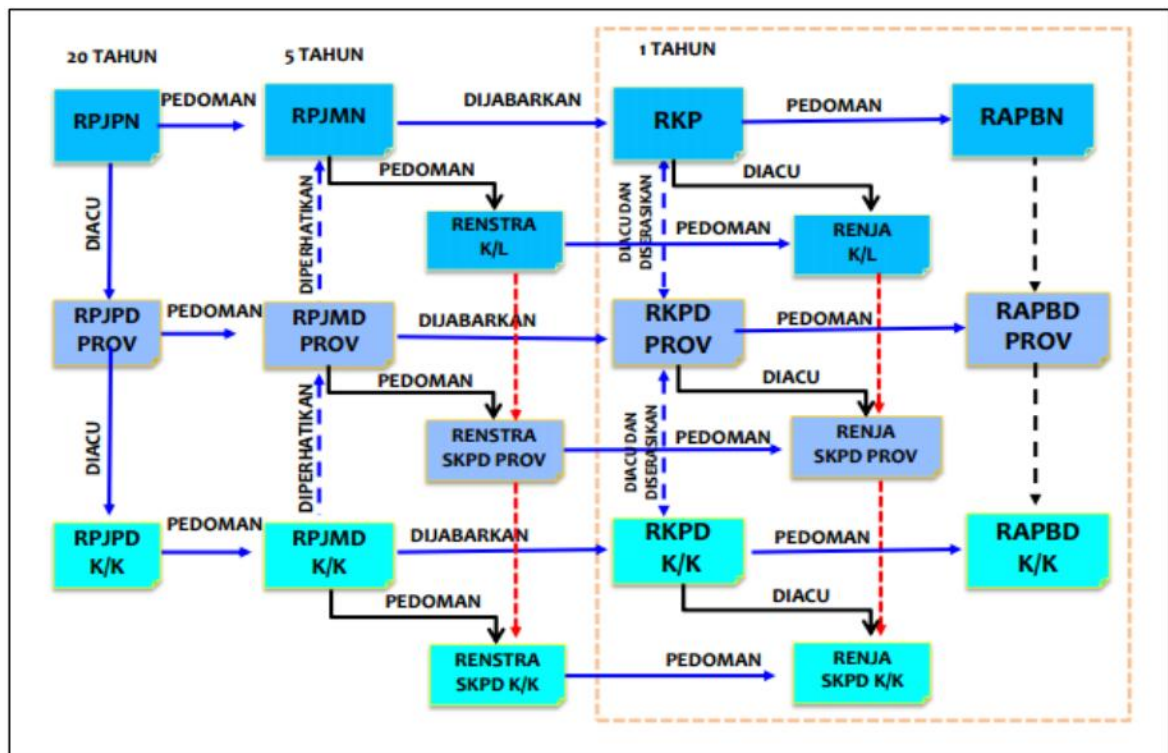
Di tingkat provinsi, RKPD Kabupaten Belu harus mengacu pada RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat terintegrasi dalam skala yang lebih luas. Sementara itu, dalam konteks nasional, RKPD Kabupaten Belu juga harus memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta sejalan dengan visi besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Selain menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah dan panjang, RKPD juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian menjadi landasan dalam perumusan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. RKPD juga harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersifat strategis dalam lima tahun serta Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi perencanaan tahunan dari masing-masing Perangkat Daerah. Dengan adanya keterpaduan antar dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efisien, serta sesuai dengan prinsip



Satu Data Indonesia, sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Belu.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Belu



Penyusunannya RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 ini akan diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045, yaitu **“Rai Belu ITAKAN UMA – Inklusif, Tangguh, Berkelanjutan dan Maju”** dan Visi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029, yaitu **“Belu Yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis Dan Berbudaya”**. Dalam rangka mendukung serta mewujudkan visi tersebut di atas, maka Tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing”**.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2026. RKPD ini menjabarkan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045, RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT



Tahun 2025-2029 serta kebijakan strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Belu;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
6. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2024, Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang



diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2026, sebagai pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2026 bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu.

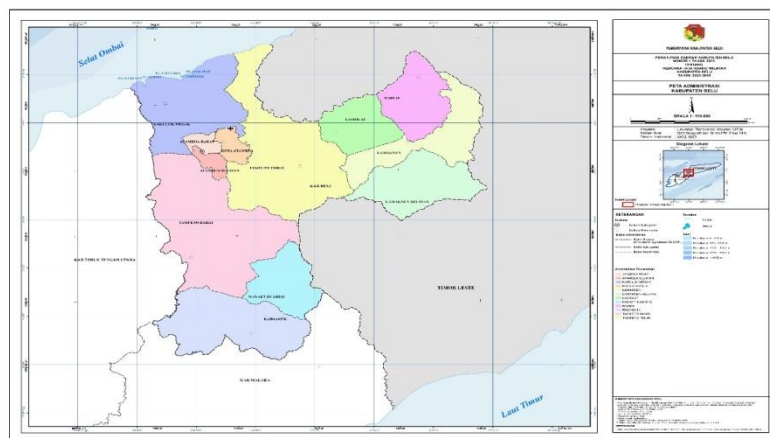
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL)
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto



Barat dengan luas wilayah 223,914 Km² atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129,924	11,55
2	Tasifeto Barat	8	223,914	19,50
3	Kakuluk Mesak	6	129,320	11,49
4	Nanaet Duabesi	4	67,818	6,03
5	Kota Atambua	4	16,301	1,45
6	Atambua Barat	4	10,994	0,98
7	Atambua Selatan	4	11,198	1,00
8	Tasifeto Timur	12	209,477	18,62
9	Raihat	6	75,528	6,71
10	Lasiolat	7	61,492	5,47
11	Lamaknen	9	92,500	8,22
12	Lamaknen Selatan	8	96,674	8,59
Total		81	1.125,14	100.00

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Berdasarkan surat Gubernur NTT Nomor: BU.410/35.a/DPMD.5.1/10.2022, tanggal 28 Oktober 2022 perihal Kode Register 18 Desa Persiapan di Kabupaten Belu, terdapat 18 (delapan belas) desa persiapan di Kabupaten Belu yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2
18 (Delapan Belas) Desa Persiapan Di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Nama Desa Induk	Nama Desa Persiapan
1	2	3	4
1.	Lamaknen	Fulur	Fulur Backhelin
		Makir	Hatulou
		Dirun	Weluli
2.	Tasifeto Timur	Silawan	Tukubesi
		Manleten	Manleten Barat
			Manleten Timur



3.	Raihat	Tohe	Tohe Rai Ain
			Tohe Fatukesi
4.	Tasifeto Barat	Tukuneno	Manuaman Fatukbot
			Manuaman Lidak
		Naekasa	Kubesi
			Banameta
			Raidikur
		Bakustulama	Makereknen
5.	Kakuluk Mesak	Dualaus	Lakafehan
		Kabuna	Fatubesi Lalori
6.	Lamaknen Selatan	Loonuna	Majo Rato

Sumber: Surat Gubernur NTT, 2022

Desa persiapan adalah wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi desa baru, melalui pemecahan dari desa induk atau penggabungan beberapa desa. 18 (delapan belas) desa persiapan merupakan pemekaran dari 13 (tiga belas) desa induk. Desa persiapan ini memiliki status yang belum sepenuhnya sebagai desa definitif dan masih dalam proses persiapan sebelum ditetapkan sebagai desa baru secara resmi.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 126,1 Km. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.



Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu
Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoea	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutharato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2024

Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.1.3 Topografi

Kondisi Topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan ±1500 m.dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	>45
1	Atambua Barat	0	3,830	5,448	0	0	0	1,717	0
2	Atambua Selatan	0	3,716	6,464	0	0	0	1,018	0



No	Kecamatan	Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	>45
3	Kakuluk Mesak	19,635	8,081	8,966	4,243	1,250	1,953	77,145	8,048
4	Kota Atambua	0	8,130	6,691	0,013	1,466	0	0	0
5	Lamaknen	5,269	6,702	1,474	0,990	16,372	11,230	49,030	1,434
6	Lamaknen Selatan	0,022	0,125	0	0,823	15,735	17,739	62,231	0
7	Lasiolat	0,003	0,059	0,187	0,885	24,909	19,647	15,802	0
8	Nanaet Duabesi	0,044	0	0	0,495	6,25	28,525	7,894	24,61
9	Raihat	9,283	9,487	0,004	0,163	33,835	15,872	6,884	0
10	Raimanuk	0,004	21,628	4,805	34,403	2,230	41,921	24,934	0
11	Tasifeto Barat	0,030	35,757	29,288	70,298	25,035	19,352	6,862	37,292
12	Tasifeto Timur	84,550	18,386	99,387	0,003	7,114	0,022	0,016	0
TOTAL		118,841	115,900	162,713	112,316	134,197	156,259	253,532	71,383

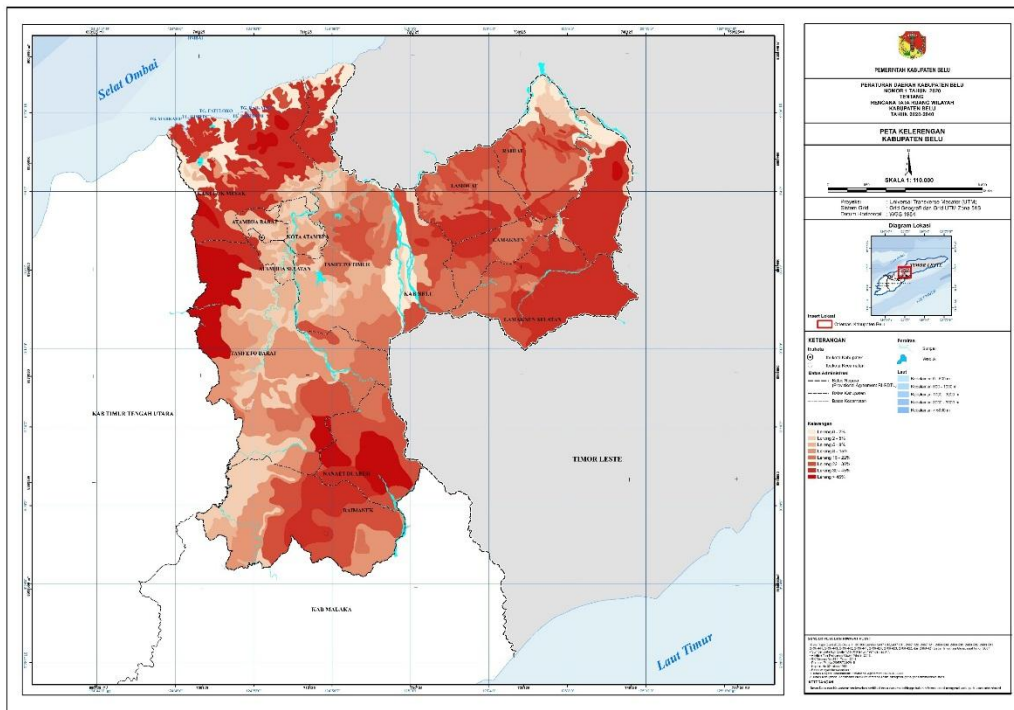
Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.
2. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
4. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
5. Kelerengan >45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.



Gambar 2.2
Peta Kelerengan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040

2.1.1.4 Geologi

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), dimana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk.

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah



mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.

e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, dimana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorall. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.

i. Alluvium



Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%), tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli

Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilutit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

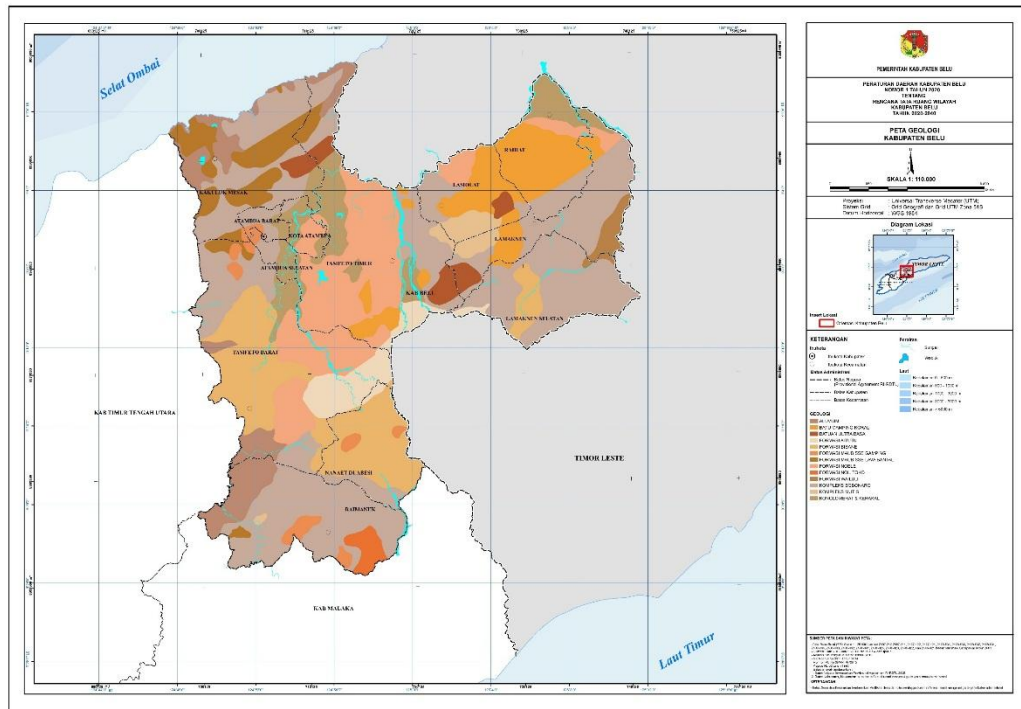
m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Batu Kerakal adalah potongan batuan yang berukuran 150–250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen,



Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.3
Peta Geologi di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan sumber daya mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.

b. Grumusol

Tanah grumusol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak



ada aktivitas organik didalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaian tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki pH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumusol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumusol ini. Jenis tanah Grumosol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah Latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran



Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah Mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah Renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain warnanya kehitaman serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol. Tanah Renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Renzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Tabel 2.5
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

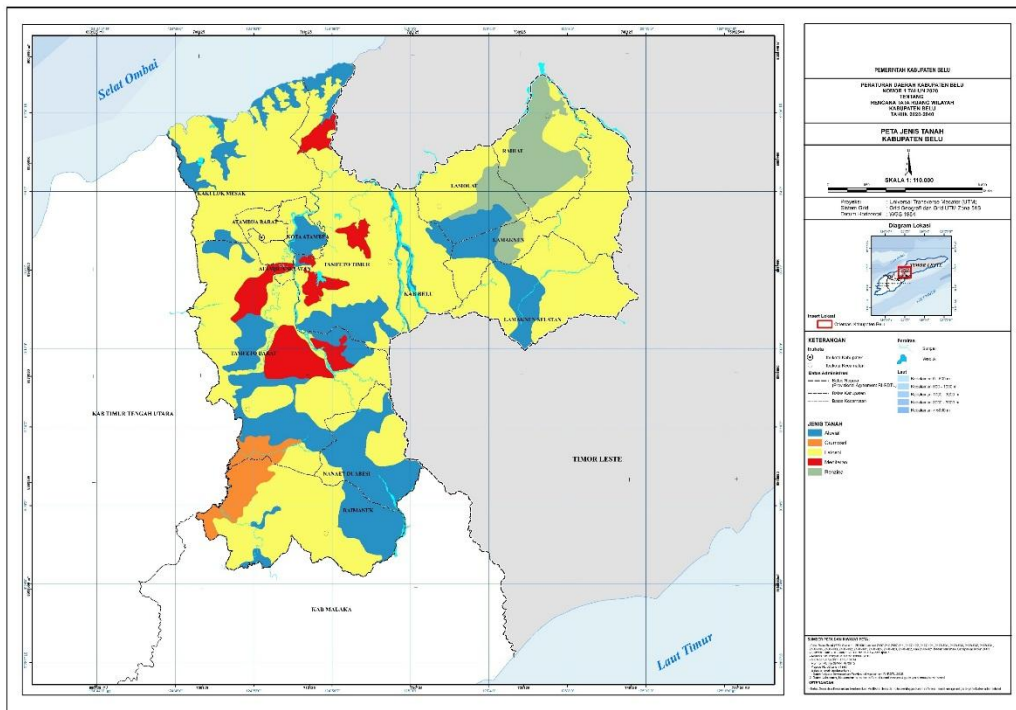
No	Jenis Tanah	Lokasi
1	Aluvial	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat,



No	Jenis Tanah	Lokasi
		Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
2	Grumosol	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3	Latosol	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
4	Mediterran	Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.
5	Renzina	Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

A. Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata-rata mata air berkisar antara 5–200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70% saat musim kemarau (September, Oktober dan November).

1.



1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10-50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (*perennial*), mengalir hanya pada musim hujan saja (*intermiten*); sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (*ephemeral*).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang diantaranya adalah DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.

2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini PDAM Kabupaten Belu telah memanfaatkan 7 (tujuh) mata air dan 1 (satu) bendungan. Tabel berikut menyajikan data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu.



Tabel 2.6
Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu

No	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit		Wilayah Pelayanan	Keterangan
			Terpasang	Riil		
			(m3/detik)	(m3/detik)		
1	Lahurus	Mata Air	20	15	Desa Maneikun, Desa Manleten, Kel. Fatubenao, Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Umanen, Kel. Manuaman, Kel. Rinbesi	Aktif
2	Molosoan	Mata Air	20	10	Desa Sarabai, Desa Bauho, Desa Manleten, Kel. Fatubenao, Kel. Tenukiik, Kel. Manumutin, Kel. Atambua	Aktif
3	Tirta Bron A	Mata Air	15	5	Kel. Fatukobot, Kel. Lidak, Kel. Rinbesi, Kel. Berdao, Kel. Manuaman, Kel. Atambua	Aktif
4	Tirta Bron C	Mata Air	12	4	Kel. Rinbesi, Kel. Atambua, Kel. Berdao	Aktif
5	Weutu	Mata Air	15	15	Kel. Manumutin, Kel. Tulamalae, Kel. Umanen	Aktif
6	MA Wefia	Mata Air	2,5	2,5	Desa Lasiolat	Aktif
7	SM Beilaka	Sumur Bor	2,5	2,5	Desa Silawan	Tidak Aktif
8	MA Webenahi	Mata Air	1	0	Desa Silawan	Tidak Aktif
9	SB. Bautasik	Sumur Bor	2,5	0	Desa Kabuna	Tidak Aktif
10	Weoe	Mata Air	10	5	Kel. Fatubenao, Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Umanen, Kel. Manuaman, Kel. Rinbesi	Aktif
11	SB. Motabenar	Sumur Bor	2,5	0	Desa Silawan	Tidak Aktif
12	IPA Haekrik	Bendungan	30	5	Kel. Fatukbot, Kel. Fatubenao, Kel. Atambua, Kel. Tanukiik, Kel. Manumutin	Aktif
Jumlah			133	64		

Sumber: PDAM Kabupaten Belu, 2024



Berikut ini tabel alternative sumber air baku yang dapat digunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu.

Tabel 2.7
Alternatif Sumber Air Baku di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
1	Tasifeto Timur	1	Embung Sirani	20
		2	MA. We Utu	20
		3	MA. Wehas	2
		4	MA. Wedomu	2
		5	Embung Haekrit	30
		6	MA. Kenebibi	0,2
		7	MA. Tulakadi/Webenahi	2
		8	SB. Motabenar	3
		9	SB. Silawan 2/ beilaka	5
		10	SB. Waskita /Silawan 1	-
		11	MA. Wesalulun	0,3
		12	MA. Wekabaan	3
		13	Biapuruk	1
		14	Weoi	<1
		15	Wetotan	3
		16	Wefulan	2
		17	MA. Lebung	9,05
		18	MA. Weabat	2,35
		19	MA. Abatsali	
		20	MA. Tiis	0,16
		21	SB. Bautasik	2,5
		22	SB. Beilaka	5
		23	MA. Webenahi	3
		24	SB. Motabenar	3
		25	Bendungan Haekrit	30
				128,56
2	Kakuluk Mesak	26	Bendungan Rotiklot	80
		27	SB. Bautasik	5
		28	MA. Haliwen 1	2,3
		29	MA. Haliwen 2	5,3
		30	MA. Haliwen 3	1,36
		31	Sumur We Utu	20
				73,96
3	Tasifeto Barat	32	MA. Lebun	6,9
		33	Wehedafehan	>1
		34	Tulatudik	1
		35	Seo B	1



No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
		36	Kali Waekabu	5,67
		37	Tirta C	12
		38	MA. Likis	11,53
		39	MA. Tabian	2,6
		40	MA. Wevanes	2,3
		41	Bendungan We Likis	80
				43
4	Nanaet Duabesi	42	MA. Webot	0,5
		43	Ma. Wedare	2,2
		44	Wehedan	<1
		45	Weibuimesek	< 1
		46	Weuas	1
		47	Hutan Kopi	1
		48	Dibawa Hutan Kopi	3
		49	Tubaki	2
		50	Webihale	1,42
		51	Wekanukur	0,39
				11,51
5	Raimanuk	52	MA. Abatbuti 1	28,47
		53	MA. Abatbuti 2	1,5
		54	MA. Abatbuti 3	0,5
		55	MA. Naiku	5,96
		56	Wehanetan	>2
		57	Wekanukur	>2
		58	Wehatook	3,89
		59	MA. Nania 1	0,59
		60	MA. Nania 2	1,48
		61	MA. Wekone	2,3
		62	MA. Mauasu	0,5
				45,19
6	Lasiolat	63	MA. Tunamuti	4,42
		64	MA. Abatmatan	2,8
		65	MA. Weau	3,06
		66	MA. Wematan Waik 1	3,3
		67	MA. Siata	28,57
		68	MA. Wetihu	246,9
		69	MA. Wemaruut	3,9
		70	MA. Wekaen	2,88
		71	MA. Fafakur	1
		72	MA. Fohowai	1
		73	MA. Wesubaer	
		74	MA. Sainuan	1,006
		75	MA. Wereha	12,58



No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
		76	MA. Lahurus	20
		77	MA. We Oe	15
		78	MA. Molosoan 2	20
				366,42
7	Raihat	79	MA. Webot	144,9
		80	MA. Wekiik	0,74
		81	MA. Weraikuak 1	2,2
		82	MA. Wesanis	17,26
		83	MA. Rusan	53,7
		84	MA. Wesaseik	1,08
		85	MA. Maumuku	0,12
		86	MA. Wesakis	1,2
		87	MA. Beabot	0,3
		88	Wehitas	>1
		89	Asumanu 1	2
		90	Asumanu 2	>1
		91	MA. Wetear	1,51
		92	MA. We Buris	0,52
				225,53
8	Lamaknen	93	MA. Lesuama	0,35
		94	MA. Selle	-
		95	MA. Ewigelon	0,5
		96	MA. Mauhelek	99,55
		97	MA. We Hut	1,14
		98	Hulutau	>1
		99	SPAM Berewen	
		100	MA. We Abateu	1,04
		101	MA. We Bol (Taon)	
		102	MA. Il Bugili	
				102,58
9	Lamaknen Selatan	103	MA. Ilgubul	1,94
		104	MA. Bontil	0,02
		105	MA. Giraltui	2,72
		106	Asahale/Purkou	<1
		107	Koban	<1
		108	Foholulik	>1
		109	MA. We Natal	1,11
				5,79

Sumber : Review Dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu - 2023

Sangat penting pemanfaatan sumber mata air yang ada di Kabupaten Belu untuk dioptimalkan. Sumber mata air di Kabupaten Belu termasuk tipe air tanah yang diremajakan yaitu air



yang untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan, maupun oleh sebab-sebab lain dan kembali ke daur hidrologi lagi dengan proses-proses metamorfis. Jumlah ketersediaan sumber mata air sebanyak ± 604 sumber mata air yang tersebar di 12 Kecamatan, dimana 45 % sumber mata air dapat mengeluarkan air sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh curah hujan (perennial springs) dengan kondisi ketersediaan air cukup baik; dan sebanyak 35 % sumber mata air bersifat musiman karena mengeluarkan air hanya pada musim tertentu dan tergantung pada curah hujan (intermitent springs), dengan kondisi ketersediaan air sedikit serta 20 % sumber mata air yang kering di musim kemarau dan dapat mengeluarkan air pada periode tertentu saja (periodic springs).

Berikut ini tabel kelompok sumber mata air yang belum termanfaatkan (belum ada jaringan atau pelayanan) secara optimal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan guna menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu.

Tabel 2.8
Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu
Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
1	Tasifeto Timur	Dafala	1	We Totan	3	Pamsimas 2018 dan ADD 2019
			2	We Fulan	2	
		Halimodok	3	Salulun	0,3	DAU 2016 dan 2017, DAK Penugasan 2018, ADD 2018
			4	Wekabaan	3	
			5	Webora	-	Pamsimas 2020
			6	Lasaka	-	
			7	Wetoi	-	
			8	Welaksai	-	
		Fatuba'a	9	We Aisiba	-	Pembangunan di Taeksoruk 2016 (DAU)
			10	Mata air		ADD 2018 dan 2019
		Manleten	11	We has	2	DAK 2021
			12	Wedomu	2	
			13	Bendung Haekrit	30	


II-19



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			14	Sumur Bor 1 Dsn Lamasi		Dana APBD Provinsi
		Silawan	15	Sumur Bor Motabenar	3	
			16	Sumur Bor Waskita/ Silawan 1	3	
			17	Sumur Bor Silawan 2	5	
			18	SMA Webenahi / Wekiar	1,8	
		Sadi	19	Sumur Bor Sadi	1,2	
			20	Biapuruk	1	Pamsimas 2017, ADD 2018 & 2020
		Sarabau	21	Lebun		dibangun Pamsimas 2017
		Tulakadi	22	Sumur Bor 1	2,85	Aset Desa
		Bauho	23	We Oi	< 1	
		Umaklaran	24	Sumur Bor Umaklaran	1,8	
			25	We utu	12,5	
			26	Bendung Sirani	-	
			27	SMA Bea Klitin	-	Pamsimas 2021
		Tialai	28	We Abat Kiik	-	Pamsimas 2018
2	Tasifeto Barat	Naekasa	29	SB 1	1,01	Dsn Nela
			30	SB 2	1,52	Dsn Nela
			31	SB 3	2,03	Dsn Batumera A
			32	SB 4	2,03	Dsn Naresa/Badan Geologi
			33	SB 5	1,5	Seminari Lalian
			34	SB 6	1,4	Seminari Lalian
			35	SB 7	3,3	Kompleks Keuskupan
			36	Wekabu	5,67	
			37	Oetfo	-	
			38	Kruitaman	-	DAU 2015 dan 2016



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Tukuneno	39	Sumur Bor 1	-	BWS NTT II (kondisi baik)
			40	Sumur Bor 2	-	Dusun Tala B
			41	Sumur Bor 3	-	SMAN 2 Kab. Belu
			42	SMA Wenaka & We ebun	-	DAU 2016, Pamsimas 2018
		Bakustulama	43	Sumur Gali	-	PUPR 2019
			44	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Derokfaturene	45	Rotiren	-	PUPR 2014
			46	Derokfaturene	-	PUPR 2018
			47	Lebun	6,9	
			48	We Hedanfehan	>1	
			49	Tulatidik	1	
		Lookeu	50	Mata air	-	Pamsimas 2021
			51	We Likis	11,58	
			52	Builara	-	
		Rinbesi hat	53	seo A	2	
			54	Seo B	1	
		Naitimu	55	SMA	-	Pamsimas 2020
			56	Sumur Bor 1	-	Halilulik
			57	SB 2	-	Halilulik / Dsn Haliseri
			58	SB	-	Halilulik
			59	Mata air	-	PUPR 2017
		Lawalutolus	60	Wekfau	-	PUPR 2015
3	Raimanuk		61	Mata air	-	Pamsimas 2020 (Rehab HU)
		Renrua	62	We Abad	-	PUPR 2021
			63	Mata air	-	Pamsimas 2020
		Raimanus	64	SMA Mauasu	< 1	Pamsimas 2017
		Faturika	65	We Hanetan	> 2	Pamsimas 2019
			66	Wekanukur	> 2	
		Mandeu	67	Sumur Bor 1	2,77	Distamben 2016
			68	Sumur Bor 2	2,5	Distamben 2016 (Motamauk)



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			69	Sumur Bor 3	1,04	PUPR 2018 (Dsn Anao Loro B)
			70	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Teun	71	Oehonis	-	Pamsimas 2020
			72	Botinaiku	5,96	PUPR 2015
			73	Abatbuti 1	28,47	
			74	Abatbuti 2	1,5	
			75	Abatbuti 3	0,5	
		Rafae	76	Wenanan	-	Pamsimas 2020
			77	Sumur Bor 1	-	PUPR 2017 (Dsn Obor)
			78	Mata air	-	DAK Reguler 2018
		Tasain	79	Mata air	-	Pamsimas 2019
		Leontolu	80	Sumur Belakang Kantor Desa	-	Pamsimas 2018
4	Nanaet Duabesi	Nanaet	81	Borakwer	-	Pamsimas 2021
			82	Sumur Bor 1	0,15	PUPR 2021
		Dubesi	83	We Uas	0,5	PUPR 2021
			84	We Bot	1	
			85	Tubaki	2	
		Fohoeaka	86	We hedan	< 1	
		Nanaenoe	87	We Dare	2,2	
			88	We Buimesak	< 1	
			89	Hutan Kopi	3	
5	Kakuluk Mesak	Fatuketi	90	Bendungan Rotiklot	-	Rencana Kerja Thn 2022
			91	Mata air	-	Pamsimas 2021(Sumur Kantor Desa)
			92	Mata air	-	PUPR 2012 (Lok.Ainiba)
		Leosama	93	Sumur Bor 1	1,6	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Fatuatis)
			94	Sumur Bor 2	1,1	PUPR 2016 (Dsn Halimea)
			95	Sumur Bor 3	1,1	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Takantade)
			96	Hatfoho	-	Pamsimas 2018



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Dualaus	97	Sumur Bor 1	2,7	Sdh peningkatan hingga 40 SR (Dsn. Berluli)
			98	Sumur Bor 2	5	Kementerian PUPR 2017(Dsn. Wekiar)
			99	Sumur Bor 3	7	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Lakartairai)
			100	Sumur Bor 4	2	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Lakafehan)
		Jenilu	101	Sumur Bor 1	3,33	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Abat)
		Kenebibi	102	Loo Weain	-	Pamsimas 2015
			103	Sumur Bor 1	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. We inggris)
			104	Sumur Bor 2	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Talilaran)
		Kabuna	105	We Hor	-	Pamsimas 2020
			106	Sumur Bor 1	2,6	SSB Bintang Timur 2017
			107	Sumur Bor 2	-	Distamben Belu 2016 (Haliwen)
			108	Sumur Bor 3	-	BWS NTT II (Haliwen)
6	Atambua Barat	Tulamalae	109	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			110	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2018
		Umanen	111	SMA Tuntuni	-	
7	Atambua Selatan	Fatukbot	112	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			113	Sumur Bor 2	-	Badan Geologi 2020
			114	Sumur Bor 3	-	Badan Geologi 2021
			115	Tirta A	7	
			116	Tirta C	5	
		Lidak	117	Sumur Bor 1	2,7	kantor Lurah Lidak
8	Kota Atambua	Manumutin	118	Sumur Bor 1	-	PUPR Belu 2017(Raimaten/Kondisi rusak)
		Tenukiik	119	Sumur Bor 1	2,7	PUPR Belu 2018(Kodim/ Pompa Rusak)



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			120	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2020 (Kodim)
		Kota	121	Sumur Bor 1	2,08	PUPR Belu 2017 (DPRD)
9	Lasiolat	Lasiolat	122	Fohowai	1	
			123	We Fia	7,8	
			124	Fafakur	1	
		Maneikun	125	We Subaer	2	Pamsimas 2019
			126	We Tunamutin	-	PUPR Belu 2015
		Lakanmau	127	We Matanwai	-	Pamsimas 2018 / PUPR 2016
		Fatulotu	128	Tunamuti	4,42	
			129	Abatmatan	2,8	
			130	We Au	3,06	
		Baudaok	131	We Tihu	13	
			132	We Maruut	2	
			133	We Kaen	2	
		Dualasi Raiulun	134	Siata	28,57	
10	Raihat	Asumanu	135	Asumanu 1	2	
			136	Asumanu 2	> 1	
			137	We hitas	> 1	
			138	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019 / Debit Kurang
		Tohe	139	We Sanis	17,26	
			140	Wee Bot 1	144,9	
			141	We Bot 2		
			142	We Kiik	0,74	
		Maumutin	143	We Saseik	1,08	
			144	Maumuku	0,12	
			145	We Sakis	1,2	
		Raifatus	146	Beabot	0,3	
11	Lamaknen		147	Wetear	-	
		Dirun	149	Lesuama	0,35	
			150	Selle	-	
			151	Ewigelon	0,5	



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			152	Berewen	0,8	
			153	Mauhalek	99,5	
			154	Sumur Bor 1	2	Badan Geologi 2019
		Maudemu	155	Mata Air	> 1	
		Leowalu	156	Holtojo	-	Pamsimas 2021
		Fulur	157	Beiseran	-	Pamsimas 2021
		Kewar	158	Wesei	-	
		Lamaksenulu	159	Manuaben	-	
		Makir	160	Weabat Teu	-	pamsimas 2014
		Duarato	161	Halutu	-	
12	Lamaknen Selatan	Lakmaras	162	il Gubul	1,94	
			163	Lano	-	Pamsimas 2017
		Lutharato	164	Bontil	0,02	
			165	Giraitul	2,72	
			166	Foholulik	> 1	
			167	Amahale	-	Pamsimas 2019
		Nualain	168	Koban	-	Pamsimas 2018
		Debululik	169	Mata air	> 1	
		Ekin	170	Sumur Belakang Kantor desa	-	
		Looluna	171	SMA Wemauat	> 1	
		Henes	172	SMA Asahale	-	
		Sisi Fatuberal	173	Mata Air	-	Pamsimas 2015

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam disuatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah



limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.

Tabel 2.9
Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Embung /Bendungan	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Desa Manleten	Bendungan Haekrit	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
		Desa Umaklran	Bendungan Haliwen	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
2	Kakuluk Mesak	Desa Fatuketi	Bendungan Rotiklot	Kualitas air buruk,perlu dilakukan pengolahan Sebelum dikonsumsi

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu, 2024

a. Bendungan Haliwen

Bendungan Haliwen terletak di Desa Umaklran, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari APBN. Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:

- a) Luas DAS : 230 Ha
- b) Panjang Tanggul: 220 m
- c) Tinggi Tanggul : 16,5 m
- d) Tampung Kotor : 2.396.000 m³

Kapasitas debit terpasang Bendungan Haliwen ±20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari bendungan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam bendungan terlalu tebal dan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.



b. Bendungan Haekrit

Bendungan Haekrit adalah bendungan irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Bendungan Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Bendungan Haekrit sebesar 29,4 km² dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Bendungan Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 liter/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c. Bendungan Rotiklot

Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan perbatasan RI-RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m³ sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

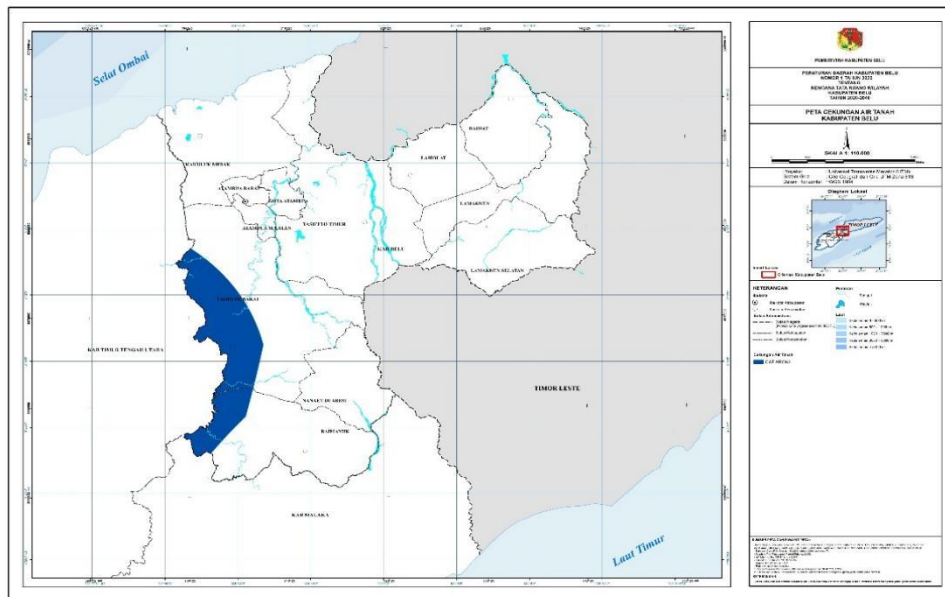
4. Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Air tanah mengalir lambat dan kapasitas keseluruhannya ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.

Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air pada sumur-sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroki.



Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu



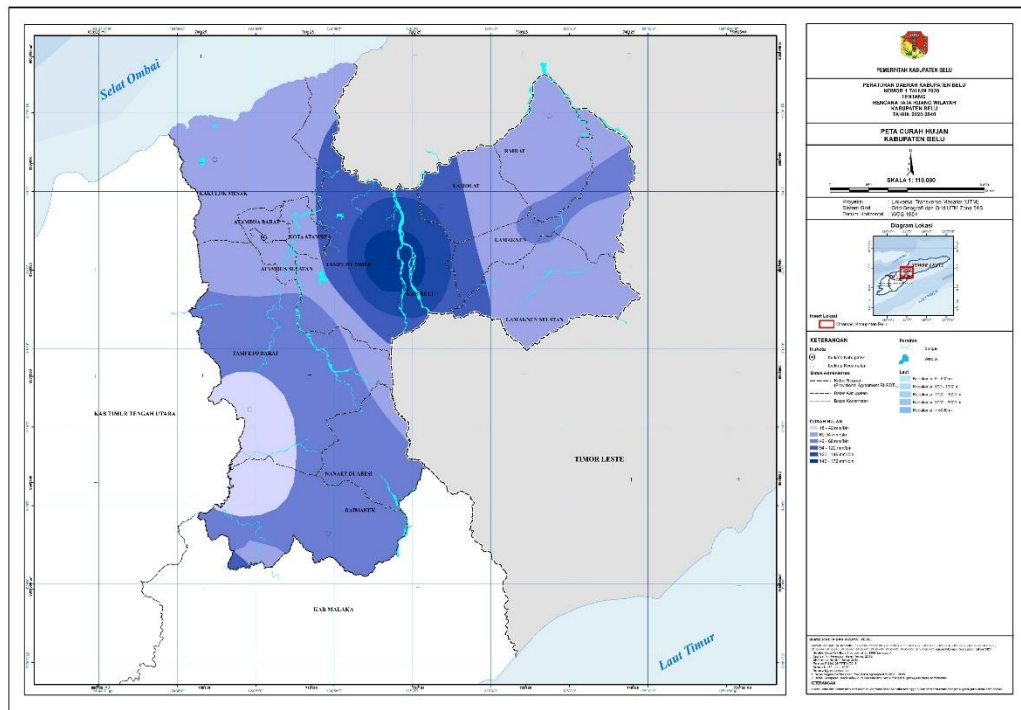
Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.6 Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5-33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6
Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.7 Hidro-Oseanografi

Hidro-oseanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

- a. Gelombang:** Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30-0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.
- b. Pasang Surut:** Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi $\pm 3,95m$ *High Water Spring* (HWS),



Lowest Water Spring (LWS)= + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level (MSL)*= + 1,89 m.

c. Arus Laut: Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir Digitasi Peta Lingkungan Laut NTT, 2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah= -0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II-Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pemukiman maupun fasilitas perdagangan lainnya. Penggunaan lahan ini mengindikasikan bahwa penambahan penggunaan lahan di salah satu sektor akan diikuti dengan pengurangan jenis lahan di sektor lainnya karena tidak adanya konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan berkaitan dengan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun uraian penggunaan lahan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut.



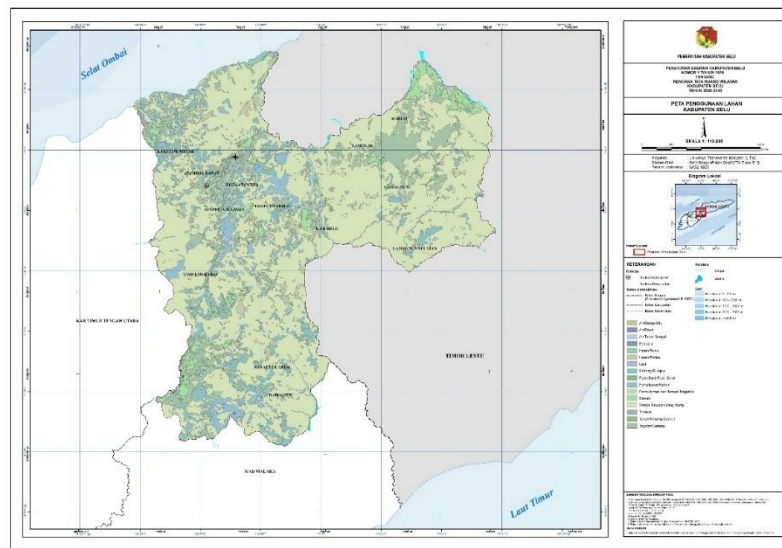
Tabel 2.10
Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)
1	Air Danau/Situ	1,37	0.12
2	Air Rawa	0,24	0.02
3	Air Tawar Sungai	19,21	1.71
4	Bandara	0,31	0.03
5	Hutan Rawa	2,85	0.25
6	Hutan Rimba	13,00	1.16
7	Laut	0,09	0.01
8	Padang Rumput	88,39	7.86
9	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,13	0.01
10	Perkebunan/Kebun	45,80	4.07
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	39,54	3.51
12	Sawah	40,96	3.64
13	Semak Belukar/Alang-alang	727,70	64.68
14	Tambak	1,15	0.10
15	Tanah Kosong/Gundul	0,79	0.07
16	Tegalan/Ladang	143,62	12.76
TOTAL		1125,14	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data penggunaan lahan di atas, jenis penggunaan lahan di Kabupaten Belu yang memiliki luasan paling besar adalah semak belukar/alang-alang, dengan persentase 64,68% diikuti dengan jenis penggunaan tegalan/ladang dengan persentase luasan 12,76%. Sesuai dengan analisis kesesuaian lahan, sebagian jenis penggunaan lahan semak belukar/alang-alang dan tegalan/ladang dapat dimanfaatkan sebagai lahan potensial pengembangan pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Penyebaran penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Kawasan Lindung di Kabupaten Belu

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Lindung		
	• Tukubesi	272	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak

1



No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
	• Bifemnasi– Sonmahole	8.536	Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan
	• Lakaan Mandeu	21.712	Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan
	• Lakaan	3.144	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasialat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen
	• Fatukaduak	1.700	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur
	• Fatusakar	9	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
2.	Kawasan Resapan Air	36.335	Terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi
3.	Kawasan Sempadan Pantai.	197	Sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur
4.	Kawasan Sempadan Sungai	2.255	Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau
5.	Kawasan Sekitar Bendungan	80	Sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	52	Hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak

Sumber:RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Selain kawasan yang disebutkan diatas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan



Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 Ha;
- b. Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas
 - 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 Ha;
 - 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 Ha;
 - 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 Ha;

2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung.
- c. Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah.



d. Kawasan Peternakan meliputi:

- 1) Kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain
- 2) Kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe dan Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutolus.
- 3) Kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa.
- 4) Kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten.
- 5) Kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus.
- 6) Kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:

- a. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;
- b. Kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;



- c. Kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
 - d. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - 1) Pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 2) Tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.
4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat; dan
 - c. Kawasan pertambangan batuan meliputi:
 - 1) Potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - 2) Potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
 - 3) Potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
 - 4) Potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 5) Potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.
5. Kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.
- Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:



- a. Sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - b. Sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - c. Sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
 - d. Sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
 - e. Sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - f. Sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi:
- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
 - b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
 - c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
 - d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - e. Pantai Motaain (perbatasan RI –RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - h. Air Terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
 - i. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;

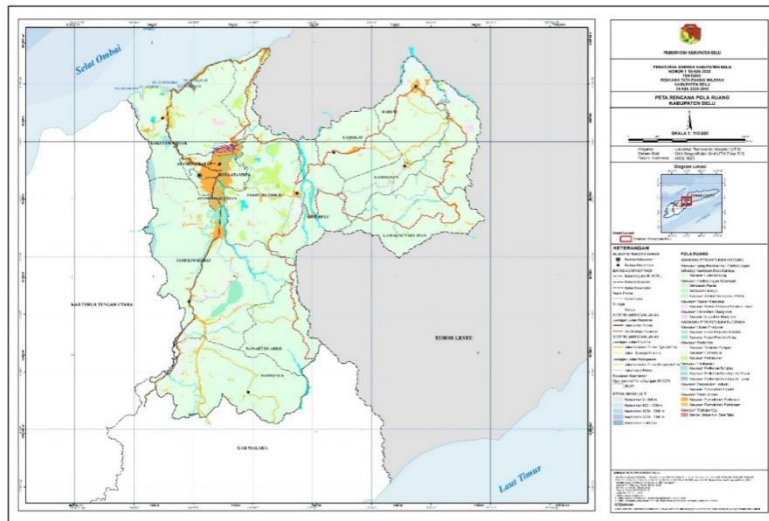


- j. Rumah Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;
 - k. Rumah Adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
 - l. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
 - m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan; dan
 - s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
 - b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;
 - e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan
 - h. Pos Angkatan Laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.
9. Kawasan Transportasi
- Kawasan transportasi meliputi:



- Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha;
- Pelabuhan laut Atapupu untuk transportasi manusia maupun barang terdapat di Kecamatan Kakuluk mesak; dan
- Pelabuhan penyebrangan teluk gurita yang menghubungkan Pulau Timor dengan Pulau Alor di kecaamtan Kakuluk Mesak.

Gambar 2.8
Peta Pola Ruang Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.2.3 Kawasan Strategis

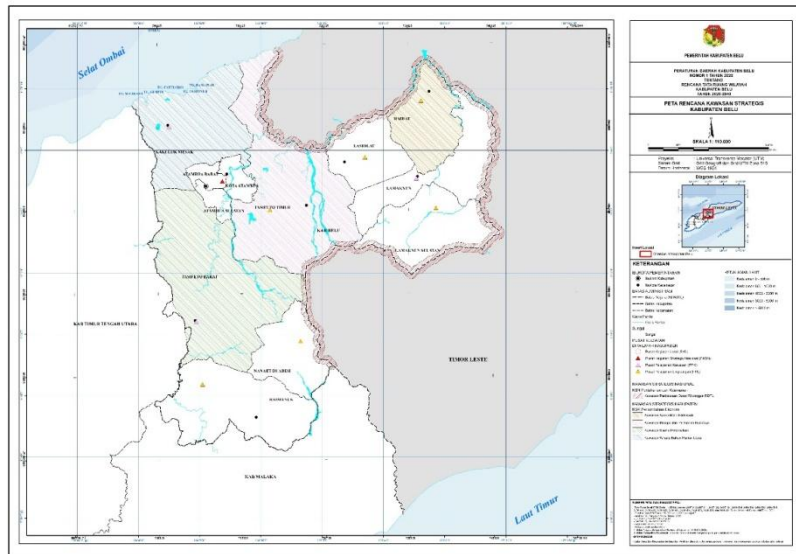
Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan



4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.9
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. Aspek geologi meliputi: gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. Aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. Aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini.



Tabel 2.12
Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencanadi Kabupaten Belu

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	Lamaknen	Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur
		TasifetoTimur	Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten
		Raihat	Tohe, Maumutin, Asumanu
		Tasifeto Barat	Naitimu, Lawalutolus, Rinbesihat, Naekasa
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Fatubenaο, Tenukiik, Manumutin
		Raimanuk	Teun, Tasain, Leuntolu, Rafae, Renrua
		Lasiolat	Lasiolat
		Lamaknen Selatan	Nualain, Lutarato, Lakmaras, Kewar
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Fatukbot, Rinbesi
		Nanaet Duabesi	Nanaenoe
2	KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		TasifetoTimur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutolus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoea, Nanaenoe
3	KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu
		Tasifeto Timur	Silawan
4	KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		TasifetoTimur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Fatubenao, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoecka, Nanaenoe
5	KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		TasifetoTimur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubenao, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeke, Nanaenoe
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu Kenebibi
		TasifetoTimur	Silawan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2024

Untuk bencana yang disebabkan oleh aspek biologis yang meliputi epidemi dan wabah penyakit terjadi pada waktu tertentu dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Jenis wabah penyakit yang ada meliputi malaria dan demam berdarah.

Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Belu. Upaya penanganan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu masyarakat yang terkena bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belu saat ini telah bergerak mengikuti Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat



menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Belu. Selain itu, perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu juga diatur tentang sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah:

1. Jalur evakuasi bencana.

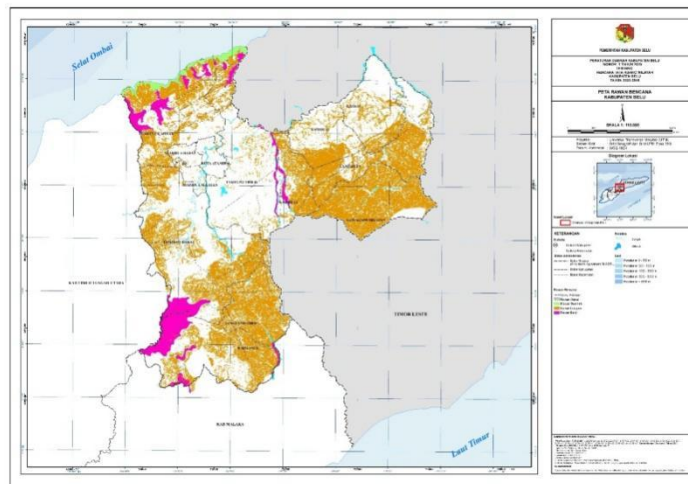
Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Belu menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas:

- a. Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
- b. Kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain;
- c. Sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan;
- d. Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.

2. Ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.



Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Peta rawan bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, maupun bencana alam lainnya. Berbeda dengan petarupa bumi pada yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif, Peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi tematik.

Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana diantaranya adalah untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Selain itu petarawan bencana akan menyediakan berbagai informasi tentang masalah kebencanaan pada satu wilayah sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan sumber daya/sarana prasarana yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lamban dari percepatan pertambahan sumber daya/sarana prasarana dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan



masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir Tahun 2024 sebanyak 232.788 jiwa.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada pada kecamatan Atambua yakni sebanyak 32.119 jiwa (13,79%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.441 jiwa (2,33%).

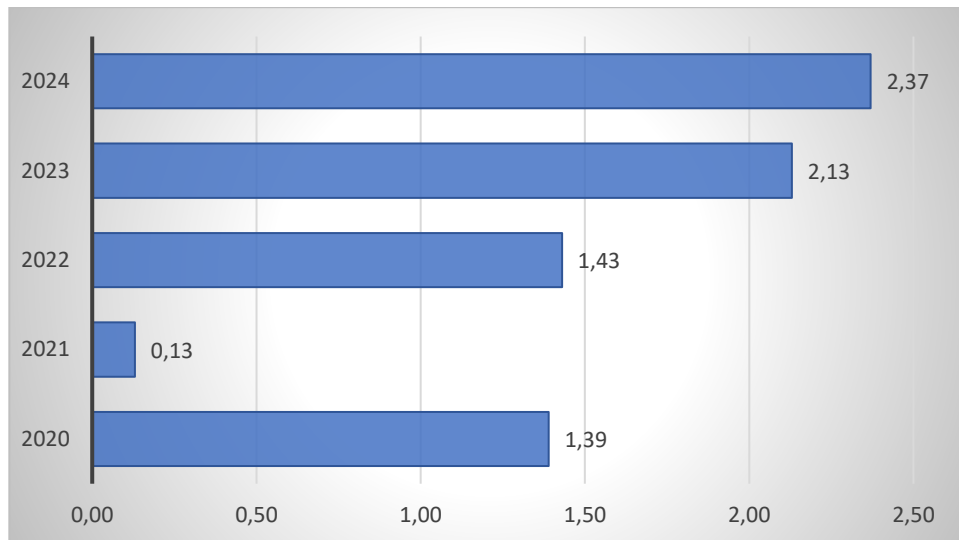
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2021-2024</i>	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Raimanuk	19.281	8,28	5.75	107,46
Tasifeto Barat	27.892	11, 98	5.33	124,41
Kakuluk Mesak	23.140	9,94	1.10	123,39
Nanaet Duabesi	5.441	2,34	4.78	90,31
Atambua	32.119	13,80	1.76	1289,92
Atambua Barat	23.440	10,07	-3.18	1507,40
Atambua Selatan	26.699	11,47	1.04	1697,33
Tasifeto Timur	27.979	12,02	3.23	132,37
Raihat	15.852	6,81	3.77	181,79
Lasiolat	7.863	3,38	3.20	121,94
Lamaknen	13.506	5,80	2.46	127,54
Lamaknen Selatan	9.576	4,11	3.78	88,33
Belu	232.788	100	2.37	181,17

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025



Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025

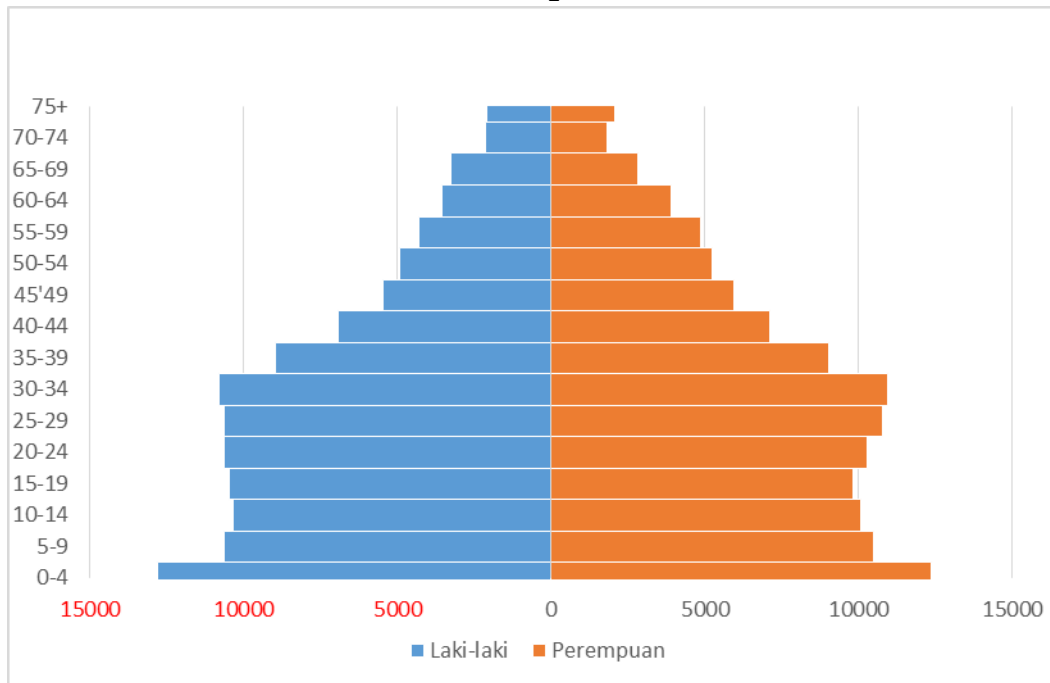
Grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2024 sebesar 0,24 poin dari 2,13 % di tahun 2023.

2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik penduduk berwarna biru menggambarkan banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki dan grafik orange menunjukkan banyaknya penduduk perempuan menurut kelompok umur seperti pada Grafik 2.2 di bawah.



Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif yaitu usia dari 15-64 tahun sebesar 65,63%. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 28,31%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 6,04%.

Adapun Rasio jenis kelamin tahun 2024 adalah 99,40 yang berarti diantara 100 perempuan terdapat 99 sampai 100 penduduk laki-laki.

Rasio penduduk sangat penting dalam berbagai bidang dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan/keputusan ekonomi.

2.1.4.3 Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi

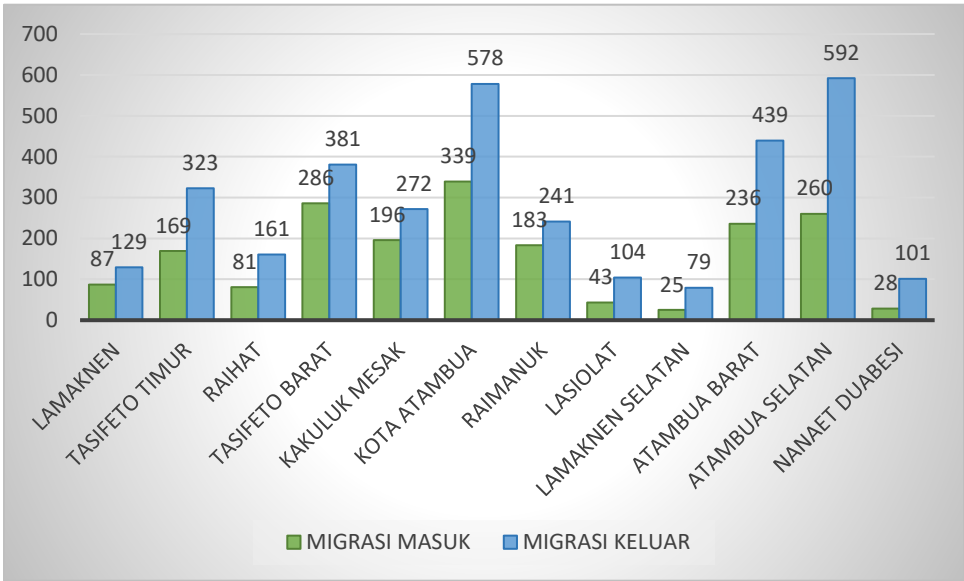
Berdasarkan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Belu Tahun 2024, angka kelahiran hidup bayi adalah 3.507 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 973 orang. Angka kematian ini mencerminkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit



menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.

Grafik 2.3

Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2024



Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belu Tahun 2024

Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1.933 orang pada Tahun 2024 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar sebanyak 3.400 orang yang lebih dipengaruhi oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

2.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.



Tabel 2.14
Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK + PR	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tidak/Belum Sekolah	38.540	33,21	36.598	31,35	75.138	32,28
2	Belum Tamat SD/Sederajat	7.984	6,88	7.340	6,29	15.324	6,58
3	Tamat SD/Sederajat	33.868	29,19	33.150	28,39	67.018	28,79
4	SLTP/Sederajat	13.018	11,22	14.871	12,74	27.889	11,98
5	SLTA/Sederajat	17.458	15,04	17.823	15,27	35.281	15,16
6	Diploma I/II	258	0,22	452	0,39	710	0,30
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	896	0,77	1.703	1,46	2.599	1,12
8	Diploma IV/Strata I	3.863	3,33	4.716	4,04	8.579	3,69
9	Strata II	149	0,13	91	0,08	240	0,10
10	Strata III	7	0,01	3	0,00	10	0,004
JUMLAH		116.041	100	116.747	100,00	232.788	100,00

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2025

Berdasarkan Tabel diatas sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat pendidikan dasar atau bahkan belum mengenyam pendidikan formal. Tercatat sebanyak 32,28% penduduk belum atau tidak pernah bersekolah, dengan jumlah laki-laki (33,21%) sedikit lebih tinggi dibanding perempuan (31,35%). Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD/ sederajat berjumlah 28,79%, menjadikannya kelompok terbesar kedua. Tingkat pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) mencakup sekitar 27,14% dari populasi, menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk telah mencapai pendidikan menengah. Namun, jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi (Diploma hingga Strata III) masih sangat rendah, hanya 5,25% dari total, dengan proporsi perempuan sedikit lebih tinggi di jenjang Diploma I – Strata I. Jumlah pemegang gelar S2 dan S3 sangat kecil, masing-masing hanya 0,10% dan 0,004%. Data ini menandakan masih rendahnya capaian pendidikan tinggi di daerah tersebut dan menyoroti pentingnya upaya peningkatan akses serta mutu pendidikan, khususnya untuk pendidikan menengah dan tinggi, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.

2.1.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2024 mayoritas memeluk



agama kristen Katolik sebanyak 88,46% sedangkan agama kristen protestan sebanyak 7,42%, pemeluk agama Islam sebanyak 3,98% dan selebihnya memeluk agama lainnya. Untuk lebih jelas mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rai Manuk	-	825	17 012	-	-	-
Tasifeto Barat	690	1 118	23 802	16	-	-
Kakuluk Mesak	816	1 649	20 595	-	-	-
Nanaet Duabesi	-	6	5 040	-	-	-
Atambua	1 380	3 165	28 449	267	25	-
Atambua Barat	4 849	3 391	16 330	17	16	-
Atambua Selatan	2 519	5 612	21 309	-	9	-
Tasifeto Timur	679	702	25 456	85	-	-
Raihat	-	49	15 367	-	-	-
Lasiolat	-	32	7 417	-	-	-
Lamaknen	-	36	13 173	-	-	-
Lamaknen Selatan	-	22	8 906	-	-	-
Belu	10 933	16 607	202 855	385	50	-

Sumber: BPS Belu, 2025

2.1.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Dalam konteks pertumbuhan penduduk, Kabupaten Belu telah menyerap penduduk yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores dan pulau lainnya di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Belu melalui hubungan *family*, kerabat, teman sekampungataupun faktor pekerjaan dan bisnis-usaha perdagangan. Beberapa suku/etnis yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu di antaranya adalah: (1) Etnis Lokal yaitu: Tetun, Dawan R, Kemak, dan Bunak; (2) Etnis Flores seperti: Ende/Lio, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Lembata, Lamaholot, dan Sikka; (3) Etnis Jawa: Sunda, Jawa dan Madura; (4) Etnis Alor; (5) Etnis Bali; (6) Etnis Rote; (7) Etnis Sabu; (8) Etnis Sulawesi seperti: Makasar, Toraja, Bugis, Sopeng, Wajo, Buton dan Manado; (9) Etnis Dawan L (Atoin Meto): TTU, TTS, Kupang; (10) Etnis Helong; (11) Etnis Timor Leste; (12) Etnis Sumatra: Batak dan Minang;



(13) Etnis Ambon; (14) Etnis Tionghoa; (15) Etnis Sumba; (16) Etnis NTB; Bima dan Lombok.

Konsentrasi suku/etnis ini lebih banyak berada di pusat Kota Atambua, sehingga permukiman kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta dengan tingkat homogenitas identitas etnisnya. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya dapat memunculkan pola permukiman seagregatif dan pada gilirannya mengakibatkan polarisasi serta segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi permukiman yang demikian, pada akhirnya membawa dampak pada polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

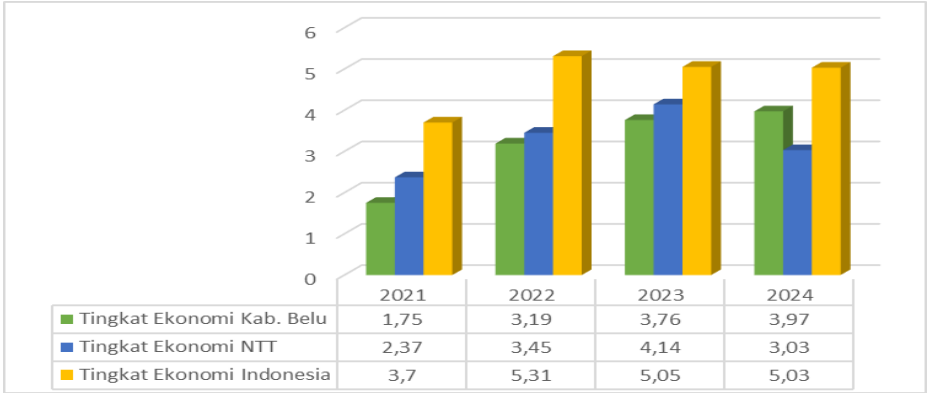
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.



Grafik 2.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan
Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 2.4 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2024 mengalami peningkatan sejak tahun 2021 yakni meningkat 2,22%. Hal ini tentu didukung dengan program-program peningkatan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang secara perlahan menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 hingga 2024. Kebijakan maupun intervensi pemerintah terhadap program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat perlu terus dilakukan. Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah melalui jaring pengaman sosial sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu akan terus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan.

Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Belu tahun 2024 adalah dari kategori A pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1.298,73 miliar rupiah atau 21,90 persen. Berikutnya adalah dari Kategori G sektor sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 915,08 miliar rupiah atau 15,43 persen dan kategori P jasa pendidikan sebesar 866,59 miliar rupiah atau 14,61 persen. Sedangkan,



capaian terendah pada tahun 2024 terdapat pada kategori E pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 1,39 miliar rupiah atau 0,02 persen. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	994,95	1.031,41	1.136,56	1.225,08	1.298,73
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	91,65	94,53	99,65	105,01	109,29
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	49,45	50,59	56,40	66,25	81,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,15	3,37	3,62	4,17	4,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewetage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,09	1,22	1,32	1,36	1,39
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	381,54	409,36	433,82	491,41	506,23
G	Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehides and Motorcycles</i>	627,42	671,64	742,62	839,55	915,08
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	211,58	219,68	244,90	275,56	323,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	16,30	16,82	18,90	21,47	24,49
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	192,47	201,50	214,51	222,80	235,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and</i>	268,74	287,89	314,22	327,15	344,34



Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Insurance Activities					
L	Real Estat/ Real Estate Activities	102,83	104,13	116,28	131,77	152,33
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	2,47	2,12	2,32	2,53	2,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	612,13	613,53	621,16	645,75	758,91
P	Jasa Pendidikan / Education	745,88	739,10	766,13	831,13	866,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	114,44	127,09	129,91	147,69	157,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	133,60	125,06	133,33	141,88	148,75
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	4.549,71	4.699,02	5.035,59	5.480,55	5.931,22

Sumber : BPS Kab.Belu, 2025

Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga di Kabupaten Belu dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dimana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan nilai tertinggi sehingga sektor ini tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah selama periode tersebut.

Tabel 2.17

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah),
Tahun 2020–2024**

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	663,59	682,27	716,84	734,32	745,21
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and	61,20	62,40	63,74	65,59	68,28



Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Quanying					
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	32,09	32,37	35,09	37,89	42,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	2,16	2,28	2,32	2,59	2,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water Supply, Sewetage, Waste Management, and Remediation Activities	0,66	0,73	0,77	0,79	0,81
F	Konstruksi / Construction	222,94	234,60	233,54	252,52	257,25
G	Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehides and Motorcycles	359,21	375,85	401,71	426,56	438,71
H	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	145,54	150,15	156,78	164,60	177,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	11,17	11,53	12,61	13,57	14,59
J	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	151,16	156,83	166,04	171,19	178,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	185,67	189,93	192,61	196,60	204,22
L	Real Estat / Real Estate Activities	80,18	81,95	86,25	90,14	93,56
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	1,58	1,35	1,41	1,46	1,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	417,38	413,24	416,12	416,91	460,96
P	Jasa Pendidikan / Education	467,26	458,10	460,72	481,66	491,96
Q	Jasa Kesehatan dan	78,03	84,32	85,85	90,10	94,04



Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>					
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	88,42	82,12	83,82	86,99	89,74
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	2.968,23	3.020,03	3.116,22	3.233,47	3.361,74

Sumber : BPS Kab.Belu, 2025

PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun 2021- 2024, yang menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa telah mengalami peningkatan..

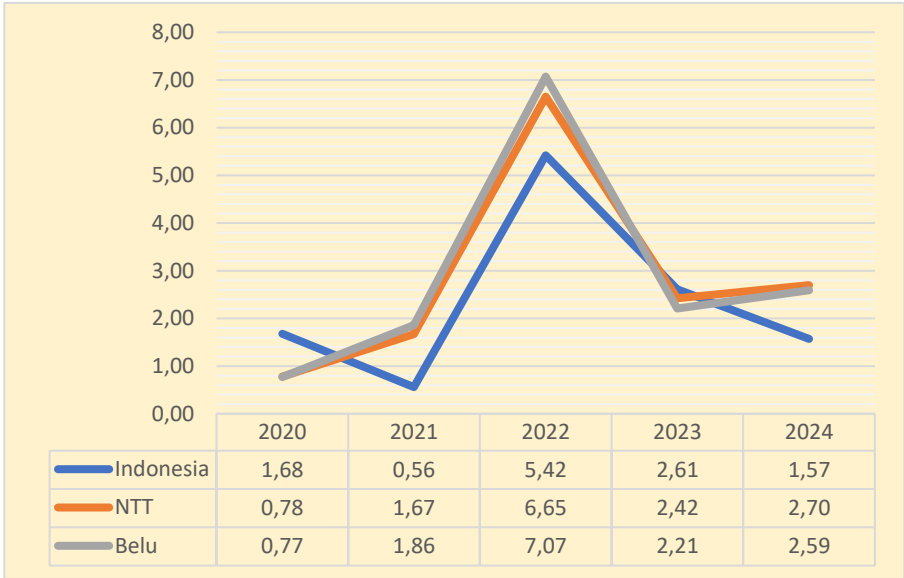
2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena tidak merupakan kota inflasi, maka untuk data inflasi Kabupaten Belu dihitung dengan menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kupang, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.5
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024; BPS, Provinsi NTT

Inflasi di Kabupaten Belu termasuk inflasi yang terkendali (berada sekitar 2-3%) Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa meningkat dengan stabil, tetapi tidak terlalu cepat sehingga tidak mengikis daya beli masyarakat secara signifikan.

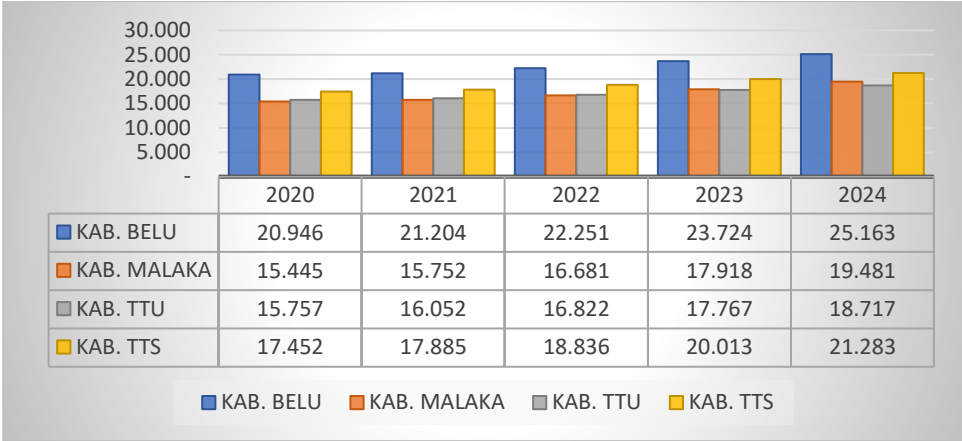
Kondisi inflasi secara nasional berada diatas Indonesia dan dibawah Provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang sedikit berbeda dengan nasional yang dipengaruhi oleh musim. Musim angin kencang yang terjadi menyebabkan kenaikan harga khususnya sektor bahan makanan dan perikanan.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dianalisis melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Indikator ini memberikan gambaran mengenai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu populasi. PDRB per kapita mencerminkan daya beli masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Dengan memahami PDRB per kapita, kita dapat mengevaluasi bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi standar hidup dan kualitas hidup masyarakat.

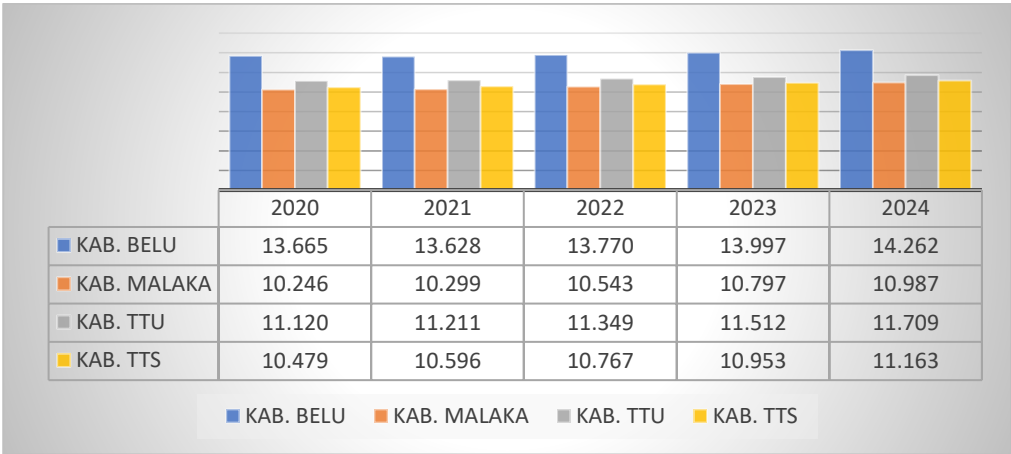


Grafik 2.6
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kab.Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

Grafik 2.7
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Kab.Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

Pada periode 2020-2024, PDRB per kapita Kabupaten Belu menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Belu tercatat sebesar 25.163 juta rupiah jika dihitung berdasarkan harga berlaku, sedangkan pada harga konstan, angkanya mencapai 14.262 juta rupiah. Meskipun ada peningkatan, Kabupaten Belu masih perlu melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

PDRB Per Kapita Kabupaten Belu untuk periode tahun 2020-2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar (Kabupaten Malaka, Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu memiliki potensi ekonomi yang lebih kuat yang dapat dilihat dari

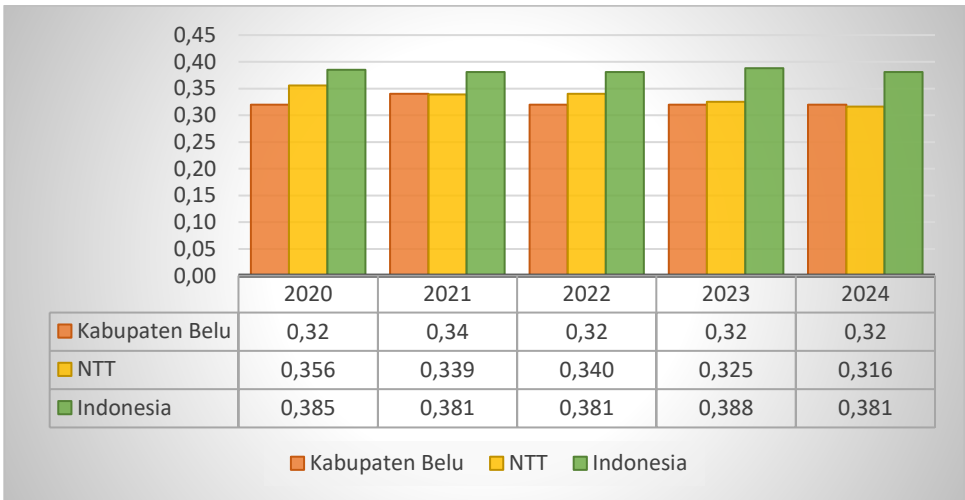


pendapatan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten sekitar sehingga masyarakat memiliki daya beli yang lebih kuat.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Belu dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dimana Kabupaten Belu masih berada dalam kategori ketimpangan sedang dan nilai ketimpangan ini sama dengan nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara nasional. Hal ini berarti pendapatan belum terdistribusi secara merata yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta ketimpangan dalam kepemilikan aset.

Grafik 2.8
Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024



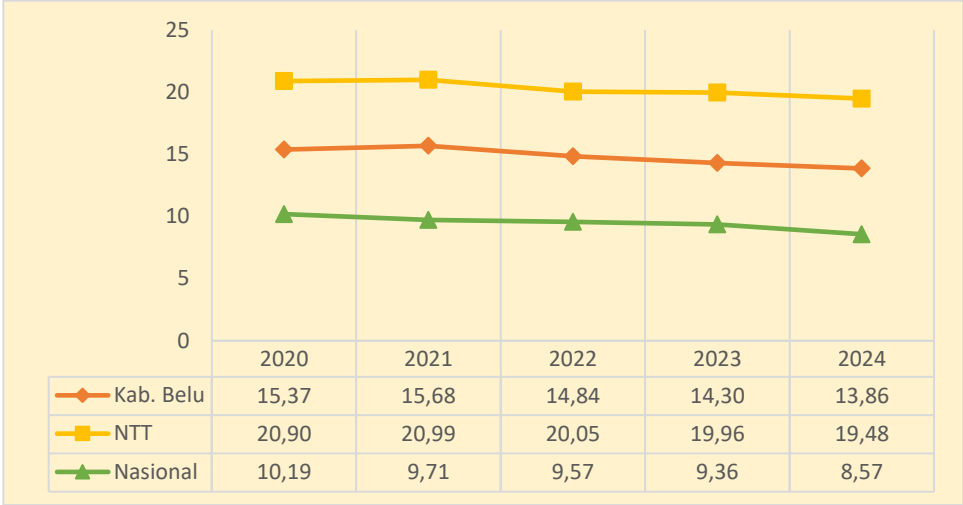
Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia Tahun 2020-2025
Belu Dalam Angka Tahun 2020 - 2025
Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita
Data BPS

2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2020-2024 mengalami penurunan menjadi 13,86% pada Tahun 2024, dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini.



Grafik 2.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2024 masih lebih rendah dari provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional secara keseluruhan. Hal ini masih harus menjadi perhatian serius yang perlu penanganan secara terintegrasi dari lintas program/kegiatan perangkat daerah.

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

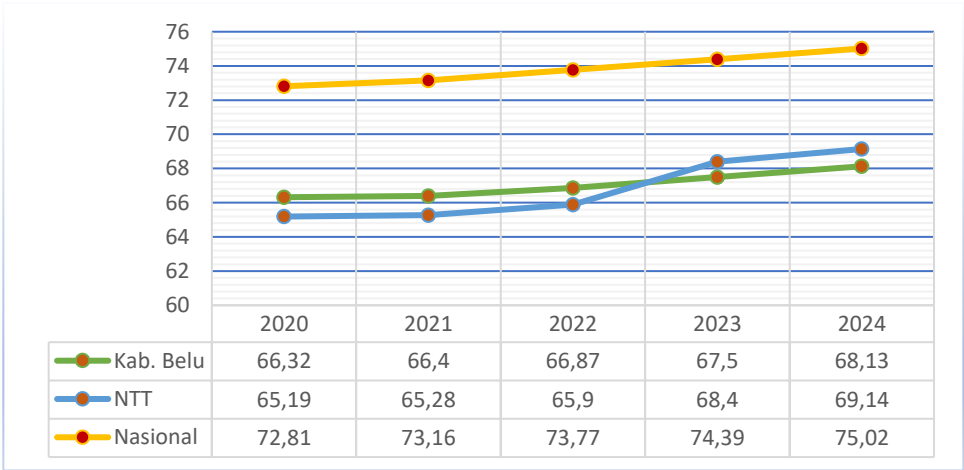
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang



digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Pada grafik 2.11 menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia Kabupaten Belu tahun 2024 mengalami peningkatan dilihat dari capaian angka di tahun 2024 yaitu sebesar 68,13% atau meningkat 0,63 point. Capaian IPM Kabupaten Belu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan masih jauh di bawah prestasi secara Nasional.

Grafik 2.10
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.2.1 Pendidikan

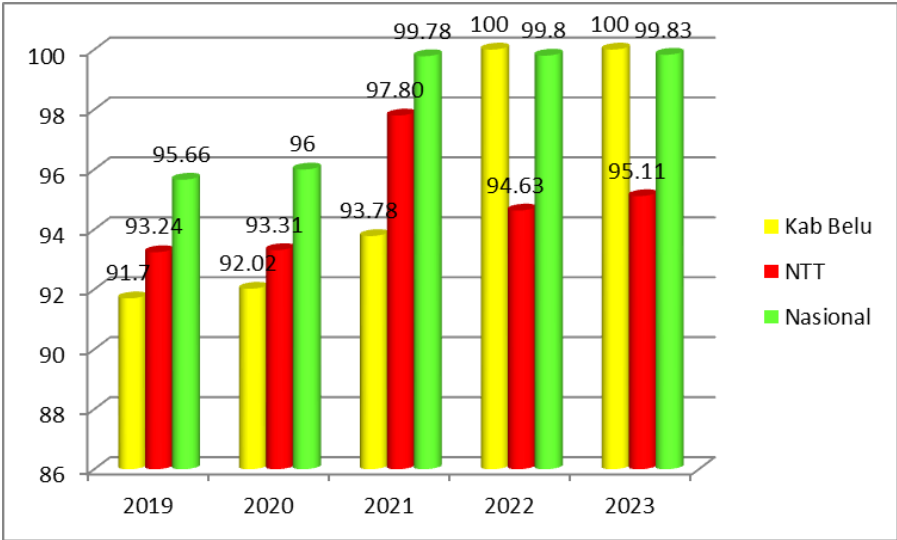
a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang didasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca, sekaligus menggambarkan



tentang kualitas penduduk secara umum. Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Belu juga selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Sebuah prestasi yang sangat baik pada dua tahun terakhir capain angkat melek huruf mencapai 100% melebihi capaian provinsi dan nasional secara umum, Namun di Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 94.40% huruf latin dan huruf lainnya sebesar 5.43%.

Grafik 2.11
Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu,
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2023, 2024



Tabel 2.18
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis
di Kabupaten Belu, Tahun 2024

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
1	2	3
Jenis Kelamin		
Laki-laki	95.14	5.59
Perempuan	93.67	5.26
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	92.39	3.91
40 Persen Menengah	94.68	6.50
20 Persen Teratas	97.02	5.86
Kabupaten Belu	94.40	5.43

Catatan: 1 Huruf lainnya yaitu selain huruf latin.

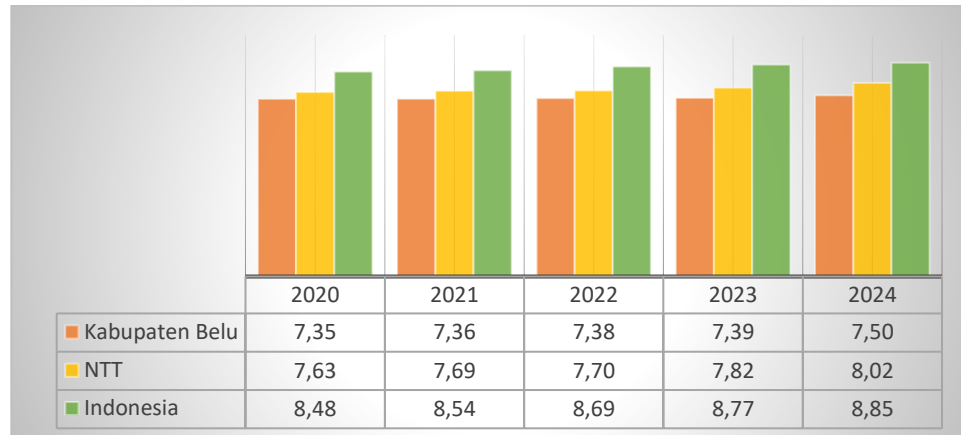
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 Tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas dijadikan lokus.



Grafik 2.12
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2021-2025.

Terlihat pada Grafik 2.12 di atas, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu menunjukkan trend yang meningkat. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu pada kisaran 7 tahun saja belum menyentuh 8 tahun sejauh ini. Masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan skala nasional. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang lebih giat untuk meningkatkan angka lama sekolah sebagaimana angka harapan lama sekolah sekitar 12 tahun.

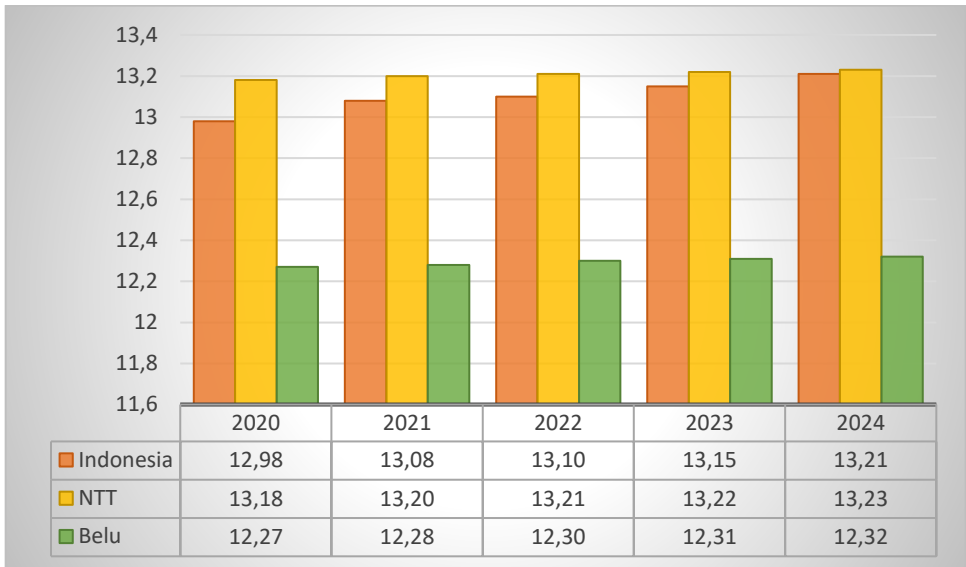
c. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 Tahun. HLS tidak mengkover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 Tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 tergambar pada Grafik 2.13 di bawah ini.



Grafik 2.13
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2021-2025.

Kondisi Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belu tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,5 poin. Namun HLS Kabupaten Belu 2020-2024 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan tertentu.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.



Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi
Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Belu, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	95,75	97,15	112,22	112,72
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	64,73	61,79	79,60	84,29
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	47,22	46,14	72,40	72,47

Sumber : BPS Belu
Kabupaten Belu Dalam Angka 2025

e. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.



Tabel 2.20
Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK+PR	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	38.540	33,21	36.598	31,35	75.138	32,28
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	7.984	6,88	7.340	6,29	15.324	6,58
3.	Tamat SD/Sederajat	33.868	29,19	33.150	28,39	67.018	28,79
4.	SLTP/Sederajat	13.018	11,22	14.871	12,74	27.889	11,98
5.	SLTA/Sederajat	17.458	15,04	17.823	15,27	35.281	15,16
6.	Diploma I/II	258	0,22	452	0,39	710	0,69
7.	Akademisi/Diploma III/S.Muda	896	0,77	1.703	1,46	2.599	1,12
8.	Diploma IV/Strata I	3.863	3,33	4.716	4,04	8.579	3,69
9.	Strata II	149	0,13	91	0,08	240	0,10
10.	Strata III	7	0,01	3	0,00	10	0,004
	JUMLAH	116.041	100	116.747	100,00	232.788	100,00

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belu, 2024

Berdasarkan Tabel 2.20 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah pada tingkat tidak/belum sekolah dengan jumlah persentase sebesar 32,28%. Sedangkan persentase terendah adalah strata III sebesar 0,004%.

2.1.2.2.2 Kesehatan

Sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator *outcome* kesehatan aspek dari kesejahteraan sosial dapat diukur antara lain melalui angka usia harapan hidup dan persentase Balita Gizi Buruk.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belu menunjukkan peningkatan konsisten selama periode tahun 2020-2024, yang mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data, AHH Kabupaten Belu pada tahun 2020 tercatat sebesar 64,61 tahun, kemudian meningkat menjadi 64,89 tahun pada 2021, berlanjut ke 65,28 tahun pada 2022, 65,68 tahun pada 2023, dan mencapai 68,13 tahun pada 2024. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.



Tabel 2.21

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	UHH	64,61	64,89	65,28	65,63	68,13

Sumber: BPS NTT, 2025, *data sementara

Peningkatan UHH Kabupaten Belu dari 64,61 tahun pada tahun 2020 menjadi 68,13 tahun pada tahun 2024 merepresentasikan penambahan sebesar 3,52 tahun dalam kurun waktu lima tahun. Capaian ini sangat signifikan mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Belu yang memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan kesehatan di wilayah perbatasan Negara. Perbaikan UHH merupakan indikator komprehensif yang merefleksikan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi.

Penyebab paling umum gizi buruk pada balita adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Bila orang tua tidak mengetahui jenis dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan anak, asupan nutrisi yang diberikan bisa tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga ia menjadi kurang gizi.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Belu, selain faktor di atas, juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.22 berikut ini.

Tabel 2.22
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Balita Gizi Buruk	12.20 %	1.65 %	1.22 %	1.28 %	1.17 %

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2024



Tabel di atas menggambarkan capaian persentase balita yang mengalami gizi buruk dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Kondisi Tahun 2022 untuk persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu dari 1.65% menjadi 1.22% namun pada tahun 2023 naik sedikit menjadi 1.28% oleh karena ada perubahan standar penentuan balita gizi buruk.

c. Prevalensi *Stunting*

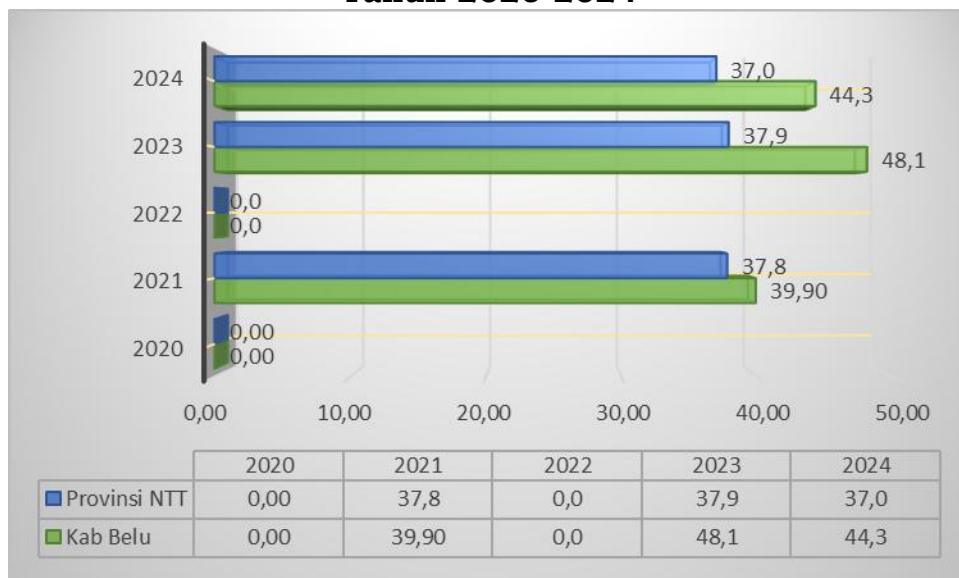
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor masih tingginya kasus *stunting* diakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil, bayi, balita dan juga remaja putri (anemia), kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Hasil Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu bersama Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan UGM (2023) juga menunjukkan faktor determinan masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Belu disebabkan oleh asupan gizi yang kurang mencukupi bagi balita, terbatasnya ketersediaan pangan sumber protein, masih tingginya kejadian penyakit infeksi pada balita, bias pengukuran tinggi badan dan berat badan dan koordinasi serta komunikasi yang terbatas (kurang aktif) pada level kecamatan dan desa.

Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 dapat dilihat Grafik 2.14 di bawah ini.



Grafik 2.14
Prevalensi Stunting Kabupaten Belu dan Provinsi NTT
Tahun 2020-2024



Sumber: SSGI, 2020- 2024

Grafik di atas menggambarkan capaian prevalensi *Stunting* Kabupaten Belu menurut data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia). Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Belu untuk tahun 2020 dan tahun 2022 tidak dilakukan survey, sedangkan pada tahun 2021 berada di angka 39,90%, mengalami peningkatan menjadi 44,3% di tahun 2024, dimana angka prevalensi stunting Kabupaten Belu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi stunting di Provinsi NTT secara keseluruhan. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Kabupaten Belu secara umum meliputi :

1. Faktor ekonomi

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah tersebut mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada ibu, juga menjadi faktor risiko karena kurangnya pengetahuan tentang gizi yang tepat.

3. Faktor kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, termasuk sanitasi yang buruk juga berperan dalam tingginya angka stunting.



4. Faktor lingkungan.

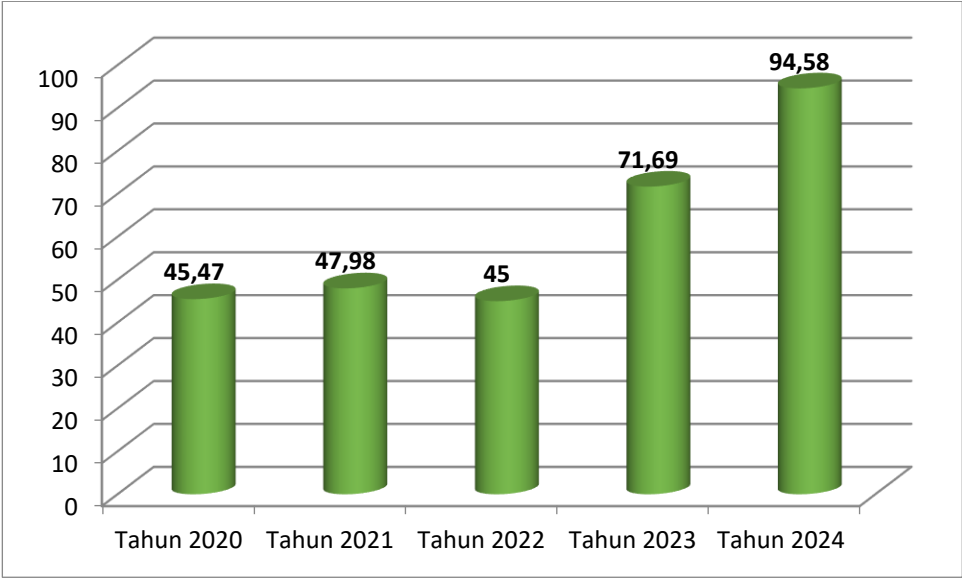
Kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi pada anak-anak, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan.

Upaya penanganan stunting di Kabupaten Belu terus dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk penyediaan makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil serta edukasi gizi kepada masyarakat.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Rasio penduduk yang bekerja dihitung berdasarkan penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja di kali dengan 100% (tertera pada Grafik 2.15).

Grafik 2.15
Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

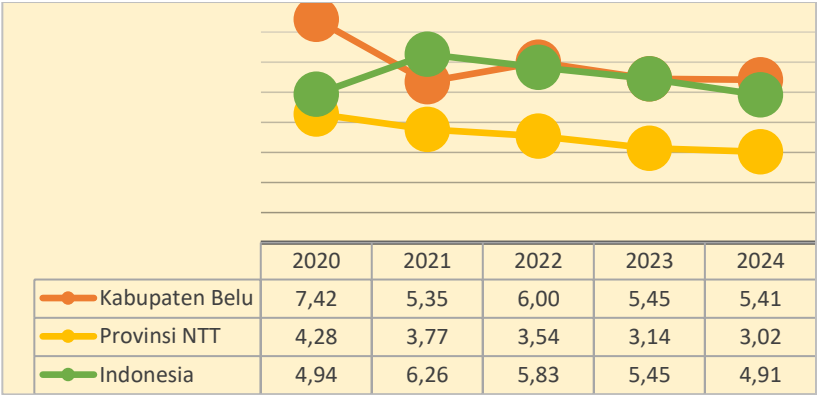


Sumber : BPS Belu 2021-2025,
Hasil olahan BP4D Kabupaten Belu



Grafik di atas menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja pada Tahun 2020-2024 mengalami tren peningkatan. Penduduk yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 98.58% meningkat 26,89% dari kondisi tahun 2023 hanya 71,69% saja. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan seiring dengan ketersediaan lapangan pasca pandemi COVID-19.

Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2025

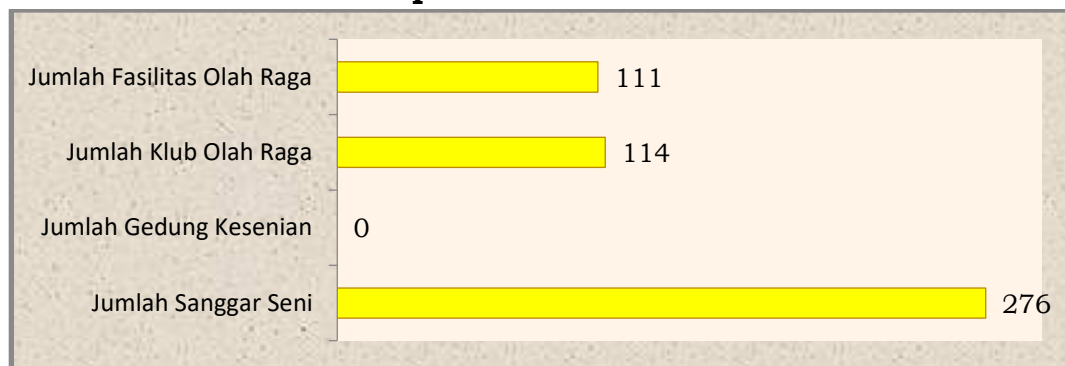
Berdasarkan grafik 2.16 menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belu mengalami penurunan sebesar 2.01%. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020 hingga 2024) namun TPT Kabupaten Belu lebih tinggi daripada Provinsi NTT dan Indonesia. TPT yang tinggi dapat berdampak pada permasalahan kemiskinan, kriminalitas dan keadaan ekonomi.

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab serta berdaya saing menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.



Grafik 2.17
Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian
di Kabupaten Belu Tahun 2023



Sumber: SIPD Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga dan kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas, sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibenahi secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung olahraga dan gedung kesenian maupun pembinaan terhadap klub olahraga dan sanggar/grup kesenian.

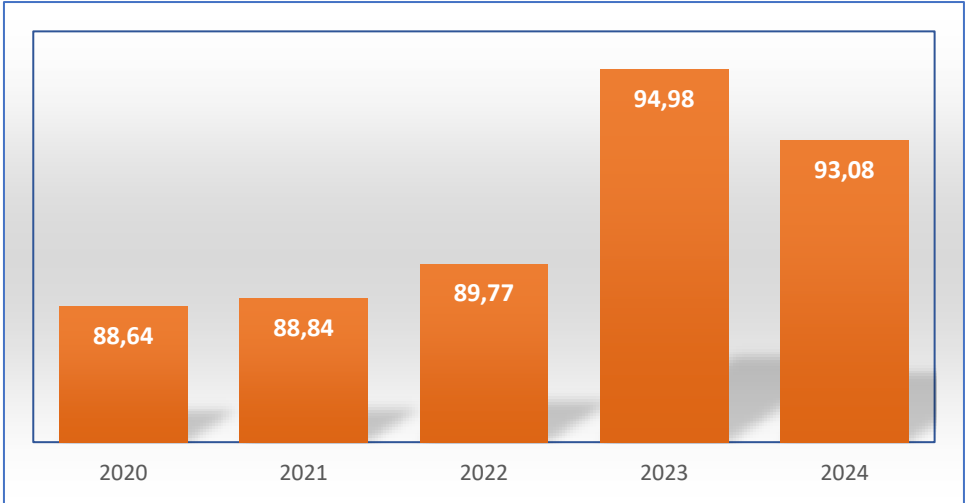
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi dari pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap SKPD pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada grafik berikut.



Grafik 2.18
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024



Sumber: SIPD,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
Kabupaten Belu Tahun 2025

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 mempunyai tren fluktuatif, dengan capaian total konversi layanan Tahun 2024 sebesar 93,08 (mutu layanan A/sangat baik) menurun 1,9 poin dari tahun 2023.

Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah baik. Secara detail penilaian indeks kepuasan masyarakat Tahun 2023 berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian
Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Unsur Layanan	Penilaian	Kinerja Unsur Penilaian
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	A	Sangat baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	A	Sangat baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	A	Sangat baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	A	Sangat baik
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	A	Sangat baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelauanan	A	Sangat baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	A	Sangat baik
8	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	A	Sangat baik
9	Penangan dan pengaduan pengguna layanan	A	Sangat baik

Sumber: SIPD, DPMPTSP Tahun 2024

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang



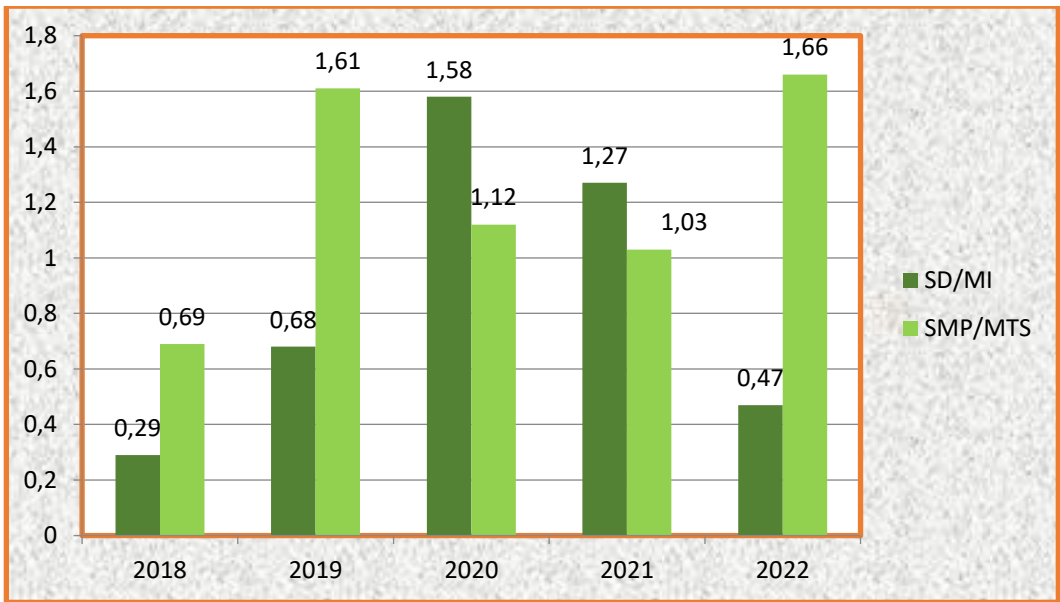
menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dan tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.19
Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs kecuali di Tahun 2020. Angka putus sekolah berfluktuasi, Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2018 sebesar 0,29 dan SMP/MTs 0,69. Tahun 2020 meningkat menjadi 1,58 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 1,12 untuk SMP/MTs. Tahun 2022 mengalami perubahan untuk SD/MI di tahun 2021 sebesar 1,27 menjadi 0,47 di Tahun 2022, sedangkan untuk SMP/MI pada angka 1,03 di Tahun 2021 mengalami



peningkatan menjadi 1,66 di Tahun 2022.

Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di Kabupaten Belu. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan.

Tabel 2.24
Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2018-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan SD	98,55	99,24	99,14	100	93,34
2	Angka Kelulusan SMP	99,17	99,65	99,37	98,69	98,80
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,2	106,5	99	99	NA
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,3	108,6	99	99	NA
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV	2346	2649	1423	2935	NA

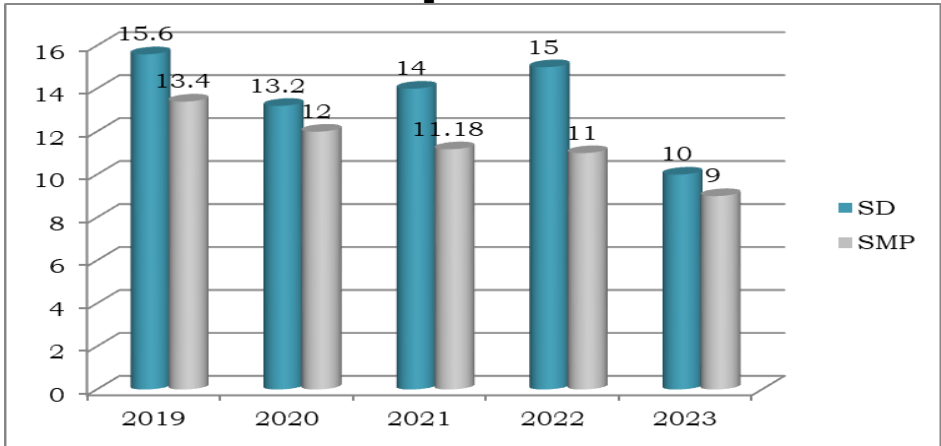
Sumber: SIPD,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah guru terhadap siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.20 menyajikan rasio guru terhadap murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk 2 jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.



Grafik 2.20
Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

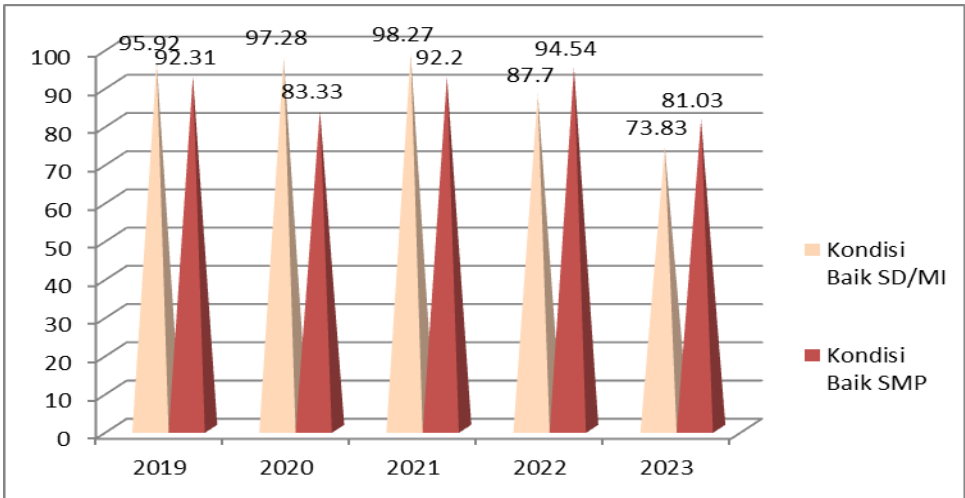


Sumber: Data Olahan BP4D 2024

3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Belu sebagai berikut:

Grafik 2.21
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2019-2023



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2024



Di Tahun 2022 dari hasil analisis terhadap 147 SD/MI terdapat 141 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 35 ruang kelas kondisi rusak berat. Ruang guru 14 rusak ringan dan 2 rusak berat. Namun pada tahun 2023 kondisi sekolah SD menurun menjadi 73,83% sedangkan SMP 81,03%.

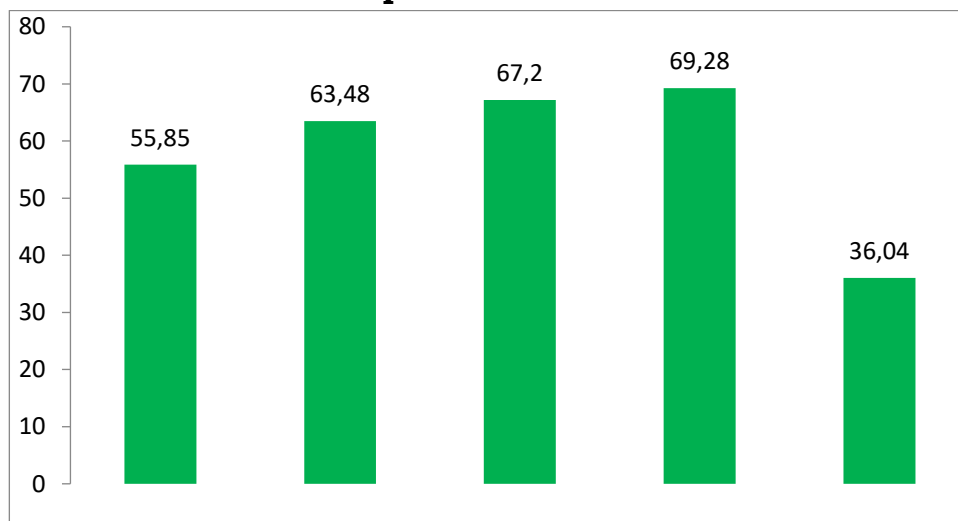
Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain-lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisi/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.

Di Tahun 2022 dari hasil analisis terhadap 54 SMP/MTS terdapat 31 ruang kelas dalam rusak ringan dan 10 rusak berat. Ruang guru 2 rusak ringan dan 2 rusak berat. Bangunan KM/WC Guru dan murid 1 rusak berat dan 5 rusak ringan.

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa APK PAUD Kabupaten Belu masih fluktuatif (Lihat Grafik 2.22).

Grafik 2.22
APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD,Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023



Pada Grafik diatas menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 69,28% Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD. Pada tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan dimana tinggal 36,04 % anak usia dini di Kabupaten Belu yang belum mengikuti pendidikan usia dini.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

a. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Gambaran kasus kematian ibu di Kabupaten Belu dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kematian Ibu	12	7	6	7	7

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2020 dan 2024

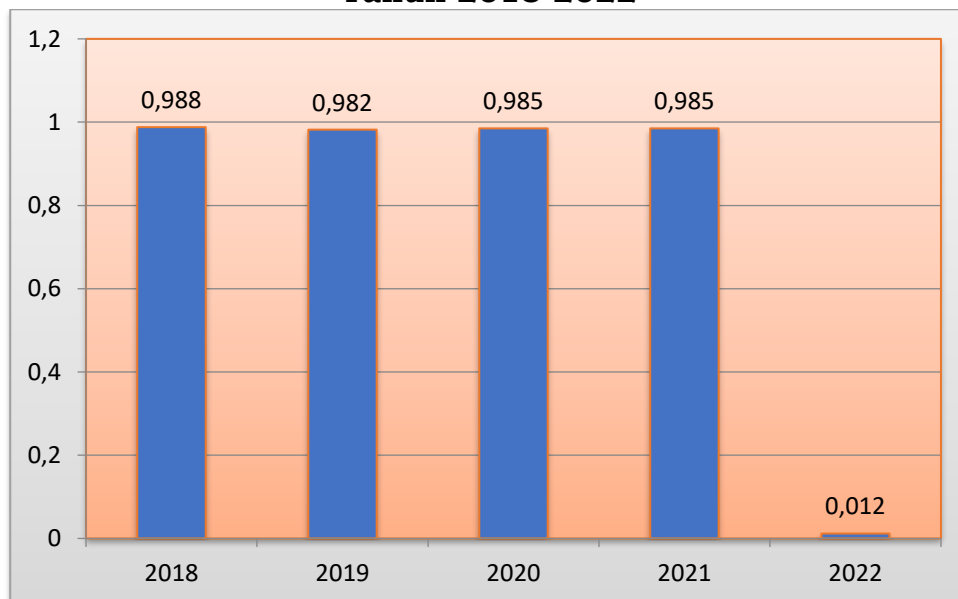


Tabel diatas menunjukkan trend kematian ibu di Kabupaten Belu, dalam 5 tahun terakhir kasus kematian ibu mengalami penurunan, dimana tahun 2020 sebanyak 12 kasus menjadi 7 kasus pada tahun 2024.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu hamil risiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 Tahun) dan terlalu tua (lebih dari 35 Tahun). Pada Tahun 2021 angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan, ini menunjukkan indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan.

Grafik 2.23
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

c. Angka Kematian Bayi

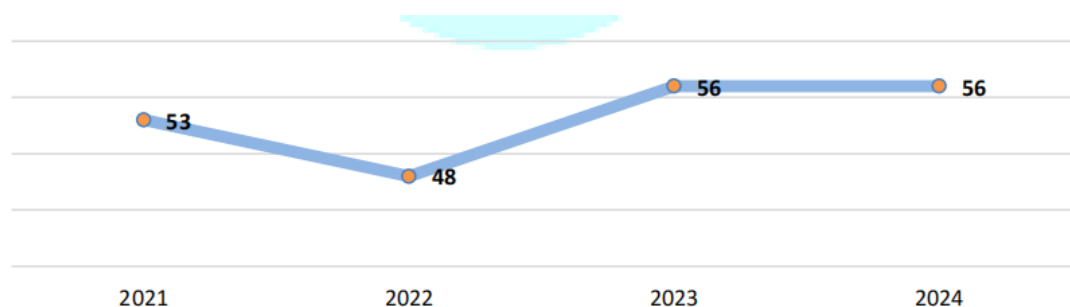
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor



yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain, karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan berdasarkan trend kematian bayi pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2021 - 2024 terjadi secara fluktuatif. Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dalam Rencana Strategis memberi target kematian bayi dalam indikator RPJMD tidak ada target kematian bayi (Nol Kematian Bayi). Dalam tahun ini terjadi peningkatan kasus kematian bayi. Trend kasus kematian bayi selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.11
Trend Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Belu
Tahun 2021-2024



Sumber data: Bidang Kesmas Dinkes Kabupaten Belu Tahun 2024

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa jumlah kematian bayi di Kabupaten Belu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 meningkat menjadi 56. Tingginya kasus kematian bayi menjadi alasan pentingnya dibuat target RPJMD Tahun 2021 yaitu 0 (Nol) kematian bayi. Untuk indikator kematian neonatal tidak ditargetkan, sehingga angka yang ada ditahun sebelumnya hanya sebagai acuan untuk mengukur kinerja



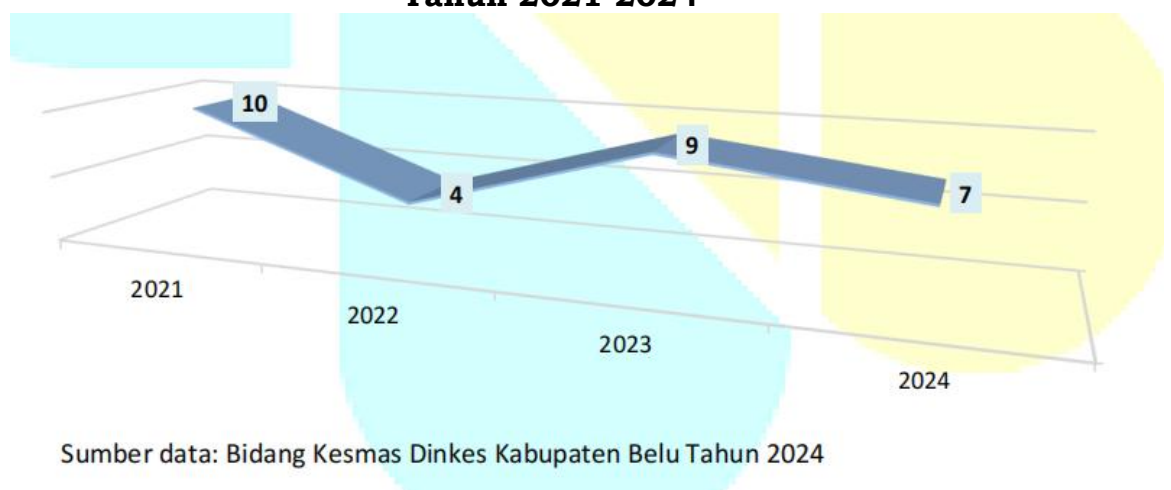
pelayanan kesehatan khususnya program peningkatan keselamatan bayi baru lahir (neonatal) di Kabupaten Belu dapat dikendalikan.

c. Angka Kematian Balita

Kematian balita adalah kejadian kematian pada anak yang berusia antara 12-59 bulan. Kematian balita terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak termasuk pemeliharaan kesehatan.

Penyebab kematian balita yang sering ditemukan antara lain; ISPA, diare, kurang gizi, penyakit menular, sanitasi yang tidak sehat, dll. Situasi kematian balita tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.12
Trend Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Belu
Tahun 2021-2024



Pada gambar di atas menunjukkan terjadinya penurunan kasus kematian balita di tahun 2024 yaitu sebanyak 7 kasus jika dibandingkan jumlah kasus di tahun 2023 sebanyak 9 kasus, bila disandingkan dengan target rencana strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, angka di atas masih melampaui target yang ditetapkan. Kematian anak usia balita erat kaitannya dengan pola asuh orang tua, asupan nutrisi dan kondisi kesehatan anak itu sendiri. Pengetahuan ibu dan keluarga yang kurang tentang pola asuh anak, nutrisi seimbang serta manfaat pemantauan dan pemeliharaan kesehatan berpengaruh terhadap penyebab kematian balita.

d. HIV dan AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immuno Deficiency Virus* yang menyerang sistem



kekebalantubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderitaterlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 (tiga) metode,yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing* (VCT), *serosurvey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kabupaten Belu dengan kondisi penemuan kasus HIV positif dari Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kasus HIV/AIDS	46	48	52	59

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2025

Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Belu pada tahun 2021 sebanyak 46 kasus kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 48 kasus dan di tahun 2023 meningkat menjadi 52 kasus sedangkan di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 59 kasus. Peningkatan penemuan kasus infeksi baru HIV-AIDS disebabkan karena partisipasi masyarakat terutama kelompok berisiko melakukan pemeriksaan atau skrining HIV-AIDS semakin meningkat melalui pelayanan mobile klinik pada beberapa titik lokasi/hotspot seperti lokalisasi, Restoran dan Café, Hotel, Lembaga Pemasyarakatan dan Salon. Berdasarkan jenis kelamin kasus HIV Positif menurut kelompok umur, kasus HIV paling banyak ditemukan pada kelompok umur produktif (25-49tahun) yaitu sebanyak 38 kasus (64%),

e. Tuberculosis

Angka penemuan kasus TBC di Kabupaten Belu terus meningkat setiap tahunnya dimana jumlah kasus yang ditemukan di tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar tabel berikut.



Tabel 2.27
Angka Penemuan (CNR) Semua Kasus TB di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Angka Penemuan (CNR) Semua Kasus TB	Cakupan Pengobatan Semua Kasus Tuberkolosis	Persentase (%)
1.	2020	398	336	84,42
2.	2021	336	335	99,7
3.	2022	502	178	35,45
4.	2023	556	504	90,65
5.	2024	551	534	94,7

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2020 dan 2024

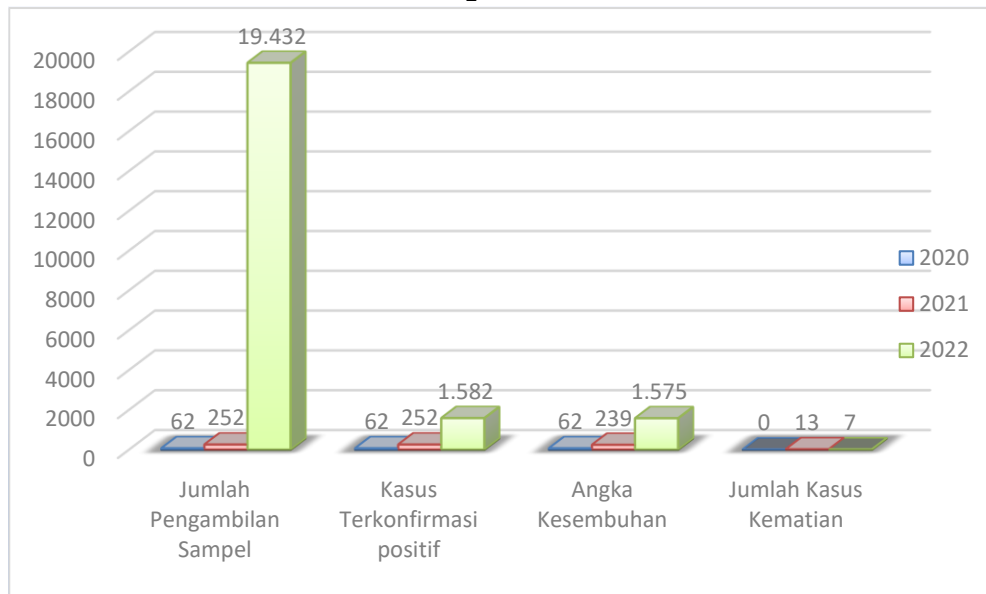
Jumlah semua kasus Tuberculosis di Kabupaten Belu Tahun 2024 sebesar 551 kasus dengan jumlah kasus Tuberculosis yang ditemukan dan diobati sebanyak 534 kasus. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak Angka keberhasilan (*succes rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 94,7%.

f. COVID-19

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Berdasarkan data surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2020 dan 2022 gambaran situasi kasus COVID-19 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.24
Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022

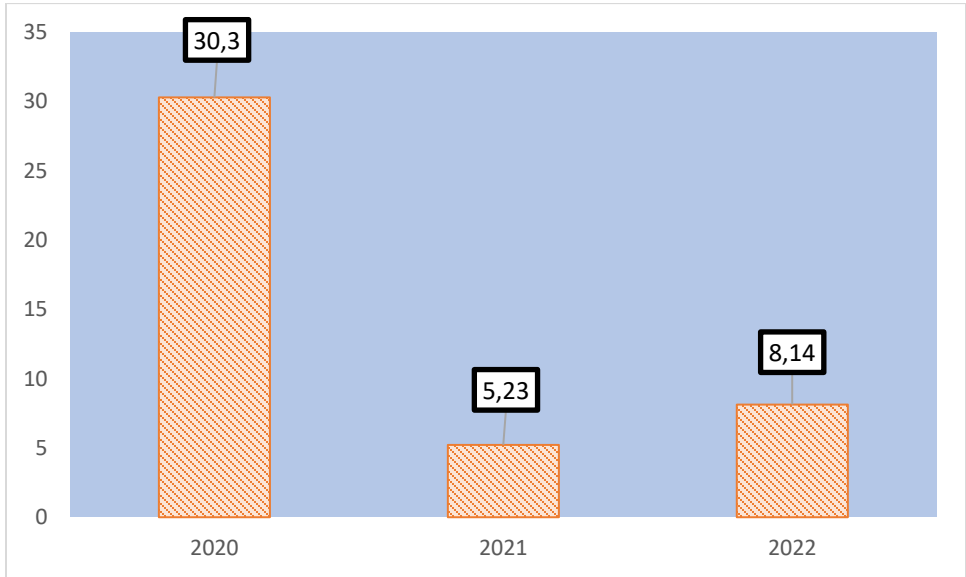


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 252 pada tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 1.582 kasus di tahun 2022. Kasus kematian mengalami penurunan dari 13 menjadi 7 kasus di tahun 2022. Persentase kesembuhan mengalami peningkatan dari 94,84% menjadi 99,57%. Rata-rata Angka *Positive Rate* tahun 2021 sampai 2022 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.25 di bawah ini.



Grafik 2.25
Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Secara umum kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk itu. Tabel 2.28 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Belu.

Tabel 2.28
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu
Tahun 2022

No	Uraian	Skor
1	Persentase warga negara usia 15–59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	20,06
2	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	74,29
3	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	12,32
4	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	56,83
5	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100
6	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	96,11
7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	100
8	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	100
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	100
10	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar (%)	17,56



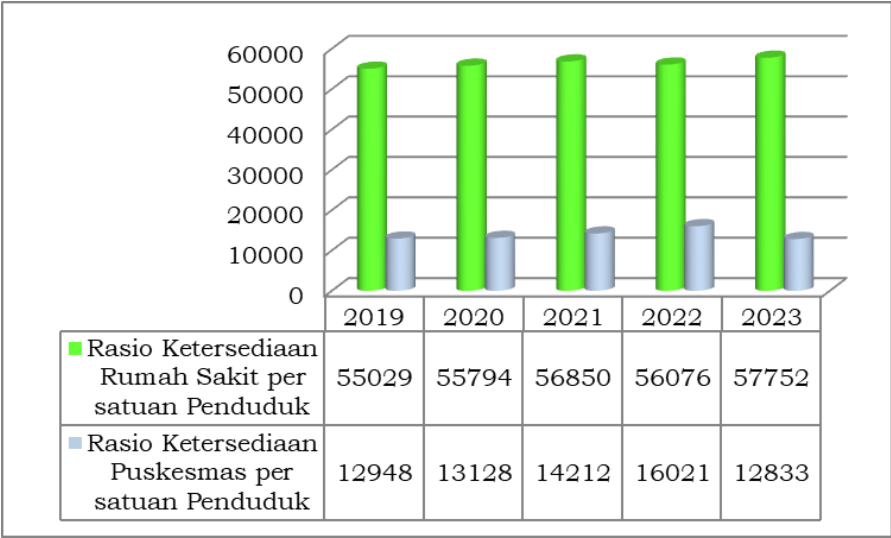
No	Uraian	Skor
11	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar (%)	75,82
12	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar (%)	22,22
13	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	32,78
4	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	86,14
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	66,54
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,87
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	80,49
18	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	65,24
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belu Tahun 2022 telah dilakukan cukup baik. Dari 19 indikator hanya terdapat 5 indikator yang belum memenuhi standar. Lebih lanjut, dari aspek ketersediaan faskes seperti: Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Grafik 2.35 menggambarkan Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan poskesdes terhadap jumlah penduduk Tahun 2018-2022 yang menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.



Grafik 2.26
Rasio Ketersediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Data Olahan BP4D 2024

Grafik 2.26 menggambarkan perkembangan rasio ketersediaan rumah sakit dan puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2023. Secara umum rasio ketersediaan kedua fasilitas kesehatan tersebut selalu fluktuatif setiap tahunnya. Selalu pada kondisi ideal ketersediaannya yang mana 1 rumah sakit harus melayani 100.000 jiwa dan puskesmas melayani 30.000 jiwa. Khusus untuk rumah sakit, sampai dengan Tahun 2023 rasio ketersediaan per jumlah penduduk sebesar 1:57752. Sedangkan rasio ketersediaan puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1:12833.

Indikator rasio tenaga medis (dokter) per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berikut standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.



Tabel 2.29
Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Belu

No	Jenis Tenaga Kesehatan	2021	2022	2023
1	Dokter/ Dokter Layanan Primer	28	39	39
2	Dokter Gigi	10		
3	Perawat	229	179	179
4	Bidan	191	183	183
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	14	19
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	32	22	22
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	27		
8	Tenaga Gizi	41	46	46
9	Tenaga Kefarmasian	69	33	33
JUMLAH		657	516	521

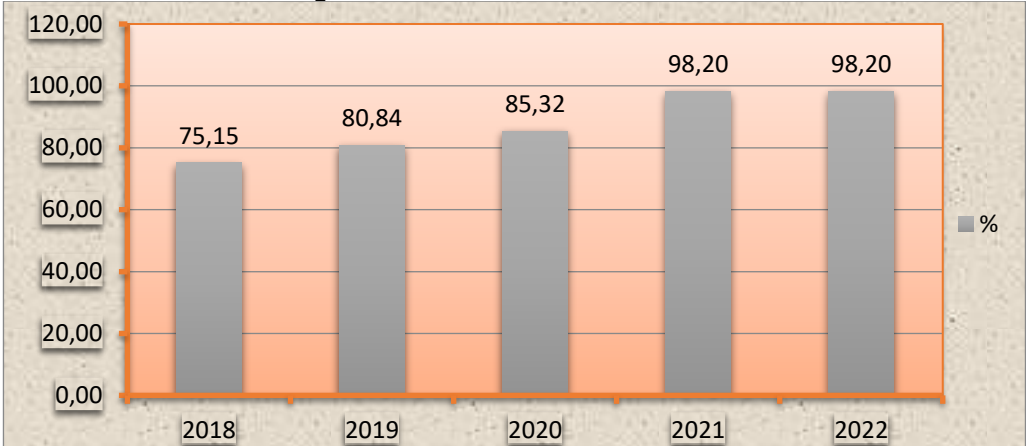
Sumber: BPS Belu 2002-2024

Tabel 2.29 menyajikan perkembangan ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Belu Tahun 2021-2023. Sebagaimana standar rasio dokter terhadap satuan penduduk 1:2200 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran Hak akan Kesehatan rasio ketersediaan, jumlah dokter yang tersedia di Kabupaten Belu masih rendah sebanyak 39 orang dengan rasio 1:5923 pada tahun 2023. Standar rasio perawat yang seharusnya 1:560, ketersediaan jumlah perawat Kabupaten Belu yang melayani masyarakat masih sangat rendah dengan rasio 1:1291. Rasio ketersediaan bidan kabupaten belu juga masih sangat rendah 1:1262 saja yang masih jauh dari standar ideal 1:850. Kondisi demikian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan masih belum memadai untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat kabupaten Belu.

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan.



Grafik 2.27
Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

a. Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan

Jalan di kabupaten Belu terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Pada tahun 2024 Panjang jalan di Kabupaten Belu sebesar 483,665 km dengan jika berdasarkan tipe permukaan jalan 355,275 Km berupa aspal dan 128,39 Km berupa kerikill. jika berdasarkan kondisi jalan 293,542 km kondisi baik, 42,25 km kondisi sedang, 25,854 km kondisi rusak, dan 122,019 rusak berat

Tabel 2.30
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Belu Tahun 2022-2024

No	Status Jalan	2022	2023	2024
1	Jalan Kabupaten (Km)			
	1. Kondisi Baik	293,542	293,542	293,542
	2. Kondisi Sedang	42,25	42,25	42,25
	3. Kondisi Rusak Ringan	25,854	25,854	25,854
	4. Kondisi Rusak Berat	122,019	122,019	122,019

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Kondisi panjang bentangan jembatan di Kabupaten Belu ditahun 2023 adalah 1.060,8 m sedangkan untuk jembatan pada jalan desa



mengalami sebesar 103,9 m masih sama dengan kondisi tahun 2022. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Status Jalan	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Kabupaten	1.054	1.060,8	1.060,8	1.060,8	1.060,8
2	Jalan Desa (m)	88	103,9	103,9	103,9	103,9
Jumlah		1.142	1.164,7	1.164,7	1.164,7	1.164,7

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

b. Pembangunan Irigasi

Upaya pemerintah Kabupaten Belu dalam menjamin pasokan kebutuhan air untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder belum dapat terlayani secara optimal. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder ini tersebar dalam 24 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Belu dengan luas fungsional daerah irigasi sebesar 886,95 Ha dari total Luas Baku Daerah Irigasi Kabupaten Belu sebesar 1.243,18 Ha. Sedangkan Daerah irigasi di Kabupaten Belu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 4.815 Ha yang tersebar pada daerah irigasi Fatubesi = 1.650 Ha; Obor = 1.815 Ha dan Maubusa = 1.350 Ha serta daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdapat di Haekesak sebesar 4.400 Ha.



Tabel 2.32
Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan
Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN (Ha)	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
1.	Buitasik	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	83.09	58.22
2.	Halisikun	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	127.06	79.54
3.	Derok	permukaan	Raihat	Maumutin	60.44	57.36
4.	Halilulik	permukaan	Tasifeto Barat	Naitimu	71.77	64.61
5.	Nubelu	permukaan	tasifeto timur	Bauho-Sarabau	119.51	85.91
6.	Raimetan	permukaan	Raihat	Maumutin	115.99	115.99
7.	Seopasar	permukaan	Raimanuk	Leontolu	11.78	3.28
8.	Taeksoruk	permukaan	Tasifeto Timur	Fatubaa	150.26	132.19
9.	Teun	permukaan	Raimanuk	Teun	48.32	24.92
10.	Webuni	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	13.57	12.30
11.	Kimbana	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	11.30	11.92
12.	Lalosuk	permukaan	Tasifeto Timur	Manleten	47.81	9.62
13.	Wekari	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	10.09	5.82
14.	Hasmetan	permukaan	Tasifeto Timur	Takirin	23.98	23.98
15.	Lahurus	permukaan	Lasiolat	Fatulotu	13.70	13.70
16.	Dualasi Raiulun	permukaan	Lasiolat	Dualasi	4.66	1.93
17.	Leowalu	permukaan	Lamaknen	Leowalu	36.77	32.02
18.	Buburlaran	permukaan	Tasifeto Barat	Lawalutolus	56.60	36.04
19.	Raiikun	permukaan	Tasifeto Timur	Tialai	63.37	30.54
20.	Halimodok	permukaan	Tasifeto Timur	Halimodok	29.06	29.06
21.	Lelowai	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	26.69	10.76
22.	Tulatudik	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	34.51	34.51
23.	Lookeu	permukaan	Tasifeto Barat	Lookeu	41.43	9.76
24	Ekin	permukaan	Lamaknen Selatan	Ekin	41.43	3.01
UAS TOTAL					1,243.18	886.95

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

Panjang saluran irigasi pada Tahun 2022 mengalami perubahan berdasarkan kondisinya, yaitu untuk Saluran Teknis dengan kondisi baik sepanjang 8.268,82 m dan Saluran Non Teknis dengan kondisi baik sepanjang 6.572,04 m.



Tabel 2.33
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi
di Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Jenis Saluran dan Kondisi	Satuan	Volume	
			2021	2022
1	Panjang Saluran Non Teknis			
	Kondisi Baik	Meter	3,022.52	2,770.72
	Kondisi Sedang	Meter	6,193.88	3,801.32
	Kondisi Rusak Ringan	Meter	5,034.41	7,678.77
	Kondisi Rusak Berat	Meter	3,771.56	3,771.56
Total Panjang		Meter	18,022.37	18,022.37
2	Panjang Saluran Teknis			
	Kondisi Baik	Meter	2,758.93	2,758.93
	Kondisi Sedang	Meter	5,788.89	5,509.89
	Kondisi Rusak Ringan	Meter	4,467.13	4,467.13
	Kondisi Rusak Berat	Meter	841.72	337.72
Total Panjang		Meter	13,856.67	13,856.67
Total Panjang Saluran Irigasi		Meter	31,879.04	31,879.04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2023

b. Pembangunan Drainase

Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2016, luas daerah genangan air di Kabupaten Belu sebesar 9,58 Ha. Hingga Tahun 2022, daerah genangan air yang sudah ditangani sebesar 4,78 Ha sedangkan yang belum ditangani sebesar 4, 8 Ha. Adapun daerah genangan air di wilayah kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
1	Jl. Pemuda (Belakang PLTD Atambua - RS Sito Husada) Kelurahan Tulamalae	1,58	Sudah ditangani 1,58 Ha pada tahun 2017
2	Simpang Jl Mente - Jembatan Mota Buik (SDK Mota Buik) Kelurahan Fatukbot	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2020
3	Jl. TN Bakel (Hutan Jati Wemata - SDI Nukfuak) Kelurahan Fatukbot	1,70	Belum ditangani
4	RT 3 (Simpang Jl. Hot Gol- Jl. Liku Baunleo Walu) Kelurahan Fatubenao	1,50	Belum ditangani



No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
5	Cabang Haliwen-Ursulin (Jalan St. Angela)Kelurahan Manumutin (Jln. Sutami – St. Angela)	1,60	Belum ditangani
6	Jl. Laksda adisucipto (depan kantor bencana s/d SDLB) Kelurahan Manumutin	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2021
	Total	9,58	Sudah ditangani: 49,90% Belum ditangani : 50,10%

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2022

Untuk menangani daerah genangan air, dilakukan dengan pembangunan drainase. Pembangunan drainase selama periode 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.35.



Tabel 2.35
Drainase Terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2023

No	Tahun	Nama Pekerjaan	Volume (m)
1	2016	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	190
2	2016	Pembangunan drainase lingkungan Wekatimun	170
TOTAL PANJANG			360
3	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tulamalae	328
4	2017	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	154
5	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tenukiik	270
6	2017	Pembangunan drainase lingkungan Umanen	371
7	2017	Pembangunan drainase lingkungan Bardao	305
TOTAL PANJANG			1.428
8	2018	Pembangunan drainase /gorong-gorong Fatubenao RT. 26	200
9	2018	Pembangunan drainase /gorong-gorong Fatukbot (belakang Klinik Abdi Kasih)	75
TOTAL PANJANG			275
10	2019	Pembangunan drainase /gorong-gorong Manumutin	306
11	2019	Pembangunan drainase /gorong-gorong Tulamalae, Tenukiik, Lolowa	895
12	2019	Pengadaan bangunan pembuang saluran drainase Dusun Motamauk, Desa Mandeu	850
TOTAL PANJANG			2.051
13	2019	Drainase /gorong-gorong Beirafu (cor beton)	250
14	2019	Drainase /gorong-gorong Beirafu (belakang puskot lama)precast	500
15	2019	Drainase /gorong-gorong Fatubenao	400
16	2019	Drainase /gorong-gorong Tenukiik	895
TOTAL PANJANG			2.045
17	2020	Tidak Ada Pekerjaan	-
TOTAL PANJANG			-
18	2021	Drainase /gorong-gorong di Kelurahan Manumutin	1107.5
TOTAL PANJANG			-
19	2022	Tidak Ada Pekerjaan	-
TOTAL PANJANG			-
20	2023	Tidak Ada Pekerjaan	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Terkait dengan pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang lancar. Di beberapa kawasan permukiman belum dilengkapi dengan jaringan drainase, sehingga sering kali terjadi banjir dan genangan air pada saat musim hujan. Berdasarkan Rencana Induk Drainase Kota Atambua Tahun 2020, total luas daerah genangan berubah menjadi 31,251 Ha yang meliputi 42



daerah genangan. Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak ada pembangunan drainase untuk mengurangi daerah genangan.

e. Pembangunan Air Bersih

Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk telah membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah 30,96% rumah tangga telah memiliki akses perpipaan terhadap sumber air bersih layak di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2.36
Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Cakupan Layanan Air Minum Per Tahun				
		(Jumlah Rumah Tangga)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDAM	5,496	6,036	4,212	4,572	4636
2	Non PDAM (PAMSIMAS)	4,386	5,224	6,567	6,567	6795
3	Non PDAM (di Pedesaan)	4,741	6,355	7,005	7,005	8643
	Non PDAM (di Perkotaan)	0	0	0	370	-
4	Total Rumah Tangga Terlayani	14,623	17,615	17,784	18,514	20074
5	Total Rumah Tangga di Kabupaten Belu	56,387	58,330	58,221	59,804	61957
6	Persentase Layanan Air Bersih (%)	25.93	30.2	30.55	30.96	32.40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024



f. Penataan Ruang

Kabupaten Belu sudah memiliki dokumen rencana umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dianggap penting sehingga fokus target kinerja bidang penataan ruang Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah presentase dokumen rencana rinci tata ruang. Jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun hingga 2021 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Atambua dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Halilulik. Karena status Atambua sebagai PKSN maka saat ini penyusunannya RDTR PKSN Atambua diambil alih oleh pemerintah pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang akan dilegalisasi berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam penyusunan RDTR PKSN Atambua ini pemerintah pusat masih tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Sedangkan RDTR Perkotaan Halilulik masih diperlukan beberapa perbaikan sehubungan dengan adanya regulasi-regulasi terbaru terkait penataan ruang. Selain itu RDTR Perkotaan Halilulik sampai dengan saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di Awal Tahun 2023, terdapat 2 dokumen RDTR yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, Dan Motamasin Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

g. Pembangunan Perumahan

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu



instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Belu merupakan salah satu penyebab timbulnya kawasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dan banyaknya rumah yang tidak layak huni di pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin melalui rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peningkatan air bersih, sanitasi, serta usaha perbaikan dan lingkungan pemukiman pada umumnya. Pembangunan Rumah layak huni di Kabupaten Belu pada periode 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Rumah Khusus (Unit)	-	213	1	100	0	314
2	Pembangunan Baru (PB) (Unit)	-	-		29	0	29
3	Peningkatan Kualitas (PK) (Unit)	1336	1114	157	481	0	3088
4	Rumah Kopel untuk Perbatasan (unit)	-	-	0	-	0	0
5	Rumah Susun (Unit)	1	-	0	-	0	1

Sumber : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, 2024

Realisasi kinerja bidang perumahan di Kabupaten Belu periode 2016–2023 diukur dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 64,10% di Tahun 2016 menjadi 64,82 % di Tahun 2023.



Tabel 2.38
Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Layak Huni (Unit)	32380	NA	NA	NA	36689	22020	22847	22847
2	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	18136	NA	NA	NA	16,652	11343	12402	12402
3	Total Rumah (Unit)	50516	NA	NA	NA	53341	33363	35249	35249
4	Penduduk (Jiwa)	207170	213596	216783	226039	227097	227097	227866	224306
5	Rasio Rumah layak Huni	0.16	NA	NA	NA	0.16	0.10	0.10	0.10
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	64.10	NA	NA	NA	68.78	66.00	64.82	64.82
7	Jumlah Backlog (KK)	NA	NA	NA	NA	4989	8702	8756	8756

Sumber: Dinas PUPR Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

h. Persampahan

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume timbunan sampah yang cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2022, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi :

- 1) Tong sampah 3 pilah 60 liter : 205 unit
- 2) Tong sampah roda 120 liter : 250 unit



- 3) Tong sampah roda 240 liter : 10 unit
- 4) Tong sampah roda 660 liter : 25 unit
- 5) Alat pencacah sampah (chooper) : 5 unit
- 6) Mobil Tanki air : 3 unit
- 7) Motor Roda 3/otonastrida : 13 unit
- 8) Mobil Dump Truck : 6 unit
- 9) Mesin Press Plastik : 1 unit
- 10) Mesin potong rumput : 4 unit
- 11) Mobil Armroll : 3 unit
- 12) Motor Roda 2 : 16 Unit

Pada Tahun 2021, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan sedangkan di Tahun 2022 didukung oleh 135 orang tenaga honorer Satgas kebersihan. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Belu serta penanganan sampah skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Timbunan SRT	M2/tahun	85338.83	87434.27	81,746.40	81,746.40	94,034
2	Volume Timbunan SSSRT	M2/tahun	12506.89	13202.45	10.177.10	10.903	14,043
3	Total Volume Timbunan Sampah	M2/tahun	97845.71	100637,00	91,923.51	92.649	108,077
4	Total Volume Sampah yang di angkut ke TPA	M2/tahun	40668.3	43614	46,740.02	70.116	34,237
5	Penanganan Sampah Kabupaten Belu	%	41.56	43.34	50.85	75.68	31.68

Sumber: Dinas LH dan Perhubungan Kab Belu, 2025

i. Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua

Berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2020. Lokasi Kawasan kumuh di maksud tersebar di Kecamatan Kota Atambua sebanyak 25.45 Ha yang tersebar di 2 Kelurahan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan utama lainnya seperti kondisi layanan air bersih, sanitasi dan



penanganan kumuh perkotaan untuk mencapai target nasional pada Tahun 2019 yaitu target strategi 100-0-100 yang artinya mencapai layanan air bersih 100%, lingkungan kumuh 0% dan sanitasi layak 100%.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belu mendapat bantuan pembangunan rumah baru sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit di kampung Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Belu dengan Program KOTAKU dan PT. Sarana Multigriya Finansial untuk menuntaskan permasalahan di kampung Sorosikun yang dulunya merupakan salah satu kawasan kumuh di Kabupaten Belu. Pada tahun 2022 tidak ada penanganan kawasan kumuh yang lokasinya sesuai SK Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2021 seluas 25,45 Ha sehingga tidak ada pengurangan luasan kawasan kumuh.

2.1.3.1.4 Pertanian

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebanyak 133 bidang dari 599 bidang tanah pemerintah. Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu yang disertifikasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 6 bidang tanah sehingga total bidang tanah yang sudah disertifikasi sampai tahun 2022 adalah sebanyak 139. Sementara itu terdapat 22 bidang tanah sedang dalam proses sertifikasi oleh BPN ATR, 10 bidang tanah sudah dilakukan sidang/pengukuran dan sedang menunggu sidang penelitian oleh BPN ATR dan 18 bidang tanah telah dilakukan pendaftaran dokumen oleh ke BPN ATR. Untuk lebih jelasnya mengenai 6 bidang tanah yang sudah disertifikasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.40
Data Sertifikasi Lahan Pemda Tahun 2022

No	Lokasi Lahan	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Status
1.	SDI. Buitae	Teun	Raimanuk	Sertifikat terbit
2.	Poskesdes	Tasain	Raimanuk	Sertifika terbit
3.	SDI. Asuulun	Fatukbot	Atambua Selatan	Sertifikat terbit
4.	PAUD Bhakti Karya	Kenebibi	KakulukMesak	Sertifikat terbit
5.	Reservoir Dualaus	Umaklaran	Tasifeto Timur	Sertifikat terbit
6.	SDN Haekrit	Tasain	Raimanuk	Sertifikat terbit

Tabel 2.41
**Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%	38,23%

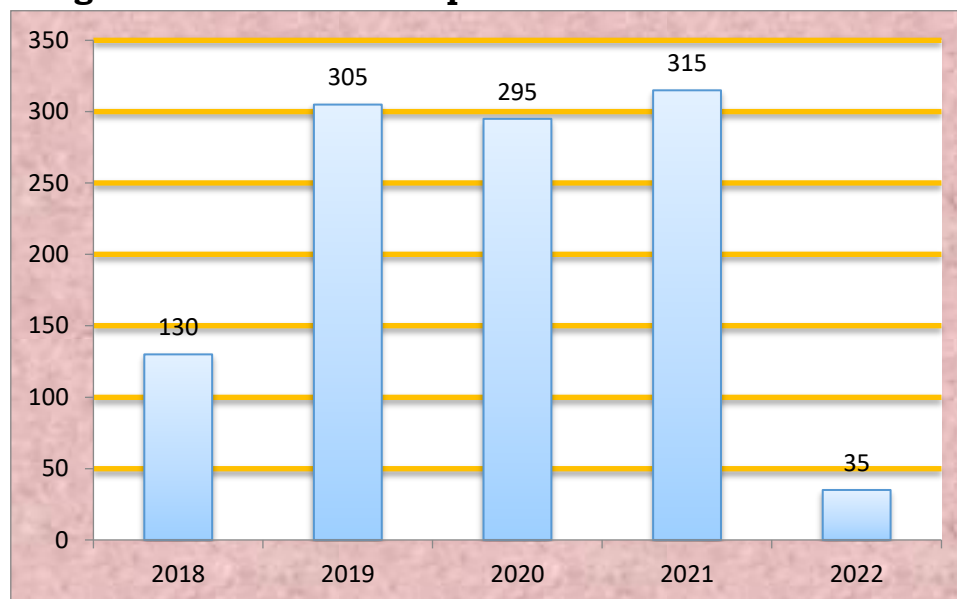
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Belu. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Belu dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Belu terlihat bahwa Tahun 2022 mengalami penurunan angka kriminalitas yang sangat signifikan sebagaimana yang tersaji pada grafik berikut.



Grafik 2.28
Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu Tahun 2022

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Belu. Untuk menurunkan angka kriminalitas perlu ditambah jumlah pamong praja dan Linmas. Tambahan petugas keamanan dan ketertiban dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Belu juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh *stakeholder* dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda pada Tahun 2022.

2.1.3.1.6 Sosial

A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Berdasarkan sumber data Dinas Sosial PMD Kabupaten Belu tahun 2025, jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan sosial/yang dilayani tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.42
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Penduduk PMKS dan Layanan	Jumlah PMKS (orang) dan Target					Jumlah PMKS Yang di Layani				
		Layanan					(orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anak Terlantar	559	178	240	221	409	0	0	0	0	0
2.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	34	16	30	20	15	0	0	16	20	15
3.	Anak dengan Kedisabilitasan	79	172	180	180	0	0	0	0	0	0
4.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	15	116	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lanjut Usia Terlantar	477	885	841	856	6195	70	10	30	372	32
7.	Penyandang Disabilitas	669	780	835	918	1263	60	18	30	218	66
8.	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Orang Dengan HIV/AIDS	734	734	734	914	914	50	10	150	0	0
10.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	895	992	1171	1171	1171	0	0	0	0	5
11.	Layanan Rujukan	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
12.	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0	200	0	0	0	0	15
13.	Penyediaan Sandang Untuk Anak Sekolah	0	0	0	0	60	0	0	0	0	2
14.	Reunifikasi	0	0	0	0	10	0	0	0	0	7

Sumber : Dinas Sosial PMD Kab.Belu,2025



Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan sasaran PMKS adalah sebagai berikut.

Tabel 2.43
Rincian Kegiatan Pelayanan PMKS Tahun 2020-2021

No	Kegiatan	Sasaran	Jumlah Penerima Bantuan (Orang)	Tahun
1.	Pelatihan Ikan Asap	Lanjut Usia	20	2020
2.	Bantuan Alat Bantu	Lanjut Usia	50	
3.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak jalanan, Anak cacat, dan Anak Nakal	Disabilitas	10	
4.	Bantuan Alat Bantu	Disabilitas	50	
5.	Orang dengan HIV/AIDS	ODHA	50	
6.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Disabilitas	Disabilitas	8	2021
7.	Bantuan Pemakaman Bagi ODHA yang Mendapat Pengobatan	ODHA	10	
8.	Bantuan Alat Bantu	Disabilitas	20	
9.	Layanan Rujukan	ODGJ Lansia Terlantar	15	2022
10.	Bantuan Alat Bantu	Lanjut Usia dan disabilitas	60	
11.	Bantuan Alat Bantu	ODHA	150	
12.	Bansos	Lanjut Usia, disabilitas, dan Anak Terlantar	625	2023
13.	Layanan Rujukan	Lanjut Usia dan ABH	60	
14.	Bantuan Pemakaman	Lanjut Usia dan disabilitas	75	2024
15.	Bantuan Alat Bantu	Lanjut Usia dan disabilitas	32	

Sumber : Dinas Sosial PMD Kab.Belu,2025

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami penambahan selama kurung waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 3.465 orang menjadi 9.967 orang di tahun 2024 dengan jumlah PMKS yang dilayani melalui kegiatan yang



dilaksanakan sebanyak 167 orang atau 1,6%. Artinya masih terdapat 9.800 orang atau 98,4% yang belum mendapat bantuan perlindungan sosial melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah diwajibkan. Data penerima PKH Kabupaten Belu Tahun 20221-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Penerima PKH Kabupaten Belu Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Dana
		Penerima Manfaat (KPM)	
1	2021	12.002	Rp.35.912.850.000
2	2022	11.569	Rp.43.386.175.000
3	2023	12.166	Rp.34.287.172.315
4	2024	12.510	Rp.38.456.009.516

Sumber: Dinas Sosial, PMD Kab.Belu, 2025

Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merujuk pada partisipasi pekerja dalam program perlindungan sosial yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi pekerja. Adapun data cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan Kabupaten Belu Tahun 2023 sebanyak 54,95% (sumber :BPJS Ketenagakerjaan, 2023), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peserata BPJS aktif tahun 2023 (sebanyak: 69.684 orang) per jumlah usia



produktif (umur 20-64 tahun) berdasarkan data penduduk BPJS (126.803 orang). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerja yang belum berpartisipasi dalam program perlindungan sosial.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.45 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2018-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	200	30	0	0	0
2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	73	38	2,11	8,66	0
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	266	95	84,12	6,24	423,45
4	Besaran kasus yang diselesaikan bersama (PB)	34	32	86,67	14,51	29
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	4916	5400	2,23	0	53,529

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu , 2024

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua



bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Tabel 2.46
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2021	2022	2023	
1.	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					DP3AP2KB
	Mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,07	97,57	97,44	
2.	Program Perlindungan Perempuan					
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100		
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Gender "Vocal Point"	Kelompok				
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
	Buku Profil Gender dan Anak	Buku	1	1		
5.	Program Pemenuhan Hak Anak Anak (PHA)					
	Desa/Kelurahan Layak Anak	Desa/ Kelurahan	0	5		

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022



Tabel 2.47
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan
di Kabupaten Belu Tahun 2017 -2022

No	Jenis Kasus	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Fisik	2	-	4	2	1	2	5	0	18	1	5	7
2	Psikis	1	-	2	1	4	3	6	0	3	3	3	1
3	Pelecehan Seksual	-	0		0	0	2	0	0	1	0	0	2
4	Penelantaran	4	2	14	0	2	1	3	1	7	3	4	8
5	Penganiayaan	2	2	6	6	4	4	3	1	3	4	3	2
6	Pemeriksaan	-	12	0	12	0	12	1	7	1	0	0	16
7	Lain-lain	10	5	20	16	15	7	0	27	1	12	10	25
	Jumlah	19	21	46	37	26	31	18	36	34	25	34	88

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keseimbangan dan keberagaman gizi konsumsi 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain. Skor PPH maksimum mencapai 100%, akan tetapi Kabupaten Belu pada Tahun 2022 baru mencapai skor PPH sebesar 84,7%.

Ketersediaan kecukupan kalori untuk setiap komponen bahan pangan tergolong tinggi yaitu 3603 Kkal/Hari; Protein 87,2 Gram/hari namun konsumsi kalori per kapita di Kabupaten Belu termasuk kategori tinggi yaitu hanya sebesar 3603 Kkal/Kapita/Hari dan berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/Kapita/Hari. Hal ini menunjukkan keterjangkauan atau aksesibilitas pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah baik.

2.1.3.2.4 Pertanian

Urusan pertanian dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial, Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP),



Dari 654 bidang tanah pemerintah kabupaten Belu, jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan April 2023 yaitu sebanyak 250 bidang. Capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%	38,23%

Sumber :SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu,2023

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah termanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.



Tabel 2.49
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan	80,91	70,39	68,82	67,83	67,94
2	Indeks Kualitas Air	58,33	50,00	52,00	51,25	53,75
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,6	50,64	50,75	50,09	50,25
4	Indeks Kualitas Udara	92,75	93,36	94,19	92.82	91,85

Sumber :SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Tahun 2025

Data pada tabel tersebut dapat diketahui Capaian indeks kualitas lingkungan meningkat 0,12 point di tahun 2024 dari capaian 67,83 di tahun 2023 masuk dalam predikat “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$). Capaian indeks tutupan lahan juga meningkat 0,16 point di tahun 2024 dari capain 50,09 point di tahun 2023 dan masuk dalam kategori “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$) dan capaian indeks kualitas air (IKA) meningkat 2,5 point di tahun 2024 dari capaian 51,25 point di tahun 2023 masuk dalam predikat “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$). Sedangkan capaian nilai indeks kualitas udara (IKU) di tahun 2024 menurun 0,97 poin dari tahun 2023 namun masih masuk dalam kategori “sangat baik” (rentang angka $90 < IKU \leq 100$).

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.



Tabel 2.50
Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Belu Tahun 2019 -2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Penerbitan KTP (%)	81,9	84,96	86.17	89.33	89.18
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-17 Tahun (%)	78,41	79,53	79.2	88.06	89.19
3	Cakupan Penerbitan AktaNikah (%)	23,81	26,84	28.48	39.73	42.27
4	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	87,97	87,37	89.7		99.88
5	Penerbitan Akta Kematian (dokumen)	NA	309	183		1,057
6	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	NA	14,01	18.34	28.16	31.17
7	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	NA	2,47	7.41	7.41	7.41

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu , 2024

Tabel 2.46 menunjukkan capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil periode 2019-2023. Capaian sampai dengan Tahun 2023 meliputi Cakupan Penerbitan KTP sebesar 89.18%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-17 Tahun sebesar 89.19%, Cakupan Penerbitan Akta Nikah sebesar 42,27%, Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 99,88%, Penerbitan Akta Kematian sebanyak 1057 Dokumen, Cakupan Penerbitan KIA sebesar 31.17% dan Cakupan Pengelolaan GISA Kependudukan pada Desa/Kelurahan sebesar 7.41%. Capaian-capaian ini belum maksimal terutama terhadap target Nasional, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat



meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangandes/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase LPM berprestasi (%)	100	100	100	100	60
2	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumdes Aktif (%)	-	-	56,52	71,01	73,91
5	Persentase Posyantek Aktif (%)	-	-	-	-	-
6	Indeks Membangun Desa (IDM)	69	69	69	69	69
7	Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang)	245	182	28	195	100
8	Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa)	69	69	69	69	69
9	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket)	N/A	N/A	N/A	-	
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok)	N/A	N/A	N/A	-	69 Dok
11	Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpg)	N/A	N/A	N/A	-	-

Sumber: Dinas Sosial & PMD Kabupaten Belu Tahun 2024

Selain capaian indikator di atas, salah satu indikator yang menggambarkan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan status desa. Sampai dengan Tahun 2023 status desa di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.52
Status Desa Tahun 2021-2023

No	Status Desa	2021	2022	2023
1	Desa Sangat Tertinggal	1	-	-
2	Desa Tertinggal	24	21	11
3	Desa Berkembang	39	42	49
4	Desa Maju	5	6	9
Jumlah Total		69	69	69

Sumber: Dinas Sosial & PMD, 2024

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%).

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

Tabel 2.53
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,17	1,17	1,43	1,43	1,43
2	Rasio Akseptor KB (%)	56	56	57	72	76
3	Total Fertility Rate (TFR) (%)	3,29	3,29	3,28	3,26	2,29
4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	22,65	22,65	22,85	106	100
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	60,7	73,6	74,9	76,2	60.5



No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	55	56,5	50	40	45
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	53	54	52	47	59,7
8	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	45	47	35,4	44	46
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	10,64	17,02	19,15	19,15	20,5

Sumber : SIPD, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB Tahun 2018-2022. Rata-rata rasio akseptor KB 76% dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebanyak 3,26.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.54
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu
Tahun 2017- 2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	40.11	40.12	62.6	58.49	59.31	45,28

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2021. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada Tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 45,28%.



2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mewujudkan misi ke 3 dari RPJMD Kab. Belu 2021-2026 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi. Urusan ini menjalankan fungsi dengan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan mewujudkan good governance serta sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bisa beroperasi secara penuh pada 2023. Oleh Karena itu SPBE menjadi tolak ukur utama dalam capaian Bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belu.

Pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika dapat diukur pula melalui indikator (i) Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit); dan (ii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerja sama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	0	1,92	2,29
2	Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit)	5	10	10	-	2,22
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%)	12	35	35	65	81,48

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian urusan komunikasi dan informatika Tahun 2019–2023. SK Presentasi dan Indeks SPBE Tahun 2022 telah diterbitkan dengan Nomor 108 Tahun 2023 tentang hasil



pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan surat keputusan tersebut, hasil SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur Khususnya Pemerintah Kabupaten Belu adalah “INDEKS PREDIKAT 2.92 (CUKUP)”.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Belu masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Belu terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persentase Koperasi Aktif	63,34	81,30	52,60	100	71
2	Persentase UKM Aktif	127,20	89,27	92,85	103	97,82

Sumber : SIPD, Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2025)

Tabel 2.56 menggambarkan capaian indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024, persentase koperasi aktif mengalami trend penurunan dari 81,30% di Tahun 2021 menjadi 52,60% di Tahun 2022 namun meningkat drastis di tahun 2023 menjadi 100% tetapi kembali menurun 71% pada tahun 2024. Sementara jumlah pelaku usaha kecil menengah meningkat dari 92,85% di tahun 2022 menjadi 103% di tahun 2023 lalu kembali menurun 97,82% di tahun 2024. Ha ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat belu untuk meningkatkan taraf hidup semakin baik. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi pun semakin meningkat yang menyebabkan jumlah koperasi semakin banyak.



2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.57
Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	88,37	88,64	85	89,77	90.61	93.08
2	Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha)	65	87	165	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp milyar)	242.681	226.352	7.899	16.174	680.813	46.236
4	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang)	29,71	26,36	7,0	5,75	2,78	94,75

Sumber : SIPD, DPMPTSP Kabupaten Belu Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan investasi di Kabupaten Belu Tahun 2019-2024 mengalami tren fluktuatif yang cukup signifikan dengan peningkatan yang cukup besar dari Tahun 2019-2024 dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada Tahun 2023 dengan angka sebesar 680.813 dan Rasio daya serap tenaga kerja mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 94,75.

Tabel 2.58
Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kabupaten Belu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	JUMLAH PERUSAHAAN					JUMLAH KEKAYAAN (MILIAR RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	SIUP skala Mikro	90	85	134	89	122	2,63	2,82	3,58	2,34	88,22
2	SIUP skala Kecil	132	145	151	145	62	29,14	36,46	40,58	31,31	44,70
3	SIUP skala Menengah	33	37	43	18	11	37,08	46,41	66,82	29,57	38,51
4	SIUP skala	1	0	3	0	6	30,00	-	44,32	-	144,76



	Besar										
Jumlah	256	267	331	252	201	98,85	85,69	155,3	63,21	236,81	

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belu Tahun 2022

Dari Tabel 2.58 di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2022 penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak ada, oleh karena perkembangan penerbitan perizinan berusaha yang mengalami perubahan sejak tanggal 04 Agustus 2021 dengan diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi. Sehingga untuk penerbitan izin usaha perdagangan berubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jumlah sebesar 776 termasuk penerbitan SIUP.

Tabel 2.59
Realisasi Penerbitan Izin Dan Non Izin Tahun 2020-2024
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belu

NO	TAHUN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2020	1300	1156	88.92
2	2021	1300	1023	78.69
3	2022	1300	3698	284.46
4	2023	1300	4291	330.08
5	2024	1300	3444	26.92
	TOTAL	6,500	13612	209.41

Sumber : SIPD, DPMPTSP Kabupaten Belu Tahun 2025

Dari table 2.59 menunjukan bahwa realisasi penerbitan izin dan non izin dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi di Tahun 2023 karena diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah



raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.60
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	5,2	6,5	7	7.47
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	1,6	1,4	1,4	1,4	2.8
3	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	0	7,8	7,8	8,5	9
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	0	5,8	5,8	5,8	6.1
5	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor)	0	70	92	92	180

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, 2023

Tabel 2.60 menggambarkan capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2021 ke 2022 berada pada angka yaitu 7.47%, cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan, cakupan pelatih bersertifikat mengalami kenaikan, dan jumlah prestasi cabang olahraga yang mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal.

2.1.3.2.14 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang andal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Indikator capaian urusan statistik Tahun 2017-2022 antara lain ketersediaan buku Kabupaten Belu Dalam Angka, Profil Kabupaten Belu dan SIPD.



Tabel 2.61
Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen)	9	12	14	17	17	17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Kegiatan even budaya Tahun 2022 diselenggarakan sebanyak 3 (Tiga) Kali, hal ini menunjukan bahwa kegiatan even kebudayaan mulai diselenggarakan dan kembali beraktifitas khususnya di tingkat kabupaten. Pembatasan mobilisasi orang dan larangan berkumpul akibat Pandemi COVID-19 sudah mengalami kelonggaran terhadap aktifitas yang melibatkan banyak orang. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Belu terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.62
Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	0	0	3	4
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit)	1300	1300	1300	1300	1323

Sumber: SIPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, 2024

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran



perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.63
Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar)	7395	21340	21616	18434	21328

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2025

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Belu dalam hal jumlah judul koleksi buku dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan namun sedikit menurun di tahun 2024.

2.1.3. 2.18 Kearsipan

Salah satu ukuran yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah adalah tertib tidaknya kearsipan daerah. Melalui arsip yang baik, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan akan mudah ditemukan. Karenanya, tertib arsip menjadi cermin administrasi modern. Capaian Kinerja Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok)	558	3651	4101	4296	12228

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, 2025

2.1.3.2.19 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Belu, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penjabaran konsistensi program	85,47	97,91	99,49	99,49



No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
	RPJMD ke dalam RKPD(%)				
2	Persentase Capaian kinerja program (%)	87	54,06	91,53	88,70
3	Indeks Government (Kategori/skor)	Sangat Inovatif untuk daerah Tertinggi/54,04	Inovatif/46,08	Kategori Kab. Terinovatif se-Indonesia Kategori Daerah Tertinggal dan Wilayah Perbatasan / Skor 54,76	-
4	Pemanfaatan hasil Kelitbangan (%)	0	0	0	2

Sumber : BP4D Kabupaten Belu, 2024

Realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator kinerja persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Diharapkan kedepannya dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan.

2.1.3.2.20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	73	225	24	118	611
2	Pembinaan politik kepada masyarakat	179	114	441.2	26	851



3	Menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/ Demonstrasi (Kasus)	3	4	14	1	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, 2025

Indikator kinerja urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Belu Tahun 2020–2024 di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan politik kepada masyarakat dan menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan politik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang selalu fluktuatif tetapi selalu membuahkan hasil yang cukup malsimal sehingga jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun organisasi tertentu hanya sebanyak 1 kasus saja.

2.1.3.2.21 Sekretariat DPRD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, mengamanatkan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;



- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Adapun indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu
Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda yang dihasilkan	7	8	5

Sumber : SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2024

2.1.3.2.22 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Belu tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2022

NO	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A (Tidak	44,52	43,24	50,7	62,70
		Kategori	Laksanakan Evaluasi RB)	C / Kurang	C / Kurang	C / cukup (memadai)	B / Cukup Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami penurunan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten



Belu pada Tahun 2024 meningkat dengan nilai sebesar 62,70 (B=cukup baik) perlu pembenahan lebih baik lagi sistem tata laksana birokrasi.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 7 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.69
Sub Indikator Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2021-2022

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	ASN yang Profesional	0-100	43,71	42,46	BKN
2	Implementasi SPBE	0-5	-	1,92	Kementerian PANRB
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,00	21,70	LKPP
4	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,14	4,26	Kementerian PANRB
5	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
7	Kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Publik	0-100	66,66	72,43	Ombudsman RI

Capaian ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Belu yaitu:

- a. Dalam Manajemen Perubahan:
- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum disertai dengan komitmen yang tinggi dan konsisten serta belum didukung dengan pengorganisasian yang ideal. Kondisi ini salah satunya terlihat dari lembar kerja evaluasi (LKE) PMPRB yang disampaikan PANRB sebagian besar belum disertai catatan dan data dukung sehingga nilai yang diberikan pada setiap pertanyaan belum dapat menggambarkan kondisi riil pelaksanaan reformasi birokrasi di level PEMDA Maupun PD.



- Pemerintah Kabupaten Belu belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang terdapat didalam laporan hasil evaluasi (LHE) reformasi birokrasi tahun 2021 sehingga belum terlihat adanya perbaikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Berdasarkan LKE PMPRB yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Belu belum dapat dipastikan telah menetapkan rencana kerja reformasi birokrasi PD sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap PD belum terencana dengan baik,
- Pemerintah kabupaten belu belum memiliki agen perubahan dan rencana aksi agen perubahan sehingga proses internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap PD belum berjalan baik.
- Sosialisasi dan implementasi terhadap budaya kerja, utamanya Core Values ASN BERAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” belum dilakukan secara insentif sehingga belum dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai telah memahami budaya kerja yang dimiliki.

b. Belum Deregulasi Kebijakan:

- Belum dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/berisifat menghambat.
- Belum dilakukan monitoring dan evaluasi yang intensif atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan perundang-undangan yang dimiliki untuk memastikan tahapan dan/atau persyaratan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diimplementasikan dengan baik.

c. Dalam Penataan dan Penguatan Organisasi:

- Kebijakan turunan terkait sistem kerja pada Pemerintah Kabupaten belu belum disusun dan diimplementasikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.



- Belum seluruh PD melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai pedoman yang terdapat di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018.

d. Dalam Penguatan Tata Laksana:

- Pemerintah Kabupaten Belu belum menyusun peta proses bisnis sehingga prosedur operasional standart (SOP) yang disusun oleh setiap PD belum dapat dipastikan sesuai dengan proses bisnis atas kinerja utama yang ingin diwujudkan.
- Pemerintah Kabupaten Belu telah memiliki Peraturan Bupati Belu Nomor 6 tahun 2023 tentang pelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
- Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi berkala atas Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sehingga belum dapat diketahui tingkat efektifitas penyampaian informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Belu sesuai wujud transparansi kepada masyarakat.

e. Dalam Manajemen SDM:

- Belum seluruh pegawai telah dilakukan assesment sehingga berdampak kepada belum diketahuinya tingkat kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diampunya.
- Pemerintah Kabupaten Belu belum memiliki kebijakan terkait manajemen talenta.
- Reward dan Punishment atas pelaksanaan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai belum diterapkan pada seluruh PD.
- Kinerja individu pegawai belum seluruhnya selaras dengan kinerja unit kerja atau level jabatan di atasnya.

f. Penerapan implementasi SAKIP sebagai bagian dari area akuntabilitas masih belum baik, masih terdapat kelemahan terutama terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil (Outcome) serta rumusan indikator kinerja baik pada tujuan dan sasaran yang belum menggambarkan prinsip spesifikasi, terukur/mesurable, achievable,



relevan dan time-bound (SMART), serta cukup, baik dan perencanaan PEMDA maupun PD.

g. Dalam Area Pengawasan:

- Belum seluruh perangkat daerah melakukan penilaian risiko dan upaya pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi
- Belum melakukan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Implementasi kebijakan benturan kepentingan, Whistle Blowing System, pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh seluruh PD.

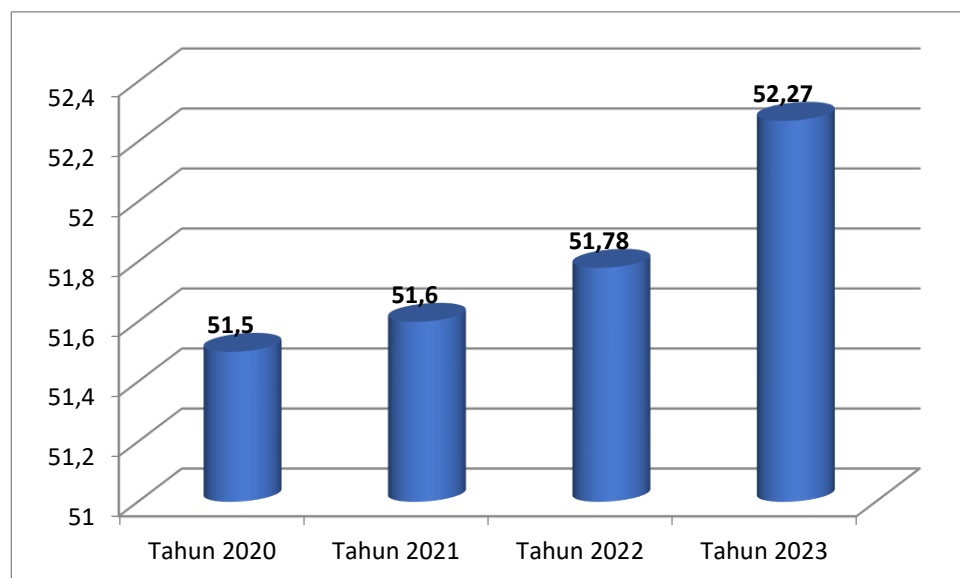
h. Dalam Peningkatan Pelayanan Publik:

- PD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauhnya tingkat efektifitas pelayanan yang diberikan. Terhadap hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan standar pelayanan.
- Belum seluruh PD menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan atas kualitas pelayanan publik yang dilakukan. Selain itu, belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- Inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik belum maksimal diterapkan diseluruh PD.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahunnya. Nilai AKIP Kabupaten Belu pada Tahun 2023 mencapai 52,27 dengan kategori CC.



Grafik 2.29
Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2020-2023



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belu Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2023 dengan nilai 52,27 dari Tahun 2020 hanya 51.5 saja. Sementara predikat tingkat akuntabilitas kinerja tetap pada posisi CC. Capaian dari Tahun 2020-2023 ini terus mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal sehingga tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah belum berubah, untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mengoptimalkan program reformasi birokrasi antara lain:

- Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis Kinerja.
- Masih ada Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.
- Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memrsyaratkan adanya kinerja yang terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya.
- Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.



Sementara itu, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belu dari Tahun 2017-2022 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 2,6561 (kategori tinggi), naik menjadi 2,67 (kategori tinggi) dan turun menjadi 2,5439 (kategori tinggi) di Tahun 2018. Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2017 menempati peringkat 304 (tiga ratus empat) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Belu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70
Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Memuaskan	2,03	2,16	2,15	NA
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	N/A	N/A	NA	NA	NA

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada indeks reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespons perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan daerah ini juga dirumuskan berdasarkan kondisi struktur organisasi perangkat daerah yang dinilai “melebar” yang berdampak pada kondisi fiskal daerah.

Terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung serta unsur kewilayahan diampu oleh 47 (empat puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya 47 OPD yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas



pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.71
Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belu

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi Penunjang Untuk: A. Perumusan Penyusunan Kebijakan Daerah B. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah C. Pengoordinasian Pelayanan Administratif Dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara D. Penetapan Pemantauan Dan Evaluasi Perangkat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Pendukung Kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan Dan Sub Urusan Aset
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan Dan Sub Urusan Pendapatan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.
7.	Inspektorat	Fungsi Penunjang Pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informasi, Bidang Statistik Dan Persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Serta Urusana Pmerintahan Bidang Pertanahan.
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kebudayaan, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
14.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perikanan.
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan



No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
		Masyarakat Dan Desa.
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian
19.	Dinas Koperasi, Tetenagakerja dan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; Transmigrasi.
20.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi Penunjang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran Dan Penyelamatan
24.	Badan Kesbangpol	Urusan Kebangsaan Dan Politik
25.	Badan Pengelola Perbatasan	Urusan Pengelolaan Perbatasan
26.	Kecamatan (12), Kelurahan (12)	Fungsi Penunjang Untuk: A. Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Umum B. Pengoordinasian Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban C. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ekonomi Dan Pembangunan D. Pengoordinasian Kegiatan Kesejahteraan Sosial E. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat F. Pengoordinasian Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan G. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum H. Pengoordinasian Pemerintahan Kelurahan

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;



- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BP4D masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.3.2.23 Administrasi Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Belu masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tahun 2021 baru mencapai 9,87%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



2	Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%)	9.11	9.87	8,19	11.24	NA
3	Persentase belanja publik terhadap APBD (%)	18.44	23.33	11.28	17,25	NA
4	Persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	91.65	74.09	135,36	-	NA
5	Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset secara akuntabel (%)	78	100	82	85	NA
6	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	16.90	2.41	2.41	11,77	9,01

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu Tahun 2025

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di Bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- Kultur budget maximer belum bisa dihilangkan.
- Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.
- Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
- Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Belu belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya;
- Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan BMD;



- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang;
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

2.1.3.2.24 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2023-2024

NO	Uraian	2023	2024
1.	Nilai Sakip	CC/52	B/60,54
2.	LPPD	2,15	NA
3.	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	37,5 %	62,5%
4.	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian	51,78 %	50%
5.	Proporsi kesesuaian program pembangunan	100 %	86,78%
6.	Proporsi pengadaan barang dan jasa	100%	100%



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025

2.1.3.2.25 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Belu sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai, sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Belu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 dan 2023 indikator kinerja kepegawaian, pendidikan, pelatihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Belu

NO	Uraian	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah	53.41 %	60.63%	73,48%
2	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	40.23 %	35.30%	45,03%

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Belu Tahun 2025

2.1.3.2.26 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa



peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Adapun indikator urusan pemerintahan bidang bencana Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75
Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana
Kabupaten Belu Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase desa tangguh bencana	0	3,7	7,41	11,11	14,18

Sumber : BPBD, 2025

Terdapat 3 (tiga) desa dari 81 Desa/Kelurahan di Kabupaten Belu yang menjadi Desa Tangguh Bencana. Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Fatuketi sebagai desa tangguh bencana banjir;
2. Desa Silawan sebagai desa tangguh bencana Tsunami; dan
3. Desa Fulur sebagai desa tangguh bencana tanah longsor.

Capaian kinerja bidang bencana pada Tahun 2024 adalah sebesar 14,18% desa tangguh bencana. Selalu meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

2.1.3.2.27 Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Belu sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada.

Tabel 2.76
Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Maturitas SPIP	2,85	2,85	2,85	2,82	2,89
3	Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen)	130	0	130	100	100
4	Persentase tindak lanjut temuan (%)	88,67	0	96,72	82,50	83,94
5	Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%)	100	0	100	100	100
6	Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%)	100	0	100	100	100



Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2025

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Belu belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan;
- 2) Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRIK;
- 3) Penerapan SPIP belum maksimal;
- 4) Belum adanya aplikasi e-LHP.

SPIP di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2023 di 6 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Belu masih pada level 3, guna meningkatkan ke level 4 diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Satgas;
- 2) Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian risiko;
- 3) Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP;
- 4) Standarisasi evaluator sejumlah ± 49 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2023 baru mencapai 46,67%, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77

Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Fungsional Auditor	30,61	36,73	36,73	36,73	46,67

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belu, 2024

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan



taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Tabel 2.71 menyajikan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024. Angka produksi perikanan tangkap mengalami fluktuatif dan terus menurun pada Tahun 2023 dan 2024 dari capaian Tahun 2022. Penurunan sekitar 100 ton produktifitas ikan tangkap. produksi perikanan air tawar juga mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024 jika dibandingkan dengan tahun capaian 2022.

Tabel 2.78
Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.675,52	1.620,83	1.682,14	1.567,28	1.565
2	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	16,2	20,30	21,03	15,03	15,37
3	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton)	42,7	55,50	58,02	41,54	40,70
4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (Kelompok)	16,4	28	42	15	52

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu 2025

2.1.3.3.2 Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yaitu: (1) KPP Motaain dan sekitarnya; (2) KPP Kota Atambua dan sekitarnya; (3) KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; (4) KPP Mandeu dan sekitarnya. Keempat KPP ini fokus pada wisata alam dan wisata minat khusus. Perkembangan indikator urusan pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut ini.

Tabel. 2.79
Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit)	1	3	2	2	1



2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1,5	1
3	Kunjungan Wisata (%)	19.91	5.02	3,36	3,36	4,31
4	PAD Sektor Pariwisata (%)	4.16	4.45	1,99	1,99	8,59

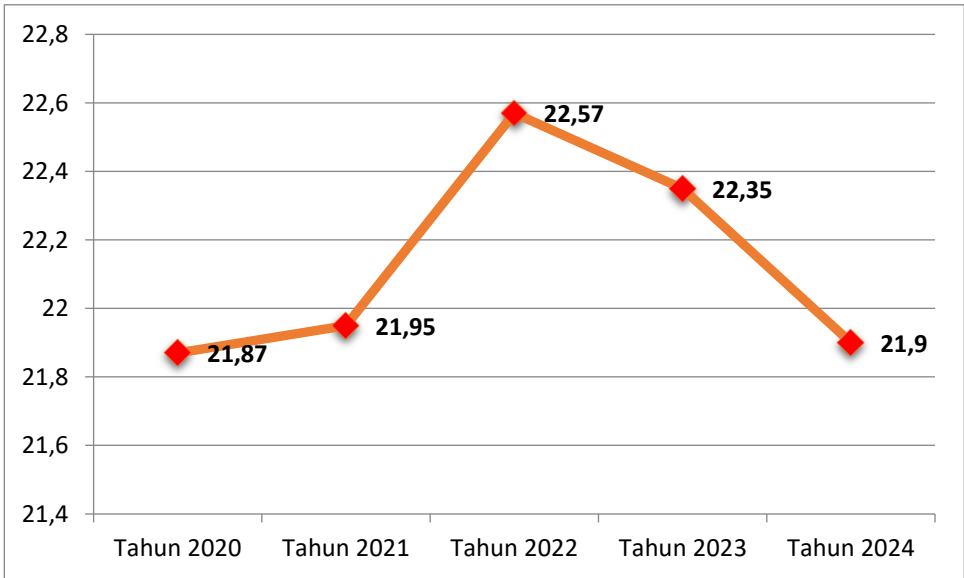
Sumber : SIPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2024

Tabel di atas menyajikan perkembangan urusan pariwisata antara lain persentase kunjungan wisata yang berfluktuatif. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 hingga 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19, sedangkan kondisi tahun 2022 pun diperhitungkan masih sama dengan pencapaian yang ada pada tahun 2021 namun pada tahun 2023 kembali naik tidak signifikan. Lama kunjungan relative wisata stagnan selama 5 (lima) Tahun terakhir, oleh karena itu diperlukan program-program inovatif di bidang pariwisata agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama.

2.1.3.3.3 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bina kelompok tani. Dalam hitungan PDRB sektor pertanian yang terdiri dari menjadi salah satu indikator utama penentu keadaan ekonomi daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih di bawah angka 23% dalam lima tahun terakhir dan cenderung fluktuatif. Kontribusi pada tahun 2023 menurun 22% dari tahun 2022 menjadi 22,35% saja.

Grafik 2.30
Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap
PDRB Kabupaten Belu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025



Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.80 menyajikan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian 2018-2022.

Tabel 2.80

**Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
1	Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ha)	3.73	3.65	3.56	3.82	4.12	4.12
2	Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ha)	1.60	1.59	1.28	1.50	1.12	1.12
3	Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ha)	0.87	0.87	0.68	0.82	0.88	0.88
4	Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ha)	3.3	3.02	2.91	3.87	3.95	3.95
5	Proporsi produktivitas tanaman <i>maek bako</i> (ton/ha)	77	5.58	0	270	0	0
6	Proporsi produktivitas tanaman jambu mete (ton/ha)	0	0	0	2.242	2.242	2.242
7	Proporsi produktivitas tanaman kopi (ton/ha)	20	10	10	150	150	150
8	Proporsi produktivitas tanaman cabai (ton/ha)	2.26	2.42	2.35	3.98	3.05	3.05
9	Proporsi produktivitas tanaman bawang merah (ton/ha)	3.65	3.79	3.7	3.89	4.13	4.13
10	Proporsi produktivitas tanaman bawang putih (ton/ha)	4.04	3.95	3.86	3.98	4.1	4.1
11	Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ha)	10	10	10	10	10	10

Sumber: SIPD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

Perkembangan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif (data pada Tabel 2.73). Fluktuatifnya produktivitas komoditas pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu, kemampuan inovasi adopsi teknologi oleh petani yang masih lemah, di samping modal usaha yang terbatas, luas lahan garapan yang kecil (hanya 0,5 Ha per KK tani) serta angkatan kerja produktif yang kurang berminat dalam sektor pertanian tanaman pangan, target dan capaian Tahun 2022 diprediksi masih sama dengan kondisi pencapaian Tahun 2022.



2.1.3.3.4 Peternakan

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional, karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih profesional demi meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

Tabel 2.81
Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Populasi ternak sapi (ekor)	72.806	62.265	65.105	65.761	66.439
2	Populasi ternak babi (ekor)	52.256	60.043	29.004	29.578	30.179
3	Populasi luas lahan pengembangan HMT (ha)	15	50	50	NA	NA
4	Mempertahankan persentase vaksin ternak (%)	69,48	70	70	NA	NA

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel 2.81 di atas menyajikan capaian bidang peternakan di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024. Populasi ternak sapi menurun dari 72.806 ekor di Tahun 2020 menjadi 66.439 ekor di Tahun 2024. Populasi ternak babi pun mengalami tren penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2024 menjadi 30.179 ekor dari 52.256 ekor pada tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh penyakit Flu Babi (*African Swine Fever*) yang merebak di Pulau Timor. Proporsi luas lahan pengembangan HMT selama lima tahun berjalan secara fluktuatif, tren peningkatan terjadi pada tahun 2019-2022 dan terjadi penurunan Tahun 2020-2021 dengan capaian angka yang sama sebesar 15Ha, untuk tahun 2022 ditargetkan masih sama seperti tahun 2021 yaitu sebesar 50 Ha. Capaian persentase vaksinasi memiliki capaian 70% di Tahun 2021 dan ditargetkan masih sama untuk tahun 2022.

Tabel 2.82 menyajikan data pengeluaran jumlah ternak yang diantarpulaukan/dimutasi keluar Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.82
Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jenis Ternak						
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi	Ayam Aduan	Ayam Potong
1	2019	4.804	50	30	351	22	0	0
2	2020	4.407	20	10	0	7	0	0
3	2021	4.440	20	30	170	7	0	0
4	2022	6.033	60	440	0	19	2.472	900.000
5	2023	4.500	220	286	7.001	24	7.385	18.484.840

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

2.1.3.3.5 Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator: (i) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten; (ii) Jumlah pembangunan pasar; (iii) Ekspor bersih perdagangan (%); (iv) Jumlah jasa pelayanan terhadap UTTP. Perdagangan di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam daerah dengan pangsa pasar yang ada di Kabupaten Belu sendiri seperti pasar desa/pasar perbatasan berupa pasar harian dan pasar mingguan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 13,78%, yang berarti bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan darat langsung dengan negara RDTL merupakan potensi untuk pengembangan ekspor komoditi terutama komoditas unggulan.

2.1.3.3.6 Perindustrian

Indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator: (i) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten (ii) Cakupan bina kelompok usaha industri (%); (iii) Jumlah event promosi produk unggulan daerah. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 2.83
Capaian Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten	1,11	1,1	1,09	1,56	1,21
2	Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

Industri di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan, sebagian besar pangsa pasarnya di wilayah Kabupaten Belu dan khusus untuk meubeler sebagian diekspor ke negara RDTL. Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan sebesar 1% menandakan bahwa sektor industri belum berkembang.

2.1.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah sistem pengembangan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk pelaksanaan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi di Kabupaten Belu dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat. Indikator urusan transmigrasi yaitu tersusunnya dokumen perencanaan transmigrasi. Intervensi dari Kabupaten masih di bidang pemberdayaan, sedangkan bidang pembangunan transmigrasi masih sebatas perencanaan.

Tabel 2.84
Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dok)	0	0	0	0	0

Sumber: SIPD, Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek



kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.85
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	413.017	262.708	426.449	467.590	492.305
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	741.934	670.364	772.546	337.199	388.608

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

2.1.4.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); melakukan optimalisasi retribusi daerah; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain



Pendapatan yang Sah, serta Bagi Hasil Pengelolaan Aset Pusat di daerah. Gambaran tentang kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Bab III.

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kabupaten Belu belum dapat memberikan gambaran Nilai Tukar Petani terhadap semua komoditas pertanian, hal ini dikarenakan belum ada lembaga yang melakukan penelitian terhadap semua jenis komoditas pertanian. Pada tahun 2020 Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu baru dapat melakukan Penelitian terhadap 1 (satu) Komoditas pertanian yakni Penelitian terhadap Nilai Tukar Bawang Putih dengan lokus kegiatan di 2 (dua Kecamatan) yakni Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa rerata harga yang diterima petani mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan harga jual komoditas bawang putih setiap tahunnya.

Berikut Tabel Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal di Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.

Tabel 2.86
Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal
Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020

Tahun	Index Harga yang dibayar (IB)	Index Harga Yang Diterima (IT)	NTP
2018	108,27	100,24	92,58709104
2019	106,23	103,20	97,14730347
2020	103.65	102,86	99,24636195

Sumber : data Diolah berdasarkan hasil isian Kuisisioner, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa NTP atau kesejahteraan petani bawang putih varietas lokal di Kabupaten Belu selama 3 (tiga) tahun mengalami defisit, artinya kenaikan harga jual bawang putih relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi ditandai dengan Nilai NTP yang kurang dari 100. Fenomena pergerakan nilai NTP bawang putih varietas Lokal dari tahun ke tahun



sangat dipengaruhi oleh kondisi harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai data NTP bawang putih varietas local di Kabupaten Belu dapat diketahui bahwa harga yang diterima petani bawang putih di Kabupaten Belu relative meningkat setiap tahun, meskipun dalam besaran yang kecil yaitu sebesar 0,13% Tahun 2018, 2,98% Tahun 2019, dan 2,79% Tahun 2020. Harga yang dibayar petani (IB) bawang putih varietas lokal relatif meningkat meningkat setiap tahun dengan peningkatan terbesar pada Tahun 2018 yaitu sebesar 8,3% jika dibandingkan dengan peningkatan harga yang dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar 6,2% dan Tahun 2020 sebesar 3,6%.

Dalam rangka peningkatan NTP bawang putih lokal Belu dan komoditas lainnya serta meningkatkan kesejahteraan petani lainnya maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui kegiatan:
 1. Melakukan pemulihan bibit;
 2. Menumbuhkan penangkar-penangkar benih;
 3. Penerapan paket teknologi intensifikasi (Sapta Usaha Tani);
 4. Perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman;
 5. Penataan Pola Usaha Tani dan Pola Tanam;
 6. Pengembangan Usaha Tani Belu Organik;
 7. Peningkatan Kapasitas petani.
- b. Strategi Peningkatan Kapabilitas Petani melalui optimalisasi Sistem penyuluhan kelembagaan petani melalui kegiatan :
 1. Penumbuhan Petani Muda;
 2. Penumbuhan penyuluh Swadaya;
 3. Penumbuhan, penilaian dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani;
 4. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- c. Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dengan kegiatan:
 1. Penetapan Kawasan-kawasan sentra produksi meliputi lokasi Petani, Kelompok Tani pelaksana serta pola pemasaran;
 2. Peningkatan skala ekonomi usaha petani dan kelompok tani;
 3. Pengembangan system agribisnis hulu dan hilir;
 4. Penumbuhan Koperasi kelompok tani;

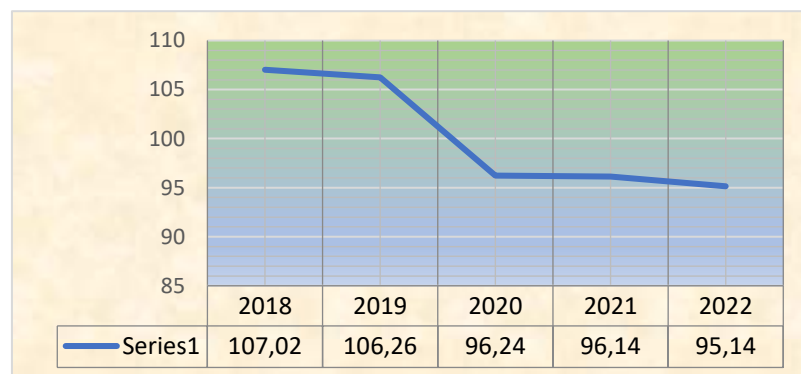


5. Pengembangan agroindustry;
6. Pemberdayaan BUMDes sebagai ATM petani/kelompok tani.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan pada komoditas Bawang putih ini merupakan satu dari sekian banyak komoditas yang berada di Kabupaten Belu sehingga tentunya tidak dapat mewakili semua komoditas, dengan demikian diharapkan kedepan akan dilakukan penelitian ilmiah di berbagai komoditas unggulan di kabupaten ini sehingga dapat memberikan gambaran yang pasti tentang kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani di Kabupaten Belu kedepan.

NTP Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembanding dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.

Grafik 2.31
Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Data pada grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Daerah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh



terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.87
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu
Tahun 2019-2025

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	62.6	58.49	59.31	45,28	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2025

Tabel di atas menunjukkan persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada Tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum menurun sebesar 45,28% .

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Indikator capaian urusan penataan ruang Kabupaten Belu adalah persentase dokumen rencana rinci. Capaian kinerja urusan penataan ruang Tahun 2021 adalah nol persen karena sesuai target kinerja bidang penataan ruang pelaksanaanya akan dikerjakan pada Tahun 2023.

2.1.4.2.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan yang mendukung fokus fasilitas wilayah dan juga mendukung aspek daya saing adalah indikator jumlah bank dan jumlah hotel/penginapan yang digambarkan sebagai berikut:



Tabel. 2.88
Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, KCP, Unit)	26	27	27	27	27
2	Jumlah Hotel	12	12	12	12	12

Sumber : BP4D Kabupaten Belu Tahun 2024

Sampai dengan Tahun 2022 lembaga perbankan yang berkembang di Kabupaten Belu sebanyak 27 Bank, dengan perincian 2 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Unit, yang didukung dengan ketersediaan ATM sebanyak 39 unit. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau orang yang berkunjung ke Kabupaten Belu baik untuk urusan keluarga, wisata maupun bisnis atau pekerjaan, didukung dengan ketersediaan hotel/penginapan sebanyak 12 hotel kelas melati dan juga fasilitas amenities lainnya seperti rumah makan, restoran, dan lain-lain. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari aspek daya saing daerah, Kabupaten Belu sangat memiliki potensi yang memadai.

2.1.4.2.4 Rumah Tangga menggunakan Air Bersih

Akses air minum layak di Kabupaten Belu sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Belu dan menjadi isu yang penting dan membutuhkan perhatian lebih karena peningkatan air minum yang layak akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9,22%, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak masih belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi capaian penyediaan air minum layak di Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah sebanyak 24.311 Rumah Tangga dari 61.957 total Rumah Tangga yang baru mencapai akses air minum layak atau sebesar 34,92% yang berarti masih ada 65,8% rumah tangga yang belum memiliki akses.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belu dalam pemenuhan akses air minum layak diantaranya adalah

- 1) ketersediaan sumber air yang terbatas di Kabupaten Belu;



- 2) kondisi topografi di Kabupaten Belu dimana pada umumnya letak sumber air berada di bawah permukiman penduduk sehingga diperlukan biaya yang besar untuk mendistribusikan air dari sumber air ke permukiman;
- 3) keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Belu sehingga sampai saat ini pembangunan air masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;
- 4) keberlanjutan program pembangunan air yang dilakukan Pemerintah Pusat kurang mendapat perhatian dari Pemerintah khususnya Pemerintah Desa, sehingga banyak program pembangunan air yang kondisinya terbengkalai dengan berbagai persoalan pasca program; dan
- 5) pengelolaan pemanfaatan air belum optimal dan menjadi perhatian pemerintah.

2.1.4.2.5 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Data mengenai listrik di Kabupaten Belu diambil menurut sumber penerangan yaitu bersumber dari PLN, Non PLN dan bukan listrik dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.89
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023

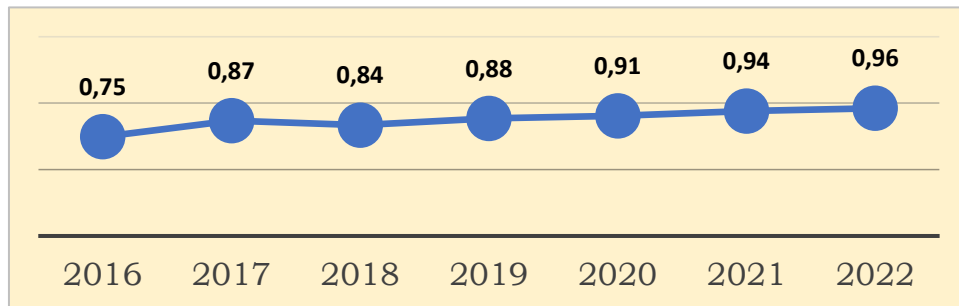
No	Jenis Penerangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PLN (%)	86,43	89,77	92,92	95,96	96,27
2	Non PLN (%)	2,06	0,75	1,12	0,18	0,28
3	Bukan Listrik (%)	11,51	9,47	5,95	3,86	3,45
4	Rasio Elektrifitas	0,88	0,91	0,94	0,96	0,96

Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024



Adapun gambaran rasio elektrifikasi di Kabupaten Belu tahun 2016-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.32
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022



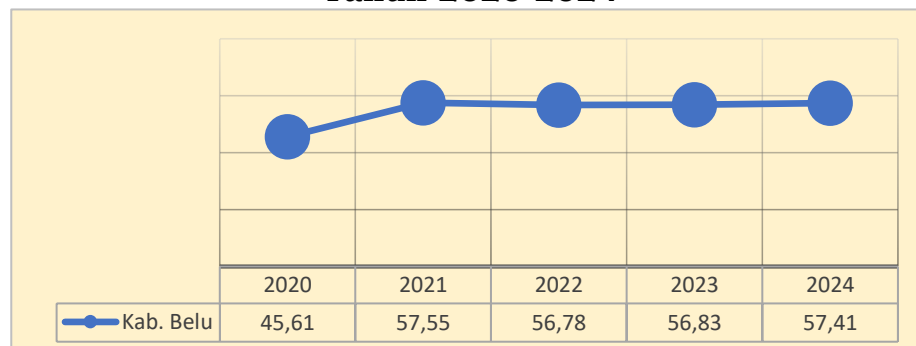
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

Grafik diatas menggambarkan rasio elektrifikasi Kabupaten Belu tahun 2016-2022 mengalami peningkatan 0,21 poin. Sedangkan rasio desa berlistrik Kabupaten Belu Tahun 2023 adalah 100%.

2.1.4.2.6 Penduduk Menggunakan HP

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang, Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang menggunakan Handphone (HP), Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini,

Grafik 2.33
Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang

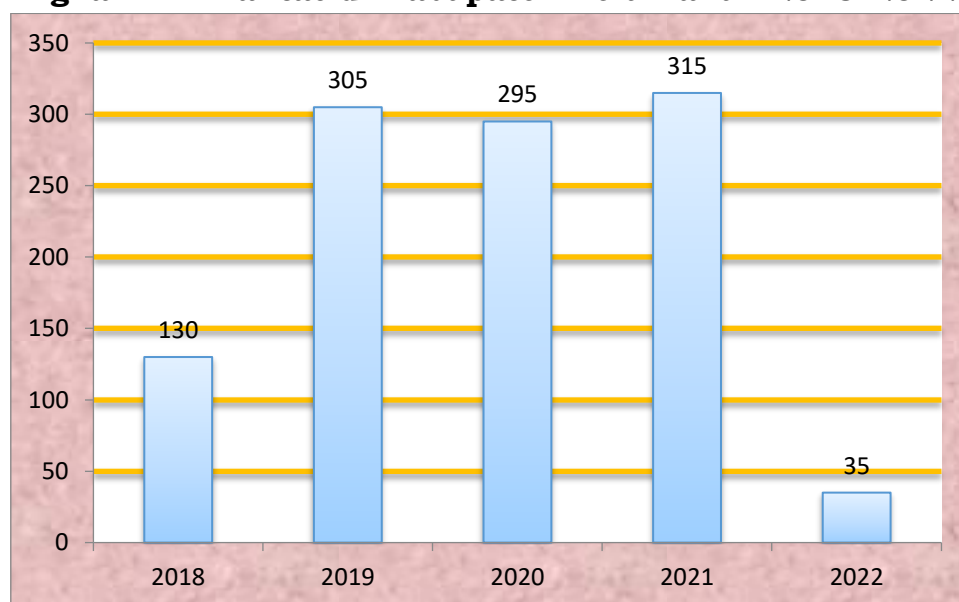


kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap beberapa indikator di bawah ini.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crimerate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 tergambar pada Grafik 2.34 berikut ini.

Grafik 2.34
Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022



Sumber : BPS, Belu Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan pada angka kriminalitas yang ada menggambarkan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan perlu terus untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian lewat forum komunikasi sosial kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar tumbuh perubahan sikap/perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan ketahanan sosial.



2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Tabel 2.90
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2018–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Unjuk Rasa/ Demonstrasi	4	3	5	14	2

Sumber: SIPD, Badan Kesbangpol Kabupaten Belu Tahun 2024

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Belu relatif aman dan terkendali, karena frekuensi demonstrasi yang relatif kurang di Kabupaten Belu. Kondisi ini tentunya sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Belu.

2.1.4.3.3 Lama Proses Perijinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Durasi waktu pengurusan izin berusaha dan Izin Usaha di Kabupaten Belu adalah minimal 1 (satu) hari selama jam dinas, apabila pelaku usaha/investor mengurus Izin Usaha dengan bantuan petugas *Front Office* DPMPSTSP Kabupaten Belu. Namun sesuai dengan regulasi dari Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan diberlakukannya OSS-RBA (*Online Single Submission*) bahwa pelaku usaha/investor berkewajiban mengurus perizinan berusahanya secara mandiri (*online*) melalui sistem OSS-RBA tersebut.



2.1.4.3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belu Tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.91
Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah

No	Jenis	Jumlah
1	Pajak Daerah	10
	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. PBB - P2 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	Retribusi Daerah	3
	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	

Sumber : Bapenda Kabupaten Belu Tahun 2022

2.1.4.3.5 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha

Untuk mendukung pengembangan iklim investasi dan usaha di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;



- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu 2020-2040.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif di Kabupaten Belu mengacu pada populasi yang berada dalam rentang usia yang siap secara fisik dan intelektual untuk berkontribusi dalam pasar kerja. Rentang usia produktif umumnya berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Rasio lulusan S1/S2/S3 merujuk pada perbandingan antara jumlah individu yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3) dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau populasi tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan tinggi dalam populasi dan dapat mencerminkan tingkat kemajuan pendidikan dalam suatu daerah. Deskripsi rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Belu akan memberikan informasi tentang tingkat kualifikasi pendidikan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut.

Rasio ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja atau belum memasuki usia kerja produktif dengan jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja produktif. Biasanya, kelompok yang tidak bekerja atau belum memasuki usia kerja



produktif meliputi anak-anak di bawah usia kerja (0-14 tahun) dan populasi lanjut usia (di atas 65 tahun). Rasio ketergantungan memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi yang bekerja terhadap populasi yang tidak bekerja dalam suatu daerah atau negara. Dalam konteks Kabupaten Belu, deskripsi rasio ketergantungan akan memberikan pemahaman tentang tingkat ketergantungan ekonomi dan potensi beban pada populasi yang berada dalam usia kerja produktif.

Kedua rasio ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami kondisi pendidikan dan ketergantungan ekonomi di Kabupaten Belu. Rasio lulusan S1/S2/S3 menyoroti tingkat pendidikan tinggi dalam populasi, sementara rasio ketergantungan menyoroti hubungan antara populasi yang bekerja dan tidak bekerja dalam konteks perekonomian. Kedua rasio ini penting untuk pemetaan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu serta untuk memahami potensi dan tantangan yang ada dalam ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan(ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.92
Indikator Ketenagaan Kabupaten Belu Tahun 2018– 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	3,21%	3,24%	3,31%	12,40%	12.05%
2	Rasio Ketergantungan	23,19%	42,10%	42,09%	N/A	51,13%

Sumber : Hasil olah data BP4D Tahun 2023

Data ketenagakerjaan Kabupaten Belu diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dari Tahun 2018-2022 meningkat, begitupun rasio ketergantungan yang di dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 12,05% dan paling rendah pada Tahun 2018 sebesar 3,21%. Rasio ketergantungan paling tinggi di Tahun 2022 sebesar 51,13%, terendah di Tahun 2018 sebesar 23,19%.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Evaluasi pelaksanaan SPM Tahun 2024 bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian target pelayanan, tingkat realisasi anggaran, serta efektivitas implementasi program di berbagai sektor. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Laporan ini menyajikan analisis terhadap capaian SPM hingga Triwulan 4 Tahun 2024 dengan fokus pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta Sosial. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi capaian yang telah berhasil diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta rekomendasi strategis untuk memastikan bahwa setiap bidang mampu memenuhi target SPM sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan ini diharapkan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat implementasi SPM di masa mendatang.

Tabel 2.93
Evaluasi SPM Tahun 2024

No	Bidang	STATUS Penginputan 2024 s/d TW 4	STATUS Pencapaian 2024 s/d TW 4	STATUS Realisasi Anggaran Tahun 2024 s/d TW 4
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (98.04 %)	68.38% (TUNTAS MUDA)	89.86%



2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (98.90 %)	83.53% (TUNTAS MADYA)	90.84%
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	100% (TUNTAS PARIPURNA)	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	100% (TUNTAS PARIPURNA)	100%
5	TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	95.6% (TUNTAS UTAMA)	99.65%
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input (85.00 %)	97% (TUNTAS UTAMA)	82.06%

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Berdasarkan data yang telah dikompilasi hingga Triwulan 4 Tahun 2024, terdapat variasi dalam pencapaian target di berbagai bidang pelayanan. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan kinerja yang optimal dengan tingkat penginputan data, pencapaian target, dan realisasi anggaran yang telah mencapai 100% (Tuntas Paripurna). Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi program yang dapat dijadikan contoh bagi bidang lainnya. Bidang Trantibumlinmas dan Sosial juga menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan kategori Tuntas Utama (masing-masing 95.6% dan 97%), meskipun tingkat penginputan data masih tergolong rendah, yaitu 85.71% dan 85.00%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar seluruh data dapat terdokumentasi dengan lengkap guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPM.

Di sisi lain, Bidang Kesehatan mencapai 83.53% (Tuntas Madya) dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi, yaitu 90.84%, menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas program agar mencapai kategori pencapaian yang lebih tinggi. Bidang Pendidikan menjadi perhatian utama karena pencapaiannya masih berada pada kategori Tuntas Muda (68.38%), meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 89.86%. Perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi anggaran dan pencapaian target ini menunjukkan adanya potensi kendala dalam implementasi program, baik dari aspek teknis maupun sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa anggaran yang telah direalisasikan dapat lebih optimal dalam meningkatkan capaian pelayanan.



Secara keseluruhan, meskipun realisasi anggaran di sebagian besar bidang telah mencapai angka yang cukup tinggi, masih terdapat beberapa bidang yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan capaian target sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas penginputan data, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran perlu terus dilakukan agar semua bidang dapat mencapai tingkat pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, evaluasi SPM Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa sebagian besar bidang telah mencapai target yang baik, tetapi perlu ada peningkatan di sektor Pendidikan dan optimalisasi anggaran di bidang Sosial. Beberapa kendala dan tantangan dalam implementasi SPM di Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Kendala dalam Bidang Pendidikan**

- **Capaian masih rendah (68.38%)** → Termasuk dalam kategori *Tuntas Muda*, yang berarti masih ada banyak aspek layanan yang belum terpenuhi.
- **Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana** → Masih ada sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai.
- **Kurangnya Tenaga Pendidik Berkualitas** → Distribusi guru yang tidak merata di wilayah terpencil atau perbatasan.
- **Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah** → Beberapa anak usia sekolah tidak bersekolah karena faktor ekonomi atau sosial.

2. **Kendala dalam Bidang Kesehatan**

- **Capaian masih di level *Tuntas Madya* (83.53%)** → Masih ada beberapa layanan kesehatan yang belum optimal.
- **Akses ke Fasilitas Kesehatan** → Daerah terpencil masih sulit mendapatkan layanan kesehatan karena infrastruktur jalan atau keterbatasan tenaga medis.
- **Ketersediaan Obat dan Peralatan Medis** → Stok obat yang tidak selalu tersedia tepat waktu di puskesmas dan rumah sakit.



- **Pemahaman Masyarakat tentang Kesehatan** → Masih ada yang enggan menggunakan layanan kesehatan karena kurangnya sosialisasi atau faktor budaya.

3. Kendala di Bidang Sosial

- **Realisasi anggaran masih rendah (82.06%)** → Indikasi adanya keterlambatan dalam pencairan dana atau alokasi yang kurang optimal.
- **Data yang Tidak Akurat atau Kurang Terpadu** → Pendataan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas atau lansia belum maksimal.
- **Koordinasi Antar Instansi** → Penyaluran bantuan sosial sering terkendala birokrasi atau regulasi yang kompleks.

4. Kendala Umum dalam Implementasi SPM

- **Koordinasi lintas sektor yang belum optimal** → Misalnya, sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga lain masih perlu diperkuat.
- **Kendala Regulasi dan Kebijakan** → Perubahan regulasi pusat yang mempengaruhi kebijakan daerah.
- **Kurangnya SDM yang Kompeten di Beberapa Bidang** → Misalnya, kurangnya tenaga teknis di sektor pekerjaan umum atau perumahan rakyat.
- **Kondisi Geografis Kabupaten Belu** → Sebagai daerah perbatasan, tantangan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi faktor penting.

Selanjutnya dalam implementasi SPM di Kabupaten Belu Tahun 2024 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah

- Pemerintah Kabupaten Belu telah menunjukkan komitmen dalam menyusun kebijakan berbasis data dan melakukan penginputan capaian SPM secara sistematis.

2. Realisasi Anggaran yang Cukup Baik

- Beberapa bidang, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah mencapai realisasi anggaran 100%, menunjukkan perencanaan yang baik.

3. Dukungan dari Masyarakat dan Pihak Eksternal



- Adanya keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung layanan publik, terutama dalam sektor sosial dan kesehatan.

4. **Teknologi dan Digitalisasi**

- Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data SPM dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

5. **Sinergi dengan Program Nasional dan Provinsi**

- Kebijakan RPJPD dan RPJPN yang selaras dengan program prioritas nasional dapat menjadi pendorong pencapaian SPM lebih optimal.

2.2.2. **Evaluasi RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024**

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2024 dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Proses evaluasi ini mencakup analisis capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi bahan refleksi dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, agar kebijakan pembangunan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2024 meliputi evaluasi terhadap rencana kerja perangkat daerah dan hasil kinerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja daerah masing-masing perangkat daerah. Kedua evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN
IV TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Kinerja		Capaian Realisasi Keuangan	
		%	Predikat	%	Predikat
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	66,76	Sedang	83,06	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	84,04	Tinggi	90,75	Tinggi
3	RSUD Atambua	75,00	Sedang	88,79	Tinggi



No.	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Kinerja		Capaian Realisasi Keuangan	
		%	Predikat	%	Predikat
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97,14	Sangat Tinggi	98,18	Sangat Tinggi
5	Satuan Polisi Pamong Praja	91,11	Sangat Tinggi	84,75	Tinggi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,38	Tinggi	92,36	Sangat Tinggi
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61,59	Rendah	89,49	Tinggi
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	97,37	Sangat Tinggi	86,87	Tinggi
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB	99,181	Sangat Tinggi	90,19	Tinggi
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	90,85	Tinggi	94,02	Sangat Tinggi
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	88,24	Tinggi	91,15	Sangat Tinggi
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	84,41	Tinggi	87,20	Tinggi
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	93,16	Sangat Tinggi	81,44	Tinggi
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92,31	Sangat Tinggi	91,53	Sangat Tinggi
III	URUSAN PILIHAN				
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	99,65	Sangat Tinggi	89,12	Tinggi
2	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	76,35	Sedang	97,68	Sangat Tinggi
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	95,10	Sangat Tinggi	88,82	Tinggi
4	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	96,88	Sangat Tinggi	86,09	Tinggi
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Bagian Pemerintahan	88,89	Tinggi	97,75	Sangat Tinggi
2	Bagian Hukum	100,00	Sangat Tinggi	98,60	Sangat Tinggi
3	Bagian Perekonomian dan SDA	93,97	Sangat Tinggi	95,45	Sangat Tinggi
4	Bagian Organisasi	100	Sangat Tinggi	98,05	Sangat Tinggi
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	Sangat Tinggi	97,62	Sangat Tinggi
6	Bagian Administrasi Pembangunan	96,30	Sangat Tinggi	80,03	Tinggi
7	Bagian Umum	94,42	Sangat Tinggi	97,19	Sangat Tinggi
8	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	100	Sangat Tinggi	88,63	Tinggi
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Sangat Tinggi	96,41	Sangat Tinggi
10	Sekretariat DPRD	77,25	Sedang	69,33	Sedang



No.	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Kinerja		Capaian Realisasi Keuangan	
		%	Predikat	%	Predikat
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	99,30	Sangat Tinggi	92,71	Sangat Tinggi
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	97,76	Sangat Tinggi	90,31	Sangat Tinggi
3	Badan Pendapatan Daerah	95,35	Sangat Tinggi	92,61	Sangat Tinggi
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	92,91	Sangat Tinggi	57,21	Rendah
5	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	100	Sangat Tinggi	85,92	Tinggi
6	Inspektorat	92,31	Sangat Tinggi	93,79	Sangat Tinggi
VI	Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan Kota Atambua	89,75	Tinggi	80,49	Tinggi
2	Kecamatan Tasifeto Barat	81,18	Tinggi	97,83	Sangat Tinggi
3	Kecamatan Tasifeto Timur	100	Sangat Tinggi	95,19	Sangat Tinggi
4	Kecamatan Raihat	100	Sangat Tinggi	76,96	Tinggi
5	Kecamatan Lamaknen	96,88	Sangat Tinggi	71,96	Sedang
6	Kecamatan Kakuluk Mesak	85,71	Tinggi	95,22	Sangat Tinggi
7	Kecamatan Raimanuk	100	Sangat Tinggi	95,38	Sangat Tinggi
8	Kecamatan Lasiolat	89,58	Tinggi	82,74	Tinggi
9	Kecamatan Atambua Selatan	100	Sangat Tinggi	71,98	Sedang
10	Kecamatan Atambua Barat	94,51	Sangat Tinggi	91,79	Sangat Tinggi
11	Kecamatan Lamaknen Selatan	88,92	Tinggi	89,75	Tinggi
12	Kecamatan Nanaet Duabesi	53,33	Sangat Rendah	79,77	Sedang
VII	Urusan Penunjang Unsur Pemerintahan Umum				
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86,19	Tinggi	99,55	Sangat Tinggi
Rata-rata realisasi >>>>>		88,70	Tinggi	88,28	Tinggi

Sumber: Data Olahan BP4D Tahun 2025.



Tabel 2.95
Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2024

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2026		Capaian Indikator Hingga Tahun 2024	Realisasi Kinerja (%)
		Target	Satuan		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
a.1	Persentase Penduduk Miskin	14,7	persen	13,86	106,06
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	17,5	persen	51,34	293,37
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	78	persen	66,84	85,69
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja				
a.1	TPT	2	persen	5,41	36,97
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	6,8	persen	4,8	70,59
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
b.1.2	Gender Vocal Point	100	persen	NA	0
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
c.1.1	Skor PPH	85,5	angka	NA	0
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa				
d.1	Persentase Desa Berkembang	78,26	persen	78,26	100,00
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	100	persen	71,01	71,01
e	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
e.1.1	Total Fertility Rate (Rate)	2,61	angka	NA	0
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,51	indeks	68,13	105,61
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	8,07	Juta Rp	8,159	101
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	5,1	persen	3,97	77,84
a.3	Inflasi	0,88	angka	2,59	33,98
a.4	Indeks GINI	0,32	indeks	0,32	100
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	7,71	tahun	7,5	97,28
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	12,48	tahun	12,32	98,72
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2026		Capaian Indikator Hingga Tahun 2024	Realisasi Kinerja (%)
		Target	Satuan		
b.1.1	Angka Harapan Hidup	66,18	tahun	67,5	101,99
b.2	Persentase <i>Stunting</i>	17	persen	44,30	-2,61
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	0,1	persen	1,3	7,69
c	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100	persen	60	60
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	22,22	persen	17,28	77,77
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup				
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	73,8	indeks	68,41	92,70
a.1.1	Indeks Kualitas Air	60,39	angka	53,75	89,00
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	93,34	angka	91,85	98,40
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,54	angka	50,25	83,00
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,76	persen	13,03	65,94
b	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	50,62	persen	0	0,00
c	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
c.1.1	SPBE	2,5	angka	2,47	98,80
d	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah				
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	97,03	persen	100	103,06
e	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal				
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1219	Miliar Rp	0	0,00
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	15,83	Rasio	94,75	598,55
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,09	indeks	93,08	104,48
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62	indeks	62,7	0
a.2.1	Nilai SAKIP	B	predikat	B	
		60	angka	60,54	100,90
a.2.2	LPPD	2,85	angka	2,15	75,44
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	persen	62,5	62,50
b	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
b.1.1	Maturitas SPIP	3	angka	2,90	96,63
c	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan				



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2026		Capaian Indikator Hingga Tahun 2024	Realisasi Kinerja (%)
		Target	Satuan		
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	100	persen	99,49	99,49
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	100	persen	88,7	88,70
d	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	11,07	persen	9,01	81,39
d.1.1	Opini atas Audit BPK	WTP	Opini	NA	0
e	Kepegawaian				
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	72,52	persen	59,26	81,72
f.	Penelitian dan Pengembangan				
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Sangat Inovatif	Kategori	NA	0
		90	Skor	NA	0
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	68,18	persen	50	73,34
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang				
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	39,01	persen	39,24	100,59
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	69,07	persen	40,32	58,38
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	42,6	persen	82,57	193,83
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,69	persen	64,71	92,85
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	22,68	angka	30,90	136,24
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	42,86	persen	14,29	33,34
B	Urusan Pemerintah Pilihan				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1213	Miliar Rp	1298,73	107,07
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	21,1	Miliar Rp	5,48	25,97
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	215	angka		0,00
c	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	807,23	Miliar Rp	915,08	113,36
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	33,67	Miliar Rp	81,29	241,43
Rata-rata Kinerja>>>>>					84,56

Sumber: Data Olahan BP4D Tahun 2025.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu.

Cakupan permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma berikut: a. Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; b. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; d. Terintegrasi, sehingga dapat mengifisenkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan e. Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh dari proses musrenbang menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas, yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat. Basis data yang digunakan dalam memetakan permasalahan pembangunan berasal dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang belum memuaskan.

Berikut adalah beberapa permasalahan pembangunan daerah yang selalu menjadi perhatian dalam program pembangunan di Kabupaten Belu:



1. Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi: Tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Belu. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi permasalahan yang perlu diatasi;
2. Infrastruktur yang kurang memadai: Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan rusak, keterbatasan akses air bersih, serta kurangnya listrik yang stabil. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat;
3. Ketergantungan pada sektor pertanian: Kabupaten Belu merupakan daerah dengan sektor pertanian yang dominan. Namun, sektor pertanian masih menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, ketergantungan pada cuaca, serta akses terbatas terhadap pasar dan teknologi pertanian. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian;
4. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan: Kabupaten Belu masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya fasilitas kesehatan dan sekolah, tenaga medis dan pendidik yang terbatas, serta keterbatasan aksesibilitas geografis menjadi permasalahan yang perlu ditangani;
5. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam: Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Deforestasi, kerusakan ekosistem, polusi air dan udara, serta degradasi lahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam di Kabupaten Belu;
6. Pengangguran dan kesenjangan kerja: Tingkat pengangguran yang tinggi dan kesenjangan kerja antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Kurangnya lapangan kerja formal, kurangnya keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, serta migrasi tenaga kerja yang tidak



terkendali dapat menyebabkan ketimpangan dan pengangguran struktural;

7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan: Kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghambat pembangunan daerah. Kurangnya transparansi, akuntabilitas yang rendah, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi permasalahan serius dalam menjalankan pembangunan daerah yang efektif.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan secara umum di atas, kemudian dijabarkan berdasarkan urusan pembangunan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Belu.

Tabel 2.96
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
(1)	(2)	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
1.	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Masih terdapat tenaga pendidik PAUD dan SD yang belum memiliki ijazah S1/D4
2.	Rendahnya akses ke pendidikan berkualitas	Masih banyak sekolah dengan Akreditasi Sekolah kategori C
3.	Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS)	Kemampuan ekonomi keluarga yang terbatas
		Lemahnya pola asuh orang tua
		Motivasi anak untuk bersekolah rendah
4.	Belum meratanya distribusi tenaga pendidik	Lemahnya kebijakan distribusi tenaga pendidik pada satuan pendidikan
5.	Rendahnya akhlak peserta didik	Rendahnya pendidikan karakter pada satuan pendidikan
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.	Masih adanya kasus gizi buruk	1. Pola konsumsi tidak tepat 2. Pola Asuh tidak tepat 3. PHBS (perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang masih kurang
2.	Masih adanya <i>stunting</i>	Pelaksanaan SOP intervensi spesifik dan sensitif belum memadai
3.	Belum optimalnya pelayanan ibu hamil	Pelaksanaan SOP pelayanan kesehatan Ibu dan anak belum baik
4.	Masih adanya angka kematian Ibu (AKI)	Pelaksanaan SOP pelayanan kesehatan Ibu dan anak belum baik



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
5.	Masih adanya angka kematian bayi (AKB)	Pelaksanaan SOP pelayanan kesehatan Ibu dan anak belum baik
6.	Masih adanya angka kematian balita (AKABA)	Pelaksanaan SOP pelayanan kesehatan Ibu dan anak belum baik
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif belum optimal	Edukasi dan layanan usia produktif belum memadai
8.	Belum tercapainya target penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular	Pelaksanaan SOP upaya preventif dan promotif (perilaku hidup bersih dan sehat) belum memadai
9.	Rendahnya Persentase ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata
10.	Belum optimalnya pemberian layanan kegawatdaruratan	Tenaga kesehatan belum berkompeten (tidak bersertifikasi)
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.	Menurunnya persentase kemantapan jalan kabupaten	Perencanaan , Penganggaran pembangunan dan pemeliharaan rutin/berkala jalan kabupaten yang kurang memadai
2.	Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi.	Perencanaan, Penganggaran pembangunan dan pemeliharaan rutin/berkala jalan desa dan lingkungan
3.	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi	Sistem Pengelolaan air yang belum berjalan baik
4.	Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih	Terbatasnya sumber air baku
5.	Rendahnya kualitas penataan ruang	Terbatas Regulasi dan Koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Rendahnya kualitas perumahan	persentase rumah tidak layak huni masih tinggi Pemenuhan persyaratan RLH yang masih rendah (dalam aspek arsitektur, struktur dan utilitas)
2.	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan yang belum optimal	SOP Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan perumahan dan pemukiman yang belum baik
		Pemenuhan Prasarana Sarana Utilitas
e	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.	Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum	Masih kurangnya koordinasi kamtrantibmas dan penegakan perda
2.	Masih adanya potensi konflik sosial dan lemahnya ketahanan sosial masyarakat	Masih kurangnya koordinasi kamtrantibmas dan penegakan perda
3.	Masih rendahnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	Kurangnya sapras penunjang
4.	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana	



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
	kebakaran	
5.	Persentase Desa Tangguh Bencana masih rendah	Pemenuhan persyaratan Destana yang masih rendah
f	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
1.	Masih Rendahnya jumlah wirausaha pemuda pemula	Kurangnya pembinaan/pelatihan dan dukungan modal bagi kelompok wirausaha pemuda pemula
2.	Jumlah prestasi cabor masih kurang	Sitem Pembinaan/ pelatihan, kompetisi dan dukungan sapras yang kurang memadai
k	Urusan Bidang Sosial :	
1.	Tingkat kemiskinan Kabupaten Belu masih di atas 10%	Tingginya harga bahan pokok
		Tingginya angka pengangguran
		Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kecukupan lahan pertanian
2.	Rendahnya kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyakat miskin dan rentan miskin	kelompok penerima manfaat belum tepat sasaran
3.	Masih rendahnya PMKS yang diberdayakan	Pendataan dan identifikasi terhadap PMKS yang belum optimal Terbatasnya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
a	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
1	Rendahnyanya produktifitas tenaga kerja	Rendahnya Kompetensi dan Keahlian
2	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	Ketersediaan Lapangan kerja masih kurang Rendahnya Kompetensi dan Keahlian Informasi bursa kerja masih terbatas Belum memiliki balai latihan kerja
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Rendahnya Indeks Perlindungan Anak	Rendahnya aksesibilitas pendidikan dan kualitas pendidikan serta kurangnya fasilitas untuk kegiatan rekreasi dan budaya
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
1.	Masih adanya kepemilikan lahan masyarakat dan pemerintah yang belum bersertifikasi	Masih adanya konflik agrarian
d	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
1.	Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan	Menurunnya indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air
		Belum ada dokumen RPPLH dan dokumen pengelolaan KEHATI (dokumen profil KEHATI dan dokumen induk KEHATI)
		Terbatasnya instrumen pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup (pemantauan dan pengawasan)



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
		Pengendalian dan Pengawasan LH masih lemah.
		Kurangnya SDM yang memadai
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.	Rendahnya pengelolaan kualitas BUMDES	SDM Pengelola BUMDES belum profesional Perencanaan, pengelolaan dan Pengawasan BUMDES belum professional
2.	Indeks Desa Membangun (IDM) masih dalam kategori berkembang	Kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan belum terbangun
e	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	
1.	Cakupan kepemilikan administrasi kependudukan	Jangkauan pelayanan yang luas Sarana dan prasarana pengelolaan pencatatan sipil belum memadai Terbatasnya SDM
2.	Penyediaan data dan informasi kependudukan belum optimal	Belum terintegrasinya data kependudukan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
f	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Masih ada Angka Kelahiran pada Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	Rendahnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi bagi Remaja Putri
2	Masih rendahnya Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	Rendahnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi bagi PUS Sistem pendataan yang belum optimal
g	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
1.	Terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi publik wilayah perbatasan dan tempat wisata	Manajemen transportasi publik belum tersedia Rendahnya kualitas layanan prasarana transportasi publik (terminal)
2.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Belum memiliki alat pengujian KIR Kualitas SDM terkait IT dan penguji KIR yang masih kurang memadai
3.	Cakupan pelayanan penerangan jalan umum belum optimal	Masih kurangnya Tenaga PJU terlatih Kurangnya sapras
4.	Penataan Parkir Kendaraan dalam kota yang belum optimal	Belum ada manajemen pengelolaan parkir
h	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	
1.	Belum optimalnya SPBE	Belum tersedianya dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Tidak mempunyai SDM dan Sarpras yang memadai
i	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan	



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
	UMKM	
1.	Terbatasnya akses pemasaran produk	SDM yang terbatas dan Kualitas produk masih rendah
2.	Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat	Sistem pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM yang berorientasi profit belum memadai.
k	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
1.	Realisasi nilai investasi daerah masih rendah	Belum tersedianya peta potensi investasi Promosi dan Komunikasi Bisnis belum berjalan baik.
2.	Belum optimalnya pelayanan publik	Sarana dan prasarana belum memadai
l	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
1.	Belum optimalnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Data terkait wirausaha pemuda pemula belum optimal Organisasi kepemudaan yang aktif masih rendah
2.	Terbatasnya cabang olah raga yang berprestasi	Kurangnya sarana, prasarana olahraga yang terstandar dan kurangnya event-event olah raga yang diselenggarakan
m	Urusan Pemerintahan Bidang statistik	
1.	Ketersediaan data statistik sektoral yang belum memadai	Sitem Pengelolaan data terpadu belum tersedia SDM Statistik yang kurang memadai
n	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	
1.	Belum tersedianya system dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Persandian	Terbatasnya tenaga Sandiman daerah
o	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
1.	Pengembangan kebudayaan yang belum optimal	Kurangnya event – event budaya lokal (festival budaya) yang dilakukan
2.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang belum optimal	Rendahnya pemeliharaan situs, benda dan kawasan cagar budaya
p	Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan	
1.	Pembinaan Perpustakaan belum optimal	Terbatasnya ketersediaan bahan pustaka Masih terbatasnya SDM pustakawan yang berkualitas
q	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
1.	Belum optimalnya pengelolaan Arsip	Belum tersedianya arsip elektronik Belum memiliki SDM yang berkompetensi (arsiparis)
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
a	Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan	
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap yang belum optimal	Terbatasnya Input-Input produksi dan produktivitas perikanan tangkap
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
1.	Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang belum optimal	Infrastruktur pendukung belum memadai Manajemen pariwisata belum berjalan baik
2.	Pemasaran Pariwisata yang belum optimal	Kurangnya kegiatan pemasaran pariwisata Penyediaan data dan informasi pariwisata kabupaten yang masih terbatas Terbatasnya Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Sistem Kerjasama dan kemitraan pariwisata belum tersedia
3.	Belum optimalnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum tersedianya Prasarana (Ruang Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten Pengembangan manajemen berusaha Ekonomi Kreatif masih terbatas (permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif, keterampilan berusaha)
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
1.	Menurunnya angka produksi tanaman pangan (komunitas padi dan jagung)	Faktor alam (musim panas yang panjang dan rendahnya musim hujan) Rendahnya akses terhadap pupuk Kurangnya Tenaga kerja produktif Ketersediaan sarana produksi petani masih terbatas Rendahnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam mengelola pertanian dengan menggunakan teknologi
2	Petani belum sejahtera	Rencahnya Nilai Tukar Petani (NTP) atau harga jual komoditi pertanian Terbatasnya Pemanfaatan lahan
d	Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan	
1	Menurunnya populasi ternak	pola manajemen pemeliharaan ternak yang masih rendah dan belum terarah Adanya Virus ASF (<i>African Swine Fever</i>)
e	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
1.	Belum optimalnya penerimaan retribusi pasar	Sebaran obyek pasar yang luas dan terbatasnya obyek penerimaan, serta Keterbatasan Sarana Pendukung dan SDM
2.	Kegiatan perdagangan (eksport dan import) produk unggulan daerah belum secara optimal	Masih terbatas komoditi produk unggulan daerah Keikutsertaan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang terbatas



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
f	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	
1.	Belum optimalnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, pemberdayaan dan manajemen industri yang belum berjalan baik.
g	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	
	Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang belum berjalan baik
		Unit Permukiman yang difasilitasi pembinaannya masih terbatas
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
a	Perencanaan	
1.	Belum konsistensinya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan teknis lainnya	Kurangnya koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan
		Belum ada regulasi yang mengatur perencanaan tingkat daerah
		SDM perencana yang berkompeten masih terbatas
b	Keuangan	
1.	Rasio kemandirian daerah masih termasuk kategori rendah	Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih tinggi dan PAD yang masih rendah
2.	Belum optimal Pengelolaan Barang Milik Daerah	SOP pencatatan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan baik.
3.	Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi belum terintegrasikan dengan baik
4.	Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sistem pengelolaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terkait pajak dan retribusi daerah belum memadai. Terbatasnya dukungan Sarana dan SDM
		Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi
c	Kepegawaian	
1.	Belum optimalnya Manajemen SDM ASN	Belum tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
		Perencanaan SDM ASN oleh Perangkat Daerah belum optimal
d	Pendidikan dan Pelatihan	
	Belum optimalnya Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Terbatasnya kesempatan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara
e	Penelitian dan Pengembangan	
1.	Terbatasnya kegiatan penelitian dan pengembangan daerah	Belum memiliki tenaga fungsional peneliti
2.	Belum dimanfaatkannya Hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan	Hasil penelitian belum menjadi prioritas dalam penyusunan



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
	pembangunan	perencanaan daerah
		Belum dilaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
3.	Pengembangan inovasi daerah yang masih rendah	Rendahnya kreatifitas ASN dalam berinovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan
		Iklim inovasi belum memadai
f	Pengelolaan Perbatasan	
1.	Masih rendahnya pengelolaan perbatasan	Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi pengelolaan perbatasan belum optimal
		Tindak lanjut Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan belum optimal
g	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
1.	Penyelenggaraan Pengawasan yang belum optimal	Terbatasnya Kapasitas sumberdaya APIP dan sarana pendukungnya
		Sistem Koordinasi manajemen administrasi perangkat daerah belum memadai. sehingga nilai Maturitas SPIP masih rendah
h	Unsur Kewilayahan	
1.	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kecamatan belum memiliki SOP terkait pelayanan masyarakat
		kurangnya SDM dan minimnya sarpras pendukung administrasi perkantoran
i	Unsur Pemerintahan Umum	
	Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Masih adanya kasus unjuk rasa/demonstrasi	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial belum memadai
j	Fungsi Penunjang Lainnya	
1.	Reformasi Birokasi yang belum optimal	Koordinasi dan komunikasi terkait penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi belum memadai
		SOP perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal SAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten belum berjalan baik.
2.	Nilai LPPD yang belum optimal	SOP perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah belum memadai
		Koordinasi dan komunikasi terkait mekanisme penyusunan LPPD belum memadai
3.	Belum optimalnya kualitas produk hukum daerah	Belum tersedianya SOP terkait kualitas produk hukum
4.	Kualitas pengadaan barang dan jasa yang belum optimal	Belum memiliki fungsional pengelola pengadaan barang/jasa



No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Akar Masalah
5.	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian belum optimal	Koordinasi pengendalian inflasi daerah, pengawasan BUMD dan BLUD serta kebijakan perekonomian lainnya belum optimal
6.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat belum optimal	Terbatasnya Koordinasi terkait bina mental spiritual,kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan kesejahteraan msyarakat
7	Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terbatasnya Koordinasi terkait Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang belum optimal	Ketersediaan SDM, sarana dan prasarana penunjang keprotokolan dan komunikasi pimpinan masih terbatas
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah belum optimal	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah belum memadai

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2025



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kabupaten Belu masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan daerah. Struktur ekonomi daerah ini didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta perdagangan lintas batas dengan Timor Leste. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, sehingga ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa menjadi sangat tinggi. Sementara itu, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional dibandingkan dengan belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat menimbulkan berbagai tantangan bagi Kabupaten Belu, seperti rendahnya kemandirian fiskal, minimnya investasi swasta akibat infrastruktur dan iklim investasi yang belum optimal, serta daya saing ekonomi yang masih terbatas. Selain itu, sumber PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi masih belum berkembang secara maksimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, serta digitalisasi layanan publik guna meningkatkan efisiensi penerimaan daerah.

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif, mengembangkan sektor unggulan seperti pariwisata dan industri pertanian berbasis hilirisasi, serta memperkuat kerja sama ekonomi dengan Timor Leste guna memperluas pasar. Upaya menarik investasi swasta juga harus ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan, pembangunan kawasan ekonomi khusus atau industri, serta pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung sektor ekonomi potensial.

Dalam hal pengelolaan anggaran, efisiensi dan efektivitas APBD perlu



ditingkatkan dengan menerapkan pendekatan berbasis kinerja dan hasil, mengurangi belanja yang tidak produktif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Kabupaten Belu dapat secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat dan menuju kemandirian ekonomi serta keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2026, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Belu difokuskan pada peningkatan produktivitas yang mendukung kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan investasi, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Mengingat ketergantungan Kabupaten Belu yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat, strategi ekonomi diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu prioritas utama adalah penguatan sektor unggulan, seperti pertanian, peternakan dan perikanan berbasis agribisnis serta pariwisata yang berorientasi pada ekonomi lokal dan perdagangan lintas batas dengan Timor Leste. Pemerintah daerah akan mendorong hilirisasi produk pertanian dan peternakan guna meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar bagi produk lokal. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata akan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan investasi, Kabupaten Belu akan mendorong kemudahan berusaha dan penguatan infrastruktur ekonomi. Reformasi regulasi dan perizinan akan dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan konektivitas infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan pasar sentra guna memperlancar arus barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.

Dari sisi keuangan daerah, strategi akan difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat sistem perpajakan daerah, mengembangkan sumber pendapatan baru, serta



meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Digitalisasi layanan publik dan sistem administrasi pajak akan diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penerimaan daerah.

Selain itu, Kabupaten Belu akan menerapkan pendekatan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan memperkuat peran UMKM, koperasi, serta ekonomi kreatif agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas juga akan diperluas untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja lokal.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Belu tahun 2026 akan berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi daerah, penguatan kemandirian fiskal, serta pembangunan yang berbasis pada keunggulan lokal dan keberlanjutan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Belu dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan dinamis.

Dalam konteks Kabupaten Belu, pembangunan daerah tahun 2026 mengusung tema RKPD *"Meningkatkan Produktivitas untuk Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing"*. Meningkatkan produktivitas merupakan kunci utama dalam mencapai ekonomi inklusif dan berdaya saing, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Peningkatan produktivitas juga berarti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu ditargetkan mencapai 6,27%, didorong oleh peningkatan produktivitas sektor unggulan, investasi yang berkelanjutan, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal. Sementara itu, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 2,39%, dengan strategi utama meliputi:

- Penguatan distribusi barang untuk memastikan kelancaran pasokan dan aksesibilitas kebutuhan pokok.
- Ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat guna menjaga stabilitas harga.
- Membangun ekspektasi positif masyarakat melalui kebijakan yang



proaktif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik, RKPD Kabupaten Belu 2026 berfokus pada sepuluh prioritas utama:

1. Revolusi pertanian menuju tani mandiri: Revolusi pertanian menuju tani mandiri akan dicapai dengan memberikan akses kepada petani untuk mendapatkan benih unggul, pupuk, dan teknologi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, permodalan serta pendampingan melalui digitalisasi pertanian;
2. Perluasan akses berusaha bagi UMKM melalui penyediaan ekosistem pembiayaan daerah: Penguatan UMKM akan dilakukan melalui penyediaan ekosistem pembiayaan daerah, termasuk pembentukan lembaga keuangan mikro, pelatihan literasi keuangan, serta pengembangan platform digital untuk pemasaran produk UMKM;
3. Fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja: Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas dengan memperluas akses ke pasar kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan bursa kerja digital, program magang, serta dukungan bagi wirausaha baru;
4. Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar: Dalam sektor pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dasar akan dilakukan melalui penguatan kapasitas guru, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik, serta program sekolah gratis bagi siswa/i kurang mampu;
5. Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan: Pemenuhan layanan kesehatan dasar akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dengan perlindungan kesehatan bagi warga tidak mampu serta pembangunan dan revitalisasi Puskesmas, penyediaan tenaga medis yang memadai, digitalisasi layanan kesehatan, serta program gizi untuk mengatasi masalah stunting di Masyarakat;
6. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu: Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu akan diwujudkan melalui program pembangunan rumah subsidi, dan bedah rumah;
7. Penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat: Untuk menjamin ketersediaan air bersih, penyediaan air baku akan diperkuat



- dengan pembangunan embung, sumur bor, dan jaringan distribusi air, serta penguatan kelembagaan pengelolaan air berbasis desa;
8. Digitalisasi layanan pemerintahan menuju *smart governance*: Digitalisasi layanan pemerintahan menuju *smart governance* akan dilakukan dengan membangun sistem e-Government, menyediakan platform layanan publik online, serta memperkuat infrastruktur digital di pusat pelayanan publik;
 9. Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proposional: Sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah akan memberikan tambahan penghasilan secara proporsional berdasarkan evaluasi kebijakan remunerasi berbasis kinerja; dan
 10. Perwujudan Atambua sebagai *central festival of Timor* (pusat festival Pulau Timor): Dalam upaya mewujudkan Atambua sebagai *Central Festival of Timor*, berbagai festival budaya dan olahraga akan diselenggarakan secara rutin, didukung oleh pembangunan infrastruktur pariwisata dan kolaborasi dengan negara tetangga dalam pengembangan ekowisata serta ekonomi kreatif berbasis budaya dan seni lokal.

Melalui strategi ini, Kabupaten Belu diharapkan semakin siap dalam menghadapi tantangan pembangunan serta mempercepat langkah menuju daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

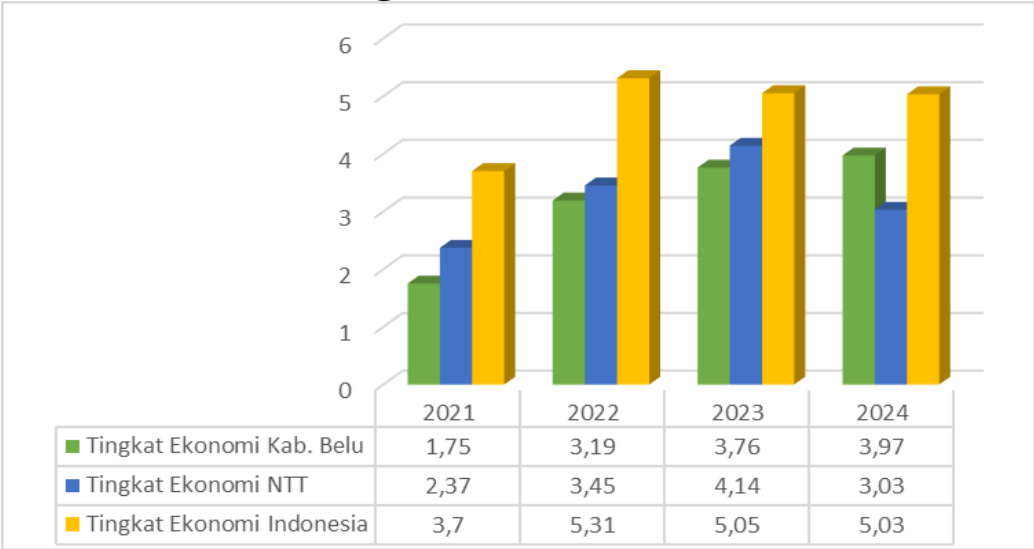
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu menunjukkan tren positif selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,75%, mencerminkan kondisi pemulihan awal pasca pandemi COVID-19 yang masih membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. Memasuki tahun 2022, pertumbuhan meningkat signifikan menjadi 3,19%, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang cukup kuat seiring dengan meningkatnya mobilitas, aktivitas perdagangan, serta stimulus dari pemerintah. Tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,76% dan 3,97%, menunjukkan bahwa perekonomian terus bergerak ke arah yang positif, meskipun laju



pertumbuhannya mulai melambat. Perlambatan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi untuk mendorong akselerasi ekonomi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu cenderung stabil dan positif, namun masih berada di bawah angka ideal untuk menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan terarah, termasuk penguatan sektor unggulan lokal, peningkatan infrastruktur, serta perluasan kerja sama ekonomi lintas batas, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. Gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

2. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Di daerah kabupaten, PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah daerah. Sektor ekonomi di daerah Kabupaten Belu terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian,



peternakan, perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Sektor pertanian dan peternakan masih menjadi sektor utama di Kabupaten Belu, sementara sektor industri dan pariwisata masih dalam tahap pengembangan. Perkembangan sektor-sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu.

Tabel 3.1
PRDB ADHb Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	994,95	1.031,41	1.136,50	1.225,08	1.298,73
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	91,65	94,53	99,65	105,01	109,29
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	49,45	50,59	56,40	66,25	81,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	3,15	3,37	3,62	4,17	4,3
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,09	1,22	1,32	1,36	1,39
F	Konstruksi/Construction	381,54	409,36	433,82	491,41	506,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	627,42	671,64	742,62	839,55	915,08
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	211,58	219,68	244,90	275,56	323,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	16,30	16,82	18,90	21,47	24,49
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	192,47	201,50	214,51	222,80	235,19





Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	268,74	287,89	314,22	327,15	344,34
L	Real Estat/Real Estate Activities	102,83	104,13	116,28	131,77	152,33
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2,47	2,12	2,32	2,53	2,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	612,13	613,53	621,16	645,75	758,91
P	Jasa Pendidikan/Education	745,88	739,10	766,13	831,13	866,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	114,44	127,09	129,91	147,69	157,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	133,60	125,06	133,33	141,88	148,75
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		4.549,71	4.699,02	5.035,59	5.480,55	5.931,22

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025

Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Belu tahun 2024 adalah dari kategori A pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1.298,73 miliar rupiah atau 21,90 persen. Berikutnya adalah dari Kategori G sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 915,08 miliar rupiah atau 15,43 persen dan kategori P jasa pendidikan sebesar 866,59 miliar rupiah atau 14,61 persen. Sedangkan, capaian terendah pada tahun 2024 terdapat pada kategori E pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 1,39 miliar rupiah atau 0,02 persen.





Tabel 3.2
PRDB ADHk Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	663,59	682,27	716,84	734,32	745,21
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	61,20	62,40	63,74	65,59	68,28
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	32,09	32,37	35,09	37,89	42,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,16	2,28	2,32	2,59	2,69
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,66	0,73	0,77	0,79	0,81
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	222,94	234,60	233,54	252,52	257,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	359,21	375,85	401,71	426,56	438,71
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	145,54	150,15	156,78	164,60	177,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	11,17	11,53	12,61	13,57	14,59
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	151,16	156,83	166,04	171,19	178,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	185,67	189,93	192,61	196,60	204,22
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	80,18	81,95	86,25	90,14	93,56
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,58	1,35	1,41	1,46	1,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	417,38	413,24	416,12	416,91	460,96
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	467,26	458,10	460,72	481,66	491,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	78,03	84,32	85,85	90,10	94,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	88,42	82,12	83,82	86,99	89,74
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		2.968,23	3.020,03	3.116,22	3.233,47	3.361,74

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025

PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun 2021- 2024,





yang menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa telah mengalami peningkatan.

3. Investasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.2
Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Miliar Rp)
2020	226.352
2021	7.899
2022	16.174
2023	680.813
2024	46.236

Sumber: DPMPSTP, 2023

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja investasi daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Kondisi ini perlu dievaluasi untuk bisa



meningkatkan dan mempertahankan investasi yang dilakukan di Kabupaten Belu.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu daerah, dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Di Kabupaten Belu, tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, tingkat pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikasi dari masalah dalam perekonomian daerah, seperti kurangnya peluang kerja dan investasi, serta rendahnya tingkat produktivitas.

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,41% dari kondisi tahun 2023 sebesar 5.45%. Walaupun demikian jumlah penganguran masih menjadi hal krusial Hal ini disebabkan karena penambahan angkatan kerja tidak semuanya terserap di pasar kerja.

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35
2022	6.00
2023	5.45
2024	5.41

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar. Berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai





dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;

2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga /perusahaan, dan pekerja).

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

1. Tantangan

Perekonomian Kabupaten Belu pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, nasional, dan regional. Ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu oleh geopolitik global, tekanan inflasi, dan gangguan rantai pasok masih menjadi tantangan yang harus diwaspadai. Di tingkat nasional, arah kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas makroekonomi turut memengaruhi ruang fiskal dan kinerja ekonomi daerah. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan Kabupaten Belu adalah:

a. Ketidakpastian Ekonomi Global

Konflik geopolitik berkepanjangan seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel-Hamas-Iran, serta tekanan inflasi dan fluktuasi harga energi dan pangan global, turut memberikan dampak pada harga komoditas dan biaya produksi lokal. Hal ini menyulitkan perencanaan ekonomi daerah jangka menengah dan menekan daya beli masyarakat.

b. Keterbatasan Daya Saing Produk Lokal

Produk-produk lokal, khususnya dari sektor pertanian,



peternakan, dan industri kecil, masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Hal ini menyulitkan pelaku usaha lokal untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, termasuk dalam memanfaatkan peluang perdagangan lintas batas dengan Timor-Leste.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis masyarakat Belu menjadi tantangan tersendiri di tengah kebutuhan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi dan berorientasi pasar. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

d. Ketimpangan Wilayah dan Sosial Ekonomi

Distribusi pembangunan yang belum merata, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah tengah dan pesisir/perbatasan, berkontribusi terhadap kesenjangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

e. Vulnerabilitas terhadap Perubahan Iklim

Kabupaten Belu yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan panjang, banjir bandang, dan degradasi lingkungan. Hal ini mengancam ketahanan pangan dan kelangsungan usaha tani masyarakat.

f. Pemanfaatan Posisi Strategis Perbatasan yang Belum Optimal

Meskipun Kabupaten Belu memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah timur dan Atambua telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), namun peran kawasan perbatasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih belum signifikan, khususnya dalam sektor perdagangan, jasa logistik, dan konektivitas pasar.

2. Prospek

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kabupaten Belu memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan jika mampu



mengoptimalkan potensi unggulannya secara terarah dan berkelanjutan. Peluang pengembangan ekonomi tahun 2025–2026 terutama terletak pada sektor-sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja serta konektivitas ekonomi lintas batas. Beberapa prospek utama meliputi:

a. Penguatan Sektor Unggulan Lokal

Sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi, diversifikasi produk, dan penerapan teknologi tepat guna. Program pemberdayaan petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

b. Akses Pembiayaan dan Investasi Daerah

Penguatan kelembagaan keuangan mikro, koperasi, serta kolaborasi dengan lembaga perbankan dan non-bank dapat membuka akses modal bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, pemberian insentif investasi dan kemudahan perizinan diharapkan dapat menarik investor di sektor agroindustri, logistik, dan perdagangan perbatasan.

c. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan produksi, irigasi, jaringan air bersih, listrik pedesaan, serta digitalisasi desa menjadi kunci mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

d. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kawasan PKSN Atambua menjadi peluang besar untuk pengembangan jasa perdagangan internasional, jasa pergudangan, pusat logistik, dan pusat ekonomi kreatif berbasis budaya perbatasan. Hal ini dapat dikembangkan melalui kemitraan strategis dengan Timor-Leste dan penguatan konektivitas darat serta digital lintas negara.

e. Penguatan SDM dan Kewirausahaan Lokal

Program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi, pengembangan inkubasi bisnis, dan pemberdayaan pemuda dan perempuan di sektor ekonomi kreatif menjadi kunci mempercepat



transformasi ekonomi daerah.

f. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, pemasaran produk UMKM, pengembangan e-commerce, dan pencatatan usaha menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dukungan terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial dalam jangka panjang.

Dengan strategi pembangunan yang tepat, sinergi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang progresif, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing wilayah, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025 dan 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belu tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Mengingat ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat, strategi keuangan daerah diarahkan untuk memperkuat sumber pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi belanja daerah, serta mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu prioritas utama adalah optimalisasi PAD melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi yang berbasis potensi ekonomi lokal. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber pendapatan baru, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengembangkan sistem digitalisasi administrasi pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan daerah. Selain itu, aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dikelola lebih produktif guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dari sisi pengelolaan belanja daerah, kebijakan akan difokuskan



pada peningkatan efisiensi dan efektivitas APBD dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Prioritas belanja daerah akan diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan ekonomi lokal. Belanja pegawai dan operasional akan dioptimalkan agar tidak menghambat ruang fiskal bagi belanja modal yang lebih produktif.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong inovasi dalam pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema kerja sama dengan sektor swasta (Public-Private Partnership/PPP) serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih efektif untuk proyek-proyek strategis. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga donor guna mendapatkan dukungan pendanaan untuk program pembangunan prioritas.

Dalam aspek tata kelola keuangan, Kabupaten Belu akan terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem e-budgeting dan e-reporting. Pengawasan penggunaan anggaran akan ditingkatkan untuk memastikan setiap alokasi belanja daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belu tahun 2026 berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan strategi ini, diharapkan Kabupaten Belu dapat memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Belu tahun 2026 didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kapasitas fiskal, serta kebijakan nasional dalam distribusi dana transfer ke daerah. Mengingat kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat, strategi pendanaan akan difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi belanja daerah,



serta pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

Pendapatan daerah Kabupaten Belu Tahun 2026 diperkirakan masih akan didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, meskipun upaya peningkatan PAD terus dilakukan. Struktur pendapatan daerah dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.

Dana Transfer Pemerintah Pusat: Masih menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta Dana Desa.

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Termasuk hibah dan bantuan dari berbagai sumber, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional atau sektor swasta.

2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026

Belanja daerah Kabupaten Belu tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Proyeksi alokasi belanja daerah mencakup:

Belanja Operasional: Akan dioptimalkan agar lebih efisien, terutama dalam belanja pegawai dan belanja barang/jasa guna meningkatkan ruang fiskal untuk belanja produktif.

Belanja Modal: Difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Transfer: Termasuk dana desa dan bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendukung program pembangunan berbasis masyarakat.

3. Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2026

Untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Kabupaten Belu akan mengembangkan strategi pendanaan yang lebih variatif, di



antaranya:

Optimalisasi PAD: Meningkatkan basis pajak daerah, memperluas sumber retribusi, serta mengelola aset daerah secara lebih produktif.

Pemanfaatan Dana Transfer Secara Efektif: Mengoptimalkan penggunaan DAU dan DAK untuk sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Skema Kerja Sama Pendanaan: Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) untuk membiayai proyek-proyek strategis, seperti infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi.

Akses Pendanaan Alternatif: Menjajaki peluang hibah, bantuan luar negeri, dan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung proyek pembangunan daerah.

Dengan pendekatan ini, diharapkan Kabupaten Belu dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan menciptakan struktur keuangan daerah yang lebih berkelanjutan, sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan secara efektif tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer pusat.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2026 pada Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan selain memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belu tahun 2025-2029 periode tahun 2026, juga didasarkan pada analisis kapasitas anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan tahun 2024;
2. Perkiraan kenaikan dana transfer berupa pendapatan transfer pemerintah pusat;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang setara dengan realisasi tahun anggaran 2024.



Langkah taktis yang dilakukan untuk efektivitas peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Belu melakukan terobosan-terobosan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan teknologi e-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak melalui media massa, media cetak, dan tatap muka;
- 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
- 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah



/ simpatda untuk semua objek pajak daerah;

- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2024 dikelola oleh 10 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan Tahun 2023, target pendapatan Tahun 2024 dan target pendapatan Tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.4
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu
Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	962.945.480.795	977.447.317.588	1.017.470.454.240	953.030.958.669
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.324.789.736	88.070.633.275	132.611.330.557	120.865.539.669
4.1.01	Pajak Daerah	20.563.777.908	19.194.087.650	48.028.739.065	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.112.694.483	4.934.589.739	9.214.462.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.529.604.943	3.480.688.664	3.480.688.664	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.118.712.402	60.461.267.222	71.887.440.828	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	749.960.574.512	877.295.842.987,30	873.796.047.683,0	832.165.419.000



				0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.478.962.836	842.871.067.818,30	855.162.229.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.481.611.676	34.424.775.169,00	18.633.818.683	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.660.116.547	12.080.841.325	11.063.076.000	0
	Pendapatan Hibah	2.977.700.415	-		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	96.682.416.132	12.080.841.325	11.063.076.000	

Sumber: Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2026 diestimasikan berdasarkan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026. Peruntukkan jenis belanja daerah yang akan dilakukan pada tahun 2026 yang akan datang meliputi:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN, PPPK, tenaga kontrak daerah yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;



4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa).

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif yang optimal untuk penanggulangan kondisi kemiskinan ekstrim daerah.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi serta penanggulangan permasalahan stunting daerah;
- c. Peningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- g. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa:



Pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan, dan

Adapun APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2023 – 2026

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
5	Belanja	928.157.650.432	1.011.544.640.144	1.044.074.724.655	953.030.958.669
5.1	Belanja Operasi	648.780.235.376	746.040.947.554	807.787.858.816	772.591.462.136
5.1.01	Belanja Pegawai	347.841.205.142	393.788.645.206	475.365.872.204	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.186.397.066	301.201.258.830	322.255.149.582	
4.1.05	Belanja Hibah	19.516.633.168	51.036.043.518	10.166.837.030	
	Belanja Bantuan Sosial	236.000.000	15.000.000	-	
5.2	Belanja Modal	160.068.785.414	144.760.748.226	112.360.826.836	56.513.457.530
5.2.01	Belanja Modal Tanah	393.232.906	-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.106.879.253	20.865.441.803	9.082.999.239	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.690.822.560	57.919.660.357	27.273.999.336	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.083.708.056	63.698.929.366	75.635.678.261	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.794.142.640	2.276.716.700	301.750.000	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	66.400.000	
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.566.815.117	-	3.234.868.078	3.234.868.078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.566.815.117	0	3.234.868.078	3.234.868.078
5.4	Belanja Transfer	116.741.814.525	120.742.944.364	120.691.170.925	120.691.170.925
5.4.01	Belanja bagi Hasil	116.741.814.525	120.742.944.364	2.696.667.025	2.696.667.025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-		117.994.503.900	117.994.503.900

Sumber : Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2026. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2026 di Kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk



penyertaan modal dalam rangka mendukung program pembangunan daerah.

Tabel. 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2023 – 2026

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.488.337.236	75.598.090.032	26.604.270.415	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.017.835.220	75.276.167.600	26.604.270.415	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	470.502.016	321.922.432		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	-	0	0
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	-	0	0
	Pembiayaan Netto	40.488.337.236	75.598.090.032	26.604.270.415	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	75.276.167.600	41.500.767.475	-	-

Sumber: Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).

Rincian kebijakan pembiayaan sebagaimana dalam portofolio pembiayaan di atas meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2025 yang diproyeksi sebesar Rp.0. SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.0.



Tabel 3.7
Ringkasan APBD Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	962.945.480.795	977.447.317.588	1.017.470.454.240	953.030.958.669
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.324.789.736	88.070.633.275	132.611.330.557	120.865.539.669
4.1.01	Pajak Daerah	20.563.777.908	19.194.087.650	48.028.739.065	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.112.694.483	4.934.589.739	9.214.462.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.529.604.943	3.480.688.664	3.480.688.664	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.118.712.402	60.461.267.222	71.887.440.828	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	749.960.574.512	877.295.842.987,30	873.796.047.683,00	832.165.419.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.478.962.836	842.871.067.818,30	855.162.229.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.481.611.676	34.424.775.169,00	18.633.818.683	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.660.116.547	12.080.841.325	11.063.076.000	0
	Pendapatan Hibah	2.977.700.415	-		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	96.682.416.132	12.080.841.325	11.063.076.000	
5	Belanja	928.157.650.432	1.011.544.640.144	1.044.074.724.655	953.030.958.669
5.1	Belanja Operasi	648.780.235.376	746.040.947.554	807.787.858.816	772.591.462.136
5.1.01	Belanja Pegawai	347.841.205.142	393.788.645.206	475.365.872.204	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.186.397.066	301.201.258.830	322.255.149.582	
4.1.05	Belanja Hibah	19.516.633.168	51.036.043.518	10.166.837.030	
	Belanja Bantuan Sosial	236.000.000	15.000.000	-	
5.2	Belanja Modal	160.068.785.414	144.760.748.226	112.360.826.836	56.513.457.530
5.2.01	Belanja Modal Tanah	393.232.906	-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.106.879.253	20.865.441.803	9.082.999.239	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.690.822.560	57.919.660.357	27.273.999.336	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.083.708.056	63.698.929.366	75.635.678.261	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.794.142.640	2.276.716.700	301.750.000	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	66.400.000	
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.566.815.117	-	3.234.868.078	3.234.868.078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.566.815.117	0	3.234.868.078	3.234.868.078
5.4	Belanja Transfer	116.741.814.525	120.742.944.364	120.691.170.925	120.691.170.925
5.4.01	Belanja bagi Hasil	116.741.814.525	120.742.944.364	2.696.667.025	2.696.667.025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-		117.994.503.900	117.994.503.900
	SURPLUS/DEFISIT	34.787.830.363	34.097.322.557	26.604.270.415	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH				



No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.488.337.236	75.598.090.032	26.604.270.415	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.017.835.220	75.276.167.600	26.604.270.415	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	470.502.016	321.922.432		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	-	0	0
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	-	0	0
	Pembiayaan Netto	40.488.337.236	75.598.090.032	26.604.270.415	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	75.276.167.600	41.500.767.475	-	-

Sumber: Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).





BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun merujuk pada RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029, di mana Tahun 2026 merupakan tahap pelaksanaan pembangunan tahun pertama dari RPJMD dan merupakan tahun ke dua periode satu RPJPD. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2025-2045 adalah *“Rai Belu ITAKAN UMA – Inklusif, Tangguh, Berkelanjutan dan Maju”* dan visi jangka menengah Kabupaten Belu 2025-2029 yakni *“Belu Yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis Dan Berbudaya”* dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

Perwujudan visi misi tersebut dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berpedoman pada visi dan misi Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: “BELU YANG BERKUALITAS, MANDIRI, HARMONIS, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA”

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun			Ket.
						2025	2026	2030	
MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif;	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belu		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,13	68,46	68,93	70,82	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi dan Numerasi						
			i) Literasi						
			SD	Persen	41,01	43,51	46,01	56,01	
			SMP	Persen	59,66	60,76	61,86	66,26	
			ii) Numerasi						
			SD	Persen	39,62	42,52	45,42	57,02	
			SMP	Persen	55,53	57,03	58,53	64,53	
			Harapan lama sekolah	Tahun	12,32	13,83	13,95	14,45	
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,5	7,5	7,68	8,44	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,13	74,64	74,99	76,4	
			Prevalensi Stunting	Persen	44,3	42,60	41	34,80	
			Cakupan kepesertaan JKN	Persen	97,26	97,39	97,52	98,04	
			Angka Kematian Ibu	Angka		0	0	0	
			Insidensi TBC	Kasus	551	525	476,64	323,83	
		Meningkatnya pelayanan sosial	Indeks Gini	Angka	0,32	0,33	0,32	0,31	
			Persentase PPKS Yang	Persen			10,69	12,50	

1



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun			Ket.
						2025	2026	2030	
		yang adaptif dan inklusif	Mandiri						
		Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,85	92,02	92,1	92,34	
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	70,19	71,47	72,75	75,29	
			Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional	Medali	10	20	25	40	
MISI 2 Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah;	Meningkatnya Perekonomian Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,97	4	4,4	5,84	
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,86	13,72	12,76	9,56	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,41	5,49	5,33	4,73	
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,21	4,24	4,25	4,30	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia	Kontribusi Persektor Terhadap PDRB						
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,37	1,44	1,51	1,79	
			Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	21,90	22,06	22,22	22,86	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,31	79,08	80,85	87,93	
			Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	7672	7729	7786	8014	
MISI 3 Mewujudkan Pembangunan infrastruktur	Terwujudnya Pembangunan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,08	3,08	5,64	6,77	

1



VISI/MISI dan lingkungan berbasis tata ruang;	TUJUAN infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun			Ket.
						2025	2026	2030	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,41	78,17	78,34	79,02	
		Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan	Persen	35,48	39,01	40,89	49,36	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen					
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Persen	64,71	66,88	67,66	70,87	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup			40,32	43,92	47,51	61,89	
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	53,75	89,36	89,56	90,36	
			Indeks Kualitas Air	Indeks	91,85	74,19	74,39	75,19	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	50,25	64,30	64,36	64,64	
			Cakupan Pengelolaan Sampah Perkotaan						
			Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	24,1	25,75	26,82	31,59	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	16,04	18,02	18,77	22,11	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		55	55	60	80	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40	0,42	0,43	0,50	

1



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun			Ket.
						2025	2026	2030	
MISI 4 Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis	Terwujudnya Pemerintah Yang bersih , berwibawa dan tidak korupsi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,7	66,52	72,94	98,62	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,84	2,44	3,04	5	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,47	2,74	3,01	#REF!	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	SAKIP	Angka	60,54	63,52	66,5	78,42	
		Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi	SPIP	Angka	2,89	2,89	2,92	3	
			Nilai MCP KPK	Angka	83	83	83	95	
			Opini Laporan Keuangan BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	
MISI 5 Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.	Terwujudnya Penguatan Identitas Budaya Daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	51,06	51,09	51,3	
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	20	20	20	20	
		Meningkatnya Promosi Budaya Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Persen	69	69	70	76	

1



4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026 memasuki tahun kedua Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang dalam prosesnya tidak terlepas dari evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu guna penyelarasan perencanaan Nasional dan Daerah adalah: a) Pemerintah daerah mengidentifikasi pokok-pokok program, kegiatan dan output prioritas nasional dalam RPJMN dan Rancangan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029; b) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program, kegiatan dan output dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 yang sesuai dengan program, kegiatan dan output dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT; dan c) Pemerintah Daerah menegaskan dalam narasi dan matriks Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra 2025-2029 tentang dukungan terhadap prioritas nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan



daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Persandingan prioritas Nasional dan Provinsi NTT dan Kabupaten Belu termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu

Prioritas RPJMN	Prioritas RPJMD Kabupaten Belu	Prioritas RPJMD Provinsi NTT



Prioritas RPJMN	Prioritas RPJMD Kabupaten Belu	Prioritas RPJMD Provinsi NTT
(1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (sdm), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi	(1) Revolusi pertanian menuju tani mandiri; (2) Perluasan akses berusaha bagi UMKM melalui penyediaan ekosistem pembiayaan daerah; (3) Fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; (4) Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; (5) Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan; (6) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu; (7) Penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat; (8) Digitalisasi layanan pemerintahan menuju smart governance; (9) Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proposional; dan (10) Perwujudan Atambua sebagai <i>central festival of Timor</i> (pusat festival Pulau Timor).	(1) Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman (2) Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal (3) Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal (4) Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat (5) Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting (6) Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan (7) Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera (8) Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin (9) Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar (10) Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama



Prioritas RPJMN	Prioritas RPJMD Kabupaten Belu	Prioritas RPJMD Provinsi NTT
politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

Dari Tabel di atas terlihat bahwa prioritas RPJMD Kabupaten Belu telah menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini tercermin dari kesesuaian program dan arah kebijakan di berbagai bidang strategis. Dalam sektor pertanian dan ekonomi lokal, Kabupaten Belu menekankan revolusi pertanian menuju kemandirian dan dukungan terhadap UMKM, yang selaras dengan prioritas nasional dalam penguatan ekonomi kerakyatan serta visi Provinsi NTT “Dari Ladang dan Laut ke Pasar”. Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, program fasilitasi angkatan kerja dan peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Belu mendukung agenda nasional dan provinsi dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelayanan kesehatan dasar.

Lebih lanjut di bidang infrastruktur, prioritas penyediaan rumah layak huni serta air bersih juga menunjukkan komitmen yang sejalan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT dalam pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, digitalisasi layanan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan ASN mencerminkan integrasi terhadap arah kebijakan nasional dan provinsi dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Bahkan, pengembangan Atambua sebagai pusat kegiatan budaya dan pariwisata menunjukkan dukungan terhadap



penguatan sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas Provinsi NTT dan nasional. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Belu telah secara konsisten mendukung dan mengintegrasikan arah pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen RKPD Tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif” dan tema RKPD Provinsi NTT 2026 adalah "Peningkatan Produktivitas dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif", sehingga berdasarkan tema RKPD dan RKPD Provinsi NTT, tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Produktivitas untuk Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing”. Selanjutnya untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Makro Pembangunan Nasional

NO	RKP Tahun 2026	RKPD Provinsi NTT Tahun 2026	RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%):	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%): 4,4 – 5,0	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%): 4,4
2	PDPRB Per Kapita (Rp Juta):	PDPRB Per Kapita (Rp Juta): 27,0 – 27,7	PDPRB Per Kapita (Rp Juta): 28,17
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%):	Kontribusi PDRB Provinsi (%): 0.6	Kontribusi PDRB Provinsi (%):
4	Tingkat Kemiskinan (%):	Tingkat Kemiskinan (%): 17,00 – 18,00	Tingkat Kemiskinan (%): 12,76
5	TPT (%):	TPT (%): 2,90 – 3,00	TPT (%): 5,33
6	Rasio Gini:	Rasio Gini: 0,303 – 0,310	Rasio Gini: 0,32
7	Indeks Modal Manusia:	Indeks Modal Manusia: 0,48	Indeks Pembangunan Manusia: 68,93 Indeks Pembangunan Manusia: 64,51
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%):	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 58,75 – 63,19	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%):



NO	RKP Tahun 2026	RKPD Provinsi NTT Tahun 2026	RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah: 80,19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah:

Selain program prioritas nasional, terdapat Program Strategis Nasional (ProSN) yang merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ProSN memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang



terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. ProSN tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.4

List Program Strategis Nasional (ProSN)

Nomor	ProSN	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota



Nomor	ProSN	Proyek/Kegiatan
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4. Makan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Mempedomani prioritas nasional dan program strategis nasional yang sudah dijabarkan di atas dan program prioritas provinsi NTT. Melalui pendekatan kolaboratif antar-pemerintah dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Belu siap menjadi aktor strategis dalam orkestrasi pembangunan Provinsi NTT dan Nasional. Seluruh program prioritas daerah kemudian diterjemahkan secara sistematis ke dalam nomenklatur program berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana termuat dalam Tabel 4.5. Nomenklatur ini menjadi instrumen utama dalam pencapaian target pembangunan daerah



dan menjadi fondasi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belu, yaitu: **"Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya."**



Tabel 4.5
Program Prioritas RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026

PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM RKPD 2026
Tema RKPD: Meningkatkan Produktivitas untuk Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing					
1. Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menjadi program prioritas utama 2. Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan diarahkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belu	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan numerasi siswa	Indeks Pembangunan Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi dan Numerasi	
				i) Literasi	
				SD	
				SMP	
				ii) Numerasi	
				SD	
				SMP	
				Harapan lama sekolah	
				Rata-Rata Lama Sekolah	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				Prevalensi Stunting	
				Cakupan kepesertaan JKN	



PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM RKPD 2026
				Angka Kematian Ibu	
				Insidensi TBC	
		Meningkatnya pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	Meningkatnya Kompetensi dan keterampilan PMKS	Indeks Gini	Program Pemberdayaan Sosial
				Persentase PPKS Yang Mandiri	
		Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta pemuda	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya kualitas perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya peran pemuda dalam bidang olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Revolusi pertanian menuju tani mandiri 4. Perluasan akses berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 5. Fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya Perekonomian Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				Tingkat Kemiskinan	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia	Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor PDRB	Kontribusi Persektor Terhadap PDRB	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	
				Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	



PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM RKPD 2026
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penduduk Usia Produktif yang Bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pemberdayaan Sosial; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga KerjaProgram Pelayanan Penanaman ModalProgram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				Peningkatan Pendapatan Per Kapita	
6. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu 7. Penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	
				Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	Terpenuhinya Infrastruktur Daerah	Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Kawasan Permukiman; Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	
				Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	
		Meningkatnya Pengelolaan dan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan	Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau



PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM RKPD 2026
		Pengendalian Lingkungan Hidup	Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air	Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Pengelolaan Persampahan
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
				Cakupan Pengelolaan Sampah Perkotaan	
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
				Indeks Ketahanan Daerah	
8. Digitalisasi layanan pemerintahan menuju <i>good governance</i> 9. Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proporsional	Terwujudnya Pemerintah Yang bersih , berwibawa dan tidak korupsi	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Penanaman



PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM RKPD 2026
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Modal, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk Dan Program Pencatatan Sipil Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pertanggungjawaban Pemerintah	SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi	Meningkatnya Kepercayaan kepada Pemerintah	SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Nilai MCP KPK	
				Opini Laporan Keuangan BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Perwujudan Atambua sebagai <i>central festival of Timor</i> (pusat festival Pulau Timor)	Terwujudnya Penguatan Identitas Budaya Daerah			Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah



PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM RKPD 2026
		Meningkatnya Promosi Budaya Daerah	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Program Pemasaran Pariwisata



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD hingga Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Tahun 2025 untuk RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026. Dengan mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing", RKPD 2026 diarahkan untuk penguatan kapasitas produksi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Pembahasan dan penyesuaian program, kegiatan, dan rencana kerja daerah dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 yang sudah dikonsultasikan dan dimusrenbangkan, memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan pendanaan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target sasaran dan program unggulan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, serta mendanai kegiatan strategis yang berkontribusi terhadap kemandirian daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Belu pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp. 953,030,958,669,-** yang bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Sementara itu, belanja daerah Tahun 2026 diproyeksikan dalam jumlah yang sama, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah Tahun 2026 diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memastikan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas, serta mendukung penyelenggaraan urusan wajib, baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait pelayanan dasar. Selain itu,



belanja daerah juga digunakan untuk membiayai program strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026. Sebagai bagian dari strategi pembiayaan, pendanaan program dan kegiatan prioritas akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai sumber pendanaan selain APBD kabupaten, seperti APBD provinsi, APBN, serta potensi pendanaan lainnya yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.1. Program Prioritas Tahun 2026

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing". Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan berbasis proses dengan metode:

- a. Teknokratik, melalui kajian ilmiah dan analisis data,
- b. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan,
- c. Politis, melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, serta
- d. Atas-bawah dan bawah-atas, melalui Musrenbang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten dan hasil Forum Perangkat Daerah.

Rencana program Tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Belu yang termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan RPJMN, dan Rancangan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Selain itu, program juga mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 serta hasil Pokir DPRD, Musrenbang, dan forum perangkat daerah.

Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih dipertajam, yang pencapaiannya diukur melalui sasaran-sasaran yang diperinci melalui indikator beserta targetnya. Adapun program adalah bingkai dari langkah-langkah riil berupa rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan merupakan upaya strategis untuk memastikan sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien.

Program Perangkat Daerah (PD) adalah input timbal-balik dari rencana strategis (renstra) PD yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing PD dan ditunjang dengan hasil



musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbang), di mana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan “bottom-up” dan “top-down”. Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja program/kegiatan bukanlah semata-mata dihasilkan dari kinerja PD pelaksananya semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja program/kegiatan lainnya yang saling menunjang. Bahkan lebih dari itu, keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan sinergitas lintas PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, antar tingkatan pemerintahan (baik pusat maupun provinsi), serta antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan (baik dunia usaha maupun masyarakat).

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Pemerintah Kabupaten Belu menerapkan kebijakan penggabungan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan upaya memperkuat fondasi pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Belu pada Tahun 2026 tetap memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pembangunan daerah. SPM merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan wajib pelayanan dasar memiliki SPM sesuai bidangnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Standar ini terus diperbarui agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Dalam penyusunan program prioritas, diperlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder guna memastikan program yang disusun responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif ini juga memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Program – program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1
Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
2,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP Peta Mutu Pendidikan APM SMP APK SMP Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP Angka Kelulusan SMP	1 Angka 5,62 Angka 90.86 Angka 92.9 Angka 95,06 rasio 99,95 Angka
3,	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya lembaga paud yang menerapkan kurikulum muatan lokal	34.88/75 %/Lembaga
4,	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi guru pendidikan S1/D4	100 %
5,	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio wirausaha pemuda	-
2,	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk pelatnas	-
	DINAS KESEHATAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
2,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Harapan Hidup	0 Orang 75 Tahun
3,	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian layanan kegawatdaruratan yang bersertifikat Persentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar	100 % 67.94 %
4,	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan	76 %
5,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	STBM Persentase Desa/ Kelurahan	56 Jumlah 69.14 %
	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
2,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita), Usia Harapan Hidup	-
3,	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
	YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	-
2,	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi	22.68 %
3,	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	-
4,	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPSP regional	-
5,	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi Rumah Tangga berakses Sanitasi layak menuju aman	-
6,	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-
7,	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan (%)	-
8,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-
2,	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1,	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk pembangunan	-
2,	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Prosentase Persertifikatan tanah aset pemerintah daerah	-
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
2,	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Cakupan petugas perlindungan masyarakat	26.54 %
3,	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100 %
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1,	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	22.22 %
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
	YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-
2,	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan undefined	6,0 % undefined undefined
3,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi	17,19 %
4,	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya PMKS Yang Diberdayakan Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	15.26 % 78 %
5,	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 % 100 persen
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1,	PROGRAM PENATAAN DESA	Terwujudnya Pemekaran Desa	18 Desa
2,	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Prosentase Bumdes Aktif	91,30 %
3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Strata Posyandu Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	39,08 % 40 undefined
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	B/60 predikat/ angka
2,	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran responsif gender	2,5 %
3,	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %
4,	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di desa/ kelurahan rawan kekerasan anak dan perempuan	10 Lembaga
5,	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Buku Profil Gender dan Anak	6 Buku
6,	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/ kelurahan layak anak Desa/ Kelurahan Layak Anak	35 % 35 Desa/ Kelurahan
7,	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2,	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR) Total Fertility Rate (TFR)	19,0 Angka 2,11 Angka
3,	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ modern contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan berKB yang tidak	48 % 61,9 % 9,5 %



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
		terpenuhi (unmet need)	
4,	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	65 % 68,91 %
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	B/60 predikat/ angka
2,	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan LH yang dibutuhkan	100 %
3,	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas air Meningkatnya indeks kualitas udara	60,39 Indeks 93,43 Indeks
4,	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60.54 Angka
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	5,89 %
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	-
2,	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Dokumen Pendaftaran Penduduk, Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP-E1, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	-
3,	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Laporan pelaksanaan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	-
4,	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya data kependudukan yang berkualitas	-
5,	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya data kependudukan	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2,	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2.5 Angka
3,	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	SPBE	2.5 angka
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Proporsi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	100 %
	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1,	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tingkat produktivitas tenaga kerja	6,8 %
2,	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri	20 %
3,	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja informal yang terlindungi	25 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1,	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya persentase koperasi yang berkualitas Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	100/26 %/ Koperasi 50 %
2,	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya persentase koperasi aktif	81,56/115 %/ Jumlah Koperasi
3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Persentase UMKM aktif	97.03 %
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase unit permukiman yang difasilitasi pembinaannya	3 UPT
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja	1219.032 Miliar Rp 15.83 Rasio
2,	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-
3,	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.25 indeks
4,	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenagakerja	1219.032 Miliar Rp 15.83 Rasio
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	B/60 predikat/ angka
2,	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase meningkatnya bahan pustaka Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	26340 Eksemplar 96.34 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1,	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi (satuan dokumen) Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi	6151 Dokumen 92.48 %
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	-
2,	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan, Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakiP	B/60 predikat/ angka
2,	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya lama kunjungan wisata	3 Hari
3,	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya lama kunjungan wisata	3 Hari
4,	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	100/11 %/Jumlah
5,	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah usaha ekonomi kreatif	215 kelompok
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1,	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	85.5 Skor
2,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakiP	B/60 predikat/ angka
2,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung	29800/78200 Ton
3,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung	29800/78200 Ton
4,	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung	29800/78200 Ton
5,	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkat Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya	23.68 %
	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.759,52 Ton 1.794,71 Ton
2,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air tawar / Air Payau	16,11 / 154,71 Ton
3,	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	115 Kelompok
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakiP Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	B/60 predikat/ angka B Predikat



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
2,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Meningkatnya Populasi ternak Sapi/ Babi Peningkatan Populasi Sapi/ Babi/ Kambing</i>	67367/31088 Ekor 67.600 / 31.326 / 13 ekor
3,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Meningkatnya Populasi ternak Sapi/ Babi Peningkatan Populasi Sapi/ Babi/ Kambing</i>	67367/31088 Ekor 67.600 / 31.326 / 13 ekor
4,	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Peningkatan Populasi Sapi/ Babi/ Kambing</i>	67.600 / 31.326 / 13 ekor
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>nilai sakip</i>	B/60 predikat/ angka
2,	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar</i>	100 Juta Rupiah
3,	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Meningkatnya ekspor bersih perdagangan</i>	100 Miliar Rp
4,	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase meningkatnya pelayanan yang standar dan perlindungan konsumen</i>	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
2,	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Meningkatnya Cakupan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan industri</i>	100 %
BAGIAN PEMERINTAHAN			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Sakip</i>	B/60 Predik at/Angka
2,	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	75 %
2,	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian</i>	100 %
SEKRETARIAT DPRD			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DPRD			
1,	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan</i>	85 Dokumen
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>nilai sakip</i>	B/60 predikat/ angka
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
1,	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase capaian kinerja program</i>	100 %
2,	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD</i>	100 %
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1,	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah</i>	-
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	KEUANGAN		
1,	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini atas Audit BPK	WTP Opini
2,	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini atas Audit BPK	WTP Opini
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	KEUANGAN		
1,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	100 % 2,09 %
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	KEPEGAWAIAN		
2,	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	87.95 %
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	75.09 %
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PENGELOLAAN PERBATASAN		
2,	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya cakupan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	95 %
3,	PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	Terpenuhinya Dokumen hasil Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi Pembangunan Perbatasan Negara	-
	INSPEKTORAT		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	INSPEKTORAT DAERAH		
2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level 3 Level
3,	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	3 Angka
	UNSUR KEWILAYAHAN		
	KECAMATAN		
2,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	-
3,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi kejadian gangguan ketenteraman dan pelanggaran peraturan daerah, Persentase koordinasi kejadian pelanggaran peraturan daerah/ peraturan Bupati	-
4,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	-
5,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala	-
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
2,	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	100/2195 %/orang



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR 2026
1	3	4	5
3,	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	100/929 %/Orang
4,	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas yang didata (Ormas)	-
5,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud dan Organisasi Kemasyarakatan	100/59 %/Dokumen
6,	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menurunnya kasus unjuk rasa/ demonstrasi	2 Kasus

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua program yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2026 merupakan penjabaran langsung dari program prioritas kepala daerah terpilih. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan daerah pada tahun 2026 dengan pendekatan perencanaan berbasis proses yang mencakup aspek teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan rencana program prioritas tahun 2026 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan, program prioritas yang disusun mengacu pada kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Salah satu prioritas utama adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitasi jaminan kesehatan gratis plus, yang bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Di sektor pendidikan, pemerintah akan menyediakan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, termasuk pembiayaan SPP, seragam, dan buku gratis guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan dasar. Dalam upaya meningkatkan kemandirian dan pembangunan berbasis masyarakat, setiap kelurahan akan mendapatkan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah



yang akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Untuk mendukung kesejahteraan pekerja informal, terutama ojek, pemerintah akan memberikan SIM C gratis bagi tukang ojek yang terdaftar, sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial dan peningkatan aksesibilitas dalam bekerja. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi prioritas dengan program pembukaan lahan gratis, penyediaan alat pertanian, pupuk, dan bibit, serta bantuan untuk usaha peternakan dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, setiap desa akan mendapatkan bantuan pembangunan sumur bor sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi.

Dalam rangka memperkuat infrastruktur, pemerintah akan melanjutkan pembangunan Bendungan Welikis, infrastruktur jalan, serta program rumah layak huni guna meningkatkan ketahanan air, konektivitas antarwilayah dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, untuk mendukung peran serta kelembagaan masyarakat, pemerintah akan memberikan insentif bagi RT, RW, dusun, kader Posyandu, tutor, serta pengelola PAUD agar dapat lebih aktif dalam pelayanan sosial dan pendidikan di tingkat komunitas. Peningkatan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru, serta pegawai pemerintah lainnya juga menjadi perhatian utama melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur daerah.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah akan menerapkan sistem rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi bagian dari agenda pembangunan dengan program penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan sumber daya manusia juga diarahkan pada pengembangan kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan pembinaan serta dukungan anggaran untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga, guna mendorong prestasi dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.



Seluruh program prioritas ini telah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden RI, yang mencakup transformasi layanan dasar, reformasi birokrasi, kesejahteraan sosial, penguatan infrastruktur, serta kemandirian ekonomi. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, diharapkan pembangunan Kabupaten Belu pada tahun 2026 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Merujuk pada tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026, “Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”, yang dapat diimplementasikan melalui berbagai program prioritas. Dalam bidang pelayanan dasar, fokus diberikan pada peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas seperti puskesmas, posyandu, dan rumah sehat di tingkat desa, serta pelatihan tenaga kesehatan berbasis komunitas lokal. Pendidikan juga menjadi prioritas dengan penguatan pendidikan inklusif, digitalisasi sekolah, dan pemberian beasiswa berbasis potensi lokal. Selain itu, akses air bersih dan sanitasi perlu ditingkatkan melalui pembangunan jaringan air, teknologi lokal seperti sumur bor, dan edukasi sanitasi kepada masyarakat.

Dalam tata kelola pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik menjadi langkah strategis, seperti pengembangan aplikasi e-governance dan pelatihan aparatur desa. Transparansi dan akuntabilitas juga dapat ditingkatkan melalui sistem monitoring berbasis masyarakat dan publikasi laporan keuangan daerah secara terbuka. Untuk mendukung kapasitas pemerintah, pelatihan manajemen berbasis kebutuhan daerah perlu dilaksanakan dengan kerja sama bersama universitas atau lembaga pelatihan.

Di sisi ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas dengan penyediaan modal usaha mikro, pelatihan pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran berbasis digital. Potensi lokal dapat dikembangkan melalui diversifikasi produk unggulan daerah, dukungan teknologi tepat guna, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, termasuk pelatihan pengelolaan homestay dan kuliner khas.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan masyarakat seperti BUMDes dapat membantu mendukung ekonomi desa, sementara pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, nelayan, perempuan, dan pemuda) mampu



meningkatkan pengelolaan sumber daya lokal. Edukasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Di bidang lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, pelestarian sumber daya air, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pengembangan energi terbarukan seperti biogas atau tenaga surya dapat mendukung keberlanjutan. Program-program ini dirancang untuk mendorong kemandirian lokal yang berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

5.1.1 Integrasi SPM dalam RKPD

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu, integrasi SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelayanan publik.

Dengan diintegrasikannya SPM ke dalam RKPD, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin tersedianya layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Melalui perencanaan yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, integrasi SPM dalam RKPD diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan yang merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Berikut program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan integrasi dari SPM yang dieksekusi oleh 6 urusan di bawah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.



Tabel 5.2
Program-Program Integrasi SPM dalam RKPD 2026

NOMOR	BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	86.175.765.250,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	86.175.765.250,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.972.717.250,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	153.048.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	57.901.581.200,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	57.901.581.200,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.901.581.200,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	16.576.101.250,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.702.216.250,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.729.224.250,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.972.992.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	873.885.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	873.885.000,00
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.265.935.500,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.265.935.500,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	615.935.500,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	650.000.000,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.458.861.180,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.458.861.180,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.458.861.180,00
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.046.298.000,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.046.298.000,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	244.168.000,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	802.130.000,00
TOTAL		164.424.542.380,00

5.1.2 Intervensi Penanganan Kemiskinan Esktrem

Baseline tingkat kemiskinan Tahun 2024 menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan intervensi pengentasan kemiskinan dan penghapusan



kemiskinan ekstrem pada Tahun 2026 dan berpedoman pada RAT Tahun 2025. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Belu antara lain melalui program penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat miskin, dan program penurunan wilayah kantong kemiskinan. Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah perbatasan, Kabupaten Belu menetapkan beberapa program prioritas yang menjadi bagian dari inovasi daerah dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya strategis yang dilaksanakan melalui RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Inovasi ini melibatkan berbagai program dan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta mendorong sinergi antara Pemerintah Kabupaten Belu, Pemerintah Provinsi NTT dan dukungan dari Pemerintah Pusat. Beberapa program dan kegiatan yang digagas merupakan program prioritas (Quick Win) pembangunan daerah yang merupakan implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 2025-2029.

Beberapa program Pemerintah Kabupaten Belu yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain:

- a. Jaminan Kesehatan Gratis + Plus: Program pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Belu. Sasaran utama adalah masyarakat Kabupaten Belu yang memiliki penghasilan rendah atau masuk dalam kategori kelompok miskin dan miskin ekstrem. Selain itu jaminan kesehatan gratis juga mengakomodir pelayanan kesehatan akibat kecelakaan berkendara dan kecelakaan kerja yang tidak dijamin pembiayaannya.
- b. Pendidikan Gratis SD dan SMP: Menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SD dan SMP di semua satuan pendidikan, baik sekolah milik Pemerintah dan swasta melalui pemberian subsidi dan insentif bagi sekolah.
- c. Bantuan Dana Satu Kelurahan Satu Miliar: Bantuan anggaran bagi kelurahan dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan program pembangunan infrastruktur dengan konsep padat karya. Selain untuk mendorong pertumbuhan



UMKM lokal sebagai penggerak utama ekonomi di Kabupaten Belu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja juga menjadi prioritas, dengan harapan dapat membuka lebih banyak peluang kerja serta memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di sektorsektor produktif.

- d. Pengembangan Sektor Pertanian: Peningkatan produksi pertanian melalui bantuan pembukaan lahan gratis, bantuan alat pertanian, ketersediaan pupuk dan bibit. kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta pengelolaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).
- e. Bantuan Air Bersih 1 Desa 1 Sumur BOR: Menjamin ketersediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat. Selain untuk pengembangan air baku pertanian, penyediaan sumur bor juga diharapkan dapat mengatasi masalah keterjangkauan air bersih. Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi. Dengan adanya pengembangan sistem penyediaan air minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berupaya memastikan bahwa akses masyarakat terhadap air. bersih lebih baik, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
- f. Pembangunan Rumah Layak Huni: Fokus pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi lemah tetap memiliki akses ke hunian yang layak.

Tabel 5.2
Intervensi Kemiskinan Ekstrem dalam RKPD 2026

Nama SKPD	Total Anggaran Kemiskinan Ekstrem
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	489.597.400,00
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.631.312.000,00
Dinas Peternakan Dan Perikanan	1.339.722.000,00
Dinas Kesehatan	56.440.041.330,00



Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	119.762.942.406,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.406.662.780,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	794.960.450,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36.908.755.431,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.867.515.299,00
TOTAL	225.661.509.096,00

5.1.3 Integrasi POKIR dalam RKPD

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, integrasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pokir DPRD merupakan hasil dari serapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun forum konsultasi yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. Aspirasi tersebut kemudian dikompilasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD.

Integrasi Pokir DPRD ke dalam RKPD merupakan bentuk nyata dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya mekanisme yang jelas, setiap usulan masyarakat yang dihimpun oleh DPRD dapat dipertimbangkan secara objektif dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, melalui proses yang terstruktur, transparan, dan berbasis prioritas, integrasi Pokir DPRD ke dalam RKPD diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk perencanaan tahun



2026 POKIR DPRD yang sudah terinput dalam sipd sebanyak 488 yang terintegrasi dalam Renja sesuai hasil telaahan dan verifikasi sebanyak 28 pokok pikiran. Berikut program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan integrasi dari POKIR DPRD.

Tabel 5.3
Program-Program yang merupakan Integrasi POKIR DPRD

No	Program	Pagu
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 3.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 7.000.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 925.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 86.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 77.090.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
6	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 141.700.000
Total		Rp. 8.232.790.000

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel. 5.4
Program Pendukung Operasional Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Capaian
	Non Urusan	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP

Program – program tersebut dielaborasikan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk dilaksanakan di Tahun 2026. Lebih lanjut, pendanaan indikatif untuk keseluruhan rencana program dan kegiatan menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Belu pada RKPD Tahun 2026. Pagu indikatif RKPD Tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan



urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2026. Pagu indikatif tiap perangkat daerah Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.4 dengan rincian terlampir dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belu.

Tabel 5.5
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2026

Perangkat Daerah	Pagu SKPD
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	294.305.986.873,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	107.446.690.850,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	86.654.795.729,00
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	48.792.143.002,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	6.208.520.118,00
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.182.269.855,00
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.412.710.527,00
2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.961.883.386,00
2.11.2.15.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	8.943.958.873,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.917.720.330,00
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	3.040.892.261,00
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.578.177.156,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.678.205.553,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.824.256.075,00
3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	5.059.720.714,00
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.358.377.346,00
3.27.3.25.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Perikanan	11.722.836.149,00
3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.495.614.609,00
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	44.131.507.552,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	21.050.670.111,00
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.219.054.853,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	139.319.853.959,00
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah	5.552.337.742,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.954.757.275,00
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.188.215.683,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	5.510.854.560,00



Perangkat Daerah	Pagu SKPD
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Atambua	8.347.966.467,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tasifeto Barat	1.838.265.534,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tasifeto Timur	2.029.548.714,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Raihat	1.441.056.290,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Lamaknen	1.461.376.075,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kakuluk Mesak	2.392.633.660,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Raimanuk	1.980.703.718,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Lasiolat	1.662.454.522,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Atambua Selatan	8.019.954.362,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Atambua Barat	6.479.810.830,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Lamaknen Selatan	1.775.537.481,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Nanaet Duabesi	1.322.773.167,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.817.536.819,00
Total	953.030.958.669,00

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
5. Menghitung alokasi PD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab PD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan PD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya.



Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke PD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan PD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Ranwal Renstra PD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD.

Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029. Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Belu; namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Belu diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Belu tahun 2026.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belu sebagai dasar dalam perumusan dokumen RKPD Tahun 2026. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menganalisis capaian pembangunan tahun sebelumnya dan keterkaitannya dengan visi, misi, serta sasaran strategis daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

6.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKU dan IKK)

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi berbagai sektor pembangunan. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah meliputi:

- Indikator Makro Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM).
- Kinerja Sektor Prioritas: Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dan kebudayaan.

Untuk memberikan gambaran lebih terukur terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Berikut adalah evaluasi capaian IKU Kabupaten Belu untuk Tahun 2024, serta target untuk Tahun 2025 dan 2026:



Tabel 6.1

Capaian IKU Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 dan 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN		KET
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,13	68,46	68,93	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,97	4	4,4	
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,21	4,24	4,25	
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	Indeks	3,08	3,08	5,64	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,41	78,17	78,34	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,7	66,52	72,94	
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	51,06	51,09	

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

Tabel 6.2

**Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan
Kabupaten Belu Capaian 2024 dan Target 2025 dan 2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,21	71,25	71,29	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	13,34	16,05	14,63	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	110.228	110.228	111.849	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	39,24	39.01	40,89	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,41	78,17	78,34	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,55	9,48%	10,67%	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang		25.75	26,82	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%		18.02	18,77	
9	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,42	0,43	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,37	1,99%	1,93%	
11	Rasio Penduduk	%	68,85	68,21	69,55	
12	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	209,49	213,66	217,8	
13	Rumah Tangga menggunakan Air Bersih	%		39,01	40,89	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,97	4	4,4	
2	Tingkat Kemiskinan	%	13,86	13,72	12,76	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	25,163	25,72	28,17	



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,41	5,49	5,33	
5	Indeks Gini	Angka	0,32	0,33	0,32	
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,13	68,46	68,93	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,13	74,64	74,99	
8	Prevalensi Stunting	%	44,3	42,6	41	
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,5	7,5	7,68	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,32	13,83	13,95	
11	Angka Literasi/ Numerasi	%				
	Hasil Pembelajaran:					
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i) Literasi Membaca					
	SD	skor	41,01	43,51	46,01	
	SMP	skor	59,66	60,76	61,86	
	ii) Numerasi					
	SD	skor	39,62	42,52	45,42	
	SMP	skor	55,53	57,03	58,53	
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100	100	100	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	54,95%	54,95%	56,62%	
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	51,06	51,09	
15	Indeks Perlindungan Anak	Indeks		71,47	72,75	
16	Indeks Pembangunan Gender	Indeks		92,02	92,1	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka Ketergantungan	%	52,36	52,71%	53,01%	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,37	1,44	1,51	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,41	0,45	0,46	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%		0,01955	0,03152	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,31	79,08	80,85	
6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Impelementasi Pembangunan	Persen	100	100	100	
7	Ekspor Barang dan Jasa	Rp				
8	Indeks Infrastruktur daerah	Indeks				
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%		66,88	67,66	
10	Persentase Desa Mandiri / Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	0	
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	3,24	0,71	0,82	
12	Tingkat Inflasi	%	2,59	2,5	2,39	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,02	100	100	



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,42	2,74	3,01	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,84	2,44	3,04	
4	Persentase Penegakan Perda	%	53,8	61,54%	69,23%	
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	0	34	37,4	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,53	3,54	
V INDIKATOR KINERJA KUNCI						
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama					
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	SPM					
1	Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
6	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar					DINKES
7	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
8	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%		100%	100%	DINKES
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB) sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
11	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
	AKSI KONVERGENSI					
13	Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%		48%	51%	DINKES
14	Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrien Supplementation (MMS)	%		82%	84%	DINKES
15	Persentase Ibu Hamil Mengkonsumsi Makanan Beragam	%		62%	64%	DINKES



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
16	Persentase Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	%		72%	74%	DINKES
17	Persentase Praktik Inisiasi Menyusu Dini	%		81%	82%	DINKES
18	Persentase Bayi Usia 0-5 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%		74%	75%	DINKES
19	Persentase Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) beragam setelah 6 bulan	%		71%	72%	DINKES
20	Persentase Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun	%		90%	90%	DINKES
21	Persentase BADUTA gizi Buruk yang mendapat pelayanan tata laksana Gizi Buruk	%		67%	68%	DINKES
22	Persentase BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%		62%	64%	DINKES
23	Persentase BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%		45%	48%	DINKES
24	Persentase BADUTA mendapatkan imunisasi rutin lengkap	%		90%	90%	DINKES
25	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	%		80%	90%	DINKES
26	Persentase Pemberian Obat cacing pada anak BADUTA (0-24 Bulan)	%		75	75	DINKES
27	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	%		84%	86%	DINKES
28	Persentase Stimulasi dan pemantauan perkembangan pada BALITA	%		62%	64%	DINKES
29	Persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%		45%	48%	DINKES
30	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	%		80%	90%	DINKES
31	Penemuan kasus pneumonia balita	%		25%	30%	DINKES
32	Persentase Pemberian obat cacing pada anak BALITA (1-4 Thn)	%		75%	78%	DINKES
33	Persentase Remaja putri yang mengkonsumsi TTD	%		76%	78%	DINKES
34	Persentase Remaja putri yang diskriminasi anemia	%		56%	57%	DINKES
35	Persentase Akses terhadap air minum aman	%		65%	67%	DINKES
36	Persentase Akses terhadap sanitasi aman	%		7%	8%	DINKES
	RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN (RIBK)					
37	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 Tahun	%		23%	50%	DINKES
38	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%		100%	100%	DINKES
39	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	%		23%	50%	DINKES
40	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
41	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%		76.60%	76.60%	DINKES
42	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%		65%	67%	DINKES
43	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%		100%	100%	DINKES
44	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%		70.58%	70.58%	DINKES
45	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%		60	60,5	DINKES
46	Persentase lanjut usia yang mandiri	%		100	100	DINKES



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
47	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%		25	24	DINKES
48	Cakupan penemuan kasus TB	%		90%	90%	DINKES
49	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%		85%	85%	DINKES
50	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
51	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%		90%	90%	DINKES
52	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	%		100%	100%	DINKES
53	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%		100%	100%	DINKES
54	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	%		75%	75%	DINKES
55	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%		100%	100%	DINKES
56	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%		75%	75%	DINKES
RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD						
1	Tingkat Kemampuan Pendapatan Rumah Sakit menutup biaya operasionalnya (<i>Cost Recovery Rate</i>)	%		40%	45%	RSUD
2	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%		100%	100%	RSUD
3	Persentase pelatihan wajib yang dilaksanakan rumah sakit	%		100%	100%	RSUD
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	%		80%	85%	RSUD
5	Angka Penggunaan Tempat Tidur (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	%		80%	80%	RSUD
6	Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat (<i>Average Length of Stay</i>)	Hari		4 Hari	4 Hari	RSUD
7	Tenggang Perputaran Tempat Tidur (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari		2 Hari	2 Hari	RSUD
8	Angka Kematian 48 Jam (<i>Net Death Rate</i>)	‰		< 25‰	< 25‰	RSUD
9	Angka Kematian Umum (<i>Gross Death Rate</i>)	‰		< 45‰	< 45‰	RSUD
10	Angka Perputaran Tempat Tidur (<i>Bed Turn Over</i>)	Kali		50 Kali	50 Kali	RSUD
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%		14,03	15,62	PUPR
2	Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi layak menuju aman	%		81,78	81,87	PUPR
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%		43	47	PUPR
4	Rasio Jaringan Irigasi	%		20,39	21,48	PUPR
D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani					



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%		100	100	Satpol PP
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit		15	15	Satpol PP
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen		6,17	12,34	BPBD
4	Persentase penanganan pasca bencana	Persen		16,66	33,32	BPBD
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen		16,66	33,32	BPBD
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai/Predikat		B/60	B/62	BPBD
F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					
G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	%		20	25	
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola hubungan industrial yang layak	%		40	45	
3	Persentase tenaga kerja informal yang terlindungi	%		25	30	
H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Anggaran Responsif Gender	Persentase		11,2	12,4	
2	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase		85	85	
3	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	Lembaga		1	10	
4	Tingkat Pemanfaatan data gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan /Atau Penyusunan Kebijakan	Dokumen		1	2	
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks		67,57	68,91	
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks		81,44	82,69	
I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	Persentase Cadangan Pangan					
J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum					



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal					
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat					
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	Persentase dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD RTRW, dan RDTR) yang memuat aspek lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian RPPLH, KLHS dan DDDTLH	%			100	
2	Cakupan Pengelolaan Taman Kehati dan Ruang Terbuka Hijau yang berada di dalam kewenangan pengelolaan Kabupaten Belu	%			100	
3	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%				
4	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah ditetapkan dan mendapatkan pengakuan resmi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%		18,75		
5	Persentase peserta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup yang mengalami peningkatan skor pemahaman dan keterampilan dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan	%				
6	Persentase penerima penghargaan lingkungan hidup yang melanjutkan dan/atau mengembangkan kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan setelah menerima penghargaan	%		100		
7	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditetapkan	%				
8	Persentase Jumlah limbah B3 yang terkelola	%				
L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP Elektronik					
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
3	Kepemilikan akta kelahiran					
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal					
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Angka Kelahiran Total (TFR) Rata-rata kelahiran per WUS 15-49 Tahun	Persentase		2,12	2,11	
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) kelahiran hidup per 1000 perempuan	Persentase		19,4	19	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase		61,8	61,9	
4	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persentase		10,5	9,5	

Handwritten signature



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
5	Cakupan Keluarga yang mengikuti Kelompok Ketahanan Keluarga	Persentase		60	65	
O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	Persentase realisasi retribusi parkir terhadap potensi retribusi	%		100%	100%	
P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota					
S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
3	Peningkatan Prestasi Olahraga					
T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah					
V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya					
W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					

h



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN		KET.
			2024	2025	2026	
Y. URUSAN PEMERINTAHAN PENDUKUNG - SEKRETARIAT DAERAH						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				BB / 80	SETDA
2	Indeks kematangan organisasi (Nilai/Kategori)				36,1/ Sedang	SETDA
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)				2,5	SETDA
4	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)				100	SETDA
5	Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)				100	SETDA
6	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan				100	SETDA
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan				45	SETDA
8	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan				100%	SETDA
Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota					
Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan					
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota					
3	Tingkat hunian akomodasi					
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					
AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular					
AB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
2	Persentase kinerja realisasi pupuk					
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
AC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota					
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					

A



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota					
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
AD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
AE. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN						
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah					
AF. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN						
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD					
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah					
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap					
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik					
6	Persentase Penurunan SILPA					
AG. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN					
AH. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah					
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah					
AI. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI Pengawasan						
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)					
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					
4	Manajemen Risiko Indeks					
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1					
AJ. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENGADAAN						
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan					
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ					
3	Tingkat Kematangan UKPBJ					
AK. URUSAN PEMERINTAHAN Hubungan dengan Perwakilan Daerah						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N					
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N					
AL. URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan Publik						



*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET.
				2025	2026	
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N					

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

Perlu disampaikan bahwa indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RKPD ini masih merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan secara resmi melalui peraturan daerah. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perubahan atau penyesuaian terhadap indikator, target, serta arah kebijakan pembangunan yang akan diakomodasi lebih lanjut setelah RPJMD definitif disahkan.

Pencantuman indikator berbasis rancangan RPJMD ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan memberikan kerangka awal dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan. Penyesuaian lebih lanjut terhadap RKPD akan dilakukan apabila terjadi perubahan substansi dalam dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.



BAB VII

P E N U T U P

Perumusan Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 merupakan tahapan ke dua pelaksanaan Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang sudah dikonsultasikan dan dimusrenbangkan, RPJMN dan Rancangan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja perangkat daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten dan digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, Rancangan RKPD yang akan berproses menjadi Rancangan Akhir dan kemudian Penetapan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2026. RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2026 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di perangkat daerah masing-masing.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2026 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Dokumen



Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing” dalam mewujudkan “*Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya*”.

Kembali ditegaskan bahwa penyusunan Rancangan RKPD ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yaitu Rancangan RPJMD. Namun demikian, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2026, indikator kinerja yang digunakan masih merujuk pada rancangan RPJMD yang belum ditetapkan secara resmi melalui peraturan daerah. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya proses penyusunan dan pengesahan RPJMD periode 2025-2029. Dengan demikian, indikator, target, dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD ini bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan penetapan RPJMD definitif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tetap berkomitmen untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan, serta akan melakukan penyesuaian terhadap dokumen RKPD apabila terjadi perubahan substansi pada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan nantinya.

BUPATI BELU

WILLIBRODUS LAY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3000 Orang/bulan	187.708.773.873,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	PNS dan PPPK		200.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	73.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	PNS dan PPPK		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	1.087.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	PNS dan PPPK		625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30.944.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH V : PENDIDIKAN	PNS dan PPPK		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				914 Orang	1.124.202.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGgunaann ya BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Peserta Didik Guru dan Kepala Sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				147 Satuan Pendidikan	20.053.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGgunaann ya BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Peserta Didik Guru dan Kepala Sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	55.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Peserta Didik Guru dan Kepala Sekolah		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				8000 Paket	1.800.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Peserta Didik Guru dan Kepala Sekolah		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	779.645.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan SMP, Guru, Kepala Sekolah dan Peserta Didik SMP		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				8 Paket	498.475.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan SMP, Guru, Kepala Sekolah dan Peserta Didik SMP		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	1.200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Satuan Pendidikan PAUD, Pendidik/Tutor, Pengelola dan Peserta Didik PAUD		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				294 Peserta didik	282.129.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Satuan Pendidikan PAUD, Pendidik/Tutor, Pengelola dan Peserta Didik PAUD		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				232 Paket	900.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan PAUD, Pendidik/Tutor, Pengelola dan Peserta Didik PAUD		1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				232 Satuan Pendidikan	447.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PRIORITAS DAERAH V : PENDIDIKAN	Satuan Pendidikan PAUD, Pendidik/Tutor, Pengelola dan Peserta Didik PAUD		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidik/Tutor PAUD dan Pendidikan Nonformal		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran	Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				232 Buku	125.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidik/Tutor PAUD dan Pendidikan Nonformal		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4,	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						153.048.000,00						-	155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	153.048.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kab. Belu	-	155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				438 Laporan	153.048.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDISTRIBUSIAN YAK BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kab. Belu		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5,	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						50.000.000,00						-	56.000.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan NonFormal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat	-			100 % 100 %	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal	-	56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal		26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				150 Orang	87.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat/pemudakabupaten Belu		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				15 Orang	193.618.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat/pemudakabupaten Belu		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelaunan Pemuda				5 Kegiatan	190.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat/pemudakabupaten Belu		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				50 Orang	197.680.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat/pemudakabupaten Belu		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/ kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				60 Orang	91.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembiayaan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat/pemuda kabupaten Belu		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	2.086.560.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembiayaan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat/pemuda kabupaten Belu		252.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota				5 Kegiatan	1.720.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Belu, atlet dan Organisasi/ Klub Olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/ kota				300 Orang	1.874.060.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Belu, atlet dan Organisasi/ Klub Olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-			100 % 100 %	698.703.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Atlet dan Organisasi Olahraga	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				150 Orang	634.703.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Atlet dan Organisasi Olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				2 Dokumen	64.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Atlet dan Organisasi Olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			100 %	500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Atlet dan Organisasi Olahraga	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				0 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Atlet dan Organisasi Olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN						107.446.690.850,00							112.533.762.290,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						107.446.690.850,00							112.533.762.290,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						107.446.690.850,00							112.533.762.290,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						44.194.289.650,00						-	45.563.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Petugas Kesehatan		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Petugas Kesehatan		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.496.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Tenaga Kesehatan		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	227.550.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Tenaga Kesehatan		71.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Barang milik Daerah		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2,	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						58.069.581.200,00						-	62.327.952.290,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	3.500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat Kabupaten Belu		3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat,	Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	224.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDANAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat Kabupaten Belu		252.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan													

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				34 Orang	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Belu		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	427.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Belu		431.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terstandarnya pelayanan kesehatan disarana kesehatan	-			15 Kegiatan	85.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Tenaga Kesehatan	-	87.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Tenaga Kesehatan		87.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Sarana Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
3,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						3.920.900.000,00						-	3.338.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				36 Orang	3.687.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan		3.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan		4.610.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	208.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Tenaga Kesehatan	-	211.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	208.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Tenaga Kesehatan		211.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						411.420.000,00						-	429.200.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Tidak Lanjut Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optokal, UMOT	-			23 Kegiatan	1.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penguatan disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Sarana Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		-			-	117.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemilik Sarana IRT-P		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	117.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Pemilik Sarana IRT-P		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						850.500.000,00						-	874.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya dukungan masyarakat dan lintas sektor di Bidang Kesehatan	-			83 Persen	214.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat Kabupaten Belu	-	222.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				17 Dokumen	636.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Masyarakat Kabupaten Belu		652.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD						86.654.795.729,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						86.654.795.729,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						86.654.795.729,00							0,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						82.067.482.089,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenuliik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Seluruh Pegawai RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-			100 %	58.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Seluruh Pegawai RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD dan Masyarakat Umum	-	0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	58.000.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Seluruh Pegawai RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD dan Masyarakat Umum		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
2,	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.547.313.640,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1.250.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	47.313.640,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat Umum		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.040.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten	-			100 Persen	2.040.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM dan Tenaga Non Medis di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	Seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Non Medis di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	-	0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			2 Orang	29.640.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		30.381.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	312.980.500,00			-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-	-	316.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			4 Paket	3.383.700,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		3.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	287.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	27.810.000,00			-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-	-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,200 KM	200.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Petani		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Petani		260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3,	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						10.729.224.250,00						-	4.045.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	-			2 Unit	10.729.224.250,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Belu	-	4.045.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				80 Orang	25.950.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Manliten Kab. Belu, Tasifeto Barat, Tukuneno Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao Kab. Belu, Raimanuk, Mandeu Raimanus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kabupaten Belu		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				3 Dokumen	307.298.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat Kabupaten Belu		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	130.101.680,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6,	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						49.040.000,00						-	75.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	49.040.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				20 Bantuan Teknis	24.040.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7,	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						100.000.000,00						-	0,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8,	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						20.157.149.430,00						-	64.900.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	517.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	114.979.200,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				100 Kegiatan Layanan	39.999.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				60 kegiatan Dokumen	39.994.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				5 kegiatan Sistem Informasi	34.985.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	124.988.000,00			-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				10 kegiatan Laporan	124.988.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.868.946.011,00							0,00	
1,	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						873.885.000,00						-	0,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	-	-			-	773.885.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi				8 Unit Rumah	340.125.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	433.760.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2,	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						995.061.011,00						-	0,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	145.061.011,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	145.061.011,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	850.000.000,00			-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				29 Unit Rumah	850.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						612.600.000,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						612.600.000,00							0,00	
1,	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						512.600.000,00						-	0,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	512.600.000,00			-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.942.584.618,00							-	4.802.834.308,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	-			2 Sub Kegiatan	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	-			4 Sub Kegiatan	4.390.164.918,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	4.353.436.108,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51/14 Orang/bulan	4.350.164.918,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.321.636.108,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		31.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	-			5 Sub Kegiatan	35.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	-			4 Sub Kegiatan	143.816.000,00			-	-	-	-	96.940.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	40.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.276.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		1.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.355.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		3.090.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		2.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	74.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		60.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	-			3 Sub Kegiatan	40.936.800,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	45.087.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.940.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		995.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	33.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		43.132.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.996.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		960.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	-			4 Sub Kegiatan	322.266.900,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	302.370.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	299.996.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		297.734.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	6.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	15.770.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		3.135.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						615.935.500,00					-		283.575.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				100 Orang	23.335.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat kabupaten Belu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sub Kegiatan	-			4 Sub Kegiatan	50.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	26.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				5 Laporan	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		26.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3,	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						650.000.000,00						-	405.802.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan	-			3 Sub Kegiatan 4 Sub Kegiatan	450.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				40 Laporan	450.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Sub Kegiatan	-			1 Sub Kegiatan	200.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	300.802.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				150 Orang	200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		300.802.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							4.182.269.855,00						4.359.469.855,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.182.269.855,00							4.359.469.855,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.182.269.855,00							4.359.469.855,00	
1,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.723.408.675,00						-	2.768.609.855,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Sub Kegiatan	53.011.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	53.011.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Sub Kegiatan	2.226.369.275,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	2.160.835.605,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.201.349.275,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.135.835.605,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	25.020.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			4 Sub Kegiatan	40.907.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	79.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.470.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.936.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		6.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Sub Kegiatan	49.308.900,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	56.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30.008.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Sub Kegiatan	353.812.500,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	417.274.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	347.244.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		410.674.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.568.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		6.600.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.458.861.180,00						-	1.590.860.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	-			2 Sub Kegiatan	65.450.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	152.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	65.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi	-		152.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			11 Sub Kegiatan	702.234.680,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	730.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				8 Unit	35.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				5 Orang	66.675.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalakan				12 Kegiatan	80.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.412.710.527,00						8.808.699.999,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.264.872.777,00							7.223.199.999,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.264.872.777,00							7.223.199.999,00	
1,	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.912.687.327,00						-	5.555.199.999,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	71.849.500,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Perencanaan OPD	-	84.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.370.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD		2.499.999,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.340.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD		33.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	47.910.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD		130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	39.728.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.003.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	329.637.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD	-	371.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	309.997.050,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	6.250.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD		6.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	13.390.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DSPMD		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						44.000.000,00						-	70.000.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan pemberdayaan KAT	-			100 %	44.000.000,00			Membangun dari desa dan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	Komunitas Adat Terpencil	-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota				10 Orang	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota				125 Orang	8.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota				15 Orang	8.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				25 Orang	5.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota				20 Orang	24.360.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	PKK,Posyandu		10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	42.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	PKK,Posyandu		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	PKK,Posyandu		500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						7.961.883.386,00							9.053.550.334,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.961.883.386,00							9.053.550.334,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.043.928.386,00							4.231.650.334,00	
1,	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.336.209.886,00						-	3.385.903.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	DINAS P3APPKB, ASN DP3APPKB	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	DINAS P3APPKB, ASN DP3APPKB		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	3.228.403.336,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN DINAS P3APKKB	-	3.250.403.334,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.228.403.336,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN DINAS P3APKKB		3.250.403.334,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.008.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	-		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				6 Lembaga	62.485.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				1 dokumen	62.107.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						206.398.000,00						-	238.464.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	50.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangkutan disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU	-	55.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				5 Lembaga	50.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangkutan disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU		55.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	34.218.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU / Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		37.639.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4,	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						16.500.000,00						-	20.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				1 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5,	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						10.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			6 Buku 100 %	10.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	DP3APPKB / MASYARAKAT	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia				1 Dokumen	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	DP3APPKB / MASYARAKAT		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	DP3APPKB / MASYARAKAT		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6,	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						96.479.500,00						-	126.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	-			100 % undefined undefined	96.479.500,00			Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing	LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA	-	126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota				20 Lembaga	96.479.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing	LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA		126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota				60 Orang	129.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU		142.175.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				60 Orang	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	MASYARAKAT KABUPATEN BELU		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.800.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Lembaga	-	38.282.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	34.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Lembaga		38.282.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	187.360.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN DP3APPKB		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						178.200.000,00						-	250.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	46.200.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	ASN DP3APPKB	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	23.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	ASN DP3APPKB		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	ASN DP3APPKB		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	132.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	DP3APPKB / MASYARAKAT KABUPATEN BELU	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				12 Dokumen	132.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	DP3APPKB / MASYARAKAT KABUPATEN BELU		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						2.183.161.000,00						-	2.760.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	36.860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	PKB / PLKB - FASKES DAN BALAI KB		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1469 Orang	600.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	PKB / PLKB - FASKES DAN BALAI KB		700.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	232.800.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat di Kabupaten Belu		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4,	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.154.560.000,00						-	1.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Teraksananya dan Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			100 %	92.560.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA / POKTAN BKB	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				60 Orang	92.560.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA / POKTAN BKB		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1.062.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Organisasi Kemasyarakatan Lingkup Kab. Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu	-	1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	1.062.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	Organisasi Kemasyarakatan Lingkup Kab. Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu		1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN						8.943.958.873,00						9.813.482.186,00		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74/14 Orang/bulan	5.746.773.573,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	RETRIBUSI JASA UMUM, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN DLHHUB BELU		5.746.773.323,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40 Dokumen	63.365.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN DLHHUB BELU		69.701.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 % 100 Persen	6.741.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Belu	-	8.714.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.741.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Belu		8.714.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumbang Daya Aparatur Persentase administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-			100 % 100 Persen	9.001.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN DLHHUB BELU	-	11.541.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan				12 Dokumen	9.001.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN DLHHUB BELU		11.541.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	101.006.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		126.287.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	99.756.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		134.283.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkannya indeks kualitas air Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten /kota	-			60,39 poin 100 Persen	25.825.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu	-	32.257.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan				1 laporan Laporan	25.825.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		32.257.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten /kota	-			60,54 poin 100 Persen	21.110.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu	-	26.411.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				3 Ha	21.110.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		26.411.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4,	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						128.688.800,00						-	160.917.683,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	128.688.800,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu	-	160.917.683,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota				16,74 Ha	102.288.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		127.917.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	26.400.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Tialai Kab. Belu, Raihat, Tohe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		33.000.003,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5,	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						32.830.000,00						-	37.229.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	32.830.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	37.229.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				120 dokumen Badan Usaha	32.830.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		37.229.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
6,	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.219.312.800,00						-	1.448.350.790,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.219.312.800,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu	-	1.448.350.790,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	11.669.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				18,783,80 Ton	1.207.643.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Kabupaten Belu		1.364.350.790,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						701.132.400,00							876.098.750,00	
1,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						701.132.400,00						-	876.098.750,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan Laporan	23.456.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Asn Dinas DLHHub dan Masyarakat Kabupaten Belu		32.482.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.917.720.330,00							4.262.049.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.917.720.330,00							4.262.049.500,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.917.720.330,00							4.262.049.500,00	
1,	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.431.054.780,00						-	3.667.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	6.050.000,00			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	6.050.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	3.106.001.530,00			-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3.232.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.075.051.530,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	30.950.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	47.860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.172.300,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	-			10 Unit 30 Unit 1 Unit	77.484.700,00			-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	66.700.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.284.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						217.950.250,00						-	250.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	32.550.250,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5000 Dokumen	32.550.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	185.400.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	185.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3,	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						167.737.500,00						-	195.049.500,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	-			79,15 %	22.688.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	22.688.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-			1 Laporan	145.049.500,00			-	-	-	-	145.049.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	145.049.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		145.049.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						90.997.800,00						-	130.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	-			100 %	52.309.100,00			-	-	Masyarakat, Lembaga Pengguna Data	-	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	32.190.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	Masyarakat, Lembaga Pengguna Data		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	20.118.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	Masyarakat, Lembaga Pengguna Data		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-			100 %	38.688.700,00			-	-	Masyarakat, Lembaga Pengguna Data	-	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	19.840.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	Masyarakat, Lembaga Pengguna Data		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.882.055.487,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu		1.928.480.580,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	30.006.250,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian disusun tepat waktu	-			100 %	10.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu	-	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	10.430.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Komunikasi Kab. Belu		8.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	30.720.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Komunikasi Kab. Belu		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	14.100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu		28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 100 %	100.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu	-	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	100.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas KomInfo Kab. Belu		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2,	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						246.500.000,00						-	223.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	22.560.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Perangkat Daerah		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Perangkat Daerah		7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				81 %	5.350.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belu		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				9 Laporan	5.350.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belu		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						7.500.000,00							8.000.000,00	
1,	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						7.500.000,00						-	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	-			100 %	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belu	-	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				59 Perangkat Daerah	7.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belu		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						4.578.177.156,00							4.399.985.606,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.448.177.156,00							4.399.985.606,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						777.575.800,00							760.138.350,00	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.224.500,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			36 Orang/ bul anbulan	1.224.500,00			-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-	-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.224.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						711.755.950,00						-	711.556.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-			45 Orang	711.755.950,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyarakat pencari kerja	-	711.556.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				45 Orang	711.755.950,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyarakat pencari kerja		711.556.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						30.000.000,00						-	6.295.000,00	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	-			60 Orang	30.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat pencari kerja	-	6.295.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat pencari kerja		6.295.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						34.595.350,00						-	41.287.350,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola hubungan industrial yang layak	-			20 perusahaan	34.595.350,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pengusaha dan pekerja	-	41.287.350,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	8.716.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pengusaha dan pekerja		14.595.350,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10 Orang	25.879.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pengusaha dan pekerja		26.692.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						3.670.601.356,00							3.639.847.256,00	
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.546.239.856,00						-	3.565.485.756,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	26.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		26.610.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			36 Orang/bulan	72.442.000,00			-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-	-	71.784.400,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.936.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		10.278.400,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	59.506.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		59.506.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya	-			2 Unit	30.000.000,00			-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	16.384.000,00			-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-	-	27.184.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	984.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		984.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	14.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		25.200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			25 Unit 13/ Unit	209.700.500,00			-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-	-	209.701.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	207.701.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		207.701.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	999.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	-			26 Unit Usaha	30.000.000,00			-	-	Unit usaha dan koperasi	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				106 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Unit usaha dan koperasi		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						23.846.500,00						-	23.846.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	-			26 %	23.846.500,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Koperasi	-	23.846.500,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	23.846.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Koperasi		23.846.500,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						19.515.000,00						-	19.515.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	-			35 Unit Usaha	19.515.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Unit usaha dan koperasi	-	19.515.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	19.515.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Unit usaha dan koperasi		19.515.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						51.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-			300 Unit Usaha	51.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Unit usaha dan koperasi	-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Unit usaha dan koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				5 Unit Usaha	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Unit usaha dan koperasi		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						130.000.000,00							0,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						130.000.000,00							0,00	
1,	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						130.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigrasi dalam pengembangan transmigrasi	-			5 Satuan Permukiman	130.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Warga Transmigrasi	-	0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				3 Satuan Permukiman	130.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Warga Transmigrasi		0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.678.205.553,00							3.839.281.503,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.678.205.553,00							3.839.281.503,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.678.205.553,00							3.839.281.503,00	
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.376.745.053,00						-	3.609.281.503,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	23.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.816.281.703,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.860.281.503,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	-			7 dokumen 4 Laporan	96.458.250,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	114.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.119.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.242.550,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		37.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.405.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	33.690.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Paket	100.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	186.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN DPMPPTSP KAB. BELU		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	44.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN DPMPPTSP KAB. BELU		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						5.060.500,00						-	30.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	-			1 Dokumen	5.060.500,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	5.060.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						41.000.000,00						-	100.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	24.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN DPMPPTSP Kab. Nelu dan Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2.824.256.075,00							2.989.498.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.824.256.075,00							2.989.498.500,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.793.336.075,00							2.929.498.500,00	
1,	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.559.504.025,00						-	2.684.498.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	2.260.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.260.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	101.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Masyarakat		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						30.920.000,00							60.000.000,00	
1,	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						30.920.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-			50 Pengguna	30.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				50 Pengguna	30.920.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						5.059.720.714,00						4.649.983.738,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						973.922.268,00							983.278.500,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						973.922.268,00							983.278.500,00	
1,	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						870.261.718,00						-	900.000.000,00	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	-			100 %	870.261.718,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab Belu	-	900.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	870.261.718,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab Belu		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2,	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						103.660.550,00						-	83.278.500,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28/14 Orang/bulan	2.738.228.896,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kab. Belu		3.009.300.738,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	60.841.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		40.128.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22.125.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keajahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keajahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	39.840.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keajahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		40.128.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16.338.250,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keajahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.543.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	155.184.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab Belu		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab Belu		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	55.970.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	118.640.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	80.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						150.000.000,00						-	12.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekraf Yang Dibina (Kelompok)	-			5 Kelompok	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu	-	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kab. Belu		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	83.931.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		85.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						17.358.377.346,00							21.049.036.491,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.175.400,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						29.175.400,00							0,00	
1,	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.190.150,00						-	0,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-			100 %	2.190.150,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyar akat	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/ Kota				1 Laporan	2.190.150,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2,	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						26.985.250,00						-	0,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-			100 %	26.985.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani dan Petani	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	26.985.250,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani dan Petani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.329.201.946,00							21.049.036.491,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						17.329.201.946,00							21.049.036.491,00	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.650.383.096,00						-	14.715.380.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	12.203.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	12.203.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	178.652.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	189.381.400,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPKP	-	3.603.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	95.781.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPKP		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	93.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPKP		3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 100 %	34.535.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	ASN DPKP	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	ASN DPKP		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29.535.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	RETRIBUSI JASA USAHA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 100 %	1.988.706.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP	-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				119 Unit	565.631.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	RETRIBUSI JASA USAHA, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), P BJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				48 Unit	1.411.825.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPKP		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	11.250.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	ASN DPKP		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	75.045.000,00			-	-	ASN DPKP	-	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	75.045.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DPKP		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.369.962.600,00						-	1.700.001.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				14 Unit	2.940.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok Tani dan Petani		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4,	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Peningkatan pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian Persentase Luas Area Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	-			29800/78200 Ton 100 %	80.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kelompok Tani	-	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Kelompok Tani		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5,	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						258.856.250,00						-	553.655.491,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian yang berkualitas	-			100 % 23,68 %	258.856.250,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Petani dan PPL	-	553.655.491,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Petani dan PPL		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	60.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Petani dan PPL		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				12 Unit	98.856.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Petani dan PPL		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Petani dan PPL		243.655.491,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						11.722.836.149,00							11.034.030.289,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.722.836.149,00							11.034.030.289,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	32.950.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						10.812.884.149,00							9.581.030.289,00	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.591.098.349,00						-	6.261.030.289,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	10.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-	-	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu		40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	176.739.500,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	207.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.024.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		5.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	37.389.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		42.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	22.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	87.226.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	10.091.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		17.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	393.300.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu	-	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	381.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	12.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.665.916.300,00						-	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 %	45.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat dan Kawasan Sonis Laloran	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat dan Kawasan Sonis Laloran		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota	-			100 % 100 %	2.620.916.300,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak	-	3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				3 Laporan	2.620.916.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak		3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						12.750.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	-			100 %	12.750.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak	-	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	12.750.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Bakustulama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1.543.119.500,00						-	305.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	1.327.992.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak	-	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	1.327.992.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	15.875.000,00			-	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatkan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak	-	30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM				4 Laporan	15.875.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatkan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	199.252.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertubuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Petani Peternak	-	175.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				4 Laporan	79.515.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertubuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Petani Peternak		95.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	119.737.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Petani Peternak		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						5.495.614.609,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.495.614.609,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.799.504.609,00							0,00	
1,	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.368.748.509,00						-	0,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	5.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	48.838.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Juta	20.460.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	14.960.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Juta	164.667.950,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	161.277.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.390.950,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						265.778.100,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Presentase Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 100 % 100 100 % 100 100 % 100 %	251.178.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pedagang Pasar/Pelaku Usaha, Masyarakat	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	206.106.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pedagang Pasar/Pelaku Usaha, Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	45.072.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pedagang Pasar/Pelaku Usaha, Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Presentase Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			1 Paket 100 %	14.600.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN, Pedagang/Pelaku Usaha	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	14.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN, Pedagang/Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						72.007.500,00						-	0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Dagang Lokal Jumlah Pameran Dagang Nasional Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagangn Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 100 100 100 %	72.007.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	43.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN, Pelaku Usaha, dan Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN, Pelaku Usaha, dan Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN						332.137.300,00							367.455.300,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						332.137.300,00							367.455.300,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						332.137.300,00							367.455.300,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						207.727.900,00						-	217.455.300,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	12.590.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	PEGAWAI BAGIAN PEMERINTAHAN	-	15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.590.600,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	PEGAWAI BAGIAN PEMERINTAHAN		15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	PEGAWAI BAGIAN PEMERINTAHAN	-	10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.746.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Pemerintahan		15.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	91.940.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Pemerintahan		91.940.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	8.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Pemerintahan	-	8.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Pemerintahan		8.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	936.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Pemerintahan	-	1.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	936.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Pemerintahan		1.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	76.515.300,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	76.515.300,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	76.515.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	BAGIAN PEMERINTAHAN		76.515.300,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2,	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						124.409.400,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan	-			100 %	124.409.400,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Sekretariat Daerah	-	150.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				7 Dokumen	124.409.400,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Sekretariat Daerah		150.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN HUKUM						383.879.000,00							665.400.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						383.879.000,00							665.400.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						383.879.000,00							665.400.000,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						114.365.000,00						-	150.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.900.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum	-	16.900.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	16.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		16.900.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	37.965.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum	-	75.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		10.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	52.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		52.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		0,00	BAGIAN HUKUM
2,	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						269.514.000,00						-	515.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Telaksananya Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				269.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum	-	515.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	160.299.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		250.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	104.215.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		250.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Hukum		15.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						161.471.400,00						179.738.100,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						161.471.400,00							179.738.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						161.471.400,00							179.738.100,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						115.801.400,00						-	115.868.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	14.166.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatan keajahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	14.166.600,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	14.166.400,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatan keajahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		14.166.600,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	59.934.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	59.934.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.264.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		6.264.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	4.190.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		4.190.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	35.480.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keadilan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		35.480.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	24.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		24.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						199.475.700,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						199.475.700,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						199.475.700,00							0,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						121.640.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	13.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	31.273.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.012.750,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	871.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	25.390.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK DAERAH	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	76.866.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	76.866.750,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2,	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						77.835.000,00						-	0,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	20.435.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Bagian Administrasi Pembangunan		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.638.480.700,00							2.598.900.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.638.480.700,00							2.598.900.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.638.480.700,00							2.598.900.000,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						75.300.700,00						-	98.900.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	17.774.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	17.400.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.425.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat		15.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat		20.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				43.500.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	45.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	43.500.600,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat		45.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2,	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.563.180.000,00						-	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terterselenggaranya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				2.563.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat	-	2.500.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				20 Dokumen	713.180.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat		800.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Masyar akat		150.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				100 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Masyar akat		1.550.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN ORGANISASI						311.982.650,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						18.000.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						18.000.000,00							0,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X	NON						293.982.650,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						293.982.650,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	92.463.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	17.057.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	50.970.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100%	24.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.806.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	-			100%	124.301.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	33.798.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	X.XX.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	25.415.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Organisasi		0,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						17.947.953.991,40							18.625.955.577,00	
	X	NON						17.947.953.991,40							18.625.955.577,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						17.947.953.991,40							18.625.955.577,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.947.953.991,40						-	18.625.955.577,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	5.070.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum	-	5.070.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.070.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		5.070.000,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		39.100.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	147.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum	-	147.700.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		35.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	112.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		112.700.000,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	618.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum	-	618.860.527,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	392.683.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum	-	1.109.180.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	67.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		67.500.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	196.883.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		896.680.000,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	236.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		314.100.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	153.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		153.100.000,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	726.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		726.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		15.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		15.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	144.977.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Bagian Umum		44.990.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	250.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Reformasi birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		250.000.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	2.634.440.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Reformasi birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.617.871.790,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	509.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah		509.250.000,00	BAGIAN UMUM
	X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	107.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah		107.750.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						423.602.249,60							423.602.356,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						423.602.249,60							423.602.356,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						423.602.249,60							423.602.356,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						265.001.749,60						-	265.001.856,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	14.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	14.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		14.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	996.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		996.100,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	83.556.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		83.556.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	40.034.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		40.034.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				6 Orang	35.010.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		35.010.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						681.854.450,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						681.854.450,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						681.854.450,00							0,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						681.854.450,00						-	0,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIKOKRASIDAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			14 Laporan	49.140.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100%	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	114.092.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	37.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	27.930.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				450 Laporan	51.984.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DPRD						21.050.670.111,00							44.836.014.751,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.050.670.111,00							44.836.014.751,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						21.050.670.111,00							44.836.014.751,00	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.318.002.111,00						-	34.577.751.751,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	-			5 Dokumen 100 %	7.599.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	12.526.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.599.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.526.000,00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	12.790.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		17.870.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	23.220.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	106.722.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	14.540.395.960,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	14.749.995.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	14.474.995.960,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		14.474.995.960,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	15.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	RETRIBUSI JASA UMUM	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Laporan 12 Laporan 100 %	742.932.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRU OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	1.607.467.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitas Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD				8 Laporan	7.450.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRU OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		14.985.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	75.482.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PAJAK DAERAH, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		356.482.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	660.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.236.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						2.732.668.000,00						-	10.258.263.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	27.760.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		55.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	8.025.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			3 Dokumen 100 %	294.825.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu	-	848.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	294.825.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		848.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				30 Laporan	38.735.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		154.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		3.474.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Meningkatnya Fasilitasi Tugas DPRD	-			2 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 100 %	433.553.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu	-	3.892.488.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4 Dokumen	149.475.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		1.817.652.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	148.930.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		544.836.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	135.148.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	DPRD Kabupaten Belu		1.530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						5.219.054.853,00							6.324.092.013,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.219.054.853,00							6.324.092.013,00	
	5.01	PERENCANAAN						5.165.554.853,00							5.724.092.013,00	
1,	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.073.849.853,00						-	4.256.552.013,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	17.360.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	3.572.937.933,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	3.585.398.863,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3.495.401.933,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		3.495.398.863,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				220 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				780 Dokumen	67.536.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-			100 %	7.512.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan				1 Dokumen	7.512.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	154.550.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		185.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.985.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		42.585.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.829.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.831.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	20.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur		40.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	57.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur		68.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	6.880.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		6.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				67 Orang	60.040.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		60.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	8.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	8.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.				4 Laporan	18.512.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	8.812.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	11.620.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	8.412.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	80.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu	-	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 dokumen Dokumen	30.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						53.500.000,00							600.000.000,00		
1,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						53.500.000,00						-	600.000.000,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-			1 dokumen	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	ASN BP4D Kab Belu		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	3.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Dokumen Laporan	3.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HIBURAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							139.319.853.959,00						139.591.872.109,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						139.319.853.959,00							139.591.872.109,00	
	5.02	KEUANGAN						139.319.853.959,00							139.591.872.109,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						136.007.472.959,00						-	136.081.460.109,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-	-	7.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-		7.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	135.071.025.759,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-	-	135.051.105.109,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	10.503.397.796,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		10.503.397.146,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	40.728.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		99.908.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	39.760.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELA NJUTAN	-		49.953.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	104.270.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-		104.270.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	99.013.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		96.013.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.490.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELAJUTAN	-		7.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	24.765.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-		24.765.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	49.975.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						2.774.691.000,00						-	2.966.837.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	257.460.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		356.610.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				161 Orang	139.990.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		139.990.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			3 Dokumen	686.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah	-	744.108.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	61.555.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		61.555.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	142.070.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		142.070.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	89.570.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		89.570.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						537.690.000,00						-	543.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			5 Dokumen	537.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah	-	543.575.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	89.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		90.845.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	110.310.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		110.310.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	34.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		34.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	186.960.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		186.960.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	116.120.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	39 Perangkat Daerah		120.660.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						5.552.337.742,00							6.519.702.685,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.552.337.742,00							6.519.702.685,00	
	5.02	KEUANGAN						5.552.337.742,00							6.519.702.685,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.947.454.777,00						-	4.422.146.885,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	11.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	12.595.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.450.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.595.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	3.442.162.477,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	3.833.839.325,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34/14 Orang/bulan	3.399.016.477,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		3.786.378.725,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.463.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.710.290,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	41.619.350,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		45.789.920,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	32.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN	-		35.440.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	19.100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		21.835.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	49.914.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Bapenda Kab. Belu, Wajip Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah		54.905.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				8 Laporan	182.453.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, PB JT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN, OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Bapenda Kab. Belu, Wajip Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah		46.552.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	42.320.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Bapenda Kab. Belu, Wajip Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah		46.552.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						76.954.757.275,00							65.259.250.975,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						76.954.757.275,00							65.259.250.975,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						76.084.392.275,00							62.741.276.975,00	
1,	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						74.687.998.775,00						-	61.229.918.725,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	-			100 %	6.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	-	-	6.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1295 Orang/bulan	62.205.638.775,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		60.839.878.725,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33.205.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		33.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	41.644.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSDMD Kab. Belu	-	49.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	41.644.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSDMD Kab. Belu		49.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	102.376.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSDMD Kab. Belu	-	110.817.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.807.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSDMD Kab. Belu		22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	103.871.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSDMD Kab. Belu		104.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSDMD Kab. Belu		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN BKPSMD Kab. Belu		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2,	S.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.396.393.500,00					-		1.511.358.250,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	-			100 %	171.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu	-	178.004.750,00	BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokumen	349.279.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		349.279.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	-			100 %	389.944.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu	-	516.415.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	330.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		405.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				6 Orang	34.644.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		85.215.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				568 Orang	20.366.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	157.262.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		158.317.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						870.365.000,00							2.517.974.000,00	
1,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						870.365.000,00						-	2.517.974.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	-			100 %	16.192.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu	-	1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				1 Orang	16.192.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			100 %	854.173.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu	-	2.516.974.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	854.173.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kabupaten Belu		2.516.974.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						2.188.215.683,00							2.342.793.800,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.188.215.683,00							2.342.793.800,00	
	5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN						2.188.215.683,00							2.342.793.800,00	
1,	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.046.720.083,00						-	2.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			14 bulan	1.944.832.370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keajaiban masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	-	2.030.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21/14 Orang/bulan	1.924.238.770,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan keajaiban masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	46.561.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	Memperkuat transformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			3 laporan	6.315.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	-	15.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	6.315.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			9 Unit	29.582.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peneguhan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	29.582.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peneguhan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2,	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN						106.921.100,00						-	155.000.000,00	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan Daerah yang disusun	-			1 Dokumen	33.731.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat yang berada di dalam Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Belu	-	60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	33.212.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat yang berada di dalam Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Belu		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
3,	5.06.03	PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA						34.574.500,00						-	37.793.800,00	
	5.06.03.2.04	Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Daerah dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	-			1 Laporan	34.574.500,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	37.793.800,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.2.04.0001	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas				1 Laporan	34.574.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		37.793.800,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT						5.510.854.560,00							5.531.054.560,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.510.854.560,00							5.531.054.560,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						5.510.854.560,00							5.531.054.560,00	
1,	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.484.111.760,00						-	4.508.467.060,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	-			100 Persen	16.810.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu	-	13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4.310.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	4.120.155.085,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu	-	4.120.155.060,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	4.085.854.885,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		4.085.854.860,00	INSPEKT ORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	34.300.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		34.300.200,00	INSPEKT ORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	46.800.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu	-	45.000.000,00	INSPEKT ORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	46.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		45.000.000,00	INSPEKT ORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	109.883.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu	-	121.982.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.650.900,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	58.075.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		56.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	7.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu	-	7.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		7.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	20.291.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu	-	40.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		39.300.000,00	INSPEKT ORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	791.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		1.000.000,00	INSPEKT ORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	162.421.775,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab. Belu	-	160.279.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	158.346.575,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab. Belu		155.879.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2.925.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu		3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Inspektorat Kab Belu		400.000,00	INSPEKTORAT
2,	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						823.930.000,00						-	819.565.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				1 Laporan	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Obrik (Opd, Desa, Sekolah, Puskesmas)		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	25.020.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Obrik (Opd, Desa, Sekolah, Puskesmas)		25.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tersedianya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 Persen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu, Obrik OPD, DESA, SEKOLAH, PUSKESMAS	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu, Obrik OPD, DESA, SEKOLAH, PUSKESMAS		15.000.000,00	INSPEKTORAT
3,	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						202.812.800,00						-	203.022.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Keg Pendampingan dan Asistensi	-			100 Persen	202.812.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu, OPD	-	203.022.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				63 perangkat daerah	35.522.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu, OPD		35.522.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	167.290.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Inspektorat Kab Belu, OPD		167.500.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KOTA ATAMBUA						4.228.864.217,00							182.216.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.228.864.217,00							182.216.500,00	
	7.01	KECAMATAN						4.228.864.217,00							182.216.500,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.227.219.217,00						-	182.216.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			10 Dokumen	3.079.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.079.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenunikiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		3.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah Nilai Sakip	-			100 % CC58Predikat/Angka Orang/bulan	4.051.807.467,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Kota Atambua	-	25.665.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.026.142.467,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	25.665.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		25.665.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	1.008.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRU OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.200.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.970.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRU OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.170.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			5 Laporan	2.143.650,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenuliik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100%	81.035.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	52.599.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	30.949.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		749.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.085.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.085.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	1.085.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
3,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						560.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	560.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	560.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
		KELURAHAN ATAMBUA							614.922.110,00	506.225.650,00						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							614.922.110,00	506.225.650,00						
	7.01	KECAMATAN							614.922.110,00	506.225.650,00						
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						50.522.110,00					-		48.825.650,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	12.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	12.740.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.740.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.740.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan umum Perangkat Daerah	-			100 %	7.110.510,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	5.020.500,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		200.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	490.940,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		478.500,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.064.570,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		3.147.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	1.555.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.195.000,00	KELURAHAN ATAMBUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	22.000.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				48 Unit	12.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-			100 %	1.822.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	10.624.550,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		195.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	6.849.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	7.440.600,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	155.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Kelurahan Atambua		65.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	152.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Kelurahan Atambua		135.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	-			0000	257.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua	-	257.400.000,00	KELURAHAN ATAMBUA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	257.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua		257.400.000,00	KELURAHAN ATAMBUA	
		KELURAHAN FATUBENAO						1.341.185.500,00							870.339.200,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.341.185.500,00								870.339.200,00	
	7.01	KECAMATAN						1.341.185.500,00								870.339.200,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						55.785.500,00							-	66.939.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	12.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	12.880.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.880.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.880.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan umum Perangkat Daerah	-			100 %	10.836.400,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	13.973.400,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.515.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		9.635.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.635.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		9.635.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	995.100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	7.247.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	7.248.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	6.997.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		6.998.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		250.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.285.400.000,00						-	803.400.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	623.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua		623.400.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
		KELURAHAN TENUKIIK						690.288.040,00							578.936.900,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						690.288.040,00							578.936.900,00	
	7.01	KECAMATAN						690.288.040,00							578.936.900,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						53.888.040,00						-	61.536.900,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	12.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	12.740.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.773.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.633.800,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2.880.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		3.761.600,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.300.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	192.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		200.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.060.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.260.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	7.941.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		7.941.500,00	KELURAHAN TENUKIHK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	165.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kelurahan Tenukiik		137.660.500,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	154.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kelurahan Tenukiik		62.339.500,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	-			0000	317.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua	-	317.400.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	317.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua		317.400.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
		KELURAHAN MANUMUTIN						1.472.706.600,00							991.839.700,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.472.706.600,00							991.839.700,00	
	7.01	KECAMATAN						1.472.706.600,00							991.839.700,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						52.309.700,00						-	48.439.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	12.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	12.740.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.740.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.740.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	1.300.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	22.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.550.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		550.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		12.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.100.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		9.300.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		250.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1.326.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		351.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.420.396.900,00					-		943.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	-			000	682.996.900,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN Kelurahan Manumutin	-	200.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	403.790.900,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Kelurahan Manumutin		108.350.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	279.206.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Kelurahan Manumutin		91.650.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	-				737.400.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua	-	743.400.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakat an	737.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Warga Kecamatan Kota Atambua		743.400.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
		KECAMATAN TASIFETO BARAT						1.838.265.534,00							1.859.996.734,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.838.265.534,00							1.859.996.734,00	
	7.01	KECAMATAN						1.838.265.534,00							1.859.996.734,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.820.556.134,00						-	1.838.046.734,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kec. Tasifeto Barat		2.750.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.850.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Kec. Tasifeto Barat		7.800.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN Kec. Tasifeto Barat		2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	814.400,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	ASN Kec. Tasifeto Barat		1.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	4.258.600,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN Kec. Tasifeto Barat		5.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.960.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	4.960.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Kec. Tasifeto Barat	-	8.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	4.960.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN Kec. Tasifeto Barat		8.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6.700.000,00						-	7.200.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	5.200.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat	-	5.550.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	2.200.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat		2.250.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat		3.300.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	-			100 %	1.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat	-	1.650.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pambangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat		1.650.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.000.000,00						-	2.200.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kec. Tasifeto Barat	-	2.200.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kec. Tasifeto Barat		2.200.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4.049.400,00						-	4.550.000,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	4.049.400,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat	-	4.550.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat		2.200.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT		
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				10 Dokumen	1.134.400,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat		1.250.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	1.015.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Tasifeto Barat		1.100.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT		
		KECAMATAN TASIFETO TIMUR						2.029.548.714,00								2.076.717.164,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.029.548.714,00								2.076.717.164,00		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.866.839.314,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	-		1.934.177.164,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	16.900.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		22.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran	-			100 %	53.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRU OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		38.040.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 jenis Paket	1.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRU OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIKORASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	35.400.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	-		17.540.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	57.750.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		55.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						26.409.400,00						-	12.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100%	10.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Tasifeto Timur	-	12.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	6.500.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Tasifeto Timur		6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 % Dokumen	4.400.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Tasifeto Timur		5.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	15.509.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Tasifeto Timur	-	0,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	15.509.400,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Tasifeto Timur		0,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
		KECAMATAN RAIHAT						1.441.056.290,00							1.421.403.745,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.441.056.290,00							1.421.403.745,00	
	7.01	KECAMATAN						1.441.056.290,00							1.421.403.745,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.407.998.090,00						-	1.409.853.745,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Raihat		15.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24.460.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Raihat		26.250.000,00	KECAMATAN RAIHAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Raihat		1.050.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.978.800,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Raihat		7.330.575,00	KECAMATAN RAIHAT
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.630.000,00						-	5.250.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	5.630.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Raihat	-	5.250.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	5.630.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Raihat		5.250.000,00	KECAMATAN RAIHAT
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6.316.000,00						-	6.300.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	6.316.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	Lembaga Kemasyarakatan	-	6.300.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.316.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Reformasi birokrasi	Lembaga Kemasyarakatan		6.300.000,00	KECAMATAN RAIHAT
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			82 %	5.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raihat	-	0,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raihat		0,00	KECAMATAN RAIHAT
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.957.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	4.957.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	ASN Kecamatan Raihat	-	0,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4.957.200,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	ASN Kecamatan Raihat		0,00	KECAMATAN RAIHAT
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						11.155.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	11.155.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH VII : KOLA BORASI	Pemerintah Desa	-	0,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	6.165.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH VII : KOLA BORASI	Pemerintah Desa		0,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	4.990.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PRIORITAS DAERAH VII : KOLA BORASI	Pemerintah Desa		0,00	KECAMATAN RAIHAT
		KECAMATAN LAMAKNEN							1.461.376.075,00						1.478.926.075,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.461.376.075,00						1.478.926.075,00	
	7.01	KECAMATAN							1.461.376.075,00						1.478.926.075,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.438.376.075,00					-	1.449.376.075,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.312.075.825,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	1.312.076.575,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.295.175.825,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.295.176.575,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.900.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		16.900.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	56.788.750,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	57.599.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.020.750,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.187.500,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.180.500,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		6.099.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		9.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.400.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		25.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.491.500,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	12.700.500,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.488.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		1.488.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.350.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.653.500,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.212.500,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.520.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	57.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	45.520.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		45.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Dokumen	2.500.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Lamaknen	-	5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Lamaknen		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	2.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7.500.000,00						-	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			100 %	7.500.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga K emasyarakat an	2.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		3.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.500.000,00						-	2.750.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	2.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	2.750.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		2.750.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						8.000.000,00						-	8.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	8.800.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN			
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		2.750.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN			
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		2.750.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN			
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	3.400.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		3.300.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN			
		KECAMATAN KAKULUK MESAK							2.392.633.660,00							2.513.202.010,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.392.633.660,00							2.513.202.010,00			
	7.01	KECAMATAN							2.392.633.660,00							2.513.202.010,00			
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.357.033.660,00							-	2.466.702.010,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	2.224.278.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	-	-	2.325.277.010,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 /14 Orang/bulan	2.207.277.260,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		2.307.277.010,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	17.001.600,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		18.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.685.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		9.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	15.740.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		17.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	11.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	11.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.780.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		6.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.038.250,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		2.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.110.500,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.600.000,00						-	24.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100%	15.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	-	-	24.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
		KECAMATAN RAIMANUK						1.980.703.718,00							1.985.518.218,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.980.703.718,00							1.985.518.218,00	
	7.01	KECAMATAN						1.980.703.718,00							1.985.518.218,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.961.903.718,00						-	1.962.518.218,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk	-	3.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.801.038.218,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		1.817.938.218,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		17.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			undefined Paket 100 %	57.208.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		58.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		7.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	32.080.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		32.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai sakisip undefined	-			B/ 60 Predikat undefined undefined	9.576.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	0,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	9.576.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		0,00	KECAMATAN RAIMANUK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		10.280.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	982.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.250.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		2.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	5.196.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.700.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prsésentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	4.700.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Raimanuk	-	5.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4.700.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		5.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9.400.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Koordinasi Kegaiaian Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 % 100 %	9.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Raimanuk	-	10.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Masyarakat	4.700.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		5.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	4.700.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		5.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1.100.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	1.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk	-	2.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				9 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		2.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						3.600.000,00						-	6.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presetasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	3.600.000,00			-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk	-	6.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		2.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
7.01.06.2.01.0011		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		2.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	1.200.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Masyarakat Kecamatan Raimanuk		2.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK	
		KECAMATAN LASIOLAT															
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7.01		KECAMATAN															
								1.662.454.522,00							1.786.534.522,00		
								1.610.361.122,00							1.766.534.522,00		
								1.610.361.122,00							1.766.534.522,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.560.121.122,00						-	1.678.534.522,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.512.662.972,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	1.575.034.522,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.495.162.972,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		1.555.034.522,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38.770.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	91.500.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.996.500,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.003.500,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		7.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		9.500.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20.770.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		60.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.688.150,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.750.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2.438.150,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						19.940.000,00						-	36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.970.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	9.970.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	9.970.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	9.970.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		21.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11.300.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.300.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.000.000,00						-	16.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	9.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		16.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						10.000.000,00						-	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	10.000.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		16.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	X	NON URUSAN						52.093.400,00							20.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						52.093.400,00							20.000.000,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						52.093.400,00						-	20.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.093.400,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	52.093.400,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
		KECAMATAN ATAMBUA SELATAN						4.354.348.037,00							4.806.794.175,70	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.354.348.037,00							4.806.794.175,70	
	7.01	KECAMATAN						4.354.348.037,00							4.806.794.175,70	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.340.346.037,00						-	4.781.794.175,70	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>meningkatnya evaluasi kinerja</i>	-			100 %	2.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	2.750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100% Orang/bulan	4.195.400.537,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua selatan		4.614.940.425,70	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20.680.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua selatan		22.784.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	15.795.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		15.795.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	26.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		26.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.690.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		9.339.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		4.840.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	3.134.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		3.447.400,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.556.000,00						-	13.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.756.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.756.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	2.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat	-	11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.509.500,00						-	9.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	8.509.500,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	3.621.900,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		4.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.887.600,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						936.500,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	936.500,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	936.500,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		3.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KELURAHAN LIDAK						954.654.325,00							1.164.299.757,50	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						954.654.325,00							1.164.299.757,50	
	7.01	KECAMATAN						954.654.325,00							1.164.299.757,50	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						44.254.325,00						-	53.959.757,50	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya urusan keuangan	-			100 %	12.740.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-	-	14.014.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.740.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Reformasi birokrasi	-		14.014.000,00	KELURAHAN LIDAK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN LIDAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.260.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		6.666.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.950.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		4.950.000,00	KELURAHAN LIDAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		550.000,00	KELURAHAN LIDAK
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						910.400.000,00						-	1.110.340.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meningkatnya pemberdayaan kelurahan	-			7 Pokmas / Ormas 100 %	401.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan	-	550.000.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	163.242.450,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		462.000.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	237.757.550,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		88.000.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan meningkatnya lembaga kemasyarakatan	-			3 Lembaga Kemasyarakatan 100 %	509.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat	-	560.340.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	509.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		560.340.000,00	KELURAHAN LIDAK
		KELURAHAN RINBESI						681.599.475,00							923.339.587,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						681.599.475,00							923.339.587,00	
	7.01	KECAMATAN						681.599.475,00							923.339.587,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						47.199.625,00						-	57.199.587,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya urusan keuangan	-			100 %	12.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	14.014.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		550.000,00	KELURAHAN RINBESI
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						634.399.850,00						-	866.140.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatkan pemberdayaan kelurahan	-			0000	346.999.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan	-	550.000.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	200.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		473.000.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						48.273.825,00						-	58.380.878,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya urusan keuangan	-				12.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-	-	14.014.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.740.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	-		14.014.000,00	KELURAHAN MANUAMAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN MANUAMAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.060.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		8.646.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	5.087.280,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		5.562.645,00	KELURAHAN MANUAMAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						971.400.000,00						-	1.123.540.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya pemberdayaan kelurahan	-			100%	450.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan	-	550.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	154.872.600,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		456.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	295.127.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		93.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	meningkatnya lembaga kemasyaraakatan	-			100%	521.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat	-	573.540.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	521.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat		573.540.000,00	KELURAHAN MANUAMAN	
		KELURAHAN FATUKBOT						1.009.678.700,00							1.102.231.400,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.009.678.700,00								1.102.231.400,00	
	7.01	KECAMATAN						1.009.678.700,00								1.102.231.400,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						45.210.200,00							-	57.891.400,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya urusan keuangan	-			100 %	12.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	14.014.000,00	KELURAHAN FATUKBOT	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	4.953.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		5.448.300,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.650.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						964.468.500,00						-	1.044.340.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatkan pemberdayaan kelurahan	-			100%	515.068.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan	-	550.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	160.450.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		440.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	354.618.500,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Kecamatan Atambua Selatan		110.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	meningkatnya lembaga kemasyaraakatan	-			100 %	449.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan dan Masyarakat	-	494.340.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	11.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		13.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	16.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		21.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerintah Daerah	-			100 % undefined	1.205.000,00			-	-	-	-	2.750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.205.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % undefined	16.470.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	480.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.990.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		9.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	48.363.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	51.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	42.689.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		42.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	3.673.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan unan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.855.000,00						-	27.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan Atambua Barat		0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tertelaksananyanya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	-			undefined undefined	7.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Aparatur Kecamatan Atambua Barat	-	16.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Aparatur Kecamatan Atambua Barat		16.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						16.100.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tertantanyanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			undefined undefined	16.100.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakat an	7.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyarakat an	8.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						11.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			undefined undefined	5.500.000,00			-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	5.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tertaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			undefined undefined	5.500.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	0,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	162.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		66.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 % undefined undefined	308.400.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	287.400.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	287.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		287.400.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	21.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN BEIRAFU
		KELURAHAN TULAMALAE						675.026.000,00							584.980.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						675.026.000,00							584.980.000,00	
	7.01	KECAMATAN						675.026.000,00							584.980.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						44.626.000,00						-	44.980.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	11.400.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	12.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-			100 % undefined undefined	7.396.700,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	10.250.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	957.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.250.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.373.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.750.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.081.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		3.750.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	985.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.500.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	15.765.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	11.980.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	240.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		480.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		10.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.500.000,00	KELURAHAN TULAMALAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Teelaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 % undefined	10.064.300,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	10.750.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	6.818.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		5.500.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.500.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2.246.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		2.750.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						630.400.000,00						-	540.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 % undefined undefined	304.000.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	215.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		150.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	154.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		65.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 % undefined undefined	326.400.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	325.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakatan	305.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		325.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	985.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.500.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % undefined	15.525.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	12.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		10.500.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		1.500.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjabg Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % undefined	9.301.200,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	11.250.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	6.818.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		6.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		2.500.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1.483.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		2.750.000,00	KELURAHAN BARDAO
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						649.400.000,00						-	480.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 % undefined	371.000.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	220.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		160.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	221.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		60.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			undefined	278.400.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	260.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakatan	257.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		260.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	21.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARDAO
	X	NON						240.000,00							480.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						240.000,00							480.000,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						240.000,00						-	480.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % undefined undefined	240.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	480.000,00	KELURAHAN BARDAO
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	240.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		480.000,00	KELURAHAN BARDAO
		KELURAHAN UMANEN						1.258.575.300,00							865.155.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.258.575.300,00							865.155.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.258.575.300,00							865.155.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						47.375.300,00						-	50.155.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah undefined	-			100 % undefined undefined undefined undefined	11.400.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	12.400.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.400.000,00	KELURAHAN UMANEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	8.159.800,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	11.500.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	957.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		1.500.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.373.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		2.750.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.844.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		3.750.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	985.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		3.500.000,00	KELURAHAN UMANEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % undefined undefined	15.765.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	12.505.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	240.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		480.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		10.525.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		1.500.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjabg Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % undefined undefined	12.050.500,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	13.750.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	9.567.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		8.500.000,00	KELURAHAN UMANEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		2.500.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1.483.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		2.750.000,00	KELURAHAN UMANEN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.211.200.000,00						-	815.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			undefined undefined	625.000.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-	-	215.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		125.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	325.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		90.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat Terlaksanananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			100 % undefined undefined	586.200.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	600.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakatan	565.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		600.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	21.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN UMANEN
		KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN						1.775.537.481,00							1.721.592.556,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.775.537.481,00							1.721.592.556,00	
	7.01	KECAMATAN						1.775.537.481,00							1.721.592.556,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.751.537.481,00						-	1.715.592.556,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.611.760.606,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	1.593.909.556,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				21 orang/Bulan 0	1.593.980.606,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		1.593.909.556,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	6.000.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga K emasyarakat an	6.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		6.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						9.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	9.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	0,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		0,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
		KECAMATAN NANAET DUABESI						1.322.773.167,00							1.335.444.217,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.322.773.167,00							1.335.444.217,00	
7.01		KECAMATAN						1.322.773.167,00							1.335.444.217,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.995.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		9.995.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	22.080.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		22.080.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	-			100 %	20.220.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	20.220.600,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.220.600,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		20.220.600,00	KECAMATAN NANAET DUABESI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.410.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		6.170.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.429.550,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		1.429.550,00	KECAMATAN NANAET DUABESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Dalam Menunjang Pelayanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	-			100 %	56.979.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	56.990.900,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	56.979.850,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIRUKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	-		56.990.900,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						13.900.000,00						-	16.800.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nanaet Duabesi		4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	-			100 %	4.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nanaet Duabesi	-	6.400.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4.400.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nanaet Duabesi		6.400.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.300.000,00						-	10.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan	-			100 %	8.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nanaet Duabesi	-	10.400.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nanaet Duabesi		3.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5.300.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing	ASN dan Masyarakat Kecamatan Nanaet Duabesi		7.400.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.800.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.800.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1.800.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		3.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1.200.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	1.200.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.100.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.100.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Desa	-	4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 dokumen Dokumen	2.100.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Desa		4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.817.536.819,00							4.075.626.669,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.817.536.819,00							4.075.626.669,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.817.536.819,00							4.075.626.669,00	
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.339.359.089,00						-	2.386.538.639,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-			1 Laporan	2.460.900,00			-	4. Reformasi birokrasi	Badan Kesbangpol	-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.460.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Badan Kesbangpol		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Sub Kegiatan	2.161.098.789,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN	-	2.182.884.289,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2.129.948.789,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN		2.129.984.289,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	31.150.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN		52.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			6 Sub Kegiatan	45.301.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Administrasi Perkantoran	-	68.906.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.821.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Administrasi Perkantoran		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	19.858.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	ASN dan Administrasi Perkantoran		13.961.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Purnapaskibraka Data Pancasila				30 Orang	1.225.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH VI : REFO RMASI BIR OKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	Siswa/Siswi SMA/SMK, TNI / Polri dan ASN		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						638.352.630,00						-	640.574.030,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-			929 Orang	638.352.630,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, Partai Politik dan ASN	-	640.574.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				929 Orang	638.352.630,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, Partai Politik dan ASN		640.574.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						24.700.000,00						-	25.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-			54 Ormas	24.700.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Ormas	-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	24.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	Ormas		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						75.346.500,00						-	99.999.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	75.346.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, ASN dan Instansi Terkait	-	99.999.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	75.346.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, ASN dan Instansi Terkait		99.999.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						917.514.200,00						-	923.514.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-			2 Kasus	917.514.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, Pimpinan Daerah dan ASN	-	923.514.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	124.179.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, Pimpinan Daerah dan ASN		130.179.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	793.335.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat, Pimpinan Daerah dan ASN		793.335.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							953.030.958.669,00							849.291.479.163,20	

BUPATI BELU
WILLYBRODUS LAY

REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024
RKPD KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga					320.387.750.442											240.142.192.789	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	CC/52	195.365.076.369											181.519.800.491	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000											3.000.000	
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Linerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3.000.000							3.000.000		0		3.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi Keuangan PD	26	195.104.008.365											181.268.284.157	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BULAN)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	194.770.458.365	4	41.095.239.820		42.461.192.811		45.350.000		181.010.334.157	14	100	181.010.334.157	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BULAN)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BULAN)	12	333.550.000	4			101.500.000		85.750.000		257.950.000,00	12	100	257.950.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	105	53.084.304											52.250.804	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	13.667.750	1					12.594.250		13.594.250	12	100	13.594.250	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	8.046.554	3							8.046.554	2	100	8.046.554	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	14.030.000	12			7.015.000				14.030.000	1	100	14.030.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	17.340.000	15			13.040.000				16.580.000	90	100	16.580.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9.577.600											9.572.500	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8	9.577.600	8							9.572.500	8	100	9.572.500	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	75.500.000											73.266.250	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000	1			2.500.000				5.000.000	1	100	5.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	70.500.000	12	10.958.000		26.466.550		19.173.300		68.266.250	12	100	68.266.250	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23	119.906.100											113.426.780	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang di Pemeliharaan, dan dibayarkan Pajak, dan Perizinannya	23	119.906.100	23	8.719.900		61.121.680		25.745.100		113.426.780	23	100	113.426.780	
	Meningkatnya kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			88.905.404.083								0,00			55.090.275.895	
			APK SMP	91.07													
			APM SMP	89.07													
			ANGKA KELULUSAN SMP	99.85													
			ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP	1.02													
			PETA MUTU PENDIDIKAN	5,4													

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
			RATIO RUANG KELAS KATEGORI BAIK TERHADAP RUANG KELAS SMP	94.96													
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20	43.979.840.787											26.537.401.315	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun	1	305.442.700	1			290.036.847,00				290.036.847	1	100	290.036.847	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	1	700.650.000	1			671.823.121,00				671.823.121	1	100	671.823.121	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1	303.248.950	1			255.674.771,87				255.674.772	1	100	255.674.772	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sapras utilitas sekolah yang dibangun	7	848.550.000	10			843.324.445,00				843.324.445	7	100,00	843.324.445	
		Pembangunan rumah dinas kepek/guru/penjaga sekolah	jumlah rumah dinas kepek/guru/penjaga a sekolah yang dibangun	6	1.441.234.086	5			1.365.594.261,00				1.365.594.261	6	100	1.365.594.261	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah	1	145.192.686	1			144.589.117,00				144.589.117	1	100	144.589.117	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.070	3.772.190.000						43.390.000		3.748.890.000	3070	100	3.748.890.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	100.000.000	51							99.945.000	1	100	99.945.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350	281.614.700	350					214.875.200		263.689.700,00	350	100	263.689.700	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	273	2.016.000.000	120	329.000.000	120	813.750.000		484.750.000,00		1.953.000.000	273	100	1.953.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1286	1.278.234.500				254.074.500		322.644.500		1.218.100.500	1286	100	1.218.100.500	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	147	23.059.256.777	147	5.764.814.194	40%	47.770.000				6.549.215.134	147	100	6.549.215.134	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6	1.606.885.000	8					418.833.773		1.547.956.785	6	100	1.547.956.785	
		Pengembangan Kontenn digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	300	81.473.800								81.473.800	300	100	81.473.800	
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	155.115.000	147			13.207.500		8.000.000		126.375.000	1	100	126.375.000	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	44.607.500		13.207.500				11.057.500		28.907.500	0	0	28.907.500	
		Pengadaan Perlengkapan peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.000	3.409.150.000								3.372.150.000	1000	100	3.372.150.000	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	20	2.610.095.870	26					307.149.180		2.470.772.095	20	100	2.470.772.095	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sapras dan utilitas sekolah yang direhab	2	100.921.718	1							100.650.440	2	100	100.650.440	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	147	159.037.500	147					59.100.000		158.827.500	147	100	158.827.500	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	2	1.560.940.000								1.246.405.298	2	100	1.246.405.298	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan SMP	20	32.197.798.428											21.588.256.875	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun	1	2.238.196.250	2					321.611.652		2.129.335.640	1	100	2.129.335.640	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan sekolah yang dibangun	1	943.600.000	1					190.709.387		745.224.523,00	1	100	745.224.523	
		Pembangunan Laboratorium	jumlah ruang laboratorium yang dibangun	2	2.625.160.000	5					408.269.559		2.459.664.249	2	100	2.459.664.249	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	jumlah rumah dinas kepek/guru/penjaga sekolah yang dibangun	4	914.300.000						240.650.650		890.809.160	4	100	890.809.160	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	7	520.250.000	10					22.422.000		489.122.599	7	100	489.122.599	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	175.631.500						47.161.700		175.246.689	3	100	175.246.689	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0	3.198.375.000						8.175.000		3.171.375.000		0	3.171.375.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan alat peraga siswa yang diadakan	1	443.450.000	17							440.495.000	1	100	440.495.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	165	286.821.200	165							275.793.363	165	100	275.793.363	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	724	1.890.000.000	25	239.750.000		607.250.000				1.464.750.000	724	100	1.464.750.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	724	505.450.400	84		192.249.000				448.070.200	724	100	448.070.200		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	55	13.113.212.550	2		1				4.509.324.430	55	100	4.509.324.430		
		Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, supervisi, perencanaa n dan evaluasi layanan dibidang pendidikan	0	177.658.750,00					39.344.000		71.602.750,00		0	71.602.750		
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	26.117.500					9.200.000		10.867.500		0	10.867.500		
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	3.933	37.500.000	55						25.700.000	3933	100	25.700.000		
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	19	2.067.630.278	4				181.185.985		1.291.975.772		0	1.291.975.772		
		Pengadaaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000	3.034.445.000							2.988.900.000	1000	100	2.988.900.000		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tercapainya Pengelolaan PAUD	20	11.753.725.068										6.958.677.905		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	jumlah sapras dan utilitas PAUD yang di bangun	13	1.193.011.968	2				177.321.770		1.051.000.355	13	100	1.051.000.355		
		Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang tersedia	3	335.000.000							333.344.500	3	100	333.344.500		
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	663	222.640.400			1.157.200				1.157.200	663	100	1.157.200		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan kependidikan yang tersedia pada PAUD	7	3.698.400.000	8	24.500.000		893.500.000				3.330.300.000	7	100	3.330.300.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	215	441.054.800	221			24.360.000		114.776.850		344.643.490	215	100	344.643.490	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mengelola dana BOP	209	3.974.119.700	215			18.663.300				35.050.000	209	100	35.050.000	
		Koordinasi,perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			152.400.000						56.872.960		143.262.960		0	143.262.960	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	128.316.200				2.842.800		112.723.400		115.566.200		0	115.566.200	
		Pengadaan perlengkapan peserta Dididik	Jumlah Pengadaan perlengkapan siswa PAUD yang tersedia	-	1.608.782.000								1.604.353.200		0	1.604.353.200	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Non formal/kesetaraan	20	974.039.800											5.939.800	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Paket A yang mendapatkan BOP Jumlah Peserta Didik Paket B yang mendapatkan BOP Jumlah Peserta Didik Paket C yang mendapatkan BOP	8	974.039.800								5.939.800		0	5.939.800	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya lembaga PAUD yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	2.33	88.267.600											88.267.600	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tercapainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	88.267.600											88.267.600	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah penyusun kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkat kompetensinya	-	88.267.600								88.267.600		0	88.267.600	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		197.271.500											197.211.980	
		Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Menengah	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Menengah		197.271.500											197.211.980	
		Penataan Pendistribusiaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Penataan Pendistribusiaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	197.271.500	221		35.091.600		50.051.600		197.211.980,00	1	100		197.211.980	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			31.562.541.700											17.311.900	
		Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat			8.421.700											10.897.900	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidkan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			8.421.700	2	-					321.700		0		321.700	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	-	27.826.200								10.576.200		0	10.576.200	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tercapainya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		31.606.710.200											6.414.000	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan Paud dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	5	24.764.000	2							6.414.000	2	40	6.414.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		259.408.600											247.588.600	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota		79.893.400											70.453.400	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Meningkatnya Pengelolaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		34.337.950	6					28.103.750		29.277.950		0	29.277.950	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Pengelolaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		43.555.450	120				13.800.000		41.175.450		0	41.175.450		
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembalian Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Meningkatnya Pengelolaan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembalian Keputusan Program Strategis Kepemudaan		2.000.000	60						0,00		0	-		
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		179.515.200	-				169.166.000		177.135.200,00			177.135.200		
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		179.515.200	1				169.166.000		177.135.200		0	177.135.200		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		4.062.370.790										2.981.736.323		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			417.700.000											413.295.460	
		Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Serta Sekolah Olah Raga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			2.000.000	1									0	-	
		Koordinasi ,sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			415.700.000								413.295.460		0	413.295.460	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.576.051.590											1.499.821.663	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		1.310.061.950,00	8			39.050.000		1.220.869.200		1.286.395.150		0	1.286.395.150	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Meningkatnya Pengelolaan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		1.265.989.640,00	150			4.360.000		14.690.000		213.426.513		0	213.426.513	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Propinsi			368.619.200,00											368.619.200,00	
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			312.702.400,00								312.702.400		0	312.702.400	
		Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan dan Data informasi Sektoral Olahraga			55.916.800,00								55.916.800		0	55.916.800	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	K	Rp	K	8		K	9		10		11		12			13
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		700.000.000											K		Rp	
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		700.000.000	14								700.000.000,00			0	700.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	66,76	74,95	
Predikat Kinerja																	Sedang	Tinggi	
Dinas Kesehatan					152.263.611.725													138.171.759.761	
1.02.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Nilai SAKIP)	CC/54	37.985.719.591													37.119.835.029	
1.02.01.2.02		Adminis trasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Gaji dan Tunjangan ASN	100	37.686.519.591													36.823.640.823	
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	14	37.642.719.591	3	6.330.559.626	3	12.625.663.494	3	9.192.634.100	4	8.630.983.603	13	92,86			36.779.840.823	
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	43.800.000	3	0	3	10.950.000	3	21.900.000	3	10.950.000	12	100			43.800.000	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkat nya pengelolaan administrasi Umum PD	100	31.000.000													30.972.000	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000	0	-	0	-	1	100			1.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
I.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	9.866.000	0	0	1	7.920.000	1	1.000.000	1	946.000	1	33,3333	9.866.000	
I.02.01.2.06.0004		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	1.134.000,00	0	0	1	1.134.000	0	-			1	100	1.134.000	
I.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3	9.000.000,00	0	0	1	2.250.000	1	2.250.000	1	4.500.000	1	33,33	9.000.000	
I.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	10.000.000,00	0	0	1	2.900.000	1	400.000	1	6.672.000	1	33,33	9.972.000	
I.02.01.2.08		Penyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkat nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	49.200.000											48.341.201	
I.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	49.200.000	0	0	3	20.710.701	3	22.521.600	5	5.108.900	3	25	48.341.201	
I.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkat nya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	219.000.000											216.881.005	
I.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	223	219.000.000	0	0	190	186.179.000	30	29.302.005	1	1.400.000	221	99,10	216.881.005	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02.02	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			103.619.597.384		-		-		-		-			91.672.328.803	
			Angka Harapan Hidup	65,8													
			Angka kematian bayi (AKB)	0													
			Angka Kematian Balita (AKABA)	0													
			Angka kemaian ibu (AKI)	0													
			Jaminan Kesehatan Masyarakat	100													
			Presentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan jiwa dan penyehatan lingkungan	85													
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenang an Daerah Kabupaten/ Kota		100	37.580.367.605											32.675.144.252	
1.02.02.2.01.0002		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Unit Puskesmas yang dibangun	2	7.095.174.851	0	0	0	0	1	1.613.546.750	1	3.976.927.300	2	100	5.590.474.050	
1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3	18.123.672.229	0	0	1	20.308.791	1	3.164.968.919	1	14.196.607.370	3	100	17.381.885.080	
1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Unit Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	2	629.653.820	0	0	0	0	1	131.848.328	1	488.457.984	2	100	620.306.312	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	17	4.232.844.400	0	0	0	0	0	0	15	3.853.717.700	15	88,24	3.853.717.700	
1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6	742.150.000	0	0	0	0	0	0	6	738.818.550	6	100	738.818.550	
1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	971.639.888	0	0	0	0	0	0	3	906.486.334	3	100	906.486.334	
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	142.062.000	0	0	0	0	0	0	1	128.500.000	1	100	128.500.000	
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai standar	17	230.743.750	0	0	0	0	1	14.410.000	13	173.812.113	14	82,35	188.222.113	
1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Paket Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	5.243.266.467	0	0	0	0	1	940.113.500	1	2.171.312.913	2	66,67	3.111.426.413	
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Paket Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	18	169.160.200	0	0	0	0	5	45.860.000	12	109.447.700	17	94,44	155.307.700	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkat nya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	65.544.945.679											58.695.714.289	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan Kesehatan	4951	548.364.000	0	0	716	79.260.000	1981	219.380.000	2196	243.240.000	4892	98,82	541.880.000	
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4726	316.127.000	0	0	182	12.200.000	805	53.840.000	2351	157.245.000	3338	70,62	223.285.000	
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bati baru lahir yang mendapatkan pelayanan keschatan sesuai standar	4726	134.425.764	0	0	0	0	0	0	1339	38.081.792	1339	28,33	38.081.792	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan keschatan sesuai standar	36804	704.300.000	0	0	5827	111.500.000	12035	230.300.000	18441	352.900.000	36.302	98,64	694.700.000	
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan keschatan sesuai standar	795	278.389.300	0	0	0	0	0	0	746	261.125.000	746	93,84	261.125.000	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Julah Orang Dengan masalah Kejiwaan yang mendapatkan pelayanan keschatan	182	27.200.000	0	0	0	0	29	4.440.000	0	-	29	15,93	4.440.000	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan keschatan sesuai standar	3972	1.378.564.000	0	0	87	30.200.000	237	82.100.000	3565	1.237.430.000	3889	97,92	1.349.730.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
I.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai atandar	6412	444.300.000	223	50.000.000	108	23.200.000	367	78.900.000	1002	215.485.000	1700	26,51	367.585.000	
I.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	18	5.264.633.200	0	0	1	124.558.800	12	3.470.451.450	4	1.275.465.750	17	94,44	4.870.476.000	
I.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	18	725.960.436	0	0	0	0	5	210.200.000	12	476.585.000	17	94,44	686.785.000	
I.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi kesehatan	18	220.650.000	0	0	0	0	0	0	15	189.150.000	15	83,33	189.150.000	
I.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2	37.896.500	0	0	0	0	1	14.496.500	1	23.400.000	2	100	37.896.500	
I.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17	973.165.000	0	0	0	0	7	377.457.000	7	421.996.000	14	82,35	799.453.000	
I.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang Penyalahguna NAZPA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10	32.052.100	0	0	0	0	0	0	10	32.052.100	10	100	32.052.100	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18	3.163.028.500	1	250.000.000	1	15.300.000	6	1.124.797.000	7	1.143.169.060	15	83,33	2.533.266.060	
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3	27.129.531.600	0	0	1	6.873.483.400	1	8.578.577.800	1	11.432.733.800	3	100	26.884.795.000	
1.02.02.2.02.0028		Pengambil an dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratori um Rujukan/ Nasional	Jumlah Pakt spesimen penyakit potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	2	15.860.000	0	0	0	0	0	0	1	914.000	1	50	914.000	
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1	50.921.604	0	0	0	0	0	0	1	50.434.307	1	100	50.434.307	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17	19.451.924.675	0	0	0	0	1	857.398.960	16	13.789.007.818	17	100	14.646.406.778	
1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1	230.125.000	0	0	1	174.419.772	0	-	0	-	1	100	174.419.772	
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17	74.800.000	0	0	0	0	5	21.000.000	10	45.200.000	15	88,24	66.200.000	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	210	142.000.000	0	0	0	0	113	76.400.000	87	58.600.000	200	95,24	135.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
I.02.02.2.02.0041		Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHAHIV	Jumlah Orang dengan HIV (ODHAHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	128	106.800.000	0	0	0	0	72	59.900.000	53	44.500.000	125	97,66	104.400.000	
I.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	10	60.787.000	0	0	0	0	1	8.200.000	6	36.506.980	7	70	44.706.980	
I.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13	151.304.000	0	0	0	0	5	62.155.000	7	80.295.000	12	92,31	142.450.000	
I.02.02.2.02.0046		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu dan Anak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	21	3.881.836.000	0	0	0	0	12	2.251.037.000	8	1.565.045.000	20	95,24	3.816.082.000	
I.02.02.2.03		Penyeleng garaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegra si	Terstandar nya pelayanan kesehatan di Sarana Kesehatan	100	438.449.100											251.660.459	
I.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Informasi Kesehatan	20	438.449.100	0	0	0	0	1	23.000.000	10	228.660.459	11	55	251.660.459	
I.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	55.835.000											49.809.803	
I.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1	55.835.000	0	0	1	49.809.803	0	-	0	-	1	100	49.809.803	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02.03	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki Sumber Daya Kesehatan sesuai Standar		10.112.758.050		-		-		-		-			8.990.989.929	
			Presentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar	100													
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Menigkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat	100	8.518.523.050											7.596.343.050	
1.02.03.2.04.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	8.184.000.000	1	339.500.000	1	2.232.750.000	1	2.208.000.000	1	2.518.750.000	4	100	7.299.000.000	
1.02.03.2.04.0002		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	334.523.050	0	0	0	0	1	65.394.000	1	231.949.050	2	100	297.343.050	
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Menigkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat	193	1.594.235.000											1.394.646.879	
1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	193	1.594.235.000	0	0	0	0	115	947.170.604	54	447.476.275	169	87,56	1.394.646.879	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Meningkatnya Pelayanan Tk.I yang memiliki ketersediaan Alat Kesehatan sesuai Standar		324.622.700											245.623.000	
			Presentase keterseiaan obat publik dan perbekalan kesehatan	100													
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	16.021.700											15.621.700	
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	16.021.700	0	0	0	0	1	9.300.000	1	6.321.700	2	100	15.621.700	
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tetentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terpenuhinya Mutu Produk IRT-P, PKRT dan bahan makanan	100	137.387.000											126.367.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.02.04.02.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tetentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tetentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2	137.387.000	0	0	0	0	1	34.552.500	1	91.814.500	2	100	126.367.000	
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	171.214.000											103.634.300	
1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam ragka Tndak Lanjut Pegawasan	3	171.214.000	0	0	1	13.105.500	1	47.919.800	1	42.609.000	3	100	103.634.300	
1.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkat nya Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kesehatan		220914000		0		0		-		-			142983000	
			Presentase Desa/ Kelurahan STBM	46													
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya dukungan masyarakat dan Lintas Sektor di Bidang Kesehatan	100	16.000.000											16.000.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	8	K	9		10		11	K		Rp	13
1.02.05.2.01.0001		Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	16.000.000	0	0	0	0	1	16.000.000	0	-	1	100	16.000.000	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pelayanan pada UKBM	100	204.914.000											126.983.000	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	204.914.000,00	0	0	0	0	1	10.889.000	1	116.094.000	2	100	126.983.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															84,04	90,75	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi	
RSUD Atambua					112.914.364.670											100.258.275.143	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP (Predikat / Angka)	CC / 56	96.464.723.968											84.919.730.021	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	23.230.693.426											22.059.953.188	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	23.221.093.426	3	3.486.906.171	5	8.331.956.136	3	5.081.790.337	3	5.149.700.544	14	100	22.050.353.188	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	9.600.000	0	-	3	2.400.000	3	2.400.000	6	4.800.000	12	100	9.600.000	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD	3	73.234.030.542											62.859.776.833	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4	73.234.030.542	0	8.464.345.958	2	12.816.692.323		16.732.585.052		24.846.153.500	2	50	62.859.776.833	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat (%)	80	15.100.240.702											14.035.645.122		
		Penyediaan Fasilitas Kesehatan untk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten /Kota	Tersedianyan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten /Kota (Paket)	100	15.100.240.702												14.035.645.122	
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah minimal 1:1000 (paket)	3	13.600.240.702	0	-		-		9.451.121.334		3.195.227.320	3	100	12.646.348.654		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	0	1.500.000.000	0	-		-		457.941.545		931.354.923		0	1.389.296.468		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat (%)	80	1.349.400.000											1.302.900.000		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dam UKM di Wilayah Kab/Kota	Terlaksananya Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	100	1.349.400.000											1.302.900.000		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	478	1.349.400.000	0	209.400.000		342.000.000		307.050.000		444.450.000	478	100	1.302.900.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															75	88,79		
Predikat Kinerja															Sedang	Tinggi		
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					97.986.656.865											96.204.843.884		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC/56	7.550.538.849											7.520.872.247	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	21	10.450.000											10.440.000	
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	5.000.000	12	776.000	4	-	4	4.670.000	4	-	21	100	5.446.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.450.000	1	4.207.000	1	-	2	787.000	2	-	4	100	4.994.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	12	6.490.697.149											6.346.282.378	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	996	6.089.047.149	249	904.680.802	249	636.337.845	249	2.621.922.259	249	1.781.691.472	996	100	5.944.632.378	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	401.650.000	3	167.350.000	3	77.150.000	3	143.800.000	3	13.350.000	12	100	401.650.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	265.356.500											265.327.850	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	3.480.000	1	811.000	1	1.143.000	1	1.526.000	1		4	100	3.480.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Disediakan	4	7.700.000	1	7.700.000	1	-	1	-	1	-	4	100	7.700.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	4	6.741.500	1	2.166.000	1	1.612.000	1	2.856.000	1	107.500	4	100	6.741.500	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5.000.000	1	2.062.800	1	1.435.000	1	881.350	1	620.700	4	100	4.999.850	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	5.000.000	1	1.657.000	1	1.657.000	1	1.620.500	1	37.000	4	100	4.971.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	237.435.000	1	55.678.809	1	63.252.595	1	117.445.691	1	1.057.905	4	100	237.435.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,00	729.140.200											846.188.382	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42,00	582.234.600	11	160.034.383	11	127.481.250	11	151.710.980	8	266.180.839	42	100	705.407.452	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5,00	146.905.600	2	34.507.000	2	35.012.430	2	47.275.000	-	23.986.500	6	120	140.780.930	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	36,00	54.895.000											52.633.637	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.500.000	3	400.000	3	-	3	800.000	3	1.300.000	12	100	2.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	52.395.000	3	11.588.800	3	8.198.967	3	14.931.951	3	15.413.919	12	100	50.133.637	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	20,52	4.815.974.602											4.791.431.772	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun dan Ditingkatkan	5	4.159.292.802											4.138.826.972	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi irigasi dan rawa	3	353.450.000	-	-			3	29.970.000	1	322.297.000	3	100	352.267.000	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	2.000	2.188.357.000	-	-			-	566.635.100	1.892	1.612.309.300	1892	94,6	2.178.944.400	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan	4.000	1.326.649.402					-	314.133.850		1.006.507.952	3.250	81,25	1.320.641.802	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang operasi dan pemeliharaan	6.000	290.836.400						9.401.000		277.572.770		0	286.973.770	
		Pengelolaan SDA Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai dalam Kab. Belu	9,00	656.681.800		-									652.604.800	
		Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dipelihara dan Dioperasikan	4,00	60.042.000	-	-	-	-	-	-	4	56.042.000	4	100	56.042.000	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,12	200.000.000					0,12	59.976.900	0,12	139.946.100	0,12	100	199.923.000	
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun	2,00	396.639.800	-					166.130.830	2	230.508.970	2	100	396.639.800	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Keluarga dengan Akses Perpipaan Air minum Layak	33,72	15.694.077.442											15.053.165.877	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota yang dikelola dan dikembangkan	6,00	15.694.077.442											15.053.165.877	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	11,00	557.298.000					-	58.150.000	7	492.660.000	7	63,64	550.810.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	260,00	12.420.289.642					2.897.438.518		809	8.927.182.859	809	311,154	11.824.621.377	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan	Jumlah Penambhan sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500,00	2.690.539.800					666.656.500		639	1.985.128.000	639	127,8	2.651.784.500	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50,00	25.950.000							50	25.950.000		0	25.950.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur pengelolaan persampahan	66,67	201.909.000											201.750.000	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolahan Persampahan diKabupaten yang Dilaksanakan	5,00	201.909.000											201.750.000	
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Disediakan	2,00	201.909.000							2	201.750.000	2	100	201.750.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	39,78	8.374.138.962											8.362.576.212	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengelolaaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	17,00	8.374.138.962											8.362.576.212	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	80,00	20.000.000	28	-				20.000.000	122	-	122	152,5	20.000.000	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengeolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tanki Septic	718,00	8.354.138.962	-	-				2.068.409.600	718	6.274.166.612	718	100	8.342.576.212	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya terjadi genangan>2 kali setahun	37,78	100.000.000											99.949.000	
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1	100.000.000	-	-					1	99.949.000	1	100	99.949.000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	50	79.640.000											91.959.928	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah Penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang Dilaksanakan	1	79.640.000											91.959.928	
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan teknis pembangunan bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12	29.640.000	-	-				15.600.000	12	29.640.000	15	125	45.240.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	80	50.000.000	-	-					40	46.719.928	40	50	46.719.928	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	63,4	59.627.643.010		-									59.297.001.990	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Jalan Kabupaten yang diselenggarakan	15,00	59.627.643.010											59.297.001.990	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	18,80	56.985.571.500						15.249.445.199	17,49	41.414.152.475	17	90,43	56.663.597.674	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2,50	2.642.071.510		-				593.481.644	4,83	2.039.922.672	5	200	2.633.404.316	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,14	468.100.000											-	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang Dilaksanakan	-	468.100.000											-	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	468.100.000	-	-						-		0	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,14	723.885.000											686.324.858	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korbann Bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota		8	723.885.000											686.324.858	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	6	340.125.000	-	-		4.100.000		7.600.000	6	327.501.260	6	100	339.201.260	
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2	383.760.000	-	-				11.999.100	2	335.124.498	2	100	347.123.598	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan	40	325.750.000											75.009.000	
		Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5	325.750.000											75.009.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	4	325.750.000	1	-	1	4.442.400	1	70.000.000	1	566.600	3	75	75.009.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemda	27,56	25.000.000											24.803.000	
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	25.000.000											24.803.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	20	25.000.000	-	-		1.110.600				23.692.400		0	24.803.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														97,14	98,18		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					3.234.379.905										2.987.206.243		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	CC/52	2.715.278.355											2.471.287.594	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah		7.000.000											7.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	7.000.000							7.000.000	4	100		7.000.000	
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrai Keuangan	100	2.399.339.005											2.167.112.748	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	18	2.366.039.005	18	355.336.293	18	592.796.878	58	590.478.798	0	595.200.779	18	100	2.133.812.748	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	33.300.000	1	5.700.000	1	14.450.000	0	7.450.000	0	5.700.000	1	100	33.300.000	
04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi	100	10.749.900											10.749.900	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.443.500	1	3.601.350	1	994.500	0	-	0	4.847.650	1	100	9.443.500	
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1.306.400	2	1.306.400	2		0,00	-	-		2	100	1.306.400	
06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	CC/52	22.997.800											17.852.350	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlahlaporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1	1.014.000	1	500.000	1	510.000	0	-	0		1	100	1.010.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	21.000.000	3	2.139.700	3	4.279.900	0	4.714.800	0	4.724.150	6	50	15.858.550	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlahlaporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1	983.800	1	983.800	1		0	-	0		1	100	983.800	
07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	CC/52	275.191.650											268.572.596	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaknya (Unit)	24	275.191.650	24,00	47.091.846	24,00	109.065.000	0,00	44.704.750	0	67.711.000	24	100	268.572.596	
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	PROGARAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	7,41	1.021.005.050											1.017.427.949	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatkan penyelamatan dan Evakuasi	7,41	519.101.550											515.918.649	
		Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300	266.401.850			6	266.401.000		-			300	100	266.401.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	52.699.700								49.530.649	1	100	49.530.649	
		Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsigaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	200.000.000		16.363.000	22	65.936.000		49.524.000		68.164.000	1	100	199.987.000	
03		Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan penyelamatan dan Evakuasi	7,41	501.903.500											501.509.300	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	12	1.990.000	0,00	-	0,00	-	0,00		0	1.990.000	12	100	1.990.000	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	150.000.000			12	33.300.000		51.700.000		65.000.000	1	100	150.000.000	
		Pencarian Pertolongan & Evakuasi Korban	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	50.000.000				12.500.000		12.000.000		25.500.000		0	50.000.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	503	299.913.500	5,50	16.500.000	12	233.869.300	0,00	17.350.000	0	31.800.000		0	299.519.300	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															84,38	92,36	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi	
Satuan Polisi Pamong Praja					8.515.298.669											7.216.406.178	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI SAKIP (PREDIKAT/ ANGKA)	CC/52	4.917.697.119											3.950.334.128	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	20	4.475.178.719											3.612.315.408	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	4.399.172.719	3	-	5	1.877.613.866	3	602.292.543	3	1.084.858.999	14	100	3.564.765.408	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12	76.006.000	0	-	6	36.900.000	3	5.250.000	3	5.400.000	12	100	47.550.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah	20	67.358.600											55.242.600	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	7.019.000	1	-	1	2.763.000	1	-	1	4.256.000	1	100	7.019.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	5.013.600	2	-	2	1.883.800	-	-	2	3.129.800	2	100	5.013.600	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13	55.326.000	0	-	8	22.440.000	3	7.590.000	2	13.180.000	13	100	43.210.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20	48.548.400											28.626.500	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	998.400	0	-	1	990.000		-	-	-	1	100	990.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	47.550.000	1	-	1	7.618.400	1	8.772.800	1	11.245.300	1	33,33	27.636.500	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		326.611.400											254.149.620	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	326.611.400	27	-	27	108.733.198	27	113.504.619	27	31.911.803	27	100	254.149.620	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	MENINGKATNYA CAKUPAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21,60	2.976.434.050											2.648.434.050	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.915.234.050											2.587.234.050	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawasan	8	1.588.123.750	-	-	5	689.685.000	2	255.527.500	1	390.911.250	8	100	1.336.123.750	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	1	100	20.000.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	3	11.160.300	-	-	-	-	-	-	3	11.160.300	1	33,33	11.160.300	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1550	1.295.950.000	0	-	1550	214.950.000	1	10.300.000	1.550	994.700.000	1.550	100	1.219.950.000	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		61.200.000											61.200.000	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5	61.200.000	0	-	3	10.000.000	-	-	2	51.200.000	5	100	61.200.000	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENAGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON-KEBAKARAN	CAKUPAN PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN	40	621.167.500											617.638.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		470.365.000											470.365.000	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	30	470.365.000	-	-	7	247.656.000	9	92.112.000	14	130.597.000	30	100	470.365.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		150.802.500											147.273.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100	150.802.500	-	-	100	147.273.000	-	-			100	100	147.273.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															91,11	84,75	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					8.209.305.963											7.346.911.585	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai sakisip(predikat/Angka)	100	5.398.590.263											4.721.742.285	
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	4.695.762.263											4.076.690.505	
	ASN	Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	4.556.462.263	47	1.079.097.802	47	727.239.269	47	1.065.179.725	47	1.066.679.709	47	100	3.938.196.505	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	ASN	Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	139.300.000	3	15.038.000	6	92.530.000	3	15.360.000	12	15.566.000	12	100	138.494.000	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	154.314.100											149.258.760	
	ASN	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2.370.000	1	512.000	1	114.000		903.000	1	841.000	1	100	2.370.000	
		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	33.199.700	-	-	1	16.400.000		8.000.000	1	5.705.000	1	100	30.105.000	
	ASN	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyedian barang cetakan dan penggandaan	1	5.004.400	-	-	1	2.500.000	1	-	1	1.997.000	1	100	4.497.000	
	ASN	Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	10.100.000	-	-	3	4.000.000	3	3.600.000	3	1.100.000	9	75	8.700.000	
	ASN	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsiltasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsiltasi SKPD	12	103.640.000	3	26.710.000	3	48.969.500	3	20.917.260		6.990.000	9	75	103.586.760	
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	63.998.900											44.861.000	
	ASN	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.030.000	3	500.000	6	2.500.000	9	1.000.000	12	2.500.000	12	100	6.500.000	
	ASN	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	51.600.000	3	7.608.000	6	8.721.500	9	8.516.500	12	8.229.000	12	100	33.075.000	
	ASN	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	5.368.900	1	-	1	2.600.000	1	426.000	1	2.260.000	1	100	5.286.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	345.515.000											312.632.020	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	ASN	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dnas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	46	329.256.300	20	53.573.000	25	66.402.000	20	106.645.680	26	70.842.640	46	100	297.463.320	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25	6.250.000	2	-	4	2.000.000	2	1.010.000	4	2.150.000	12	48	5.160.000	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1	10.008.700		-	1	195.500	1	9.813.200	1	-	1	100	10.008.700	
		Keg. Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	1	139.000.000											138.300.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	139.000.000	3	16.000.000	3	26.600.000	3	26.300.000	3	69.400.000	1	100	138.300.000	
		Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya PMKS Yang direhabilitasi(%)	7,4	42.079.500											28.953.500	
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	100	42.079.500											28.953.500	
	PMKS	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Kapasitas	Jumlah Keluarga Pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab	82	42.079.500	-	-	-	0	1	26.437.500	1	2.516.000		-	28.953.500	
		Program Rahabilitasi Sosial	Meningkatnya PMKS Yang direhabilitasi(%)	7,4	368.979.100											270.701.160	
		Kag. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksanya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	368.979.100											270.701.160	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	PMKS	Sub. Keg. Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/kota	75	39.777.500					25	33.858.730	2	2.000.020	27	36	35.858.750	
	PMKS	Sub. Keg. Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60	17.890.000						1.215.000		3.375.000		-	4.590.000	
	PMKS	Sub. Keg. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	32	40.080.000	-	2.000.000	10	33.240.000		2.840.000		2.000.000	10	31	40.080.000	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10.780.000			2	2.800.000		7.580.000		400.000	2	20	10.780.000	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	90.049.600		-			10	17.750.000	15	63.255.850	25	100	81.005.850	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	25	23.590.000		-		-			25	23.590.000	25	100	23.590.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	34.522.000					4	3.400.000	6	22.600.000	10	5	26.000.000	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Kedaruratan Kewenangan Kab/Kota	15	15.840.000					2	600.000	10	6.400.000	12	80	7.000.000	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	15	38.850.000	24	8.700.000		8.680.000	24	3.480.000	6	6.240.000	12	80	27.100.000	
	PMKS	Sub. Keg. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	15	57.600.000		-	-	-	2	14.696.560	10	-	12	80	14.696.560	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial untuk masyarakat Miskin dan rentan Miskin	76	106.198.100											103.198.100	
		Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2	106.198.100											103.198.100	
	Fakir Miskin	Sub. Keg. Pendataan fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupaan daerah kabupaten/kota yang didata	99.128	106.198.100	-	-				103.198.100	-	-		-	103.198.100	
		Program Penanganan Bencana	Persestase Pemenuhan laporan ketanggap daruratan bencana	100	1.185.135.000											1.171.351.280	
		Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	508.635.000											494.851.280	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Korban Bencana a	Sub. Keg. Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100	359.380.000	10	1.200.000					10	344.466.280	10	10	345.666.280	
	Korban Bencana a	Sub. Keg. Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Perlengkapan Lainnya Yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	86.725.000	-							86.655.000		-	86.655.000	
	Korban Bencana a	Sub. Keg. Penyediaan Tempat Pengungsian Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3	45.000.000	-							45.000.000	3	100	45.000.000	
	Korban Bencana a	Sub. Keg. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	17.530.000	-						100	17.530.000	100	100	17.530.000	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100	676.500.000											676.500.000	
		Sub.Keg.Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	19	676.500.000	19	28.200.000	19	458.800.000	19	13.000.000		176.500.000,00		-	676.500.000	
		Program Penataan Desa	Pemekaran Desa	18	500.000.000											471.369.260	
		Keg.Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	100	500.000.000											471.369.260	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	18	500.000.000	18	12.880.000	18	21.630.000		82.258.400		354.600.860	18	100	471.369.260	
		Program Administrasi Pemerintah Desa	Prosentase Bumdes Aktif	82,61	240.995.000											227.636.000	
		Keg.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	100	240.995.000											227.636.000	
		Sub Keg.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	69	54.000.000	-						69	54.000.000		-	54.000.000	
		Sub Keg.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	69	99.120.000	69	20.000.000	69	20.000.000	69	1.920.000	69	57.200.000		-	99.120.000	
		Sub Keg.Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	69	55.000.000	69		69		69	55.000.000		-		-	55.000.000	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	30	32.875.000	69	2.766.000	69		69	12.000.000	69	4.750.000		-	19.516.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Strata Posyandu	38,62	367.329.000											351.960.000	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Keg.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	367.329.000											351.960.000	
		Fasilitasi Penataan ,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,L PM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kel Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan ,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyan du,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kel Dan Masyarakat Hukum Adat	2	310.000.000			1	255.280.000	2	52.300.000			2	100	307.580.000	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	57.329.000			1		12	26.500.000		17.880.000	2	100	44.380.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															61,59	89,49	
Predikat Kinerja															Rendah	Tinggi	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB					9.769.477.039											8.811.042.816	
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	S	CC/56 K	4.075.985.689											3.450.685.887	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	12.500.000											12.494.000	
	ASN	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	12.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		12.494.000	10	100	12.494.000	
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35	3.582.092.889											3.006.003.780	
	ASN	Sub.keg . Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (Orang /bulan)	32	3.510.592.889	32	467.269.209	32	1.318.054.230	32	3.560.592.889	32	2.934.903.780	32	100	2.934.903.780	
	ASN	Sub.keg . Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35	71.500.000	1	18.750.000	6	47.600.000	16	71.500.000	60	71.100.000	35	100	71.100.000	
		Keg. . Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	71.714.000											71.254.000	
	ASN	Sub.keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	25.054.000	1	6.304.000		12.554..000	4	25.054.000	70	25.054.000	1	100	25.054.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	10.000.000								10.000.000	5	100	10.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	23.160.000								22.700.000	1	100	22.700.000	
	ASN	Sub.keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	13.500.000	1	3.375.000	2	3.375.000	3	13.500.000	80	13.500.000	1	100	13.500.000	
	ASN	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	47.253.050											36.852.986	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	ASN	Sub.keg.Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.200.000		-	2	1.500.000	5	4.200.000	97	4.200.000	12	100	4.200.000	
	ASN	Sub.keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	40.050.000	1	3.666.236	2	9.266.478	3	37.050.000	87	29.652.986	1	100	29.652.986	
	ASN	Sub.keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3.003.050				1.500.000		3.003.050	45	3.000.000	1	100	3.000.000	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67	154.425.750											116.081.121	
	ASN	Sub.keg. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67	154.425.750		#REF!	1	24.679.460	2	154.425.750	45	116.081.121	60	90	116.081.121	
		Keg.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	208.000.000											208.000.000	
	ASN	Sub.keg. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	208.000.000		14.300.000		57.200.000		208.000.000		208.000.000	1	100	208.000.000	
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	151.823.600											151.823.600	
	Masyarakat	Keg.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota	Terpenuhinya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota	6	13.109.200											13.109.200	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	13.109.200	1	5.809.200	2	13.109.200	3	13.109.200		13.109.200	6	100	13.109.200	
	Masaya rakat dan Organis asi	Keg. Pemberdayaan Perempuan Bid. Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bid. Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota		13.109.400											13.109.400	
	Msykt d	Sub.keg Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	13.109.400				13.109.400	1	13.109.400	1	13.109.400	6	100	13.109.400	
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayayaan perempuanankewenagan kabupaten kota	TerlaksananyaPenguatandan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayayaan perempuanankewenagan kabupaten kota		125.605.000											125.605.000	
		Pengembangan komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kota	Jumlah Pengembangan komonikasi, informasi dan edukasi (KEI) pemberdayaan perempuan kewenangan kota	1	125.605.000					3	125.605.000,00	15	125.605.000	1	100	125.605.000	
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	267.370.000											223.953.597	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Keg. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60	101.500.000		-		-							101.500.000	
	Masyarakat Korban kekerasan	Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhdp Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9	101.500.000					2	101.500.000	1	101.500.000	9	100	101.500.000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedanya Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	131.213.000											87.796.597	
	Masyarakat Korban kekerasan	Sub.keg Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	131.213.000						149.213.000	1 dok, 4lyn	87.796.597	25	83	87.796.597	
		Keg.Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindng. Peremp. Tk Daerh Kab/Kota	TerlaksananyaPenguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindng. Peremp. Tk Daerh Kab/Kota	1	34.657.000											34.657.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Masaya rakat korban kekerasan perenp uan	Sub.keg Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	34.657.000					34.657.000	2 dok	34.657.000	40	100	34.657.000		
4	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	MENINGKATNYA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	12	142.600.000											142.600.000	
		Keg.Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tk. Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tk. Daerah Kabupaten/Kota	4	127.600.000											127.600.000	
		Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	112.600.000							112.600.000	12	100	112.600.000		
	Msykt,Peningkatan Kualitas keluarga	Sub.keg Pengembangan Kegt. Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	15.000.000						1 dok	15.000.000	12	100	15.000.000		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Keg.Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalamKabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalamKabupaten/Kota	1	15.000.000											15.000.000	
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dlm mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerja nya dlm Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	15000000							15.000.000	4	100	15.000.000		
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	MENINGKATNYA PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	10.000.000											9.400.000	
		Keg.Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data di Tk. Daerah kabupaten Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data di Tk. Daerah kabupaten Kota		10.000.000											9.400.000	
	Data ge	Sub.keg. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	10.000.000	1	4.400.000	2	4.400.000	2	10.000.000	1 dok	9.400.000	4	100	9.400.000	
6	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENUHAN ANAK (PHA)	PENINGKATAN PENUHAN HAK ANAK (PHA)		226.990.000											226.990.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Keg.Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah non Pemerintah dan Dunia usaha kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Dunia usaha kewenangan Kabupaten Kota		226.990.000												
	Masyarakat Korban (PHA)	Sub.Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3	226.990.000	2		3		4	226.990.000	3 organ	226.990.000	3	100	226.990.000	
7	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		170.630.000											150.209.660	
	Masyarakat Korban kekerasan anak	Keg. Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	4	170.630.000											150.209.660	
		Sub. Keg. Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50	170.630.000						170.630.000		150.209.660	50	100	150.209.660	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENDUDUK	1	132.000.000											130.680.000	
		Keg Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah propisi dengan perintah daerah kabupaten /kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk .	Terlaksananya Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah propisi dengan perintah daerah kabupaten /kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk .		60.000.000											58.900.000	
		Sub.keg Pelaksanaan Rapat Pengendalain data Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalain data Kependudukan	1	60.000.000						60.000.000		58.900.000	1	100	58.900.000	
		Keg.Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		72.000.000											71.780.000	
		Sub.keg. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	72.000.000	2	21.460.000	3	31.760.000	4	72.000.000	85	71.780.000	1	100	71.780.000	
9	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	MENINGKATNYA PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10	3.242.477.750											3.046.729.922	
		Keg. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terpenuhinya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	10	1.011.571.000											927.977.672	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Masyarakat Yang berke-lu-rga	Sub.keg. Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	106.840.000				80.000.000	4	80.000.000	80	104.988.272	1	100	104.988.272	
		Sub.keg. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	358.400.000	3	358.400.000	4	108.000.000	5	358.400.000	75	277.576.500	1	100	277.576.500	
	Masyarakat	Sub.keg. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	136.800.000	4				2	358.400.000	80	136.800.000	1	100	136.800.000	
		Sub.keg Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	78.200.000	1	23.300.000	1	23.300.000	3	78.200.000	75	78.100.000	1	100	78.100.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Sub.keg. Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	331.331.000	-	13.500.000	1	125.250.000	2	331.331.000	65	330.512.900	1	100	330.512.900	
		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		441.171.750											441.171.750	
		Penyediaan sarana pendukung operasional bagiPKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	44	441.171.750						441.000.000		441.171.750	44	100	441.171.750	
		Keg.Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		809.860.000											698.905.500	
	Masyara	Sub.keg. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	68.060.000	-	23.437.500	1	30.037.500	2	68.060.000	87	57.055.500	1	100	57.055.500	
		Sub.keg. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1223	710.300.000		128.800.000	1	133.800.000	2	710.300.000	80	610.350.000	1223	100	610.350.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Masyarakat	Sub.keg.Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	31.500.000					2	31.500.000	85	31.500.000	1	100	31.500.000	
		Keg.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		979.875.000											978.675.000	
	Masyarakat	Sub.keg. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	36	979.875.000					2		87	978.675.000	36	100	978.675.000	
10	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.349.600.000											1.277.970.150	
		Keg.Pelaksanaan Pembangunan Kel.Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kel	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Kel.Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kel		1.349.600.000											1.277.970.150	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Masyar akat	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25	300.000.000	1	360.00.000	2	3.000.000	3	300.000.000	89	233.570.150	24	96	233.570.150	
	Masyara	Sub.keg.Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	504	1.049.600.000	1	1.049.600.000	2	1.049.600.000	3	1.049.600.000	87	1.044.400.000	504	100	1.044.400.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															99,18	90,19	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan					12.911.092.646											12.139.355.239	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai sakip	CC/56	7.931.151.996	CC/52.27		CC/52.27		CC/52.27		CC/52.27		CC/52.27		7.193.038.880	
		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100	11.400.000	0,00										11.400.000	
		Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan prangkat daerah (dokumen)	26	11.400.000	8,00	3.000.000	6,00	7.200.000	4,00	1.200.000	5,00	0	23,00	88	11.400.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K		K						K		Rp	13
		Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Menigkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)	100	6.792.723.646	0,00										6.037.880.689	
		Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	1176	6.462.923.646	241	1.003.157.422	240,00	1.781.181.647	232,00	1.141.667.492	215,00	1.782.075.128	928,00	79	5.708.081.689	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	52	329.800.000	0,00	0	250.638.000	15,00	54.250.000	15,00	24.911.000	30,00	58	329.799.000		
		Administrasi perangkat daerah	Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	10.000.000	0,00										-	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0	-	0	
		Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran (persen)	100	69.089.350											68.578.070	
		Sub Kegiatan Penyediaan komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan (paket)	1	4.432.350		0	0,00	0	1,00	3.200.000	1,00	1.110.000	1	100	4.310.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	5.137.000	0,25	1.284.250	0,00	0	1,00	2.568.500	1,00	970.000	1	100	4.822.750	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	8	59.520.000	3,00	15.680.540	2,00	14.874.780	6,00	15.020.000	4,00	13.870.000	15	188	59.445.320	
		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100	82.500.000											76.230.600	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	K	Rp	K	8		K	9		10		11		12			13
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	82.500.000	3,00	5.629.150	3,00	17.683.900	3,00	15.782.200	3,00	37.135.350	12	100	76.230.600			
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	965.439.000											998.949.521			
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, Dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	85	929.195.000	85,00	221.604.752	85,00	263.564.910	85,00	194.200.000	85,00	283.335.859	85	100	962.705.521			
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)	2	36.244.000	2,00	9.060.000	2,00	9.000.000	2,00	10.000.000	2,00	8.184.000	2	100	36.244.000			
		2	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan LH yang dibutuhkan (persen)	66,67	206.000.000									66,67		200.009.250	
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota (persen)			100	206.000.000											200.009.250			
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun (dokumen)			1	206.000.000	0,00	8.250.000	0,00	27.699.250	1,00	163.500.000	0,00	560.000	1	100	200.009.250			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Meningkatnya indeks kualitas air			59,69	589.940.650	51,25		51,25		51,25		53,75		53,75		545.180.378			
	Meningkatnya indeks kualitas udara (poin)			93,21		92,82		92,82		91,85		91,85							
Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Meningkatnya indeks kualitas air			59,69	553.840.650	51,25		51,25		51,25		53,75		53,75		509.080.378			
	Meningkatnya indeks kualitas udara (poin)			93,21		92,82		92,82		91,85		91,85							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Sub Kegiatan Kordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut (dokumen)	2,00	397.016.650			1	59.721.237	1	51.485.939		241.582.402	2,00	100	352.789.578	
		Sub Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (dokumen)	12,00	156.824.000	0,00	0	6,00	8.226.500	3,00		3,00	148.064.300	12,00	100	156.290.800	
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kualitas air (poin), dan	59,69	36.100.000	51,25	-	51,25		51,25	-	53,75	36.100.000	53,75		36.100.000	
	Meningkatnya indeks kualitas udara (poin)		93,21		92,82		92,82		91,85		91,85						
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan (laporan)	2,00	36.100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	36.100.000	2,00	100	36.100.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan (poin)	57,93	230.000.000	50,09		50,09		50,09		50,25			50,25	231.072.581	
		Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan (poin)	57,93	230.000.000	50,09		50,09		50,09		50,25		50,25		231.072.581	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	36,13	200.000.000		14.068.048		21.425.472	36,13	25.286.061	36,13	140.355.000	36,13	100	201.134.581	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan prasarana keanekaragaman Hayati yang Dikelola (unit)	2,00	30.000.000		2.023.600		7.238.000	2,00	7.766.400	2,00	12.910.000	2,00	100	29.938.000		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang tertangani (persen)	19,02	3.259.000.000										69,77	3.280.457.750		
		Kegiatan Pengelolaan sampah	Terlaksanannya penanganan sampah kabupaten (persen)	100	3.259.000.000												3.280.457.750	
		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instansi pengelolaan sampah di instansi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengelolaan sampah di instansi pengelolaan sampah di instansi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	49.072,00	3.259.000.000	#####	0	#####	1.339.465.000	7.879,21	547.484.500	8.942,05	1.393.508.250	34.237,26	70	3.280.457.750		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	14,62	695.000.000	81,82		81,82		81,82				81,82		81,82	689.596.400	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (%)	100	665.000.000												660.871.400	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia (unit)	1.423	605.000.000	315	100.000.000	325	130.407.500	366	150.708.000	417	220.340.900	1.423,00	100	601.456.400		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara (unit)	3	60.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	59.415.000	3,00	100	59.415.000		
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	20.000.000												18.725.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	K	Rp	K		K						K		Rp	13	
		Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor (laporan)	110	20.000.000	0,00	0	0,00	2.900.000	28,00	4.400.000	0,00	11.425.000	28,00	25	18.725.000		
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota.	100	10.000.000												10.000.000	
		Sub Kegiatan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/provinsi (laporan)	12	10.000.000	0,00	0	5,00	4.800.000	1,00	0	6,00	5.200.000	12,00	100	10.000.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														90,85	94,02			
Predikat Kinerja														Tinggi	Tinggi			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					4.446.208.367											4.052.660.239		
	Nilai SA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CC/56		3.906.297.167											3.534.120.739		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (paket)	2	3.556.189.017											3.213.041.965		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.376.839.017	3,00	473.792.404	-	686.052.999	-	1.038.247.006	-	844.349.556	14	100	3.042.441.965		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	179.350.000	0,92	28.000.000	-	119.650.000	-	7.650.000	-	15.300.000	1	100	170.600.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Paket)	3	159.251.300											159.239.650		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.948.750	-		1,13	4.224.500	-		-	4.720.000	1	100	8.944.500	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	90.550.350	-		0,65	31.465.000	-	17.600.000	-	41.480.000	1	100	90.545.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	59.752.200	-		3,90	11.791.200	-	4.969.650	-	42.989.300	2	100	59.750.150	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Paket)	3	96.286.350											72.359.950	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	23.900.000	0,38	5.264.000	0,15	950.000,00	-	950.000	-	2.081.000,00	1	100	9.245.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	70.410.000	0,99	19.516.100	0,55	18.691.600	-	12.071.700	-	10.860.550	3	100	61.139.950	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.976.350	-	-	0,49	490.000	-	490.000	-	995.000	1	100	1.975.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Paket)	3	94.570.500											89.479.174	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	70.760.500	1,51	9.603.174	2,20	42.278.500	-	-	-	13.949.000	10	100	65.830.674	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	17.000.000	-	-	#####	3.000.000	-	2.999.900	-	14.000.000	75	100	17.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	6.810.000	-		0,61	4.546.602	-	-	-	2.101.898	1	100	6.648.500	
	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	91,96%		309.088.000											288.995.000	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Paket)	0	37.388.000											37.220.000	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan / Penatausahaan dan Penerbitan atas Pendaftaran penduduk (Paket)	5.000	37.388.000	-	-	-	21.050.000	-	3.300.000	-	12.870.000		0	37.220.000	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk (Paket)	1	271.700.000											251.775.000	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	18	271.700.000	-	-	16,67		-	-	-	251.775.000	18	100	251.775.000	
	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak 0-18 Tahun	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	81,77%		179.937.500											179.244.500	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Paket)	0	34.888.000											34.345.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5	34.888.000	-	-	-	-	-	20.525.000	-	13.820.000	5	100	34.345.000	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Paket)		145.049.500											144.899.500	
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		145.049.500						144.899.500		-		0	144.899.500	
	Meningkatnya Keterse-diaan Data Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			37.985.700											37.400.000	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Paket)	1	37.985.700											37.400.000	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	37.985.700	0	6.940.000	0,04	14.770.000	-	3.210.000	-	12.480.000	1	100	37.400.000	
	Meningkatnya Keterse-diaan Data Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3 Dokumen		12.900.000		-				12.900.000		-			12.900.000	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan (Paket)	0	12.900.000		-				12.900.000		-			12.900.000	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2	12.900.000	-	-				12.900.000		-	2	100	12.900.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															88,24	91,15	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi	
Dinas Komunikasi dan Informatika					2.668.531.712											2.326.917.177	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip	CC/56	2.232.611.712					-	-				CC/56	1.968.094.223	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.965.031.712											1.720.320.357	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	17	1.906.981.712	16	287.309.841	16	467.064.198	15	525.778.569	15	385.417.749	16	94	1.665.570.357	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	58.050.000	1	12.480.000	1	22.920.000	1	7.650.000	1	11.700.000	1	100	54.750.000	
3	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	75.698.000											75.318.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan (Paket)	1	13.100.000	-	-	-	-	-	-	1	13.100.000	1	100	13.100.000	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan (Paket)	2	8.378.000	-	-	2	2.500.000	-	-	2	5.878.000	2	100	8.378.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	3	9.000.000	-	-	-	-	-	-	3	9.000.000	3	100	9.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	45.220.000	3	6.480.000	3	2.620.000	3	9.700.000	3	26.040.000	3	25	44.840.000	
4	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	100	91.882.000											83.973.116	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	91.882.000	3	9.214.652	3	5.946.885	3	32.342.222	3	36.469.357	3	25	83.973.116	
5	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100.000.000		21.337.506	15	21.337.500	15	6.723.326	15				88.482.750	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	100.000.000	15	21.337.506	15	21.337.500	15	6.723.326	15	39.084.418	15	100	88.482.750	
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2,2	435.920.000											358.822.954	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	11	435.920.000	-		10		10		10				358.822.954	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Lavanan)	10	260.920.000	-	-	10	62.650.000	10	74.800.000	10	93.263.484	10	100	230.713.484	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	175.000.000	-	-	1	550.000	1	-	1	127.559.470	1	100	128.109.470	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															84,41	87,20	
Predikat Kinerja															Tinggi	Tinggi	
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					5.108.561.957											4.437.901.845	
	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip	cc/56/predikat/angka	3.944.489.357											3.293.716.845	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	ASN Dinas Kopna kertrans	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	56	3.660.696.357											3.020.448.553	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	35	3.546.796.357	31	524.542.558	31	869.627.234	27	802.416.163	27	709.962.598	35	100	2.906.548.553	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	29	113.900.000	4	21.900.000	16	39.400.000	16	43.800.000	16	8.800.000	29	100	113.900.000	
	ASN Dinas Kopna kertrans	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	6	26.386.000											25.746.000	
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1.000.000	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	100	1.000.000	
		Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	10.936.000	1	2.221.000	-	968.100	1	3.495.000	1	4.251.900	2	100	10.936.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1.000.000	1	500.000	-	-	1	500.000	-	-	1	100	1.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1.000.000	1	500.000	-	500.000	-	-	-	-	1	100	1.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	12.450.000	1	2.470.000	-	-	-	7.050.000	-	2.290.000	1	100	11.810.000	
	ASN Dinas Kopna kertrans	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	20	27.196.000											25.309.000	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	996.000	1	500.000	-	-	1	490.000	-	-	1	100	990.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	25.200.000	1	2.572.050	1	7.368.950	3	2.122.050	-	11.255.950	3	100	23.319.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	1.000.000	-	-	-	-	1	1.000.000	-	-	1	100	1.000.000	
	ASN Dinas Kopnas kertrans	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25	230.211.000											222.213.292	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25	228.207.000	5	47.710.960	5	33.729.170	5	62.264.000	10	76.505.162	25	100	220.209.292	
		Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000	1	100	1.000.000	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	1.004.000	-	-	-	-	2	941.000	-	63.000	2	100	1.004.000	
	II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1	717.556.000											697.824.000	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1	717.556.000											697.824.000	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	40	717.556.000	-	-	20	414.435.000	20	283.389.000	-	-	40	100	697.824.000	
	III	Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Meningkatnya persentase koperasi yang berkualitas	1	199.119.360	-	-	-	-	-	-	-	-			199.089.320	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	1	199.119.360											199.089.320	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	60	199.119.360	5	9.520.000	40	123.245.000	15	33.007.400	-	33.316.920	60	100	199.089.320	
	IV	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif	66,99	102.595.000											102.595.000	
	UMKM	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah pendidikan dan Pelatihan Bagi Koerasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kab/Kota	1	102.595.000											102.595.000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Koperasi	60	102.595.000	-	-	-	6.100.000	60	93.295.000	-	3.200.000	60	100	102.595.000	
	V	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Meningkatnya persentase UMKM aktif	1	144.802.240											144.676.680	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		3	144.802.240											144.676.680	
		Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	1.000.000	-	-	-	-	-	-	100	1.000.000	100	50	1.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	90	142.802.240	-	-	10	50.373.000	80	89.103.680	-	3.200.000	90	100	142.676.680	
		Penyusunan basis data usaha mikro	Jumlah unit usaha kecil terdata	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000	1	100	1.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															97,37	86,87	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					11.056.129.893											9.004.410.667	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		10.469.718.893											8.475.437.267	
		Penyusunan DoAdministrasi Keuangan Perangkat Daerahkumen Perencanaan			2.975.090.793											2.358.971.974	
		Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2.886.840.793		710.362.909		477.437.593		1.580.854.940		212.429.441	26	100	2.270.721.974	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuanga SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	88.250.000		6.750.000		55.750.000		13.500.000		19.000.000	12	100	88.250.000	
		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.800.000											22.775.000	
		Monitoring Evaluasi dan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	22.800.000		13.575.000		-				22.775.000	12	100	22.775.000	
		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			34.891.200											34.890.900	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	9.987.000				703.000		-		9.987.000	37	97,37	9.987.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	6.523.500				850.000		-		5.673.500	1	100	6.523.500	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8.010.700				1.000.000		-		7.010.400	1	100	8.010.400	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.250.000		-		-		-		6.250.000	12	100	6.250.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4.120.000		-		2.060.000				2.060.000	12	100	4.120.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			7.238.694.400											5.874.674.380	
		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	7.238.694.400		-		239.694.400		-		5.874.674.380	1	100	5.874.674.380	
		Peneyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			97.213.000											83.159.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90.420.000		22.636.500		17.295.350		36.933.100		22.138.550	12	100	76.367.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6.793.000				2.012.000		-		4.780.000	12	100	6.792.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101.029.500											100.966.013	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	97.029.500		33.401.603		20.092.897		48.152.863		28.720.253	14	100	96.966.013	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	4.000.000		-		-		-		4.000.000		0	4.000.000	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		522	586.411.000											528.973.400	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4	87.961.000		-		-		9.126.400		31.975.000	4	100	41.101.400	
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500	322.527.000		0		135.731.600		18.150.000		164.245.400	500	100	318.127.000	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	18	175.923.000		0		82.300.000		-		87.445.000	18	100	169.745.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															93,16	81,44	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					3.100.838.680											2.838.142.906	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip		2.867.006.630											2.611.089.906	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Keu PD	20	2.738.674.680											2.492.114.006	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.710.774.680		415.017.612		746.748.679		674.493.644		628.254.071	14	100	2.464.514.006	
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	27.900.000		7.850.000		9.600.000		1.750.000		8.400.000	12	100	27.600.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Umum	20	7.471.500											7.471.050	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	5.465.900				2.725.000		1.985.000		755.500	12	100	5.465.500	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	2.005.600				1.329.700		493.150		182.700	12	100	2.005.550	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.340.000				-		-			0	0	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	37.096.700											30.838.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	998.400				659.500		180.000		156.000	12	100	995.500	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	35.100.000				8.437.000		7.349.100		13.058.400	12	100	28.844.500	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	998.300				821.000		-		177.000	12	100	998.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	83.763.750											80.666.850	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jmlh Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg dipelihara & dibayarkan Pajak & Perizinannya	12	82.763.750	3	3.500.000	3	30.277.800	3	24.299.750		21.589.300	12	100	79.666.850	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jmlh peralatan dan mesin yg dipelihara	12	1.000.000	3	-	3	1.000.000	3	-	3	-	12	100	1.000.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip		233.832.050											227.053.000	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Keu PD	20	233.832.050											227.053.000	
		Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jmlh Perpust. Pd satuan pendidikan Dasar & yg dilakukan pembinaan dlm mewujudkan standar nasional perpustakaan	12	31.143.050					3	1.843.000	3	29.300.000	12	100	31.143.000	
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jmlh Bhn Perpust Terctak yg dictak & diadakan	12	121.900.000							3	121.900.000	12	100	121.900.000	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Daerah Kab. / Kota	Jlmh data & Informasi perpustakaan,Tenag a perpustakaan dan Pustakawan tngkat kab/kota	12	80.789.000			3	18.600.000	3	5.600.000	3	49.810.000	12	100	74.010.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															92,31	91,53	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					11.477.707.107											10.228.483.118	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			11.477.707.107											10.228.483.118	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	CC56	2.970.109.107									B 60.44	2.816.632.718		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35,92	2.882.480.573											2.754.316.106	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	2.794.490.573	22	378.926.938	22	237.691.498	22	1.095.913.536	22	958.734.134	22	100	2.671.266.106		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	87.990.000	12	4.800.000	12	53.350.000	12	10.500.000	12	14.400.000	12	100	83.050.000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	16,505149	9.431.450												9.252.450	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.828.700			10	520.000	10		10	1.308.700	1	100	1.828.700		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4.015.050	10		10	1.962.000	10		10	1.874.150	1	100	3.836.150		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	3.587.700	97500		97500	1.600.000	97500		97500	1.987.600	1	100	3.587.600		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,950312	36.317.950												16.220.500	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.540.000	0		200		200		200	1.068.000	1	100	1.068.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	32.400.000	3	1.664.123	3	8.332.500	3		3	4.505.877	1	100	14.502.500		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.377.950	1		1	650.000	1		1		1	100	650.000		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,713785	41.879.134											36.843.662		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	38.784.334	14	3.383.000	14	13.927.500	14			14	18.238.362	14	100	35.548.862	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1.294.800									1.294.800	1	100	1.294.800	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	1.800.000										10	100	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Capaian Kinerja Program		1.691.811.000												1.152.668.170	
		Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan		1.691.811.000												1.152.668.170	
		Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan,.	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	1.691.811.000			3	5.150.000	3	748.609.900	3	398.908.270	10	100	1.152.668.170		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Capaian Kinerja Program		89.738.000												89.518.000	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya		89.738.000												89.518.000	
		Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	15	50.130.000						49.910.000	1,0		14	93,33	49.910.000		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5	39.608.000							1,0	39.608.000	5	100	39.608.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Capaian Kinerja Program	626,55448	5.392.545.000											4.897.685.530	
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Belu	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	626,55448	5.392.545.000											4.897.685.530	
		Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	5.392.545.000		15.906.514		3.320.000		993.582.368		3.884.876.648	1	100	4.897.685.530	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kinerja Program	23,591	100.000.000											99.879.600	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan Promosi	23,591	100.000.000											99.879.600	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	100.000.000	1	29.750.000	1	21.499.600	1	5.600.000	1	43.030.000	1	100	99.879.600	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Capaian Kinerja Program	23,84	29.800.000											29.420.000	
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	23,84	29.800.000											29.420.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	29.800.000	1	-	1	4.690.000	1	3.500.000	1	21.230.000	1	100	29.420.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Capaian Kinerja Program		1.203.704.000											1.142.679.100	
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		1.203.704.000											1.142.679.100	
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40	884.511.000	0	5.340.000	0	13.200.000	0	193.100.000	0	615.396.100	40	100	827.036.100	
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40	319.193.000	0		0	307.143.000	0		0	8.500.000	40	100	315.643.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															99,65	89,12	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Dinas Peternakan dan Perikanan					13.359.585.268											11.865.914.385	
I		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		7%	810.540.000											762.510.925	
	1	Keg.Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	9%	745.110.000											701.581.800	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.1		Sub Keg.Pengembangan Kapasitas Pembudidya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	40	745.110.000		-		17.300.000	50	195.010.540		489.271.260	50	125	701.581.800	
2		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananaya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	2%	65.430.000											60.929.125	
2.1		Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	65.430.000		-		1.925.000	3	59.004.125			3	100	60.929.125	
II		Prog. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		50%	32.700.000											32.148.000	
1		Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	50%	32.700.000											32.148.000	
1.1		Sub Keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro danm Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perkikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	20	32.700.000		-			20	29.748.000		2.400.000	20	100	32.148.000	
I		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai sakip (predikat/Angka)	20%	7.256.176.768											6.565.106.350	
1		Keg.Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12%	5.000.000											5.000.000	
1.1		Sub Keg.Penyusunana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.000.000	5	550.000	2	2.230.000	2	2.220.000			9	180	5.000.000	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20%	6.087.121.718											5.509.423.699	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
2.1		Sub Keg.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org / bulan)	58	5.932.621.718	58 orang/ Bulan	823.458.353	58 orang/ Bulan	1.624.867.204	65 orang/bulan	1.451.336.398	65 orang/bulan	1.455.261.744	58	100	5.354.923.699	
2.2		Sub Keg.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	154.500.000	3 Dokumen	48.250.000	3 Dokumen	67.500.000	3 Dokumen	29.000.000	3 Dokumen	9.750.000	12	100	154.500.000	
3		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,91%	74.175.050											74.165.500	
3.1		Sub Keg.Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2	40.043.050	2 Paket	18.765.000		1.550.000	2 paket	19.719.500			2	100	40.034.500	
3.2		Sub Keg.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3	19.132.000	1 Paket	2.668.000	1 Paket	5.332.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	8.131.000	2	66,67	19.131.000	
3.3		Sub Keg.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4	15.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	1.000.000	1 laporan	7.000.000	4	100	15.000.000	
5		Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,86%	698.580.000											591.610.268	
5.1		Sub Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	2	9.600.000		550.000	laporan	241.000	1 laporan	1.907.000	1 laporan	6.900.000	1	50	9.598.000	
5.2		Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12	72.230.000	3 Laporan	15.493.514	3 Laporan	15.879.032	3 Laporan	15.374.232	3 Laporan	22.515.490	6	50	69.262.268	
5.3		Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	616.750.000	3 Laporan	67.450.000	laporan	79.500.000	3 laporan	187.300.000	3 laporan	178500000	12	100	512.750.000	
6		Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,67%	391.300.000											384.906.883	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
6.1		Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasuonal atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	66	381.300.000	66 unit	89.264.361	66 unit	72.030.200	66 unit	97.458.352	66 unit	116.173.970	66	100	374.926.883	
6.2		Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	10.000.000	7 unit	1.950.000	1 unit	100.000	4 unit	1.830.000	28 unit	6.100.000	40	100	9.980.000	
II		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi	20,67%	4.119.246.500											3.486.044.980	
1		Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6,32%	37.500.000											37.495.000	
1.1		Sub Keg.Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian Sesuai komoditas, Teknologi dan spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian Sesuai komoditas, Teknologi dan spesifikasi Lokasi	2	37.500.000	1 Laporan	2.380.000	Laporan	5.958.000	1 Laporan	5.300.000	1 Laporan	23.857.000	1	50	37.495.000	
2		Keg.Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit Ternak,dan hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	41,67%	4.081.746.500											3.448.549.980	
1.1		Sub Keg.Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit ternak dan Hijauan pakan ternak yang tersedia	2	4.081.746.500		10.500.000	laporan	40.935.750	1 Laporan	1.006.524.230	1 Laporan	2.390.590.000	2	100	3.448.549.980	
III		Prog. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi	0,21	1.140.922.000											1.020.104.130	
1		Keg.Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten /Kota	0,23	1.140.922.000											1.020.104.130	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
1.1		Sub Keg.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah Kader Zoonosis	24	1.140.922.000		-			24 orang	645.794.130		374.310.000	24	100	1.020.104.130	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															95,10	88,82	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					21.015.597.199											20.528.165.396	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	CC / 52	10.649.213.124											10.337.609.218	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.348.579.824											9.037.099.335	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	111	9.047.079.824	17	1.392.222.690	33	2.694.396.555	29	2.326.868.068	28	2.322.112.022	107	96	8.735.599.335	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7	4.200.000	0	0	4	2.200.000		0	3	2.000.000	7	100	4.200.000	
		Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	297.300.000		57.650.000		152.250.000		64.550.000	1	22.850.000	1	100	297.300.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		11.963.300											11.963.300	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	9.606.500		4.000.000		5.606.500		0		0	1	100	9.606.500	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	2.356.800		1.000.000		1.356.800		0		0	1	100	2.356.800	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24.920.000											24.917.500	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	24.920.000	0	5.095.800		5.875.100		6.903.700		7.042.900	1	100	24.917.500	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.263.750.000											1.263.629.083	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayrkan Pajak dan Perizinanya	131	308.750.000	27	63.550.000	35	81.560.775	33	78.141.172		85.497.230	95	73	308.749.177	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinanya	43	955.000.000		38.797.500		205.257.236		613.377.731		97.447.439		0	954.879.906	
2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi dan Jagung	24.580/54.530	2.633.664.000											2.547.930.250	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2.633.664.000											2.547.930.250	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1	2.582.862.500				15.415.000		1.287.778.750		1.193.935.000	1	100	2.497.128.750	
		Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	50.801.500		6.265.500		7.935.500		36.600.000		500		0	50.801.500	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
3	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana Pertanian	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi dan Jagung	24.580/54.530	5.608.705.075											5.581.097.000	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksanana pengembangan prasarana pertanian		1.774.551.075											1.774.050.000	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	1	1.774.551.075		963.000		120.770.000		801.360.000		850.957.000	1	100	1.774.050.000	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya pembangunan prasarana pertanian		3.834.154.000											3.807.047.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	JUT yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0	3.834.154.000		0		0		2.191.151.200		1.615.895.800		0	3.807.047.000	
3	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kegiatan penyuluhan pertanian	3,95	2.121.015.000											2.058.528.928	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian		2.121.015.000											2.058.528.928	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kec. Dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kec. dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	4.000.000	0	0		0		4.000.000		0	12	100	4.000.000	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	20	265.000.000				0		257.575.000		0	20	100	257.575.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekola Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah Lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	12	1.852.015.000	0	0		393.571.000		1.202.157.928		201.225.000	12	100	1.796.953.928	
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	3,95	3.000.000											3.000.000	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	3.000.000											3.000.000	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kec. Dan Desa	1	3.000.000		0		800.000		2.200.000		0	1	100	3.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															76,35	97,68	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian					7.578.855.778											6.524.729.443	
I	Meningkatnya Perekonomian masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip (predikat/angkat)	CC/54	3.606.095.778											3.129.949.517	
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (paket)	2	3.444.448.778											2.974.400.451	
		Penyedian Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bln / org)	32	3.311.498.778	32	476.549.468	30	868.456.922	30	774.934.894	30	736.809.167	30	93,75	2.856.750.451	
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	4	132.950.000	1	17.500.000	1	62.107.500	1	27.107.500	1	10.935.000	4	100	117.650.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (paket)	2	6.757.900											6.680.981	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	4.628.500	-		2	4.192.081	2	76.819	2	282.681	2	100	4.551.581	
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2.129.400	-		-		-		2	2.129.400	2	100	2.129.400	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (paket)	2	27.600.000											22.387.910	
		Penyediaan Jasa Surta Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	600.000	-	-	-		-		1	600.000	1	100	600.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	27.000.000	1	1.941.310	1	6.094.620	1	6.731.930	1	7.020.050	4	100	21.787.910	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (paket)	2	127.289.100											126.480.175	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	19	126.639.100	19	8.907.000	19	38.698.375	19	41.322.450	19	36.902.350	19	100	125.830.175	
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	3	650.000	-	-	3	650.000	3		3	-	3	100	650.000	
VII		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemberdayaan Industri (persen)	15	3.972.760.000											3.394.779.926	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (paket)	3	3.972.760.000											3.394.779.926	
		Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	8	3.472.760.000	-	-	2	1.573.600.000	2		2	1.386.401.100	6	75	2.960.001.100	
		Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	3	500.000.000	-	-	-	4.063.330	1	15.781.783	2	414.933.713	3	100	434.778.826	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														96,88		86,09	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi		Tinggi	
Bagian Pemerintahan					1.176.280.074											1.149.844.133	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	CC/54	911.262.074											885.006.133	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	707.666.574											685.519.809	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	8	694.466.574	8	66.243.295	0	-	8	419.445.788	0	186.630.726	8	100	672.319.809	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD (orang)	15	13.200.000	3	3.300.000	3	3.300.000	0	-	9	6.600.000	15	100	13.200.000	
		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	10.000.000											10.000.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	1	100	10.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	105.280.000											104.400.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ penyediaan logistik kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (jenis)	1	5.280.000	0	-	10	2.700.900	10	2.579.100	0	-	1	100	5.280.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	100.000.000	5	22.400.000	6	28.370.000	5	20.610.000	0	27.740.000	20	100	99.120.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	8.136.000											6.125.550	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	936.000	0	-	30	468.000	0	-	30	468.000		0	936.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	1	7.200.000	1	429.850	1	2.149.250	1	429.850	1	2.180.600	1	100	5.189.550	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	80.179.500											78.960.774	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (unit)	5	80.179.500	5	19.262.750	5	19.617.500	5	23.989.250	5	16.091.274	5	100	78.960.774	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Sakip	CC/54	265.018.000											264.838.000	
			LPPD	2,65													

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penaggang Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12				13
				K	Rp	K		K						K		Rp		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya administrasi tata pemerintahan	98,47	265.018.000											264.838.000		
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (dokumen)	8	265.018.000	3	56.918.000	0	14.140.000	3	44.620.000	2	149.160.000	8	100	264.838.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														88,89		97,75		
Predikat Kinerja															Tinggi		Sangat Tinggi	
Bagian Hukum					693.042.093											683.318.806		
	Meningkatna Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip (Predikat/Angka)	CC/ 56	167.464.893											165.282.756		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	1.000.000											1.000.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	20	1.000.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	87.853.473											87.853.473		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	8	72.253.473	8/14	72.253.473	8/14	72.253.473	8/14	72.253.473	8/14	72.253.473	8	100	72.253.473		
		Pelaksanaan Pemantauan dan Penguji / Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	15.600.000	1	3.900.000	1	7.800.000	1	11.700.000	1	15.600.000	1	100	15.600.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	9.070.500											9.070.000		
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	15	4.470.500	15	2.000.000	15	3.551.000	15	3.551.000	15	4.470.000	15	100	4.470.000		

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	4.600.000	2	0	2	4.599.900	2	4.599.900	2	4.600.000	2	100	4.600.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor (%)	100	10.040.400											8.407.900	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12	4.040.400	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	4.040.000	12	100	4.040.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Laporan)	12	6.000.000	3	775.600	3	2.289.200	3	2.513.200	3	4.367.900	12	100	4.367.900	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	59.500.520											58.951.383	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak/perijinannya (unit)	5	59.500.520	5	8.518.644	5	24.156.652	5	31.616.580	5	58.951.383	5	100	58.951.383	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Sakip	Predikat CC / angka 56	525.577.200									Predikat CC / angka 56		518.036.050	
			LPPD	2,65								2,65					
			Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	51,79													
			Persentase pengelolaan bina mental spritual	22,81								22,81					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum (%)	51,79	525.577.200											518.036.050	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen produk hukum yang di fasilitasi (Dokumen)	4	210.580.000	328	41.984.000	400	64.759.000	400	129.689.000	400	210.538.850	4	100	210.538.850	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah fasilitasi bantuan hukum (kasus)	2	304.997.200	4	57.314.850	4	86.754.850	4	141.884.850	4	297.497.200	2	100	297.497.200	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Didokumentasikan	4	10.000.000	4	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	100	10.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															100	98,60	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Bagian Perekonomian dan SDA					1.183.518.916											1.129.718.403	
01.0	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAAERAH KABUPATEN KOTA	NILAI SAKIP (Predik	CC/54	960.039.116											910.125.403	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	908.367.616											859.230.783	
02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tuunjangan ASN (orang/bulan)	14	885.217.616	2	93.304.502		297.843.700		100.305.570		344.627.011	14	100,00	836.080.783	
02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (orang)	5	23.150.000	3	5.900.000		8.300.000		2.950.000		6.000.000	3	60,00	23.150.000	
2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	3.004.000											3.004.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
05		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (paket)	2	2.004.000	1	1.002.000		1.002.000		-		-	2	100	2.004.000	
08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.000.000	0	500.000		500.000		-		-	1	100	1.000.000	
2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan (%)	100	8.196.000											8.105.945	
01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	996.000	0	480.000		516.000		-			1	100	996.000	
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	7.200.000	1	1.779.500		1.739.300		1.814.026		1.777.119	1	100	7.109.945	
2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	40.471.500											39.784.675	
01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	40.471.500	7	9.500.000		9.500.000		9.822.500		10.962.175	6	85,71	39.784.675	
01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian (%)	50	223.479.800											219.593.000	
	Proporsi Kesesuaian Program Pembangunan (%)		95														
	Proporsi Pengadaan Barang dan Jasa (%)		100														
2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Lancarnya Koordinasi Perekonomian Daerah (%)	100	223.479.800											219.593.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
01		Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	123.379.800	2	4.918.000		19.315.000		71.256.000		24.754.000	1	100	120.243.000		
02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	100.100.000	0	-		-		-		99.350.000	1	100	99.350.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														93,97		95,45		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
Bagian Administrasi Pembangunan					716.526.108											573.435.621		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC/ 56	696.426.108											561.132.621		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	599.520.408											479.243.082		
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	Jan 00	574.020.408	5/3	81.383.153	5/5	109.200.309	,5/3	93.279.892	5/3	169.879.728	5	100	453.743.082		
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	3	25.500.000	3	10.750.000	3	2.625.000	3	9.750.000	3	2.375.000	3	100	25.500.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	4.906.700											3.920.570		
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	2	3.999.500	2	0	1	1.932.000	1	929.000	1	660.272	2	100	3.521.272		
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan (paket)	2	807.200	2	0	1	399.298		0		0	2	100	399.298		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
6	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	100.000	0	0	0	0		0		0	1	100	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dissediakan(%)	100	6.000.000											4.866.353	
8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	6.000.000	1	0	1	1.657.775		1.838.364		1.370.214	1	100	4.866.353	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	85.999.000											73.102.616	
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara (unit)	11	85.999.000	11	17.779.959		11.596.073		15.169.060		28.557.524	11	100	73.102.616	
		Program Perkonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian (Persen)	50	20.100.000											12.303.000	
	Proporsi Kesesuaian Program Pembangunan (Persen)		95														
	Proporsi Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)		100														
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pembangunan (%)	100	20.100.000											12.303.000		
13		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	JumlahLaporan Hasil Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	100.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
14		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	6	20.000.000	0	0	1	6.219.080	2	1.736.680	1	4.347.240	4	66,67	12.303.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															96,30	80,03	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Bagian Kesejahteraan Rakyat					3.100.041.284											3.026.249.522	
I	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	Predikat CC / angka 52	825.401.284											787.706.122	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	762.101.284											725.396.362	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	10	744.701.284	9 orang / 3 bulan	110.332.189	14 bulan	214.902.800		550.873.374		707.996.362	10	100	707.996.362	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	17.400.000	Dokumen	3.900.000	Dokumen	4.350.000		8.700.000		17.400.000	1	100	17.400.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	10.000.000											10.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	1	10.000.000	1 Paket	568.500	1 Paket	2.870.000		3.870.000		10.000.000	1	100	10.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	7.800.000											7.345.550	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	600.000	50 lembar	600.000	Lembar	0				600.000	1	100	600.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik yang disediakan (laporan)	1	7.200.000	1 Rek / 3 bulan	1.672.500	Rek/3 B	3.395.000		5.067.500		6.745.550	1	100	6.745.550	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	25	45.500.000											44.964.210	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatann yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	4	45.500.000	4 unit / 3 bulan	4.660.000	4 Unit	22.321.585		29.285.586		44.964.210	4	100	44.964.210	
II	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Nilai Sakip (Predikat/angka)	CC/54	2.274.640.000											2.238.543.400	
			LPPD (Angka)	2,65													
			Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum (%)	37,5													
			Persentase pengelolaan bina mental spritual (%)	22,81													
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	2.274.640.000											2.238.543.400	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9	629.338.000	0	-	Dok	550.551.500		600.551.400		619.121.400	9	100	619.121.400	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan K	1	150.000.000	0	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	1	100	150.000.000	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	1.495.302.000	0	150.000.000	Dok	13.841.500		393.083.500		1.469.422.000	1	100	1.469.422.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															100	97,62	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Bagian Organisasi					424.550.600											416.290.432	0
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP (predikat/angka)	cc/56	424.550.600							B/60,54		B/60,54		416.290.432	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Paket)	2	59.080.000											59.066.000	

#REF! -1,9456

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD (orang)	3	59.080.000	3	3.750.000	3	47.816.000	0	-	3	7.500.000	3	100,00	59.066.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	3	265.568.500											264.221.902	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan (jenis)	2	14.726.900	2	3.342.800	2	8.340.600	2	2.030.150	2	1.010.000	2	100,00	14.723.550	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (lembar)	2	15.011.600		-	2	5.939.000	2	9.072.600		-	2	100,00	15.011.600	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	235.830.000		-	10	102.178.800	7	79.960.952	3	52.347.000	20	100,00	234.486.752	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (paket)	1	7.200.000											6.956.400	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	1	7.200.000	1	1.740.000	1	1.738.200	1	1.739.100	1	1.739.100	1	100,00	6.956.400	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (paket)	1	92.702.100											86.046.130	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (unit)	6	92.702.100	6	13.921.000	6	30.497.000	6	24.192.000	6	17.436.130	6	100,00	86.046.130		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														100		98,05	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
Bagian Umum						19.018.373.585										18.483.060.718	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip		19.018.373.585											18.483.060.718	
01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	4.780.028.741											4.610.263.500	
01 2 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	32	3.099.078.741	30/2	308.066.520	30/6	1.010.245.833	30/3	782.629.215	30/3	889.571.932	30	93,75	2.990.513.500	
01 2 02 02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	1.680.950.000	2	269.178.000	4	351.750.000	3	391.875.000	3	606.947.000	12	100	1.619.750.000	
01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kulitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	21.000.000	0	-	0	-	0	-	100	21.000.000			21.000.000	
5 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	21.000.000	0	-	0	-	0	0	1	21.000.000	1	100	21.000.000	
01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.002.623.900											3.929.497.357	
6 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	80.462.000	1	17.561.700	1	19.988.900	1	11.197.950	4	31.713.100	1	25	80.461.650	
6 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Paket)	4	70.210.700	3	17.438.700	4	12.385.000	3	23.296.500	4	17.090.300	3	75	70.210.500	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
6 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	3	15.411.200	1	6.516.000	1	2.636.000	3	3.570.000	2	2.689.200	3	100	15.411.200	
6 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	36	33.600.000	6	5.190.000	6	5.308.000,00	6	10.548.000	18	10.731.000	36	100	31.777.000	
6 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12	2.948.955.000	2	344.965.800	4	774.059.642	3	987.266.860	3	818.624.100	12	100	2.924.916.402	
6 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	200	853.985.000	51	178.918.060	45	180.193.150	50	174.806.800	54	272.802.595	200	100	806.720.605	
01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.115.407.800											2.065.905.000	
7 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional / lapangan yang disediakan (unit)	1	501.200.000	0	-	0	-	0	-	1	501.200.000	1	100	501.200.000	
7 05		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan (unit)	943	574.250.000	0	-	536	377.000.000	8	93.400.000	399	92.500.000	943	100	562.900.000	
7 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	24	994.957.800	0	-	7	723.480.000,00	0	-	17	233.325.000	12	50	956.805.000	
7 11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	102	45.000.000	0	-	0	-	0	-	102	45.000.000	102	100	45.000.000	
01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran peaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	483.142.500											468.455.572	
8 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	15.000.000	2	3.056.000	4	1.364.000	3	1.522.000	3	9.050.000	12	100	14.992.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
8 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	36	359.400.000	6	79.176.297	12	84.095.464	9	76.932.407	9	104.522.264	36	100	344.726.432	
8 04		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	108.742.500	12	12.542.500	12	15.820.490	12	22.446.750	12	57.927.400	12	100	108.737.140	
01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.799.402.664											2.711.637.657	
01 2 09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	2	250.000.000	2	55.652.380	2	39.991.055	2	64.168.700	2	89.783.400	2	100	249.595.535	
01 2 09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	47	992.198.000	47	211.564.728	47	203.169.289	47	217.180.415	47	329.731.250	47	100	961.645.682	
01 2 09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	35	8.000.000	3	375.000	5	355.000	5	1.795.000	22	5.475.000	35	100	8.000.000	
01 2 09 09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	6	1.519.204.664	6	9.143.500	6	856.000	2	139.251.000	6	1.313.145.940	6	100	1.462.396.440	
01 2 09 11		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	53	30.000.000	15	12.110.000	17	8.320.000	17	7.100.000,00	4	2.470.000	53	100	30.000.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
01 2 11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	3.413.342.980											3.273.141.632	
01 2 11 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	2	201.321.380	2/2	23.897.970	2/6	70.307.480	2/3	35.773.599	2/3	35.773.599	2	100	165.752.648	
01 2 11 02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	6	93.321.600	1	482.500	0	-	4	26.500.000	6	62.670.000	6	100	89.652.500	
01 2 11 03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	4	280.000.000	2	83.648.295	3	43.414.724	3	89.457.700	3	46.900.000	4	100	263.420.719	
01 2 11 04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	2	2.838.700.000	2/3	445.828.448	2/3	608.307.517	2/3	913.292.290	2/3	786.887.510	2	100	2.754.315.765	
01 2 12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (%)	0	1.403.425.000											1.403.160.000	
01 2 12 01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	12	746.425.000	3	175.175.000	2	117.425.000	3	140.140.000	4	313.525.000	12	100	746.265.000	
01 2 12 02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (paket)	12	529.250.000	3	127.400.000	2	85.400.000	3	184.150.000	4	132.230.000	12	100	529.180.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	K	Rp	K	8		K	9		10		11		12			13		
01 2 12 03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (paket)	12	127.750.000	3	31.220.000		2	21.000.000		3	32.865.000		4	42.630.000		12	100	127.715.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		94,42	97,19		
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					916.824.849														812.582.789		
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip (Predikat / Angka)	CC/ 54	789.364.599,00														685.122.789,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	710.785.349,00														606.723.539,00		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji (orang/bulan)	7	685.885.349,00	7/3	60.226.057	7/5	188.693.503	7/8	188.088.309	7/3	144.815.670	7	100,00	581.823.539					
		Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (orang)	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (orang)	5	24.900.000,00	3	7.100.000	3	8.850.000	3	5.350.000	3	3.600.000	5	100,00	24.900.000					
		Administrasi Umum perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	6.553.800,00														6.513.600,00		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1	1.820.000,00	1	910.000,00	1	910.000	-	-	-	-	1	100,00	1.820.000					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)	1	4.628.800,00	1	1.022.200	1	1.022.200	1	872.200	1	1.672.000	1	100,00	4.588.600					
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu (Laporan)	1	105.000,00	1	105.000	-	-	-	-	-	-	1	100,00	105.000					
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	9.193.200,00														9.053.400,00		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (Laporan)	1	109.200,00	1	108.000	-	-	-	-	-	-	1	100,00	108.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Laporan)	1	9.000.000,00	1	2.221.400	1	32.750	1	4.411.550	1	2.195.700	1	100,00	8.861.400	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Laporan)	1	84.000,00	1	84.000	-	-	-	-	-	-	1	100,00	84.000	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	62.832.250,00											62.832.250,00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	7	62.832.250,00	7	15.694.300	7	17.702.524	7	14.173.000	7	15.262.426	7	100,00	62.832.250	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian (Persen)	50	127.460.250,00											127.460.000,00	
Proporsi Kesesuaian Program Pembangunan (Persen)			95														
Proporsi Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)			100														
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	100	127.460.250,00											127.460.000,00	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	12	90.000.000,00	0	-	3	22.500.000	3	22.500.000	6	45.000.000	12	100,00	90.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan (Laporan)	1	37.460.250,00	1	3.150.000	1	10.010.000	1	6.810.000	1	17.490.000	1	100,00	37.460.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															100	88,63	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					2.721.953.953											2.624.250.386	
01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip(Predikat/angka)	CC/54	682.428.953											585.011.126	
01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah(%)	100	168.568.653											78.600.000	
01 2 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	89.968.653	0 Jan	-	0 Jan	-	0 Jan	-	0 Jan	-		100	-	
01 2 02 02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD)	18	78.600.000	28	35.400.000	28	35.400.000	28	3.900.000	28	3.900.000	18	100	78.600.000	
01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	100	264.448.400											264.405.950	
6 02		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	9.919.400	1	3.557.290	1	4.000.000	1	2.261.000	1	101.000	4	100	9.919.290	
6 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	254.529.000	10	43.040.000	15	79.931.600	15	80.028.400	15	51.486.660	12	100	254.486.660	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	50.000.000											49.950.000	
7 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000	0	- 0	- 0	- 0	- 0		49.950.000	1	100	49.950.000		
01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran peaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	14.900.000											13.775.208	
8 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	14.900.000	1	3.699.063	1	3.781.140	1	2.569.900	1	3.725.105	1	100	13.775.208	
01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	2	184.511.900											178.279.968	
01 2 09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	147.011.900	10	24.153.647	10	24.153.647	10	48.137.721	10	44.334.953	6	100	140.779.968	
01 2 09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	37.500.000	0	10.000.000	60	15.000.000	60	10.000.000	60	2.500.000	1	100	37.500.000	
		Program Administrasi Umum	Nilai Sakip (Predikat/angka)	CC/54	2.039.525.000											2.039.239.260	
			Persentase Kegiatan Bupati,	50													
				2.136													
012 14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan(%)	100	2.039.525.000											2.039.239.260	
012 14 01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	1.137.620.000	1	60.700.000	1	480.065.180	1	396.583.080	1	200.000.000	1	100	1.137.348.260	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
012 14 02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	219.340.000	0	-	0	74.690.000	"2	20.000.000	"2	124.640.000	1	100	219.330.000	
012 14 03		Pendokumentasian tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	682.565.000	3	-	3	53.159.000	3	53.159.000	3	576.243.000	1	100	682.561.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														100	96,41		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Sekretariat DPRD					31.618.865.827											21.922.388.685	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Sakip (predikat/nilai)		19.717.653.320											14.922.901.684	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.214.000											7.468.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.214.000								7.468.000			7.468.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	17.513.261.270											13.882.871.492	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	59	17.331.214.270	59 org	3.718.840.581	59 org	4.501.434.180	59 org	7.803.600.915	59 org	13.738.338.492	59	100	13.738.338.492	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	182.047.000	18,86	34.334.000	42,74	77.809.000	17,79	32.390.000	79,39	144.533.000	3	100	144.533.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	271.025.300											126.364.574	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	6.727.700	0,00		0,00		57,46	3.866.000	57,46	3.866.000	1	100	3.866.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	36.619.100	0,00		0,00		41,41	15.163.600	41,41	15.163.600	8	100	15.163.600	
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	68.158.500	1,03	700.000	0,00		40,93	27.898.950	41,96	28.598.950	2	100	28.598.950	
		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	4.320.000	0,00		0,00		12,50	540.000	12,50	540.000	2	100	540.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2	17.870.000	0,00		0,00		49,45	8.837.500	49,45	8.837.500	2	100	8.837.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	14	137.330.000	17,48	24.000.000	25,09	34.459.924	11,18	15.358.600	50,51	69.358.524	14	100	69.358.524	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	180.260.050											112.904.651	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	6.840.000	0,00		1,59	109.000	53,48	3.658.000	55,07	3.767.000	2	100	3.767.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	119.700.000	13,39	16.022.850	31,02	37.128.980	24,31	29.094.126	74,47	89.140.651	3	100	89.140.651	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	53.720.050	0,00		0,00		37,22	19.997.000	37,22	19.997.000	2	100	19.997.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menigkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	253.559.700											106.478.967	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pemeliharaannya	8	224.559.700	8,86	19.900.000	20,58	46.218.430	15,76	35.401.550	47,31	106.228.967	8	100	106.228.967	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	10.000.000	0,00		0,00		0,00		0,00			0	0	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang dipelihara	1	7.500.000	0,00		0,00		0,00		0,00			0	0	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37	11.500.000	0,00		0,00		2,17	250.000	2,17	250.000	2	5,4	250.000	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)	100	445.900.000											151.800.000	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian Dinas dan atribut DPRD yang disediakan	6	395.900.000	0,00		0,00		38,34	151.800.000	38,34	151.800.000	4	66,67	151.800.000	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	50.000.000	0,00		0,00		0,00		0,00			0	0	
		Layanan Administrasi DPRD	Layanan administrasi DPRD (%)	100	1.042.433.000											535.014.000	
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD	8	15.000.000	0,00		0,00		0,00		0,00			0	0	
		Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	6	490.731.000	0,00		3,42	16.792.000	13,21	64.847.000	21,60	106.014.000	6	100	106.014.000	
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	3	536.702.000	19,19	103.000.000	47,33	254.000.000	13,42	72.000.000	79,93	429.000.000	3	100	429.000.000	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan (dokumen)	55	11.901.212.507											6.999.487.001	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Ketersediaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	7	564.750.000											253.300.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	3	405.250.000	0,00		1,14	4.610.000	4,91	19.888.000	54,14	219.400.000	3	100	219.400.000	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	79.500.000	0,00		0,00		0,00		0,00		3	100	0	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	1	80.000.000	0,00		0,00		26,90	21.520.000	42,38	33.900.000	1	100	33.900.000	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	3	1.053.335.507											439.290.000	
		Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	3	1.053.335.507	0,00		0,00		43,39	457.080.000	41,70	439.290.000	3	100	439.290.000	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya peningkatan kapasitas DPRD (%)	100	1.389.090.000											1.155.396.041	
		Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	2	1.386.590.000	0,00		24,02	333.110.000	1,68	23.270.000	83,33	1.155.396.041	2	100	1.155.396.041	
		Publikasi dan dokumentasi dewan	jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum Daerah, Publikasi dan dokumentasi Dewan	1	2.500.000	0,00		0,00		0,00		0,00			0	0	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100	3.624.300.000											1.753.350.000	
		Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	251	150.000.000	0,50	750.000	0,00		12,63	18.950.000	14,13	21.200.000	251	100	21.200.000	
		Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	3.474.300.000	0,00		48,99	1.702.150.000	0,00		49,86	1.732.150.000	3	100	1.732.150.000	
		Fasilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Tugas DPRD (%)	100	5.269.737.000											3.398.150.960	
		Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	3	2.791.152.000	8,31	231.820.000	0,00		7,90	220.379.300	64,16	1.790.778.000	3	100	1.790.778.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	2	252.645.000	0,79	1.990.000	436,18	1.101.978.000	44,67	112.855.000	45,46	114.845.000	2	100	114.845.000	
		Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD	3	2.225.940.000	9,49	211.231.960	31,94	710.856.000	23,95	533.210.000	67,05	1.492.527.960	3	100	1.492.527.960	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															77,25	69,33	
Predikat Kinerja															Sedang	Sedang	
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah					6.881.003.336											6.379.700.537	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	predikat CC/ angka 56	4.288.042.636									predikat CC/ angka 52,27		4.042.932.304	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	10 Dokumen	45.000.000											42.794.800	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	2	15.000.000	1 dokumen	210.000	1 dokumen	2.756.000	1 dokumen	5.443.000	1 dokumen	14.622.000	2	100	14.622.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000	0	0	1 dokumen	3.552.000	1 dokumen	0	1 dokumen	4.962.000	2	100	4.962.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5.000.000	0	0	0	0	2 dokumen	1.649.000	1 dokumen	4.996.000	2	100	4.996.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	20.000.000	0	0	0		0		1 dokumen	18.214.800	4	100	18.214.800	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (paket)	38 orang/ 2400 dokumen	3.585.103.836											3.373.819.636	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	3.448.828.836	38 orang/bulan	498.075.787	38/bulan	952.028.827	39/bulan	990.428.967	39/bulan	3.237.574.636	38	100	3.237.574.636	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900	10.000.000	0	0	0	2.283.000	900 dokumen	2.283.000	900 dokumen	9.971.000	900	100	9.971.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500	126.275.000	1500 dokumen	19.300.000	1500 dokumen	51.574.000	1500 dokumen	25.630.000	1500 dokumen	126.274.000	1500	100	126.274.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	16.000.000											15.886.000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	16.000.000	0	0	1 dokumen	4.313.000	1 dokumen	3.293.000	1 dokumen	15.886.000	1	100	15.886.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket/ 1 laporan	369.298.600											368.248.432	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3.091.600	0	0	1 paket	44.000	1 paket	615.000	1 paket	3.091.000	1	100	3.091.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	65.007.800	1 paket	1.061.000	1 paket	13.887.650	1 paket	16.421.000	1 paket	64.523.650	2	100	64.523.650	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	55.209.200	1 paket	2.288.400	1 paket	16.042.600	1paket	13.114.100	1paket	55.175.100	2	100	55.175.100	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12	35.000.000	12 Laporan	909.800	12 Laporan	9.901.000	12 Laporan	2.223.000	12 Laporan	34.933.300	12	100	34.933.300	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	210.990.000	50 laporan	6.042.934	50 laporan	64.299.016	50 laporan	48.048.288	50 laporan	210.525.382	50	100	210.525.382	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	36.781.900											35.400.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	36.781.900	0	0	0	0	0	0	4 Unit	35.400.000	4	100	35.400.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	70 laporan	66.209.600											59.785.200	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.489.600	12 Laporan	0	12 Laporan	270.000	12 Laporan	2.846.000	12 Laporan	5.866.000	12	100	5.866.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	49.320.000	36 Laporan	6.947.200	36 Laporan	13.054.650	36 Laporan	10.740.300	36 Laporan	47.841.200	36	100	47.841.200	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	10.400.000	12 Laporan	173.000	12 Laporan	2.405.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	6.078.000	12	100	6.078.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	24 Unit	169.648.700											146.998.236	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	162.856.700	18 unit	24.431.345	18 unit	36.318.995	18 unit	31.738.396	18 unit	144.810.236	18	100	144.810.236	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	1.000.000	4 unit	760.000	4 unit	50.000	0	0	4 unit	810.000	4	100	810.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4.992.000	0	0	1 unit	55.500	1 unit	597.500	1 unit	653.000	1	100	653.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	800.000	0	0	1 unit	400.000	0	0	1 unit	725.000	1	100	725.000	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program	100%	1.367.530.000											1.159.529.120	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	8 Dokumen/5 BA/102 Usulan	1.221.630.000											1.036.612.120	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	11.770.000	3 dokumen	2.375.000	3 dokumen	6.475.000	3 dokumen	892.300	3 dokumen	11.642.300	3	100	11.642.300	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan/dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen kebijakan	1	49.480.000	0	0	1 laporan	10.000.000	1 laporan	22.326.247	1 laporan	32.326.247	1	100	32.326.247	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	38.685.000	1 berita acara	15.064.872	1 berita acara	17.060.565	1 berita acara	820.928	1 berita acara	34.069.918	2	100	34.069.918	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	186	55.575.000	0	0	2 Berita Acara	43.974.000	2 Berita Acara	1.770.000	2 Berita Acara	51.564.000	186	100	51.564.000	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	59.565.000	0	0	1 Berita Acara	48.273.000	1 Berita Acara	9.670.000	1 Berita Acara	57.943.000	1	100	57.943.000	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	120	86.300.000	120 usulan	82.300.000	120 usulan	4.000.000	0	0	120 usulan	86.300.000	120	100	86.300.000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	920.255.000	4 dokumen	13.515.135	4 dokumen	60.334.107	4 dokumen	444.721.225	4 dokumen	762.766.655	4	100	762.766.655	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen/ 56 orang	65.020.000											52.528.000	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	6.830.000	0	0	1 Dokumen	5.424.000	0	1 Dokumen	6.624.000	1	100	6.624.000		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56	58.190.000	0	0	0	0	0	56 Orang	45.904.000	56	100	45.904.000		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	6 laporan/ 1 kerja sama	80.880.000											70.389.000	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	5.280.000	0	0	0	0	3 laporan	0	0	1	100	-		
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	7.900.000	0	0	0	0	0	0	1 kerja sama	7.600.000	1	100	7.600.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	67.700.000		0	4 dokumen	11.900.000		0	4 dokumen	62.789.000	4	80	62.789.000	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program dan RKPD dengan RPJMD	100%	304.340.000											294.718.973	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan/dokumen hasil koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	20 Dokumen/ 36 laporan	104.340.000											100.073.623	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	18.340.000	0	0	0	15.928.684	3 Dokumen	0	3 Dokumen	18.326.684	3	100	18.326.684	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19	15.000.000	19 laporan	748.000		0		0	19 laporan	12.536.000	19	100	12.536.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	16.000.000	4 Laporan	6.700.000	4 Laporan	1.200.000	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	15.900.000	4	100	15.900.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	18.700.000	0	0	0	0	3 Dokumen	17.650.939	3 Dokumen	18.510.939	3	100	18.510.939	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9	15.000.000	9 Laporan	3.050.044		0	9 Laporan	9.304.956	9 Laporan	15.000.000	9	100	15.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	11.300.000	4 laporan	1.200.000	4 laporan	1.600.000	4 laporan	4.100.000	4 laporan	12.200.000	4	100	12.200.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	7.600.000	1	100	7.600.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan/dokumen hasil koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 dokumen /17 laporan	100.000.000											98.560.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	23.000.000	0	0	3 Dokumen	8.170.000	3 dokumen	1.010.000	3 dokumen	22.792.000	3	100	22.792.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	13.410.000	4 laporan	1.938.000		0	4 laporan	8.080.000	4 laporan	13.388.000	4	100	13.388.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	20.000.000	0	0	4 laporan	1.400.000	1 laporan	18.500.000	4 laporan	19.900.000	4	100	19.900.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	20.000.000	0	0	0	0	3 dokumen	0	3 dokumen	19.460.000	3	100	19.460.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	13.590.000	0	0	5 laporan	2.100.000	5 laporan	1.170.000	5 laporan	13.070.000	4	80	13.070.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	10.000.000	0	0	0	0	4 Laporan	4.950.000	4 Laporan	9.950.000	4	100	9.950.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan/dokumen hasil koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 dokumen/ 17 laporan	100.000.000											96.085.350	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	30.000.000	0	0	3 dokumen	12.514.850	3 dokumen	6.964.000	3 dokumen	29.975.850	3	100	29.975.850	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6	15.000.000	6 laporan	2.720.000	6 laporan	2.352.500	6 laporan	6.611.000	6 laporan	13.312.500	6	100	13.312.500	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	5.000.000	0	0	0	0	4 Laporan	1.600.000	4 Lporan	5.000.000	4	100	5.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	30.000.000	0	0	3 Dokumen	4.280.000	3 dokumen	6.518.000	3 dokumen	27.882.000	3	100	27.882.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	15.000.000	4 Laporan	0	4 laporan	680.000	4 laporan	11.857.000	4 laporan	14.915.000	4	100	14.915.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	5.000.000	0	0	0	0	4 Laporan	800.000	4 Laporan	5.000.000	4	100	5.000.000	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Government	Kategori Sangat Inovatif / Skor 70	921.090.700											882.520.140	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	20%													
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	306.091.000											304.609.139	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	1	306.091.000	0	0	1 dokum en	2.690.000	1 dokumen	50.224.514	1 dokumen	304.609.139	1	100	304.609.139	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	2 laporan	15.000.000											14.894.000	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	14.894.000	1	100	14.894.000	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektua	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	-	
		Kegiatan Penelitian & Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian & Pengembangan Bidang EKonomi	1 dokumen	599.999.700											563.017.001	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	1	599.999.700	0	0	1 dokum en	7.192.646	1 dokumen	91.755.400	1 dokumen	563.017.001	1	100	563.017.001	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														99,30		92,71	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
Badan Pendapatan Daerah					5.357.487.767											4.961.516.178	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.357.487.767											4.961.516.178	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC/56	4.145.018.148									CC/56		3.878.974.304	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	3.879.000											3.875.400	
	Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3.879.000	-	-	2	1.232.400	-	13.000	4	2.630.000	6	100	3.875.400	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.663.398.648											3.445.776.569	
	Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	3.547.298.648	3	761.449.113	4	759.198.277	3	1.034.746.150	3	774.283.029	13	93	3.329.676.569	
	Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	116.100.000	-	28.150.000	-	52.650.000	-	24.650.000	-	10.650.000	1	100	116.100.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	100	294.333.550											281.837.709	
	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	429.950	-	-	-	428.500	-	-	-	-	1	100	428.500	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	5	61.487.900	-	-	3	14.224.500	1	3.351.500	1	43.809.600	5	100	61.385.600	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	8	142.415.700	-	-	4	39.867.500	2	32.865.000	2	58.213.400	8	100	130.945.900	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1	10.000.000	-	864.000	-	1.631.000	-	1.505.000	1	5.925.500	1	100	9.925.500	
	Aparatu r Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	80.000.000	1	2.490.000	7	22.782.209	4	11.090.000	12	42.790.000	24	100	79.152.209	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	8.350.000											6.800.000	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2	8.350.000	-	-	2	6.800.000	-	-	-	-	2	100	6.800.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	62.436.800											38.057.726	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.486.800	-	-	-	1.175.000	-	100.000	2	1.187.500	2	100	2.462.500	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12	59.950.000	3	4.108.100	3	8.764.100	3	13.362.876	3	9.360.150	12	100	35.595.226	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	112.620.150											102.626.900	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	11	110.548.250	11	23.319.210	11	28.101.384	11	27.554.060	11	21.670.746	11	100	100.645.400	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	900.000	1	420.000	1	50.000	-	-	1	350.000	3	100	820.000	
	Badan Pendap atan Daerah Kab. Belu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1.171.900	1	568.000	1	593.500	-	-	-	-	1	100	1.161.500	
II		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	10.04	1.212.469.619											1.082.541.874	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	10.04	1.212.469.619											1.082.541.874	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	97.283.000	-	13.800.000	-	11.859.500	-	23.952.000	2	47.579.750	2	100	97.191.250	
	ASN Bapenda serta Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	6.710.300	-	-	-	4.016.500	-	75.500	1	2.600.000	1	100	6.692.000	
	Subyek dan Obyek	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta	1	28.416.700	-	-	-	12.243.000	-	794.500	1	15.310.000	1	100	28.347.500	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	1	102.364.600	-	-	-	6.253.900	-	45.500	1	96.000.000	1	100	102.299.400	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	500	12.148.000	-	10.400.000	-	1.474.000	1	199.000	-	-	1	0	12.073.000	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	33.257.100	-	-	-	8.476.100	-	6.630.000	1	18.112.500	1	100	33.218.600	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1	884.309.919	-	-	-	13.359.000	-	307.479.623	1	434.127.901	1	100	754.966.524	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	3.844.000	-	-	-	1.080.800	-	-	1	2.600.000	1	100	3.680.800	
	Subyek dan Obyek Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	44.136.000	-	435.000	-	6.963.300	-	4.284.000	1	32.390.500	1	100	44.072.800	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															95,35	92,61	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					139.465.528.886											125.947.946.996	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP		136.766.618.886											123.730.622.489	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.500.000											7.455.000	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	7.500.000	3	5.175.000		2.280.000		-	1		4	100	7.455.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			135.267.723.686											122.439.243.497	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	44	12.134.638.497	5	552.991.540	4	2.337.575.114	5	1.239.714.781	20	1.346.847.539	34	77	5.477.128.974	
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2	123.133.085.189	0	51.899.000	5	30.114.917.172	3	7.679.775.537	3	79.115.522.814	2	100	116.962.114.523	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			156.840.000											121.479.006	
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	120.120.000	-	0	-	-	1	90.641.006	-	10.050.000	1	100	100.691.006	
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1,00	36.720.000	-	-	0	-	-	-	1	20.788.000	1	100	20.788.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			718.503.700											677.571.429	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	5	2.124.000	0	-	-	-	4	1.015.000	1	1.095.000	5	100	2.110.000	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29	244.500.000	-	-	1	30.000.000	-	-	28	213.441.000	29	100	243.441.000	
	04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	19	144.098.000	1	110.000	8	69.829.500	8	15.541.500	2	34.219.900	19	100	119.700.900	
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	200.000	145.352.700	3600	1.443.100	10000	38.552.665	50.000	96.753.003	127.000	8.011.400	190600	95	144.760.168	
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum yang tersedia	1	10.050.000	1	2.481.980	-	2.530.000	1	2.524.500	-	2.509.500	1	100	10.045.980	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi	10	172.379.000	3	35.716.000	3	42.774.300	2	9.450.000	2	69.573.081	10	100	157.513.381	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.920.000											80.436.640	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan surat yang terkirim	300	18.200.000	2	1.280.000	50	2.294.000	2	732.800	146	11.117.500	200	67	15.424.300	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan komunikasi	2	66.720.000	2	9.399.950	-	10.972.200	2	21.560.440	-	23.079.750	2	100	65.012.340	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			531.131.500											404.436.917	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	40	237.795.000	4	33.036.000	4	53.285.062	4	39.231.760	28	43.802.595	40	100	169.355.417	
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor, genzet, printer, laptop dan PC yang diperbaiki	1	10.344.000	-	585.000	-	100.000	1	250.000	-	1.353.000	1	100	2.288.000	
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	2	282.992.500	-	1	7.998.500	-	75.193.500	1	149.601.500	2	100	232.793.500		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI ATAS AUDIT BPK		2.191.110.000											1.833.509.058	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	JUMLAH DOKUMEN RENCANA ANGGARAN DAERAH		1.454.844.000											1.173.254.868	
	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2	53.520.000	-	-	17.243.000	2	22.676.698	-	-	2	100	39.919.698		
	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	37.640.000	-	-	-	2	30.909.493	-	-	2	100	30.909.493		
	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	53	82.756.000	1	24.036.830	-	35.233.500	-	-	52	21.538.000	53	100	80.808.330	
	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	53	42.976.000	1	16.905.000	3	17.620.500	-	-	49	0	53	100	34.525.500	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	2	98.232.000	0	-	-	16.480.000	-	19.900.000	2	42.316.500	2	100	78.696.500	
	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	81.870.000	-	-	-	2	23.815.000	-	56.231.700	2	100	80.046.700		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya evaluasi Ranperda ttg APBD, tersedianya Perbup ttg Perubahan Penjabaran APBD	2	820.580.000	2	124.197.841	-	209.830.000,00	2	160.040.000,00	-	207.446.165	2	100	701.514.006	
	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja dengan provinsi dan pemerintah pusat	5	237.270.000	-	2.056.000	1	24.500.000	-	-	4	100.278.641	5	100	126.834.641	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	JUMLAH DOKUMEN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAA N DAERAH		356.530.000		78.457.000		140.438.400		33.885.760		84.556.320			337.337.480	
	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen pencairan dana yang diverifikasi	8.000	202.170.000	500	55.653.000	500	43.471.000	2000	22.490.760	5000	61.430.720	8000	100	183.045.480	
	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya	18	106.440.000	-	-	6	81.624.400	2	8.660.000	10	16.125.600	18	100	106.410.000	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	12	47.920.000	2	22.804.000	4	15.343.000	2	2.735.000	4	7.000.000	12	100	47.882.000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	JUMLAH KOORDINASI DAN DOKUMEN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		379.736.000											322.916.710	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	53	103.080.000	3	49.413.000	1	9.356.030	7	4.500.000,00	42	28.842.500	53	100	92.111.530	
	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	Jumlah dokumen Perda tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	2	97.840.000	-	-	0	11.920.000	2	77.850.680	0	-	2	100	89.770.680	
	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah koordinasi dan tindak lanjut terhadap LHP BPK	1	115.856.000	-	18.892.000	1	78.440.500	1	15.920.000	0	-	1	100	113.252.500	
	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah evaluasi dan penyelesaian terhadap TP-TGR	2	62.960.000		-	-	2.400.000	-	4.330.000	2	21.052.000	2	100	27.782.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	OPINI ATAS AUDIT BPK		507.800.000											383.815.449	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	JUMLAH PENGELOLAAN BMD		507.800.000											383.815.449	
	02	Penyusunan Standar Harga Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar harga BMD	2	78.000.000		16.402.000	1	15.446.000		8.957.500	1	36.390.000	2	100	77.195.500	
	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen KI	1	124.810.000	1	13.940.000	-	53.593.000	-	45.647.640	-	10.955.920	1	100	124.136.560	
	07	Pengamanan Barang Milik Daerah		5	32.300.000		-		-	-	4.800.000	4	23.190.000	4	80	27.990.000	
	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapus, dimusnahkan dan dimanfaatkan	1	171.960.000	-	8.510.000	0	20.628.000	-	5.140.000	-	22.420.000	1	100	56.698.000	
	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi BMD dengan OPD	2	100.730.000	1	25.832.279	-	42.682.000	-	17.016.110	1	12.265.000	2	100	97.795.389	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															97,76	90,31	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					29.461.636.528											16.855.343.785	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	CC/54	26.769.073.928											14.934.772.855	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah (%)	100	26.517.341.928											14.697.212.370	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	1450	22.190.892.528	750	912.517.290	36	9.069.428.623	34	479.012.474	34	741.753.983	854	58,90	11.202.712.370	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	12	4.326.449.400	3	3.500.000	3	25.250.000	3	849.000.000	3	2.616.750.000	12	100	3.494.500.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	52.526.100											51.314.280	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.927.100	0	0	0	-	0	6.370.500	1	6.478.500	1	100	12.849.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	6.044.000	0	0	0	-	0	2.317.400	2	3.726.600	2	100	6.044.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dok)	1	9.975.000							1	9.969.000	1	100	9.969.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kali)	4	23.580.000	0	0	2	12.012.280	0	-	2	10.440.000	4	100,00	22.452.280	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	58.931.900											57.381.450	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	58.931.900	0	0	0	-	-	8	57.381.450	8	100	57.381.450		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	17.180.000											13.962.700	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	1	980.000	0	0	0	390.000	0	250.000	1	136.500	1	100	776.500	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	12	16.200.000	0	0	6	5.667.750	3	2.774.400	3	4.744.050	12	100	13.186.200	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	123.094.000											114.902.055	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya (Unit)	13	115.044.000	13	1.750.000	13	34.198.705	13	20.168.500	13	51.560.350	13	100	107.677.555	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	8.050.000	0	0	2	575.000	0	-	20	6.649.500	22	100	7.224.500	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah	70.48	2.198.802.600											1.442.579.930	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (%)	100	378.149.100											316.271.070	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dok)	1415	378.149.100	0	0	0	42.387.430	0	22.358.999	60	251.524.641	60	4,24	316.271.070	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya pengelolaan mutasi dan promosi ASN (%)	100	1.152.467.500											583.127.890	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dok)	451	215.381.000	4	0	61	2.370.000	128	2.007.600	132	139.295.790	325	72,06	143.673.390	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dok)	6	937.086.500	2	0	0	413.061.340	0	26.393.160	6	-	8	133,33	439.454.500	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN (%)	100	448.215.000											384.589.880	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (Orang)	101	79.215.000	0	0	27	4.220.000,00		280.000	0	18.589.880	27	26,73	23.089.880	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	7	369.000.000	0	0	7	196.500.000	7	157.500.000	1	7.500.000	7	100	361.500.000	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (%)	100	219.971.000											158.591.090	
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	176.161.000								137.168.500	1	100	137.168.500	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	43.810.000	7	0	5	-	1	1.416.650	31	20.005.940	44	220	21.422.590	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.38	493.760.000											477.991.000	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (%)	100	493.760.000											477.991.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan (Lap)	2	493.760.000	1	0	0	399.201.000	0	34.240.000	0	44.550.000	1	50	477.991.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															92,91	57,21	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Badan Pengelola Perbatasan Daerah					2.307.234.646											1.982.363.414	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	CC/56	2.257.134.646											1.982.363.414	
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrai Keuangan	100	2.108.318.546											1.982.363.414	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.066.218.546	3	326.176.479	5	441.283.293	3	644.789.872	3,00	528.013.770,00	14	100	1.940.263.414	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	42.100.000	3	9.650.000	3	10.500.000	3,00	9.650.000	3,00	12.300.000	12	100	42.100.000	
04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi	100	108.838.000												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10.500.000	1	-	1	-	1	-	1,00	10.500.000	1	100	10.500.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	9.830.000	1	-	1	-	1	7.875.000	1	1.954.800	2	100	9.829.800	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	88.508.000	12	-	12	14.070.000	12	42.423.700	14	31.718.640	25	100	88.212.340	
06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	CC/52	10.500.000												
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	10.500.000	3	-	3	4.335.000	3	-	3,00	5.501.300	3	100	9.836.300	
07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	CC/52	29.478.100												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	29.478.100	10	-	10	6.478.272	10	11.420.550	10	5.620.025	10	100	23.518.847	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan Negara	CC/52	50.100.000												
		Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Terwujudnya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	CC/52	50.100.000												
		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	7	50.100.000	2	-	2	25.000.000	2	-	1	25.100.000	7	100	50.100.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															100	85,92	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
INSPEKTORAT					6.655.454.083											6.242.284.707	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP/B/60 (PREDIKAT/ANGKA)	100	5.317.510.483	13	712.851.515		1.388.359.375		1.385.257.992		1.478.934.225			4.965.403.107	
2	ASN Inspektorat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)	100	55.000.000	0	-		5.030.000		2.400.000		41.355.759			48.785.759	
0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	55.000.000		-		5.030.000		2.400.000		41.355.759	2	100,00	48.785.759	
2.02	ASN Inspektorat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Paket)	100	4.779.534.083	14	687.281.215		1.205.444.860		1.286.351.258		1.271.447.791			4.450.525.124	
0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (45 org/14 bulan)	45	4.746.534.083	45	687.281.215		1.205.444.860		1.286.351.258		1.238.447.791	45	100	4.417.525.124	
0002		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan (Orang)		33.000.000		0		0		0		33.000.000		0,00	33.000.000	
2.06	ASN Inspektorat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	175.950.900	0	11.208.000		42.149.280		31.620.400		90.950.400			175.928.080	
0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	1	11.750.900		0		4.721.700		1.440.400		5.588.800	1	100	11.750.900	
0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu (Paket)	4	53.500.000	1	2.203.000		11.292.000		30.180.000		9.821.600	4	100	53.496.600	
0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)	10	110.700.000	2	9.005.000		26.135.580		-		75.540.000	10	100	110.680.580	
2.08	ASN Inspektorat Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	141.129.500	0	3.614.300		61.792.200		23.763.700		43.649.550			132.819.750	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	3	48.450.000	3	2.535.800		9.531.200		5.003.700		23.069.550	3	100	40.140.250	
0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	48	92.679.500	10	1.078.500		52.261.000		18.760.000		20.580.000	48	100	92.679.500	
2.09	ASN Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Paket)	100	165.896.000	0	10.748.000		73.943.035		41.122.634		31.530.725			157.344.394	
0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya (Unit)	22	165.896.000	22	10.748.000		73.943.035		41.122.634		31.530.725	22	100	157.344.394	
02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	KAPABILITAS APIP/3/LEVEL	100	1.312.443.600	0	68.100.000		268.098.000		344.590.000		570.593.600			1.251.381.600	
2.01	OPD, Sekolah, Desa, Puskesmas, sesuai PKPT	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.312.443.600	0	68.100.000		268.098.000		344.590.000		570.593.600			1.251.381.600	
0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	40	931.430.000	1	68.100.000		108.625.000		177.100.000		519.443.600	40	100	873.268.600	
0003		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja (Laporan)	40	245.213.600		0		59.473.000		157.990.000		24.850.000	40	100	242.313.000	
0004		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	40	100.000.000		0		100.000.000		-		-	40	100	100.000.000	
007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Laporan)	40	35.800.000		0		-		9.500.000		26.300.000	40	100	35.800.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	MATURITAS SPIP/3/ANGKA	100	25.500.000	0	-		24.200.000		-		1.300.000			25.500.000	
2.02	ASN Inspektorat & ASN Pemda Belu	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi		25.500.000	0	-		24.200.000		-		1.300.000			25.500.000	
0001		Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	2	25.500.000	0	-		24.200.000		0		1.300.000	2	100	25.500.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															92,31	93,79	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Kota Atambua					6.628.865.656											5.335.328.970	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	NILAI SAKIP	CC/56	4.744.922.756											3.474.318.844	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.401.226.086											3.266.435.665	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	50	4.307.476.086	50	664.347.287	-	1.154.938.354	-	2.437.517.104	-	3.172.685.665	50	100	3.172.685.665	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD (orang)	5	93.750.000	1	19.500.000	-	16.350.000,00	-	39.000.000	-	93750000	1	20	93.750.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	68.472.400											67.872.400	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	2.225.500	-	1.230.000		332.000		1.562.000		2.225.500	5	100	2.225.500	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	16.325.300	-	4.429.800		4.233.500,00		8.861.800		16.325.300	5	100	16.325.300	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11	13.561.600	-	2.926.600		2.616.800,00		7.043.400		13.561.600	11	100	13.561.600	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17	1.780.000	-	690.000		695.000,00		1.580.000		1.780.000	17	100	1.780.000	
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	34.580.000	-			14.420.000,00		33.980.000		33.980.000	4	100	33.980.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.647.170											45.709.702	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	1.788.000	1	800.000		312.000,00		1.112.000		1.788.000	8	100	1.788.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	29	50.700.000	12	11.872.900		6.416.700,00		20.994.220		41.012.602	29	100	41.012.602	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor yang disediakan	5	3.159.170	1	1.803.000		1.158.500		2.961.500		2.909.100	5	100	2.909.100	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	219.577.100											94.301.077	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang di Peliharaan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	215.341.200	-	15.734.600		17.395.750		34.811.000		90.065.177	12	100	90.065.177	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan mebel yang dipelihara	10	494.000	-					-		494.000	10	100	494.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	2.200.000	-	250.000		200.000,00		950.000		2.200.000	20	100	2.200.000		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	9	1.541.900	-			398.800,00		794.000		1.541.900	9	100	1.541.900		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	#####	8.600.000											8.000.000	
		Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	8.600.000	-	200.000				-					8.000.000	
		Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi /sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah daerah dan Instansi Vertikal	33	8.600.000	-	200.000		1.200.000,00		3.200.000		8.000.000	33	100	8.000.000	
	MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan	80	1.875.342.900											1.853.010.126	
		Pemberdayaan Kelurahan			710.592.900											694.260.126	
		Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan			710.592.900								694.260.126			694.260.126	
	EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100	1.164.750.000											1.158.750.000	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksannya Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	16	1.164.750.000		19.275.000		269.400.000,00		923.572.570		1.158.750.000		16	1.158.750.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															89,75	80,49	
Predikat Kinerja															Tinggi		
Kecamatan Tasifeto Barat					1.722.475.452											1.685.107.571	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	CC/52	1.717.375.452											1.682.207.571	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.621.116.502											1.598.798.404	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	17	1.604.916.502	3	250.756.405		607.350.315		974.050.038		1.586.198.404	17	100	1.586.198.404	
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12	16.200.000	3	5.400.000	3	5.400.000		5.400.000		12.600.000	12	100	12.600.000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	45.236.400											43.934.307	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.104.000								1.076.000	1	100	1.076.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	3.500.000	25	875.000	25	875.000		875.000		3.500.000	1	100	3.500.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	7.202.400	600	1.800.000	600	1.800.000		1.800.000		6.550.000	2	100	6.550.000	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50	2.800.000								2.800.000	40	80	2.800.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	30.630.000								30.008.307	4	100	30.008.307	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100%	10.376.900											4.906.900	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	12	2.100.000								2.050.000	12	100	2.050.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	12	7.320.000	2	1.500.000	2	1.500.000		1.500.000		2.400.000	12	100	2.400.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	750.000								250.000		-	250.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	206.900								206.900	12	100	206.900	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	40.645.650											34.567.960	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4	40.354.550	4	5.400.000	4	11.467.100		11.467.100		34.567.960	4	100	34.567.960	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	9.100											-	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	282.000											-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELATANAN PUBLIK			1.700.000											1.700.000	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			1.700.000											1.700.000	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	1.700.000								1.700.000	12	100	1.700.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.400.000											1.200.000		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.400.000											1.200.000		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	1.700.000								0	15	100	-		
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	1.700.000								1200000	15	100	1.200.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														81,18		97,83		
Predikat Kinerja															Tinggi		Sangat Tinggi	
Kecamatan Tasifeto Timur					2.060.887.685											1.961.785.877		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip (Predikat/Angka)		2.037.427.685											1.939.325.877		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.971.862.685											1.874.820.077		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12	1.955.062.685		308.214.198		542.940.090		776.481.223		230.384.566	12	100	1.858.020.077		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	16.800.000		-		5.600.000		4.200.000		7.000.000	1	100	16.800.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.147.000											26.545.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	115.000						115.000			5	100	115.000		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	5.492.000						5.490.000		-	1	100	5.490.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	3.000.000		1.500.000		530.000		470.000		500.000	1	100	3.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	18.540.000		-		-		-		17.940.000	4	100	17.940.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.900.000											4.900.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	4.900.000		2.450.000		800.000		1.055.000		595.000	36	100,00	4.900.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.518.000											33.060.800	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	33.518.000		9.410.000		-		11.925.800	0	11.725.000	5	100	33.060.800	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELATANAN PUBLIK		-	1.000.000											-	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.000.000		1.000.000		-		-						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	1.000.000		1.000.000							4	100	1.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	22.460.000											22.460.000	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			22.460.000											22.460.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	16.700.000		2.000.000			14.700.000				12	100	16.700.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	5.760.000		-	0	-	0	5.760.000			15	100	5.760.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														100		95,19	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
Kecamatan Raihat					1.851.752.880											1.425.160.916	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	CC54	1.839.249.080											1.414.162.616	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.746.190.830											1.330.420.641	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	14	1.718.890.830	3	256.063.914	4	382.019.268	3	347.479.622	3	317.557.837	14	100	1.303.120.641	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	27.300.000	3	9.450.000	3	9.450.000	3	4.200.000	4	4.200.000	12	100	27.300.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	39.428.050											36.428.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.083.000	2	0	2	583.000	0	-	1	500.000	1	100	1.083.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	7.065.050	3	1.990.000	2	1.275.000		-	2	3.000.000	1	100	6.265.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	1.500.000	2500	750.000	0	-			2	750.000	2	100	1.500.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000		-	2	4.500.000	12	100	8.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6	19.780.000	3	4.800.000	1	1.200.000		-	2	13.580.000	6	100	19.580.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.625.000											3.625.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.000.000		-	1	1.000.000		-			12	100	1.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24	2.625.000	1	650.000	1	650.000		-	2	1.325.000	24	100	2.625.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.005.200						-					43.688.975	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang di Peliharan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	34.112.000	3	11.153.000	3	11.153.000	1	-	2	11.806.000	12	100	34.112.000	
		Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang (Jasa servis)	Jumlah kendaraan dinas /operasinal lapangan yang dipelihara	4	2.500.000	1	625.000	1	625.000		-	2	1.250.000	4	100	2.500.000	
		Penyediaan pengantian suku cadang-Alat Angkutan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4	9.131.700	1	2.282.000	1	2.282.000		-	2	456.400	4	100	5.020.400	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang di Peliharan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	3.250.000	0	-				-	2	2.056.575	2	100	2.056.575	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	2	1.011.500	0			-					2	100	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	88,73	2.500.000											2.500.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan		2.500.000		-		2.500.000		-		-			2.500.000	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya	2	2.500.000		-	2	2.500.000		-		-	2	100	2.500.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA		10.003.800											8.498.300	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		10.003.800											8.498.300	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	4	10.003.800	0	-	1	1.982.000		-	1	6.516.300	4	100	8.498.300	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															100	76,96	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Kecamatan Lamaknen					1.513.780.465											1.089.359.689	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	CC/52	1.498.280.465											1.073.859.689	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.400.279.565											1.017.627.739	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	14	1.352.879.565	3	216.388.846	4	300.506.781	4	277.462.514	3	196.569.598	14	100	990.927.739	
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	47.400.000	3	4.050.000	1	8.750.000	1	5.800.000	1	8.100.000	6	50	26.700.000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	19.500.000											16.481.000	
		Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1.000.000		300.000				500.000		200.000	1	100	1.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	5.000.000	30	1.250.000	30	-	30	1.250.000	-	1.250.000	1	100	3.750.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	3.000.000	0	750.000	0	-	1.500	750.000	-	731.000	1	100	2.231.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3.000.000								2.000.000	1	100	2.000.000	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoarn Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	7.500.000		1.800.000						5.700.000	10	100	7.500.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100%	14.000.900											5.665.000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	10.000.000	0	-	0	-	3	885.000	-	1.220.000	12	100	2.105.000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1.500.000								1.310.000	1	100	1.310.000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	2.500.900					1	500.000		1.750.000	1	100	2.250.000	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	64.500.000											34.085.950	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	59.500.000	0	2.250.000	1	8.750.000	4	12.349.150	-	9.236.800	4	100	32.585.950	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dipelihara	2	5.000.000	0	-	0	-	-	-	-	1.500.000	2	100	1.500.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai saki		5.000.000											5.000.000	
		Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.000.000											5.000.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	1	2.500.000					1	1.250.000		1.250.000	1	100	2.500.000	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	2.500.000					1	1.250.000		1.250.000	1	100	2.500.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	nilai sakip		10.500.000											10.500.000	
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.500.000											10.500.000	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1	2.500.000					1	2.500.000			1	100	2.500.000	
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Julah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	8.000.000		1.800.000						6.200.000	1	100	8.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															96,88	71,96	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Kecamatan Kakuluk Mesak					2.435.283.391											2.318.866.514	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	CC56	2.414.683.391											2.298.266.514	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.321.725.391											2.218.866.514	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.304.925.391	3	387.434.396	0	638.110.797	0	389.026.185	0	787.495.136	14	100	2.202.066.514	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	16.800.000		-		-		-		16.800.000		0	16.800.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100	31.793.800											26.527.600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.000.000				834.000		-		-	1	100	834.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	7.819.800				3.946.650		-		3.843.300	1	100	7.789.950	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	4.144.000				1.143.650		-		-	1	100	1.143.650	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2.830.000		-		-		-		2.830.000	1	100	2.830.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	16.000.000		-		-		13.930.000		-	1	100	13.930.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.796.000											2.168.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35	546.000								168.000		0	168.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	3	5.250.000		-		-		-		1.000.000	3	100	1.000.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1.000.000		-		1.000.000		-		-	1	100	1.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54.368.200											50.704.400	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan DinasOperasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	53.307.400	10	12.014.350	10	14.661.350	10	5.700.000	10	18.328.700	10	100	50.704.400	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.060.800		-		-		-		-	1	100	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		10.600.000											10.600.000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintahan di Kecamatan		10.600.000											10.600.000	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	10.600.000		3.400.000		-		-		7.200.000	1	100	10.600.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA		10.000.000											10.000.000	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa		10.000.000											10.000.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	10.000.000		3.000.000		-		-		7.000.000	1	100	10.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															85,71	95,22	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Raimanuk					1.905.296.817											1.817.267.055	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai saki(predikat/ Angka)	100%	1.894.296.817											1.806.287.055	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.781.401.317											1.697.137.455	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	19	1.760.051.317	19	456.182.497	19	382.959.612	19	360.064.085	19	476.581.261	19	100	1.675.787.455	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan dan Jumlah Tenaga Kontrak	3	21.350.000	3 dok	3.150.000	0	11.900.000	3 dok	3.150.000	0,00%	3.150.000	3	100	21.350.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	39.621.600											42.921.600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	376.000	0%	0	100%	376.000,0	0	-	0	-	4	100	376.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	2.078.000	50%	1.039.000	30,12%	709.000	100,00%	330.000	100,00%	2.160.000	12	100	4.238.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	2.997.600	50%	1.498.800	20,35%	610.000	100,00%	888.800	100,00%	2.040.000	100	100	5.037.600	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	3.500.000	50%	1.750.000	0	-	78,57	1.000.000	100%	750.000	100	100	3.500.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7	30.670.000	0	-	44,80%	13.740.000	54,78%	-	97,07%	16.030.000	7	100	29.770.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.978.400											7.778.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40	624.000	50%	312.000	50%	312.000	0	-	0%	-	40	100	624.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12	9.900.000	3	1.210.000	3	2.262.000	3	1.011.500	,3	1.216.500	12	100	5.700.000	
		Penyediaan Jasa Peleyanan Umum Kantor	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor yang disediakan	9	1.454.400	50%	727.000	100%	727.000	0	-	0	-	9	100	1.454.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61.295.500											58.450.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang di Peliharan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	60.545.500	5	8.313.200	5	23.199.000	5	7.284.700	5	18.903.100	5	100	57.700.000	
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	750.000	3	-	3	-	3	750.000	0,00%	-	3	100	750.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		5.500.000											5.500.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan		5.500.000											5.500.000	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya	1	2.750.000	73,72%	2.000.000	91,64%	520.000	0	230.000	0	-	1	100	2.750.000	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2.750.000		-	100%	2.750.000	0	-	0,00%	-	1	100	2.750.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	100%	5.500.000											5.480.000	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		5.500.000											5.480.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1	2.750.000		-	14,36	395.000	87%	2.000.000	99,27%	335.000	1	100	2.730.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1	2.750.000		-	0	-	100%	2.750.000	100,00%	-	1	100	2.750.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															100	95,38	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Lasiolat					1.879.434.815											1.555.015.827	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai saki(predikat/Angk a)	100%	1.868.784.815											1.544.978.827	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.782.304.865											1.452.647.827	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	18	1.765.504.865	10,6	187.277.244	39	513.976.544	20	350.982.071	0,00%	383.811.968	18	100	1.436.047.827	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	16.800.000	0,0	-	50	8.400.000	0	3.600.000	0,00%	4.600.000	3	75	16.600.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	41.871.400											36.781.400	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	7.758.800	40,4	3.133.000	15	1.133.000	20	1.560.000	0,00%	1.932.800	1	100	7.758.800	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4.112.600	48,6	2.000.000	18	750.000	18	750.000	0,00%	612.600	2	100	4.112.600	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	10.000.000	10,0	1.000.000	20	2.000.000	64	6.400.000	0%	600.000	1	100	10.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	20.000.000	0,0	-	0	-	41	8.200.000	0	6.710.000	4	100	14.910.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.999.050											5.314.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	312.000	0,0	-	100	312.000	0	-	0%	-	12	100	312.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	36	1.260.000	39,7	500.000	79	1.000.000	100	1.260.000	0,00%	-	36	100	2.760.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12	2.427.050	41,2	1.000.000	41	1.000.000	0	-	0	242.000	12	100	2.242.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40.609.500											50.235.600	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang di Peliharaan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	40.609.500	30,5	12.367.000	43	17.400.000	20,1923	8.200.000	0,00%	1.768.600		0	50.235.600	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MENINGKATNYA PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	100%	10.650.000											10.037.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		10.650.000											10.037.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	8	5.250.000	-	0	-	0	-	0	5.042.000	8	100	5.042.000		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	4	5.400.000	-	0	-	0	2.400.000	0	2.595.000	4	100	4.995.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														89,58	82,74		
Predikat Kinerja														Tinggi	Tinggi		
Kecamatan Atambua Selatan					5.718.048.656										4.116.045.857		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC/54	3.845.848.656										2.737.448.561		
		ADMINISTRASI PERANGKAT KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.721.160.806										2.606.770.697		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42,00	3.650.360.806	42,00	603.595.248	42	943.793.709	42	1.024.881.740	-	42	100	2.572.270.697		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00	70.800.000	1,00	17.700.000	1,00	-	1,00	16.800.000	17.700.000	1	100	34.500.000		
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	17.360.050										10.807.708		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1,00	1.601.000	1,00	600.000	1,00	-	1,00	2.048.951		1	100	600.000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1,00	15.759.050	1,00	4.419.510	1,00	-	1,00	5.788.198	2.386.386	1	100	10.207.708		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13	
				K	Rp	K		K						K		Rp		
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Penyediaan Barang Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100,00	37.530.000											25.687.483		
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon Yang Dibayar	13,00	37.530.000	13,00	8.346.359	13,00	-	13,00	12.125.359		5.215.765	13	100	25.687.483		
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	69.797.800											94.182.673		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	13,00	69.797.800	13,00	21.782.250	13,00	-	13,00	55.405.816		16.994.607	13	100	94.182.673		
	Meningkatnya Ketahanan Nasional, Ekonomi dan Lingkungan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	70	1.872.200.000											1.378.597.296		
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100	800.000.000											601.447.296		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	3,00	800.000.000	0,00	-	3	-	3	601.447.296			3	100	601.447.296		
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	1.072.200.000												777.150.000	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM, RT, RW dan Kader yang dibayarkan jasanya	308,00	1.072.200.000	-	-	308 orang	268.050.000	308 orang	250.500.000		258.600.000	308	100	777.150.000		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														100,00		71,98		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah		
Kecamatan Atambua Barat					5.354.623.173											4.914.876.187		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP B/60	CC/56	3.752.852.972											3.313.105.986		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Publik	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.411.372.672											2.971.625.686	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33,00	3.338.772.672	33,00	653.975.560	31,00	628.818.674	31,00	966.310.485	31,00	649.920.967	31	93,94	2.899.025.686	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	2,00	72.600.000	1,00	9.600.000	1,00	19.250.000	1,00	5.255.000	1,00	38.495.000,00	2	100	72.600.000	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	59.394.600											59.394.600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1,00	2.805.300	1,00	931.000	1,00	1.372.200	1,00	117.100	1,00	385.000,00	1	100	2.805.300	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan	1,00	17.265.300	1,00	5.635.000	1,00	7.347.000	1,00	1.654.600	1,00	2.628.700,00	1	100	17.265.300	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	26.024.000	1,00	4.360.000	1,00	7.182.000	1,00	2.155.350	1	12.326.650,00	1	100	26.024.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,00	13.300.000	2,00	2.100.000		4.200.000	2	350.000	2	6.650.000,00	2	100	13.300.000	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Penyediaan Barang Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100,00	57.896.400											57.896.400	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yag Disediakan (Laporan)	1,00	670.800	1,00	461.600	1,00	108.000	1,00	100.000	1	1.200	1	100	670.800	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	16,00	47.160.000	4,00	7.449.294	1,00	10.829.896	1,00	5.259.409	1	23.621.401	7	43,75	47.160.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan (Laporan)	1,00	10.065.600	1,00	2.516.000	1,00	1.516.000	1,00	1.000.400	1,00	5.033.200,00	1	100	10.065.600	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	224.189.300											224.189.300	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5,00	221.189.300	1,00	20.517.346	1,00	37.529.563	1,00	39.304.860	1,00	123.837.531	4	80	221.189.300	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4,00	3.000.000	1,00	-	1,00	1.750.000	1,00	-	1,00	1.250.000,00	4	100	3.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ditingkat Kecamatan	CC/56	11.000.000											11.000.000	
		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Jumlah kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	11.000.000											11.000.000	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,00	11.000.000	1,00	-	1,00	3.100.000	1,00	4.400.000	1,00	3.500.000	4	100	11.000.000	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
	Meningkatnya Ketahanan Nasional, Ekonomi dan Lingkungan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	CC/56	1.590.770.201											1.590.770.201	
		PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan	100	708.470.201											708.470.201	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya sejumlah sarana dan prasarana kelurahan yang bermanfaat	1,00	552.522.701	4,00	-			4,00	153.030.850	4,00	399.491.851	1	100	552.522.701	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pokja masyarakat kelurahan	1,00	155.947.500	4,00	-			4,00	106.229.000	4,00	49.718.500	1	100	155.947.500	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	882.300.000											882.300.000	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan jasanya Jumlah LPM yang dibayarkan jasanya Jumlah RT dan RW yang dibayarkan jasanya (orang)	16,00	882.300.000	1,00	-		134.150.000	1,00	319.500.000	1,00	428.650.000	16	100	882.300.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														94,51	91,79		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Kecamatan Lamaknen Selatan					1.811.452.266											1.625.855.230	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	CC 56	1.809.452.266											1.623.855.230	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	1.700.303.976											1.505.948.655	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.673.003.976	3	258.679.669	3	674.329.261	3	225.539.700	3	320.100.025	14	100	1.478.648.655	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	27.300.000	3	7.700.000	3	11.200.000	6		4	8.400.000	12	100	27.300.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	37.756.640											37.704.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1.135.000	2	-	1	280.000	-		1	850.000	2	100	1.130.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor yang disediakan	2	12.066.640	1	12.066.000	1	-	-	-		-	2	100	12.066.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1.541.400	-	-	10	500.000	-	-		1.000.000	1	100	1.500.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2.113.600	-	-	2.000	700.000	-		5284	1.408.000	1	100	2.108.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.500.000	-	-	-	-	-		12	6.500.000	12	100	6.500.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	14.400.000	-	-	5	4.800.000	-		20	9.600.000	23	92	14.400.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.844.400											20.715.500	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.380.000	-	-	1	240.000	-		4	1.100.000	12	100	1.340.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15.100.000	-	-	1	1.605.500	-		1	13.433.000	12	100	15.038.500	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1.250.000	-	-	-	-	-		2	1.224.000	3	60	1.224.000	
		Penyediaan Jasa Peleyanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	3.114.400	-	-	3	1.000.000	-		3	2.113.000	3	42,86	3.113.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan BMD		50.547.250											59.487.075	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	50.547.250				10.200.000		10.200.000		39.087.075	6	100	59.487.075	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK			2.000.000											2.000.000	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	6	2.000.000	6	50	2.000.000	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															88,92	89,75	
Predikat Kinerja															Tinggi	Tinggi	
Kecamatan Nanaet Duabesi					1.381.604.784											1.102.111.633	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	52/CC	1.366.604.784											1.102.111.633	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	1.282.932.234											1.047.911.818	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.266.132.234	3	185.305.496,00		263.561.307,00		303.367.006,00		280.678.009,00	14	100	1.032.911.818	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	16.800.000	0,25							15.000.000,00	1	100	15.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	37.168.750											33.476.250	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4.160.150		4.160.150,00							1		4.160.150	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.008.600	3,00	1.890.000,00	3					546.100,00	2	100	2.436.100	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10.000.000	-	-	-	-					12		-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	20.000.000	-	-	-	-				26.880.000,00	12	100	26.880.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	6.983.800											3.308.800	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	390.000	50,00	390.000,00	-					390.000,00	1	100	780.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	6.170.000	34,12	2.105.000,00	-						3	100	2.105.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	423.800		423.800,00	3						12	100	423.800	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100%	39.520.000											17.414.765	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	39.520.000	4,00	9.513.125,00	4				7.901.640,00	5	100		17.414.765	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88,73	7.000.000											-	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	5.500.000											-	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	3.000.000	5,00	-	-	-						0	-	
		Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	2.500.000										0	-	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	1.500.000	-	-	-								-	

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	1.500.000	6,00	-		-						0	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partispasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	60%	8.000.000											-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	100%	8.000.000											-	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	3.000.000	3,00	-	-	-						0	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	5.000.000	4,00	-	-	-						0	-	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															53,33	79,77	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sedang	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					35.407.467.390											35.247.830.857	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	CC/54	2.408.374.122											2.193.939.968	
	ASN Badan Kesban gpol	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.255.908.972											2.048.633.973	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	308	2.203.008.972	22	317.404.514	22	538.616.376		462.086.844		677.626.239	308	100	1.995.733.973	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	52.900.000	0	12.350.000	0	19.350.000	0	12.350.000	1	8.850.000	1	100	52.900.000	
	BADAN KESBA NGPOL	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	8.497.000											13.196.800	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (paket)	1	3.785.200	0	-	1	2.739.000	0	1.046.200	1	3.708.400	1	100	7.493.600	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	2	1.591.800	0	-	1	1.591.600	0		1	1.141.600	1	50	2.733.200	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	3.120.000	0	-	1	2.970.000			7		7	100	2.970.000	
	BADAN KESBA NGPOL	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.000.000											14.096.600	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000	-	-	1	250.000	-	250.000		500.000	1	100,00	1.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	15.000.000	2	2.838.700	1	3.223.450		3.223.450		3.811.000	24	100,00	13.096.600	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		-	-	1	-	-				1	100,00	-	
	ASN Badan Kesban gpol	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	127.968.150											118.012.595	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	126.468.150	16	23.709.000	14	28.300.685		26.255.760		38.247.150	16	100	116.512.595	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1.500.000	12	-	12	1.000.000				500.000	1	100	1.500.000	
	ASN DAN SISWA	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PENINGKATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	822.643.500											822.643.500	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	790	822.643.500											822.643.500	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan (orang)	790	822.643.500	-	-	-	55.525.000	118	696.251.400	118	34.015.000	236	29,87	785.791.400	
	ASN, PARTAI POLITIK, KPU, BAWASLU DAN TNI, POLRI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	31.076.996.168	26	-		-		-	28				31.145.973.789	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	402	31.076.996.168											31.145.973.789	
	ASN, ORMAS DAN MASYA RAKAT	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang)	402	31.076.996.168	26	72.200.000	26	30.257.680.000	0	97.800.000		718.293.789	52	12,94	31.145.973.789	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya serta Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100.600.000											100.600.000	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya (dokumen)		100.600.000											100.600.000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13
				K	Rp	K		K						K		Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	109	100.600.000	1	6.800.000	2	37.275.000		15.000.000		41.525.000	109	100	100.600.000	
	MUSPI DA, ASN DAN MASYA RAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KUALITAN DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100%	998.853.600											984.673.600	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4	998.853.600											984.673.600	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12			13				
				K	Rp	K		K						K		Rp					
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	184.260.000	-	6.100.000	1	46.565.000	-	37.840.000		83.175.000	1	100	173.680.000					
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah		1	814.593.600	-		1	202.450.000	-	271.100.000		337.443.600	1	100	810.993.600					
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)															86,19	99,55					
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi					
					1.090.272.873.190											962.470.226.109					
					1.127.373.249.850,00	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)												88,70		88,28	
					Predikat Kinerja												Tinggi		Tinggi		

BUPATI BELU
WILLYBRODUS LAY